

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026



KUNINGAN **MELESAT**



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD merupakan:

- a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2026, yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026; dan
- b. penjabaran dari RPJMD 2025-2029 yang memuat:
 1. pendahuluan;
 2. gambaran umum kondisi Daerah;
 3. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 4. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 5. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 6. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan KUA, PPAS dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

- (1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Buku I (satu) memuat tentang pendahuluan, terdiri atas:
 1. gambaran umum kondisi Daerah;
 2. kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan ekonomi Daerah;
 3. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 4. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 5. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Buku II (dua) memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

pada tanggal 11-7-2025

 BUPATI KUNINGAN,
DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan

pada tanggal 11-7-2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

 SETDA
BENI PRIHAYATNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen	12
1.4 Maksud dan Tujuan	16
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	18
2.1. Kondisi Umum Daerah	18
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	18
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	51
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	65
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	86
2.1.5. Evaluasi Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i>	86
2.1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Institusi	91
2.1.7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	111
2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dalam kerangka RPD.....	119
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	159
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah.....	159
2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	163
2.3.3. Permasalahan Utama Pembangunan.....	174
2.3.4. Isu Strategis Pembangunan.....	176
2.4. Inovasi Daerah.....	176



2.4.1. KABISA DESA (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa)	176
2.4.2. GERBANG KAYA, Pelaksanaan Inovasi Gerakan Pengembangan Kambing dan Ayam.....	177
2.4.3. SI KOBOI NAEK KUDA PONI, Pelaksanaan inovasi sistem kolam bioflock optimalisasi ideal naikan ekonomi keluarga pelaku budidaya pondasi nikmat illahi.....	178
2.4.4. SIPANDUK (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)	179
2.4.5. GERBANG BERKAH (Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah).....	182

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH... 184

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	184
3.1.1. Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2022 - 2024	185
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2026.....	194
3.1.3. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah	199
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	202
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	207
2.8.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	210
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	211
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	214
3.2.5 Arah Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah ..	215
3.3 Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	217
3.4 Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	219

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... 220

4.1 Visi dan Misi Nasional, Provinsi dan Kabupaten	222
4.1.1 Visi Misi Nasional.....	222
4.1.2 Visi Misi Provinsi Jawa Barat	223
4.1.3 Visi Misi Kabupaten Kuningan	223

4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	226
4.2.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	226
4.2.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	242
4.2.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026	259
4.2.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kuningan	268
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	281
4.3.1	Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 281	
4.3.2	Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	283
4.3.3	Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026	285
4.3.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026	305
4.3.5	Program Prioritas Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026	352
4.3.6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	420
4.3.7	Inovasi Daerah	446
4.3.8	Kebijakan Pembangunan Wilayah	451
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		458
5.1	Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2026	458
5.2	Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026	460
5.3	Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2026	464
5.4	Sinkronisasi Rencana Kegiatan yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	466
5.5	Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Kuningan	467



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN	471
6.1. Indikator Makro Daerah.....	472
6.2. Indikator Kinerja Utama	473
BAB VII PENUTUP.....	489

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2026	13
Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Kecamatan.....	21
Tabel 2.2 Luasan Wilayah berdasarkan Topografi.....	22
Tabel 2.3 Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi.....	24
Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan.....	26
Tabel 2.5 Luas Wilayah Berdasarakan Cekungan Air Tanah.....	29
Tabel 2.6 Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya.....	33
Tabel 2.7 Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Tahun 2024.....	34
Tabel 2.8 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024.....	34
Tabel 2.9 Jumlah Komoditas Ternak Tahun 2024.....	35
Tabel 2.10 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Kuningan, 2022–2024.....	36
Tabel 2.11 Luasan Kawasan Rawan Bencana.....	40
Tabel 2.12 Luasan Kerentanan Gerakan Tanah.....	42
Tabel 2.13 Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan.....	45
Tabel 2.14 Luasan Kawasan Rawan Banjir Bandang.....	47
Tabel 2.15 Data Kejadian Bencana Alam Tahun 2022-2024.....	49
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur.....	50
Tabel 2.17 Indikator Umum Kesejahteraan Tahun 2022-2024.....	51
Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2022-2024.....	54
Tabel 2.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2022–2024.....	54
Tabel 2.20 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2022–2024.....	55
Tabel 2.21 Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024.....	56
Tabel 2.22 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024.....	57
Tabel 2.23 Capaian Inflasi Kota Cirebon Tahun 2022-2024.....	57
Tabel 2.24 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024.....	58
Tabel 2.25 Target dan Capaian Indikator Indeks Gini Ratio.....	58

Tabel 2.26 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024.....	59
Tabel 2.27 Kemiskinan Tahun 2022-2024.....	60
Tabel 2.28 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024.....	62
Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022-2024.....	63
Tabel 2.30 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kuningan, Provinsi dan Nasional.....	64
Tabel 2.31 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan.....	65
Tabel 2.32 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan.....	67
Tabel 2.33 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	68
Tabel 2.34 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	69
Tabel 2.35 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.....	69
Tabel 2.36 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Sosial.....	70
Tabel 2.37 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar.....	71
Tabel 2.38 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	71
Tabel 2.39 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pangan.....	72
Tabel 2.40 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanahan..	73
Tabel 2.41 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Lingkungan Hidup.....	73
Tabel 2.42 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	74
Tabel 2.43 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	74
Tabel 2.44 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	75
Tabel 2.45 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perhubungan.....	76
Tabel 2.46 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Komunikasi dan Informatika.....	76
Tabel 2.47 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	77
Tabel 2.48 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Penanaman Modal.....	78

Tabel 2.49 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kepemudaan dan Olahraga.....	78
Tabel 2.50 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Statistik.....	79
Tabel 2.51 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Persandian..	79
Tabel 2.52 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kebudayaan..	79
Tabel 2.53 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perpustakaan	80
Tabel 2.54 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kearsipan..	80
Tabel 2.55 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kelautan dan Perikanan.....	81
Tabel 2.56 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pariwisata..	81
Tabel 2.57 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanian..	81
Tabel 2.58 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perdagangan	83
Tabel 2.59 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perindustrian	83
Tabel 2.60 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Perencanaan Pembangunan	83
Tabel 2.61 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Keuangan	84
Tabel 2.62 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	84
Tabel 2.63 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Pengawasan	85
Tabel 2.64 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Sekretariat Dewan Tahun 2024	85
Tabel 2.65 Kondisi Aspek Daya Saing Daerah	86
Tabel 2.66 Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan	93
Tabel 2.67 Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024	112
Tabel 2.68 Capaian SPM Kesehatan Tahun 2024.....	113
Tabel 2.69 Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	114
Tabel 2.70 Capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2024.....	115
Tabel 2.71 Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....	116
Tabel 2.72 Capaian SPM Sosial Tahun 2024.....	117
Tabel 2.73 Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2024.....	118

Tabel 2.74 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Daerah RPD Kab. Kuningan 2024 – 2026.....	120
Tabel 2.75 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Sampai Tahun 2024 (Dokumen RPD).....	123
Tabel 2.76 Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	160
Tabel 3.1 Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Tahun 2022-2024	185
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024	186
Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)	188
Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020–2024 (%)	189
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Sektor pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020–2024 (%)	190
Tabel 3.6 Indikator Ketenagakerjaan 2020 – 2024.....	191
Tabel 3.7 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan 2020 – 2024	192
Tabel 3.8 Angka Kemiskinan Tahun 2020 – 2024.....	193
Tabel 3.9 Gini Ratio Tahun 2020 – 2024	193
Tabel 3.10 Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi	194
Tabel 3.11 Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan.....	199
Tabel 3.12 Angka Kemiskinan Tahun 2020 – 2024.....	201
Tabel 3.13 Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2025	208
Tabel 3.14 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026.....	209
Tabel 3.15 Realisasi Belanja Tahun 2021-2025	211
Tabel 3.16 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2026	213
Tabel 3.17 Realisasi Pembiayaan Tahun 2021-2025.....	214
Tabel 3.18 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuningan	215
Tabel 3.19 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan 2026.....	216
Tabel 4.1 Visi Misi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan	225
Tabel 4.2 Indikasi intervensi per Prioritas Nasional di Kabupaten Kuningan	230
Tabel 4.3 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Kuningan.....	234

Tabel 4.4 Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029.....	260
Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026	268
Tabel 4.6 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026	287
Tabel 4.7 Keselarasan Isu Strategis Kabupaten Kuningan Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan 2025-2029, serta Isu Strategis/Tantangan dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dan RKP 2026	293
Tabel 4.8 Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026.....	308
Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kuningan	317
Tabel 4.10 Keterkaitan Program Unggulan dengan Pokok-Pokok DPRD Tahun 2026	326
Tabel 4.11 Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2026 Antara Pemerintah Pusat, ...	333
Tabel 4.12 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	335
Tabel 4.13 Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	352
Tabel 4.14 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah.	355
Tabel 4.15 Kerangka Pendanaan Teknokratis untuk Program/Kegiatan yang Menjawab Isu Strategis Tahun 2026	390
Tabel 4.16 Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026 serta Prioritas Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	393
Tabel 4.17 Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).....	414
Tabel 4.18 Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan.....	422
Tabel 4.19 Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan.....	426
Tabel 4.20 Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	436
Tabel 4.21 Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan	440

Tabel 4.22 Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	443
Tabel 4.23 Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial	445
Tabel 4.24 Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan	451
Tabel 5.1 Rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2026.....	459
Tabel 5.2 Rekapitulasi Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2026.....	460
Tabel 5.3 Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026	461
Tabel 5.4 Skema Anggaran Pusat	465
Tabel 5.5 Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	466
Tabel 5.7 Rekapitulasi Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026	468

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Tatacara Penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan	6
Gambar 1.2 Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah	15
Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan	20
Gambar 2.2 Peta Topografi	23
Gambar 2.3 Peta Morfologi	25
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan	27
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan	30
Gambar 2.6 Peta Sebaran Objek Daya Tarik Wisata	37
Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana.....	41
Gambar 2.8 Peta Kerentanan Gerakan Tanah	43
Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunungapi.....	46
Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Banjir Bandang.....	48
Gambar 2.11 Piramida Penduduk Tahun 2024.....	50
Gambar 2.12 Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Kuningan.....	51
Gambar 2.13 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022-2024	53
Gambar 2.14 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	57
Gambar 2.15 Capaian Inflasi Kota Cirebon Tahun 2022-2024.....	57
Gambar 2.16 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024	58
Gambar 2.17 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	59
Gambar 2.18 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tetangga Tahun 2022-2024	63
Gambar 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024	65
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Program Pembangunan Antara Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah	221
Gambar 4.2 Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029.....	227
Gambar 4.3 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 Persen.....	228



kuningan
gemilang

**KUNINGAN
MELESAT**



rancage!
Bappeda Kuningan

Gambar 4.4 Prasyarat Penurunan Kemiskinan.....	229
Gambar 4.5 Proyek Strategis Kawasan Rebana di Kabupaten Kuningan .	411
Gambar 4.6 Mekanisme Kegiatan KABISA DESA.....	499

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

RKPD TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2026. Berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD paling sedikit memuat

analisis gambaran umum kondisi daerah; analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; analisis kapasitas riil keuangan daerah; penelaahan rancangan Renja Perangkat Daerah; perumusan permasalahan pembangunan daerah; penelaahan terhadap sasaran RPJMD; penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Selain harus fokus terhadap pencapaian, target-target tujuan dan sasaran daerah yang belum tercapai pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD Tahun 2026 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah:

- (1) Merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.
- (3) Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (4) Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam RKPD dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 dilaksanakan melalui pendekatan:

- 1) **Top-down**, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta visi-misi daerah.

- 2) **Bottom-up**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Kabupaten. Proses ini dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2024, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan April 2025.
- 3) **Teknokratik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- 4) **Politik**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukan terakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.
- 5) **Partisipatif**, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Selain pendekatan diatas, penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 juga menerapkan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik** pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi multi kementerian dan antar perangkat

daerah, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga dan antar perangkat daerah di tingkat provinsi/ kabupaten.

- **Pendekatan Integratif** lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu perangkat daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada perangkat daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.
- **Pendekatan Spasial** digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa perangkat daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 dilakukan melalui:

- 1) **Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD** dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2026-2030, Rancangan Awal RKP Tahun 2026, Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045, Rancangan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 serta Evaluasi RKPD Tahun 2025.
- 2) **Penyusunan Rancangan RKPD** dilakukan melalui tahapan yang terdiri dari **Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Pra Musrenbang, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kabupaten** sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, dan hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas secara intensif melalui rangkaian Pra Musrenbang Kabupaten dan Rakor Bidang, Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta Musrenbang Kabupaten.

- 3) **Penyusunan Rancangan Akhir RKPD**, melalui tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah Kabupaten pada rangkaian Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Kuningan serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.
- 4) **Penetapan RKPD**, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026. Adapun alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 disajikan pada Gambar 1.1

```

graph TD
    A[Persiapan Penyusunan RKPD] --> B[Pengolahan data dan informasi]
    A --> C[Review RPJMD]
    A --> D[Telaah Kebijakan Nasional (RKPD) & Provinsi (RKPD Prov)]
    A --> E[Pokok-pokok Pikiran RPRD Kab/Kota]
    B --> F[Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah]
    B --> G[Analisis Ekonomi dan Keuda]
    B --> H[Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu]
    C --> F
    C --> G
    C --> H
    D --> I[Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah]
    E --> I
    I --> J[Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan]
    I --> K[Perumusan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuda]
    I --> L[Perumusan Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatif]
    J --> M[Forum Konsultasi Publik]
    K --> M
    L --> M
    M --> N[Penyelarasan Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatif]
    N --> O[Dok RKPD Tahun Berjalan]
    O --> H
    O --> P[Rancangan Awal RKPD]
    O --> Q[Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota]
    Q --> R[Berita Acara Musrenbang Kecamatan]
    R --> Q
    Q --> S[Verifikasi Bappeda]
    S --> T[Rancangan RKPD]
    T --> U[Murenbang RKPD]
    U --> V[Rancangan Akhir RKPD]
    V --> W[Fasilitasi Gubernur]
    W --> X[Penyusunan KUA & PPAS]
    T --> Y[Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD]
    Y --> X
  
```

The flowchart illustrates the process of preparing the Regional Development Planning (RPJMD) and the Regional Development Planning (RKPD). It starts with 'Persiapan Penyusunan RKPD' (Preparation of RKPD) and branches into four main paths: 'Pengolahan data dan informasi' (Data and information processing), 'Review RPJMD', 'Telaah Kebijakan Nasional (RKPD) & Provinsi (RKPD Prov)' (Review of National Policy (RKPD) & Provincial (RKPD Prov)), and 'Pokok-pokok Pikiran RPRD Kab/Kota' (Basic ideas of RPRD Kab/Kota). The 'Pengolahan data dan informasi' path leads to 'Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah' (General description of the region), 'Analisis Ekonomi dan Keuda' (Economic and Keuda analysis), and 'Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu' (Evaluation of RKPD performance last year). The 'Review RPJMD' path leads to 'Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah' and 'Analisis Ekonomi dan Keuda'. The 'Telaah Kebijakan Nasional (RKPD) & Provinsi (RKPD Prov)' path leads to 'Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah' (Formulation of regional development problems). The 'Pokok-pokok Pikiran RPRD Kab/Kota' path leads to 'Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah'. 'Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah' leads to 'Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan' (Formulation of development priorities and targets), 'Perumusan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuda' (Formulation of economic framework and Keuda policy), and 'Perumusan Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatif' (Formulation of regional priority programs with indicative budget). 'Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan', 'Perumusan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuda', and 'Perumusan Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatif' all lead to 'Forum Konsultasi Publik' (Public consultation forum). 'Forum Konsultasi Publik' leads to 'Penyelarasan Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatif' (Coordination of regional priority programs with indicative budget). 'Penyelarasan Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatif' leads to 'Dok RKPD Tahun Berjalan' (Current year RKPD document). 'Dok RKPD Tahun Berjalan' leads to 'Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu' and 'Rancangan Awal RKPD' (Initial RKPD draft). 'Rancangan Awal RKPD' leads to 'Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota' (Preparation of RKPD draft). 'Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota' leads to 'Berita Acara Musrenbang Kecamatan' (Kecamatan Musrenbang Minutes) and 'Verifikasi Bappeda' (Bappeda verification). 'Verifikasi Bappeda' leads to 'Rancangan RKPD' (RKPD draft). 'Rancangan RKPD' leads to 'Murenbang RKPD' (RKPD revision) and 'Rancangan Akhir RKPD' (Final RKPD draft). 'Rancangan Akhir RKPD' leads to 'Fasilitasi Gubernur' (Governor facilitation) and 'Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD' (Regulation/Regulation on RKPD). 'Fasilitasi Gubernur' leads to 'Penyusunan KUA & PPAS' (Preparation of KUA & PPAS). 'Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD' leads to 'Penyusunan KUA & PPAS'.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang melandasi penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Review Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisai Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
40. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 32);
41. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 30);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD memperhatikan RKP, rancangan akhir RKPD Provinsi, rancangan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 serta masukan dan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui penjangkaran aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan. Mekanisme perencanaan partisipatif juga diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah sampai dengan Musrenbang Kabupaten.

Tabel 1.1 Sinergitas Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2026

NASIONAL	KABUPATEN KUNINGAN	JAWA BARAT
“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”	“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing”	“Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar”
▪ Pangan & Energi mencakup swasembada pangan, energi dan air melalui Optimalisasi BULOG, Pelaksanaan <i>food estate</i>, Peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, Energi terbarukan, Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, dan pengelolaan sampah ▪ Ekonomi yang Produktif dan inklusif mencakup : ➢ Pendidikan dan Kesehatan melalui Ekosistem Makan Bergizi Gratis, Percepatan renovasi sekolah, Sekolah rakyat, sekolah unggulan, digitalisasi pendidikan, Cek kesehatan, dan Percepatan rumah sakit daerah; ➢ Adopsi Teknologi dan Inovasi melalui Transformasi digital, dan Riset dan Inovasi ➢ Deregulasi dan kepastian hukum melalui Reformasi Birokrasi, Kemudahan berbisnis, dan Ketertarikan investasi ➢ Pertahanan Semesta melalui Komponen cadangan, Pemenuhan alutsista, dan Penguatan kemampuan teritorial ➢ Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi	▪ Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif ▪ Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis ▪ Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif ▪ Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan ▪ Penguatan Nilai-Nilai Religius dan Budaya dalam Kehidupan Sosial ▪ Pembangunan Infrastruktur Sosial dan	▪ Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul ▪ Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif ▪ Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya ▪ Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance

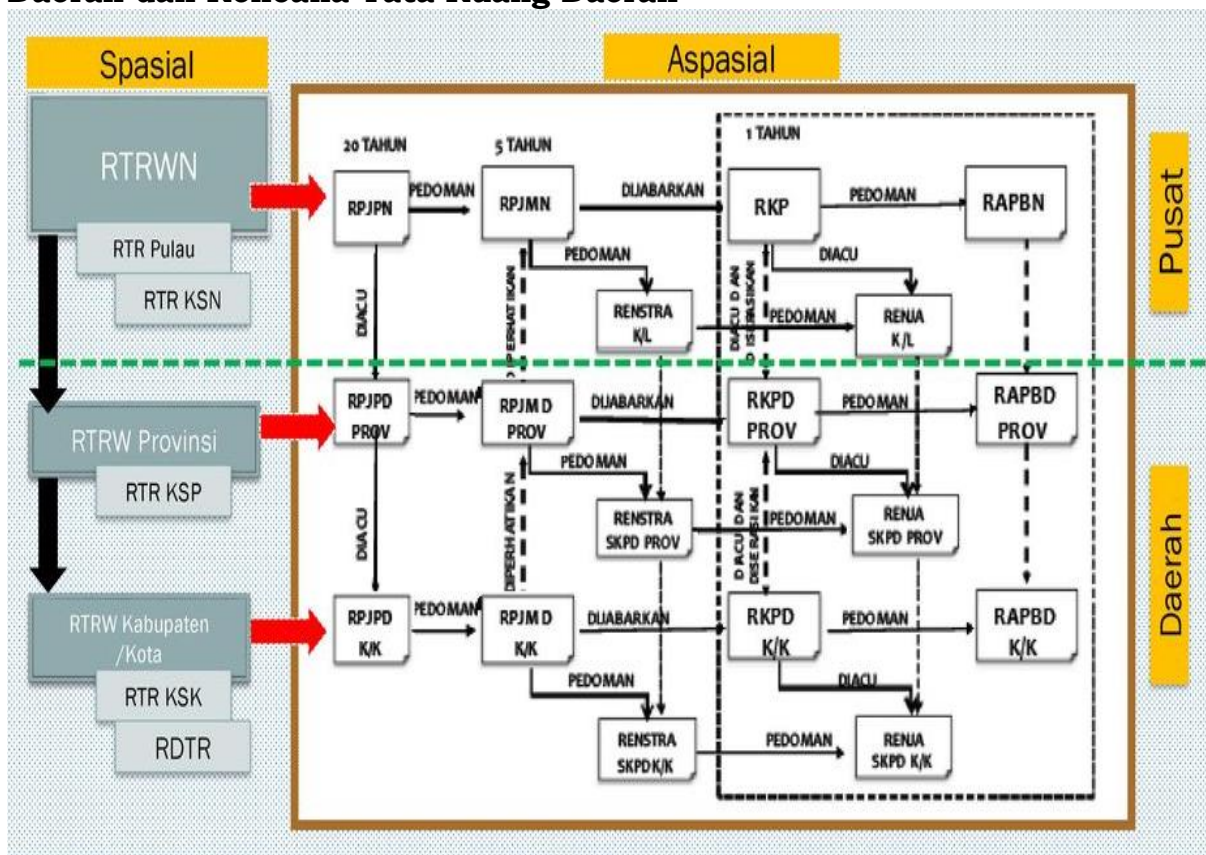
➤ Percepatan Pertumbuhan Ekonomi meliputi Percepatan Hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia, dan Optimalisasi potensi Danantara ➤ Percepatan Pengentasan Kemiskinan meliputi Data tunggal kemiskinan, Digitalisasi bantuan, 3 juta rumah, dan koperasi desa/kelurahan merah putih	Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 adalah tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Seluruh Perangkat Daerah pengampu urusan pembangunan harus memastikan target dan sasaran kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan mewujudkan pencapaian indikator RPJMD.

Dari matrik sanding pada gambar 1.2 secara umum terdapat sinergi antara tema pembangunan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta prioritas pembangunannya.

RKPD ini disusun berdasarkan hubungan antar dokumen yang ada baik di tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan daerah sekitar juga Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hubungan antar dokumen yang membentuk sinergi perencanaan dapat digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 1. 2 Skema Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah



Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi serta harus selaras dan sinergi antar

daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Penyusunan RKPD berpedoman pada rancangan RPJMD Kabupaten Kuningan, dengan memperhatikan rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan Tahun 2024.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026, yaitu:

- a. Menyelaraskan dan mensinergikan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kuningan Tahun 2026;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 disajikan dalam (Tujuh) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, uraian penelaahan hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat uraian kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026 beserta pagu indikatif.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029.

Bab VII Penutup

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan Pembangunan Tahun 2026

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Kuningan terletak di ujung timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 6°46'51,92" Lintang Selatan - 7°11'44,02" Lintang Selatan dan 108°23'2,07" Bujur Timur - 108°47'40,12" Bujur Timur. Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Kuningan memiliki posisi yang cukup strategis karena berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pangandaran, dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung - Majalengka dengan Jawa Tengah, serta berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Kertajati. Kabupaten Kuningan bersama dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cirebon menjadi bagian dari Kawasan Rebana yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

Secara hidrologi, Kabupaten Kuningan mempunyai keterkaitan erat dalam pengaturan tata air dengan daerah di bawahnya seperti Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka di Jawa Barat, dan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah karena menjadi hulu bagi 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yaitu DAS Cisanggarung dan DAS Citanduy. Selain itu, di Kabupaten Kuningan terdapat 2 (dua) waduk dengan kapasitas yang dapat memasok air hingga ke Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cilacap yakni Waduk Darma dan Waduk Kuningan.

Secara administratif, Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 kecamatan, 15 kelurahan, 361 desa, 33 lingkungan, 1.187 Dusun, 1.745 Rukun Warga dan 5.675 Rukun Tetangga. Berdasarkan batas definitif melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2009, Permendagri Nomor 14 tahun 2009 dan Kepmendagri

Nomor 246 Tahun 2004 serta arahan Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) Badan Informasi Geospasial, dan data Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan luas wilayah Kabupaten Kuningan secara keseluruhan mencapai $\pm 119.080,6$ hektar dengan kecamatan terluas di Kabupaten Kuningan yaitu Kecamatan Cibingbin seluas $\pm 7.051,5$ hektar dan kecamatan yang memiliki luas paling sedikit yaitu Kecamatan Sindangagung seluas $\pm 1.281,3$ hektar. Luas tersebut dihitung menggunakan *cylindrical equal area projection system* sebagaimana arahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).



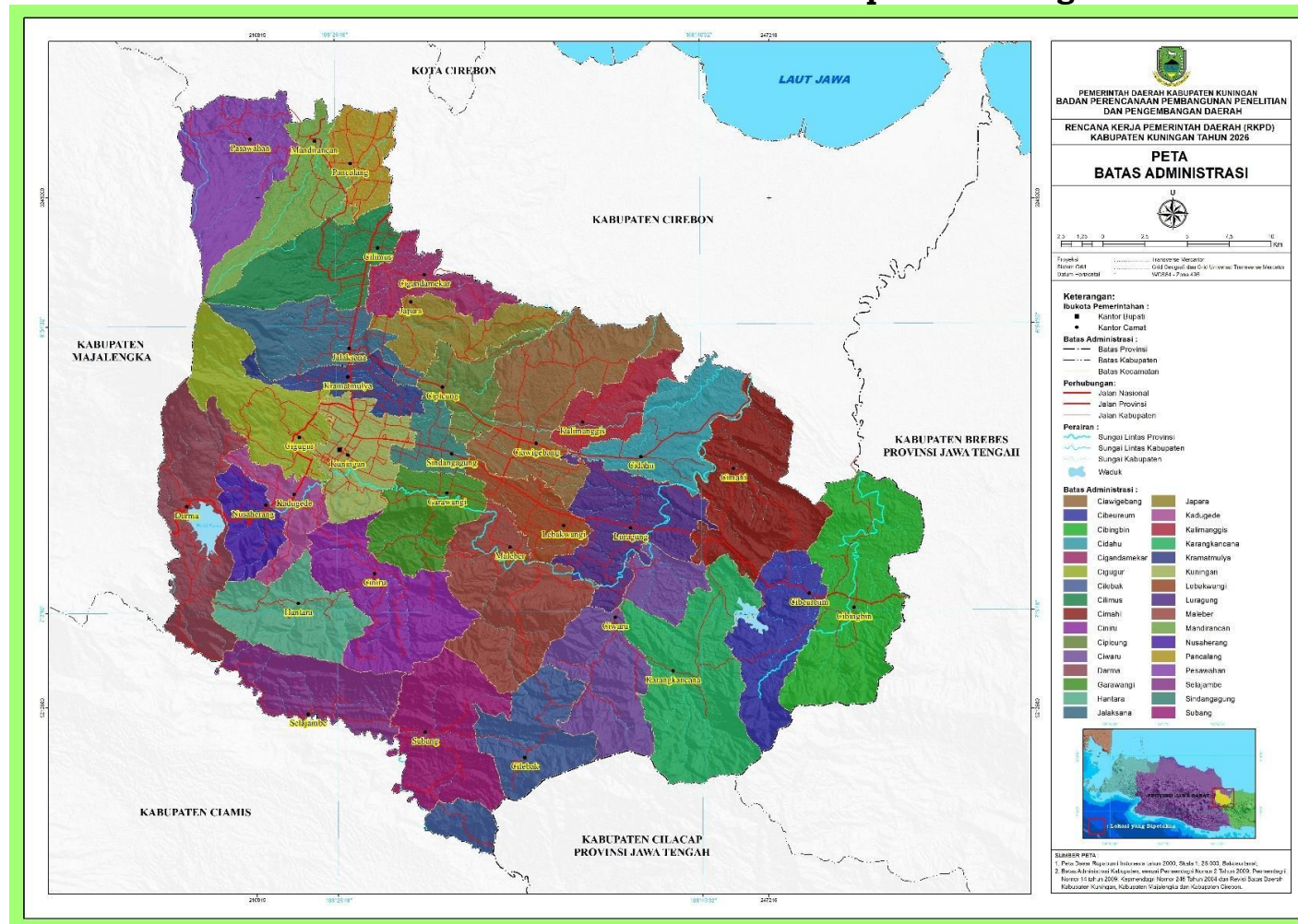
kuningan
gemilang

KUNINGAN
MELESAT



ranca ge!
Bappeda Kuningan

Gambar 2. 1Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Luas wilayah setiap kecamatan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Ciawigebang	6.084,6	5,11%
2	Cibeureum	3.850,8	3,23%
3	Cibingbin	7.051,5	5,92%
4	Cidahu	3.691,1	3,10%
5	Cigandamekar	2.164,7	1,82%
6	Cigugur	4.206,2	3,53%
7	Cilebak	4.273,1	3,59%
8	Cilimus	3.798,5	3,19%
9	Cimahi	5.437,8	4,57%
10	Ciniru	4.866,1	4,09%
11	Cipicung	1.921,2	1,61%
12	Ciwaru	5.204,5	4,37%
13	Darma	5.405,6	4,54%
14	Garawangi	3.012,5	2,53%
15	Hantara	3.468,0	2,91%
16	Jalaksana	3.296,2	2,77%
17	Japara	2.649,5	2,22%
18	Kadugede	1.763,5	1,48%
19	Kalimanggis	2.091,3	1,76%
20	Karangkencana	6.715,0	5,64%
21	Kramatmulya	1.798,9	1,51%
22	Kuningan	2.981,8	2,50%
23	Lebakwangi	1.945,0	1,63%
24	Luragung	4.290,7	3,60%
25	Maleber	5.735,9	4,82%
26	Mandirancan	3.205,5	2,69%
27	Nusaherang	1.803,0	1,51%
28	Pancalang	1.916,0	1,61%
29	Pesawahan	4.878,6	4,10%
30	Selajambe	3.586,6	3,01%
31	Sindangagung	1.281,3	1,08%
32	Subang	4.705,2	3,95%
Jumlah		119.080,6	100,00%

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Batas wilayah Kabupaten Kuningan diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;

- Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

B. Topografi dan Morfologi

Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain, meliputi planet, satelit alami (bulan dan sejenisnya), serta asteroid. Salah satu yang dikaji dalam topografi yaitu mengenai elevasi atau ketinggian suatu wilayah. Ketinggian pada suatu wilayah dapat diklasifikasikan menjadi 0 – 500 mdpl, 500 – 1.000 mdpl, 1.000 – 2.000 mdpl, 2.000 – 3.000 mdpl dan > 3000 mdpl. Luasan wilayah berdasarkan ketinggian disajikan Tabel 2.2, sementara sebarannya disajikan pada gambar berikut ini.

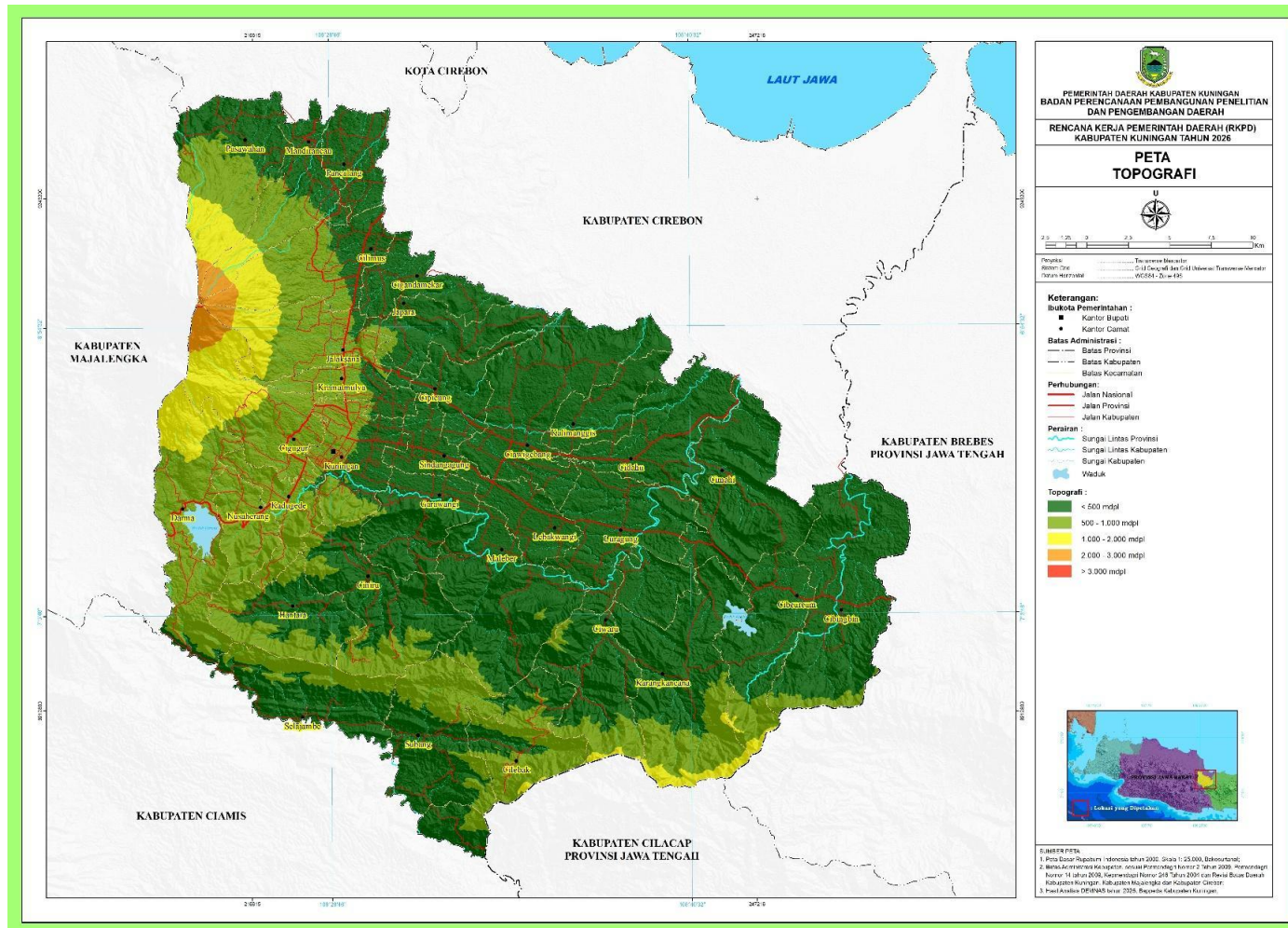
Tabel 2.2 Luasan Wilayah berdasarkan Topografi

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase
1	< 500 meter	79.790,0	67,01
2	500-1.000 meter	32.011,5	26,88
3	1.000-2.000 meter	6.193,2	5,20
4	2.000-3.000 meter	1.077,8	0,91
5	> 3.000 meter	8,1	0,01
Jumlah		119.080,6	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.2. dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Kuningan didominasi wilayah dengan ketinggian antara 0 – 500 mdpl sebesar 67,01% persen berada di wilayah tengah, timur, dan utara. Sementara itu, ketinggian wilayah dengan luasan terkecil berada pada ketinggian >3.000 mdpl yakni seluas 8,14 hektar yang merupakan bagian dari puncak Gunung Ciremai.

Gambar 2. 2 Peta Topografi



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Kabupaten Kuningan memiliki karakteristik morfologi yang beragam. Wilayah barat memiliki morfologi khas berupa Gunung Ciremai dengan ketinggian mencapai 3.078 meter di atas permukaan laut. Wilayah Selatan memiliki karakteristik yang cenderung berbukit, wilayah timur cenderung bergelombang hingga berbukit, wilayah utara cenderung landai hingga bergelombang, dan wilayah tengah cenderung datar hingga landau. Luasan wilayah berdasarkan morfologi disajikan Tabel 2.3, sementara sebarannya disajikan pada Gambar 2.3.

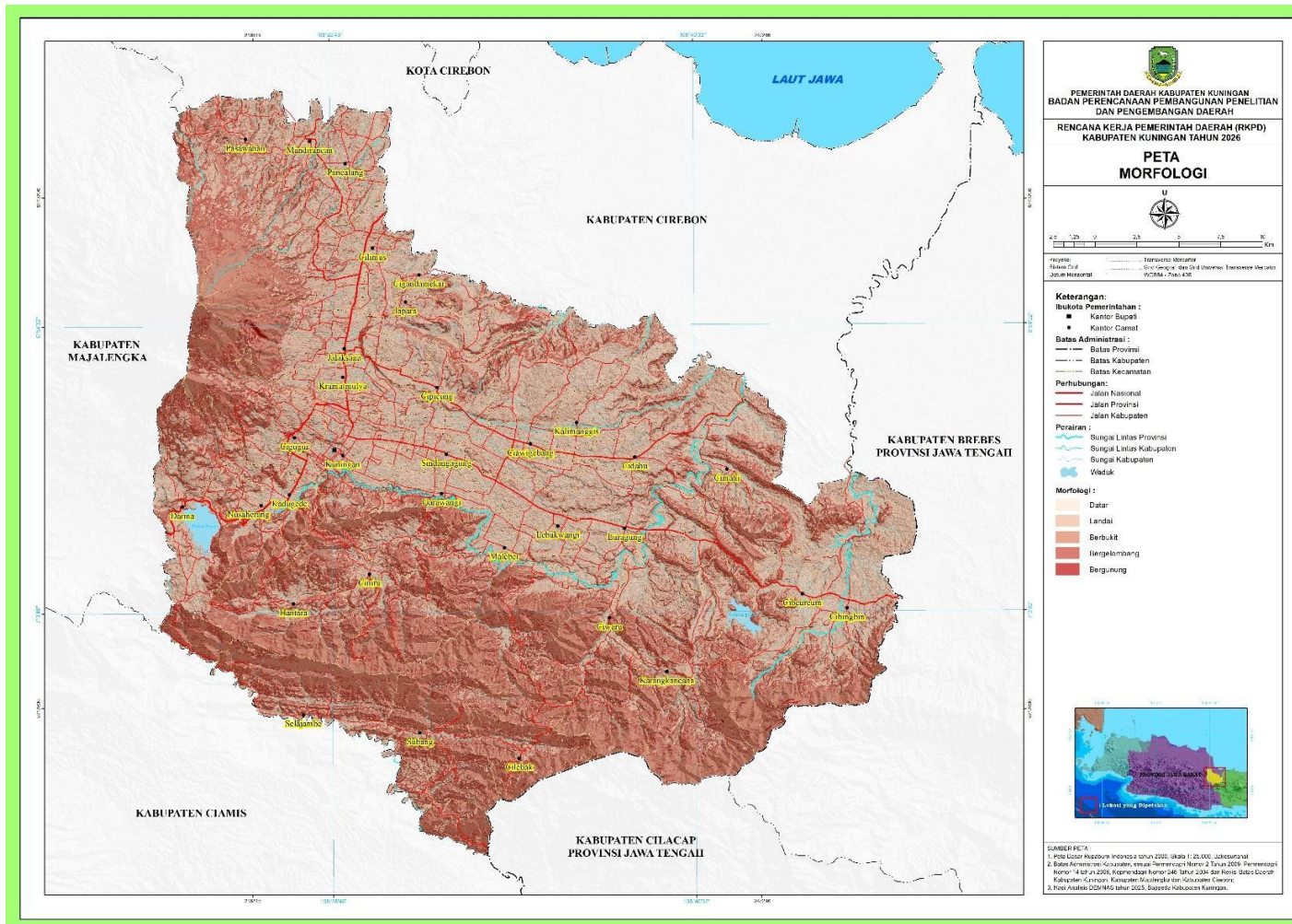
Tabel 2.3 Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi

No	Morfologi	Luas (ha)	Persentase
1.	Datar	11.474,1	9,64
2.	Landai	56.938,7	47,82
3.	Bergelombang	29.284,8	24,59
4.	Berbukit	21.230,5	17,83
5.	Bergunung	152,4	0,13
Jumlah		119.080,6	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.3. dapat dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten Kuningan didominasi oleh morfologi landai dengan luasan sebesar 56.938,71 hektar (47,82 persen), sedangkan luasan yang terkecil berada di wilayah morfologi bergunung seluas 152,42 hektar (0,13 persen).

Gambar 2. 3 Peta Morfologi



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

C. Klimatologi

Kabupaten Kuningan memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2024, rata-rata suhu udara tahunan mencapai 28,1°C atau naik 0,1°C dari tahun 2023, suhu minimum rata-rata tahunan sebesar 24,7°C atau naik 0,6°C dari tahun 2023, sedangkan suhu maksimum rata-rata tahunan mencapai 33,2°C atau turun 0,7°C dari tahun 2023, dengan kelembaban rata-rata 77,75 persen atau turun 0,6 persen dari tahun 2023, dan kecepatan angin rata-rata 27,5 knot (Kuningan Dalam Angka tahun 2025).

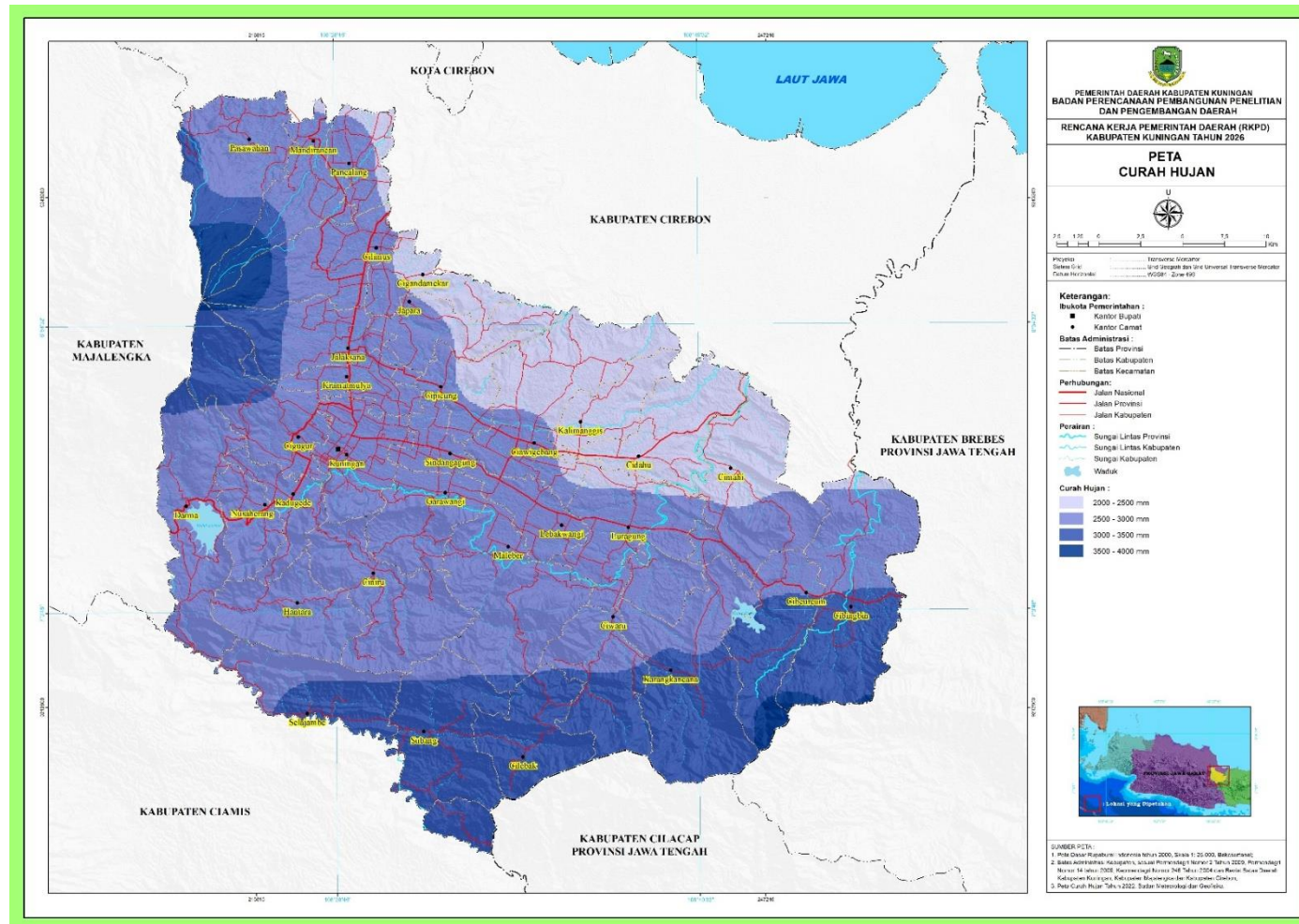
Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan

No	Curah Hujan	Luas (ha)	Persentase
1	2000 - 2500 mm	18.254,9	15,33
2	2500 - 3000 mm	70.310,2	59,04
3	3000 - 3500 mm	27.779,1	23,33
4	3500 - 4000 mm	2.736,4	2,30
Jumlah		119.080,6	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.4, Wilayah Kabupaten Kuningan memiliki curah hujan antara 2.000 sampai dengan 4.000 mm/tahun di mana sebagian besar wilayahnya (58,91 persen) memiliki curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun.

Gambar 2. 4 Peta Curah Hujan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

D. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan air tanah merupakan wilayah yang memiliki sistem akuifer yang luas, memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah dan tersimpan dalam lapisan batuan di bawah permukaan. Dengan adanya cadangan air tanah yang cukup, masyarakat di kawasan ini dapat dengan mudah mengakses air bersih untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan keperluan lainnya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada air permukaan seperti sungai atau waduk.

Keberadaan CAT di Kabupaten Kuningan memberikan manfaat besar bagi keberlanjutan sektor pertanian. Banyak kawasan pertanian yang bergantung pada air tanah untuk irigasi, terutama di daerah dengan curah hujan musiman. Dengan adanya cekungan air tanah, petani dapat menggunakan sumur untuk menyuplai air bagi lahan pertanian mereka sepanjang tahun, bahkan saat musim kemarau. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, serta mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Di beberapa kawasan, mata air yang berasal dari CAT juga dimanfaatkan sebagai sumber air minum alami bagi masyarakat sekitar, yang seringkali memiliki kualitas air yang lebih baik dibandingkan air permukaan yang rentan terhadap pencemaran.

Namun, berada dalam cekungan air tanah juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu risiko utama adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan, yang dapat menyebabkan penurunan muka air tanah dan berdampak pada lingkungan, seperti amblesan tanah (subsidence). Jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan air tanah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan air bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah yang bijak dan berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaat dari CAT dapat dinikmati secara optimal tanpa merusak keseimbangan lingkungan.

Kabupaten Kuningan memiliki luas area CAT sekitar 48.555,8 Hektar (40,8 persen) yang meliputi CAT Kuningan, CAT Majalengka dan CAT

Cirebon-Sumber, sedangkan sisanya merupakan area non CAT yakni seluas 70.524,8 Hektar (59,2 persen). Luasan CAT di Kabupaten Kuningan sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.

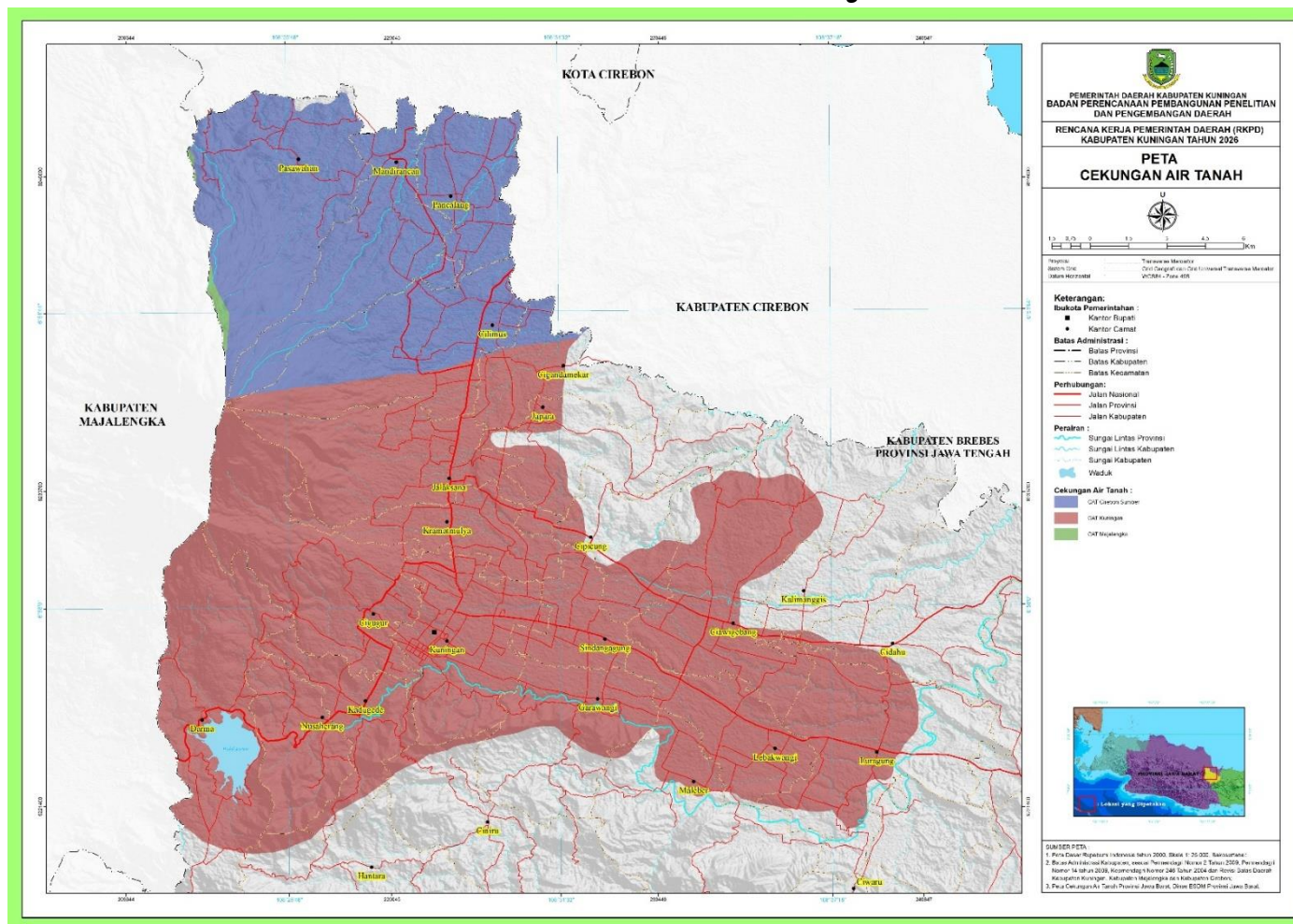
Tabel 2.5 Luas Wilayah Berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT)

No	CAT	Luas (ha)
1	CAT-Kuningan	35.752,4
2	CAT-Majalengka	115,9
3	CAT-Cirebon-Sumber	12.687,5
Jumlah		48.555,8

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Lokasi Cekungan air tanah secara umum menempati wilayah bagian barat Kabupaten Kuningan. Adapun area non CAT berada di wilayah selatan, wilayah timur hingga sebagian wilayah utara dengan bentuk menyerupai huruf U. Area non CAT memiliki keterbatasan dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya air tanah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya akuifer yang luas dan produktif yang dapat menyimpan serta mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, masyarakat akan bergantung pada ketersediaan sumber air permukaan atau membuat sistem penyimpanan air yang lebih kompleks.

Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Salah satu dampak utama dari kondisi ini adalah kerentanan terhadap kekeringan. Karena wilayah tersebut tidak memiliki cadangan air tanah yang memadai, pasokan air bisa sangat bergantung pada curah hujan dan sumber air permukaan seperti sungai, danau, atau waduk. Ketika musim kemarau tiba, kawasan ini lebih rentan mengalami krisis air, yang dapat berdampak buruk pada sektor pertanian, industri, dan kebutuhan domestik masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan ketergantungan pada air yang disuplai dari daerah lain, yang berpotensi menyebabkan konflik sumber daya air antarwilayah.

Selain itu, kawasan yang tidak berada dalam CAT juga lebih rentan terhadap penurunan kualitas tanah dan lingkungan. Tanpa adanya akuifer yang mampu menyimpan air dengan baik, tanah di daerah tersebut mungkin memiliki daya serap air yang rendah. Akibatnya, saat hujan turun, air lebih cepat mengalir di permukaan daripada meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan risiko erosi dan banjir. Di sisi lain, kurangnya cadangan air tanah juga dapat menghambat pertumbuhan vegetasi alami, yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan ekosistem.

Dari aspek ekonomi, keterbatasan air tanah dapat menyebabkan biaya tinggi dalam penyediaan air. Pengeboran sumur dalam mungkin tidak efektif karena tidak ada akuifer besar yang bisa dimanfaatkan, sehingga masyarakat harus mengandalkan pasokan air dari luar atau membangun infrastruktur tambahan seperti waduk atau sistem pemanenan air hujan. Hal ini tentu membutuhkan investasi besar, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan ketersediaan air yang memadai bagi penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, tidak berada dalam cekungan air tanah dapat menyebabkan berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, wilayah semacam ini perlu mengembangkan strategi yang lebih adaptif, seperti pemanfaatan teknologi penyimpanan air, efisiensi penggunaan air, serta pelestarian lingkungan untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan bagi masa depan.

E. Potensi Wilayah

Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan sumberdaya air. Hal tersebut sangat ditunjang oleh faktor demografi, iklim serta tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air yang berlimpah. Berikut dijelaskan beberapa sektor yang menjadi potensi di Kabupaten Kuningan:

1. Kehutanan

Kehutanan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan-paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.¹

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Dengan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2016; SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai dan Berita Acara Rapat dengan BTNGC tanggal 15 Desember 2017; SK Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.35/IV-SET/2015 tentang Penataan Blok Taman Wisata Alam Linggarjati Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat; Berita Acara Rapat Teknis Revisi RTRW

¹ Arief, Arifin. 2011. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kabupaten Kuningan Persamaan Persepsi Seluruh Sektor dengan Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Hutan Kota; Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012 tentang Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kuningan; dan Hasil Analisis SIG Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Kuningan, diperoleh luasan hutan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	25.066,82
2	Taman Nasional	8.837,02
3	Taman Wisata Alam	8,90
4	Hutan Hak/Hutan Rakyat	18.418,73
5	Hutan Kota	71,50
6	Taman Keanekaragaman Hayati	4,30

*Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025
Hasil Analisis dari Pemangku Kepentingan Terkait*

Tabel di atas tidak terbatas pada kawasan hutan yang dimiliki negara, akan tetapi terdapat juga hutan yang menjadi kewenangan daerah seperti hutan kota dan Taman Kehati yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berbagai hasil hutan yang diproduksi hutan produksi dan hutan hak/hutan rakyat antara lain kayu jati, kayu bakar jati, kayu rimba, kayu bakar rimba, dan produk lainnya seperti getah pinus, minyak kayu putih, daun kayu putih (Kuningan dalam Angka Tahun 2025).

2. Perkebunan

Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditas tertentu. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Perkebunan mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa. Luas areal tanaman perkebunan

menurut jenis tanaman dan produksi sebagaimana ditampilkan Tabel bawah ini.

Tabel 2.7 Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Tahun 2024

No	Tanaman Perkebunan	Luas (Ha)	Ton
1	Kelapa	3.994,94	4.017,94
2	Kopi	1.537,56	726,03

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2025

3. Tanaman Pangan

Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut². Luasan lahan sawah dilindungi (LSD) memiliki luas sekitar 27.415 hektar. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh petani terutama untuk menanam padi, jagung kedelai, kacang tanah dan sebagainya. Adapun kuantitas produksi tanaman pangan yang sudah terdata sebagaimana di tabel bawah ini.

Tabel 2.8 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024

No	Tanaman Pangan	Ton
1	Padi	352.511
2	Jagung	3.035
3	Kedelai	229
4	Kacang Tanah	114
5	Kacang Hijau	12
6	Ubi Kayu	472
7	Ubi Jalar	4.751

Sumber : Kuningan dalam Angka Tahun 2025

4. Peternakan

Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil

² Aartsen, J. V., 1953. *Ekonomi pertanian Indonesia*. Jakarta: Pembangunan.

dari kegiatan tersebut, sehingga tujuan dari peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal. Terdapat berbagai jenis komoditas ternak di Kabupaten Kuningan sebagaimana diperlihatkan Tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Jumlah Komoditas Ternak Tahun 2024

No	Komoditas Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Ternak Besar	
	a. Sapi Potong	30.712
	b. Sapi Perah	7.303
	c. Kerbau	4.929
	d. Kuda	382
2	Ternak Kecil	
	a. Domba	137.015
	b. Kambing	9.086
	c. Kelinci	7.987
	d. Babi	1.347
3	Ternak Unggas	
	a. Ayam Buras	597.938
	b. Ayam Ras Petelur	2.340.353
	c. Ayam Ras Pedaging	4.248.100
	d. Puyuh	141.072
	e. Itik	89.072
	f. Itik Manila/Entog	21.106

Sumber : Kuningan Dalam Angka Tahun 2025

5. Perikanan

Definisi perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. Menurut Kuningan dalam Angka Tahun 2025, Kabupaten Kuningan memiliki produksi perikanan tangkap pada Tahun 2024 sebesar 440,83 ton dengan nilai Rp11.792,31 (dalam Juta) dengan jenis potensi perikanannya berupa ikan mas, patin, nilem, gurame, nila, sepat, dan lele. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap paling banyak terdapat di Kecamatan Darma, Pasawahan, dan Kuningan.

6. Pariwisata

Karena keberagaman morfologi dan topografinya, Kabupaten Kuningan memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan baik pariwisata alam, pariwisata budaya maupun pariwisata buatan. Gunung Ciremai di bagian barat merupakan destinasi favorit bagi para pendaki dan pecinta keindahan alam. Di bidang sejarah dan budaya, memiliki banyak destinasi yang menarik. Gedung Perundingan Linggarjati, misalnya, menjadi saksi bisu perundingan penting antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1946. Selain itu, Situs Purbakala Cipari memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat prasejarah di wilayah ini. Dengan segala potensinya, Kabupaten Kuningan memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

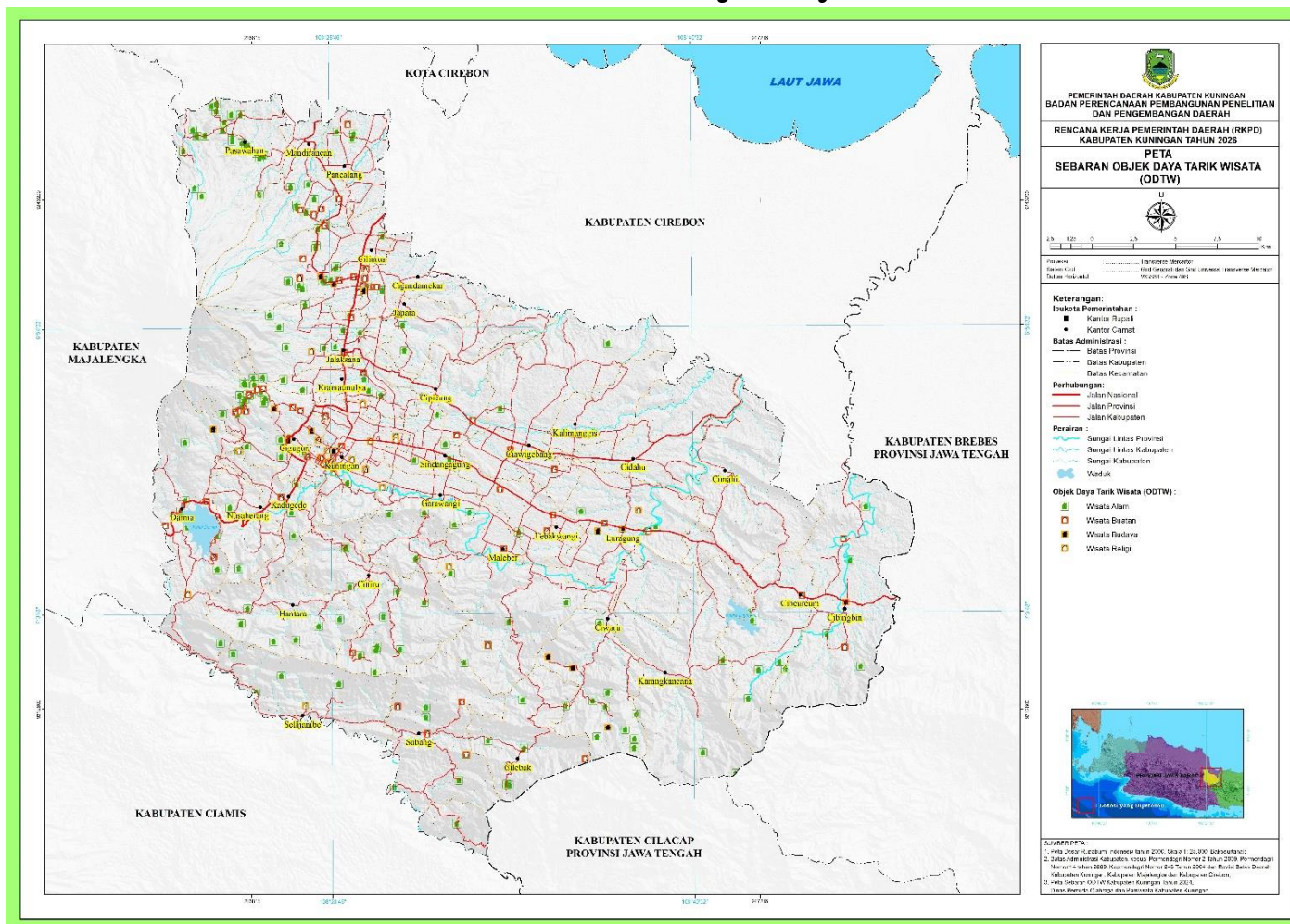
Tabel 2.10 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Kuningan, 2022–2024

Tahun	Mancanegara	Domestik	Jumlah
2022	35	3.448.882	3.448.917
2023	26	2.785.100	2.785.126
2024	224	3.824.296	3.824.520

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2025.

Jumlah wisatawan mengalami fluktuasi selama periode 2022–2024, dengan tren peningkatan pada wisatawan domestik maupun domestik. Pada 2022, dengan jumlah wisatawan mencapai 3.448.917 orang, yang didominasi oleh wisatawan domestik sebanyak 3.448.882 orang, sementara wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 35 orang. Pada 2023, total wisatawan sedikit menurun menjadi 2.785.126 orang, sejalan dengan penurunan wisatawan mancanegara menjadi 26 orang. Namun, pada 2024 terjadi lonjakan wisatawan mancanegara, mencapai 224 orang, dengan total wisatawan meningkat drastis menjadi 3.824.520 orang. Tren ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan terus berkembang, dengan daya tarik utama masih berasal dari wisatawan domestik, sementara wisatawan mancanegara mulai menunjukkan peningkatan yang menjanjikan.

Gambar 2. 6 Peta Sebaran Objek Daya Tarik Wisata



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Beberapa potensi pengembangan pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan:

1. Potensi Pariwisata Alam

- a. Taman Wisata Alam (TWA) Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
- b. Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC);
- c. Gunung Mayana di Desa Sindangjaya Kecamatan Kadugede;
- d. Bumi Perkemahan Palutungan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- e. Bumi Perkemahan Cibunar di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
- f. Bumi Perkemahan Cibeureum di Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus;
- g. Bumi Perkemahan Paniis di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan;
- h. Bumi Perkemahan Padamatang di Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan;
- i. Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin;
- j. Arung Jeram Cisanggarung di Kecamatan Luragung;
- k. Waduk Darma di Desa Jagara Kecamatan Darma;
- l. Balong Keramat Darmaloka di Desa Darma Kecamatan Darma;
- m. Telaga Remis di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;
- n. Balong Ikan Cigugur di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
- o. Cibulan di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana;
- p. Curug Lembah Cilengkrang di Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya;
- q. Curug Landung di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- r. Curug Bangkong di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang;
- s. Curug Ciputri di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
- t. Curug Sidomba di Desa Peusing Kecamatan Cilimus;
- u. Wisata Pedesaan Sitonjul di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;

- v. Linggarjati Indah di Desa Linggamekar Kecamatan Cilimus;
 - w. Pemandian Air Panas Sangkanhurip Alami di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
 - x. KRK di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan;
 - y. Balong Dalem di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;
 - z. Balong Kembang di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
 - aa. Situ Cicerem di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;
 - bb. Air Panas Ciniru di Desa Padamenak Kecamatan Jalaksana;
 - cc. Air Panas Ciangir di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin;
 - dd. Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; dan
 - ee. Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru.
2. Potensi pariwisata budaya
- a. Gedung Naskah Perundingan Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
 - b. Gedung Syahrir di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus;
 - c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
 - d. Taman Purbakala Cipari di Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur.
3. Potensi pariwisata buatan antara lain *Open Space Gallery* di Desa Linggasana, Sangkan Resort Aqua Park di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus dan sebagainya.
4. Potensi Pariwisata Religi antara lain Gua Maria di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur; Makam Syech Muhibat, Makam Syeh Magelung dan sebagainya

7. Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,

serta kegiatan pasca tambang³. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yaitu seluas kurang lebih 46.313 hektar yang terdiri dari Blok A Bukan Logam dan Batuan, Blok B Bukan Logam dan Batuan, Blok C Bukan Logam dan Batuan, Blok D Bukan Logam dan Batuan, Blok I Mineral Logam dan Blok II Mineral Logam.

8. Kawasan Rawan Bencana

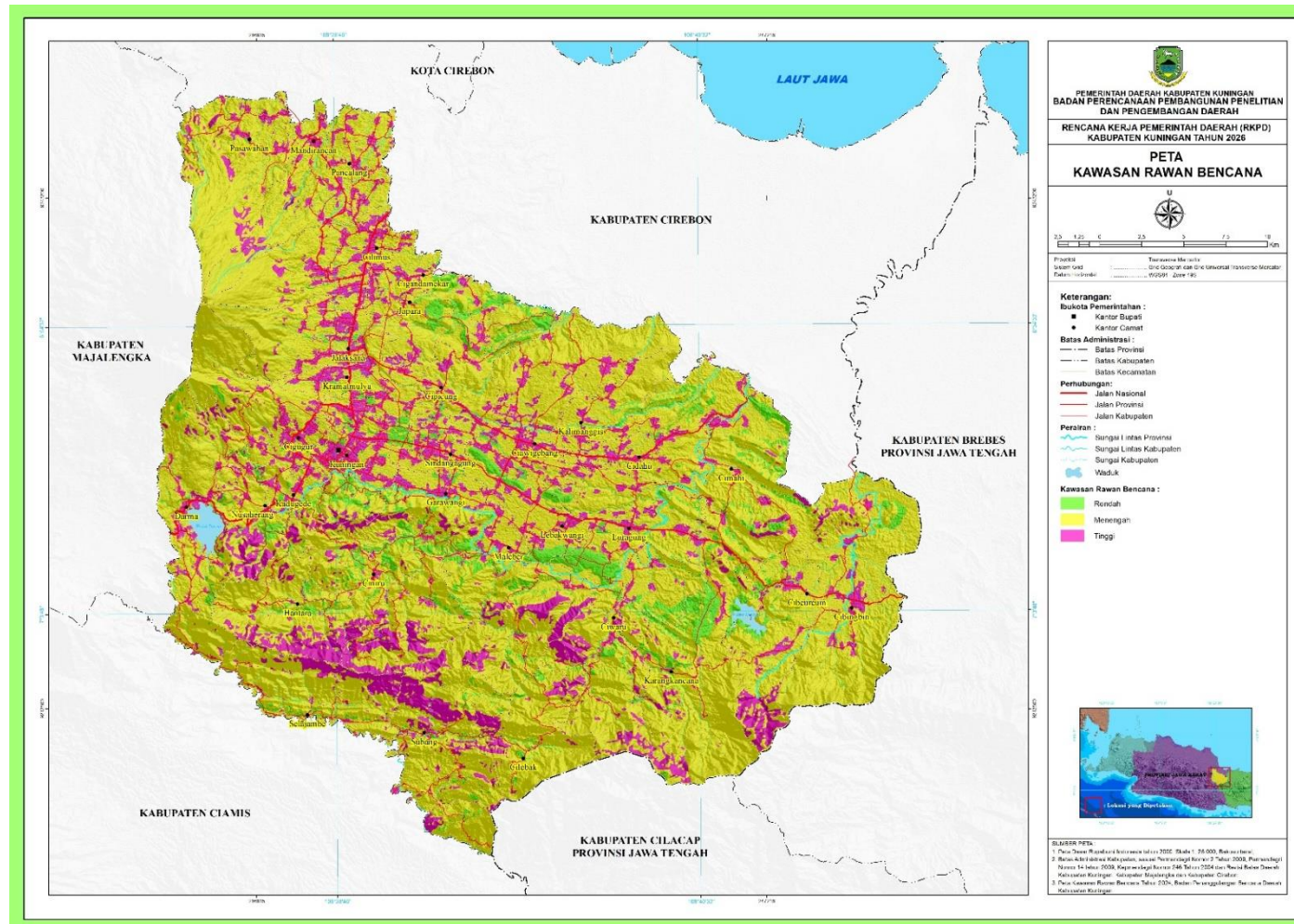
Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Berdasarkan hasil inventarisasi BPBD Kabupaten Kuningan, bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kuningan diantaranya yaitu gerakan tanah terutama longsor, letusan gunung api, gempa bumi, kekeringan, banjir bandang, banjir geomorfologis, dan cuaca ekstrim. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan (76,18 persen) diprediksi memiliki kerawanan bencana alam tingkat menengah.

Tabel 2. 11 Luasan Kawasan Rawan Bencana

No	Tingkat Kerawanan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Rendah	8.741,42	7,35
2.	Menengah	90.620,14	76,18
3.	Tinggi	19.588,31	16,47

Sumber : BPBD Kabupaten Kuningan, 2025

Gambar 2. 7 Peta Kawasan Rawan Bencana



Sumber: BPBD Kabupaten Kuningan, 2025

9. Kerentanan Gerakan Tanah

Gerakan tanah merupakan perpindahan massa jenis tanah atau batuan pada arah tegak, datar, ataupun miring dari kedudukannya semula, terjadi bila ada gangguan pada kesetimbangan pada saat itu. Gerakan tanah merupakan fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat adanya gangguan keseimbangan terhadap tanah yang terjadi, baik terjadi secara alamiah ataupun buatan. Gerakan tanah yang umum terjadi di Kabupaten Kuningan yaitu longsor, rayapan, amblasan, dan aliran bahan rombakan. Gerakan tanah biasanya terjadi pada kawasan berbukit ketika musim hujan.

Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM, kawasan rentan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan terbagi menjadi kawasan rentan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, alur aliran bahan rombakan, dan danau. Adapun luas kawasan rawan gerakan tanah disajikan pada Tabel di bawah ini.

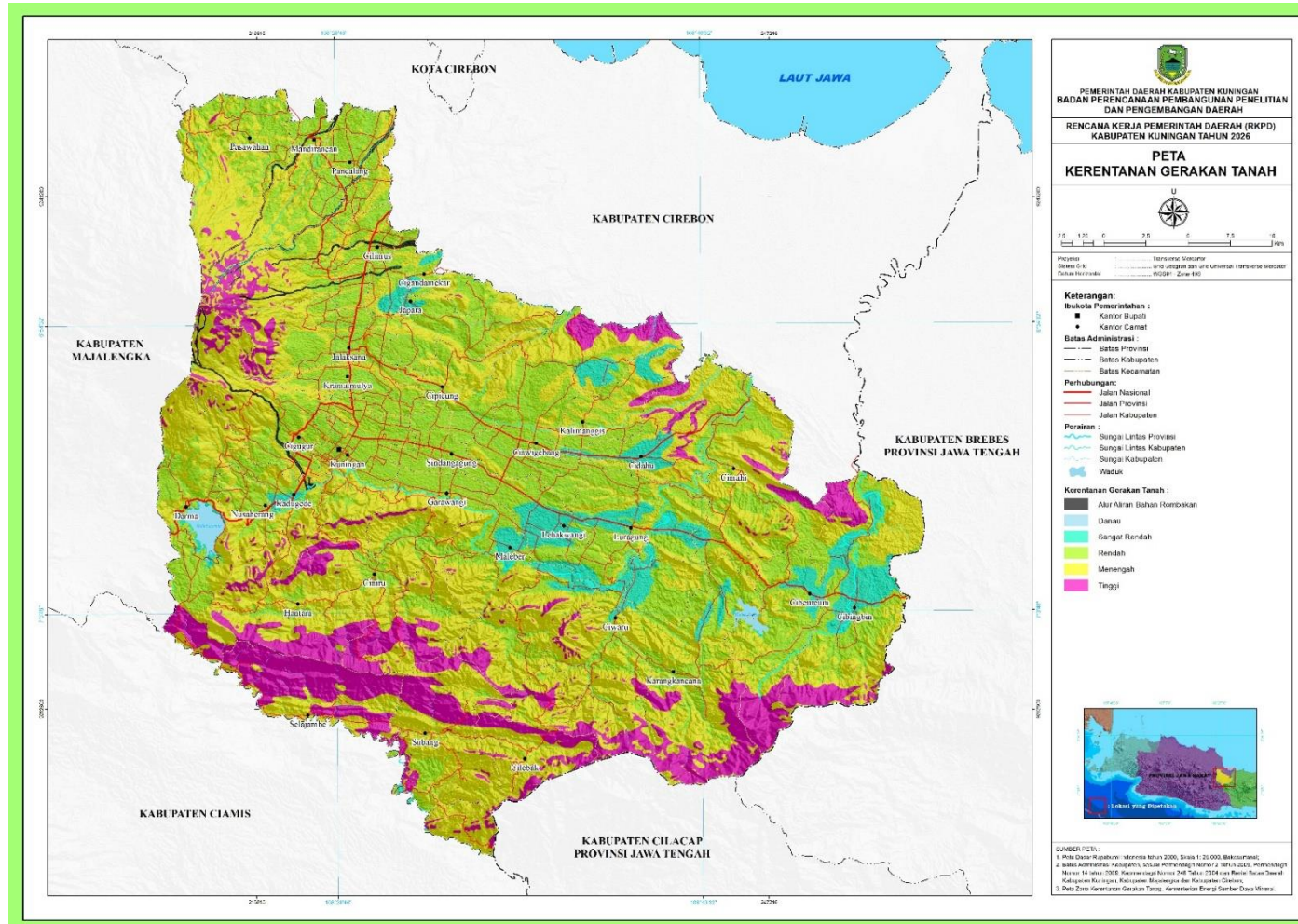
Tabel 2.12 Luasan Kerentanan Gerakan Tanah

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Sangat Rendah	6.852,76	5,75
2.	Rendah	42.021,57	35,29
3.	Menengah	53.162,04	44,64
4.	Tinggi	15.877,43	13,33
5.	Alur Aliran Bahan Rombakan	817,24	0,69
6.	Danau	349,54	0,29
Jumlah		119.080,6	100,00

Sumber : Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan berada pada kerentanan gerakan tanah rendah hingga menengah. Kawasan dengan kerentanan tinggi umumnya berada di wilayah selatan yang kondisi topografinya berbukit.

Gambar 2. 8 Peta Kerentanan Gerakan Tanah



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

10. Kawasan Rawan Letusan Gunungapi

Gunung Ciremai yang terletak di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka merupakan gunung api strato (stratovulkan) yang masih aktif hingga saat ini. Meskipun aktivitas vulkaniknya relatif jarang dibandingkan gunung api lainnya di Indonesia, Gunung Ciremai memiliki riwayat letusan yang tercatat dalam sejarah vulkanologi.

Letusan terakhir Gunung Ciremai terjadi pada tahun 1951 dan tergolong sebagai letusan freatik. Letusan jenis ini terjadi akibat interaksi air dengan panas magma di bawah permukaan, menghasilkan semburan uap panas, abu vulkanik, dan material ringan lainnya. Letusan tersebut berskala kecil hingga sedang, tidak menimbulkan kerusakan signifikan, tetapi cukup untuk mengingatkan masyarakat akan potensi bahaya dari aktivitas vulkanik gunung ini. Selain itu, beberapa letusan kecil lainnya diduga terjadi pada abad ke-17, menghasilkan aliran lava dan material piroklastik yang membentuk sebagian lanskap gunung hingga saat ini.

Karakter letusan Gunung Ciremai umumnya bersifat eksplosif, meskipun dalam skala yang terbatas. Potensi bahaya dari letusan ini meliputi lontaran material vulkanik, sebaran abu yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, hingga aliran piroklastik pada letusan besar. Selain itu, material vulkanik yang tertinggal di lereng gunung berisiko terbawa air hujan, memicu lahar yang berbahaya bagi permukiman di sekitar gunung.

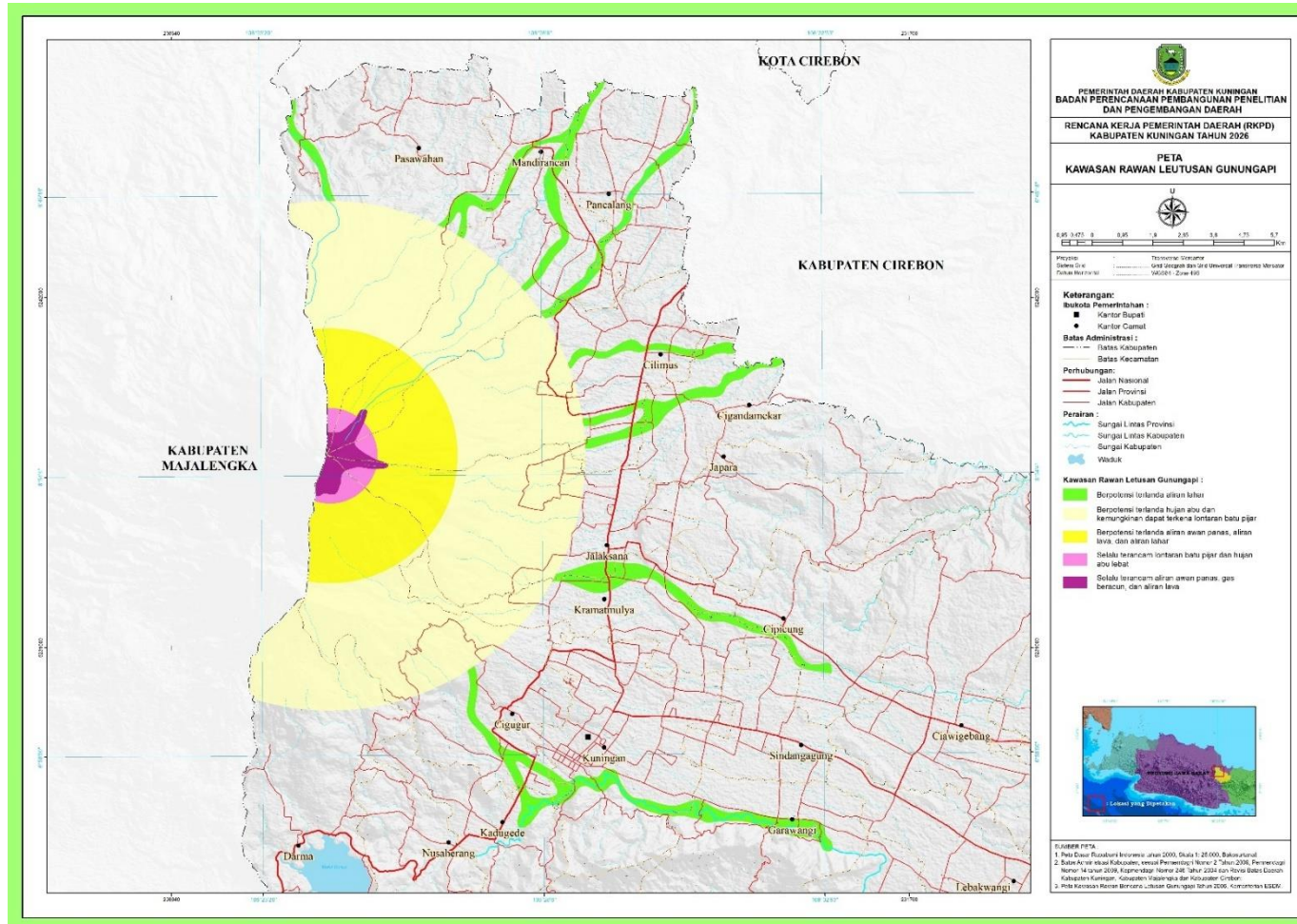
Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai, luasan yang berpotensi terlanda bencana dapat disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunungapi

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar	4.455,67	23,95%
2.	Berpotensi terlanda aliran lahar	2.514,23	13,51%
3.	Selalu terancam aliran awan panas, gas beracun, dan aliran lava	231,80	1,25%
4.	Selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat	417,43	2,24%
5.	Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar	2.375,23	12,77%
6.	Berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar	8.609,59	46,28%
Jumlah		18.603,95	100%

Sumber: Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Ciremai, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi.

Gambar 2. 9 Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunungapi



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

11. Kawasan Rawan Banjir Bandang

Kabupaten Kuningan, dengan karakteristik geografis yang mencakup daerah pegunungan/perbukitan, lembah, dan aliran sungai, memiliki potensi terjadinya banjir bandang, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Topografi Kuningan yang berbukit dan curam di beberapa wilayah, terutama di kawasan hulu sungai, dapat memicu aliran air yang deras saat hujan lebat, meningkatkan risiko banjir bandang di daerah hilir. Selain itu, berkumpulnya air di sungai besar seperti Sungai Cisanggarung dan Sungai Cijangkelok berpotensi menyebabkan terjadinya banjir geomorfologis di beberapa wilayah seperti Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cimahi, dan Kecamatan Luragung. Pada kondisi tersebut, meskipun tidak terjadi banjir bandang, beberapa permukiman dapat terendam oleh luapan air sungai, seperti yang pernah terjadi di Desa Datar Kecamatan Cidahu dan Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin.

Kawasan rawan banjir di Kabuapten Kuningan memiliki luas $\pm 14.140,59$ hektar. Dari luas tersebut, sebagian besar berada pada tingkat kerawanan menengah (59,53 persen) dan hanya sebagian kecil berada pada tingkat kerawanan tinggi (2,72 persen).

Tabel 2.14 Luasan Kawasan Rawan Banjir Bandang

No	Tingkat Kerawanan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Rendah	5.337,86	37,75
2.	Menengah	8.417,72	59,53
3.	Tinggi	385,02	2,72

Sumber : BPBD Kabupaten Kuningan, 2025

48

Tabel 2.15 Data Kejadian Bencana Alam Tahun 2022-2024

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian		
		2022	2023	2024
1	Tanah Longsor	228	161	154
2	Gerakan Tanah	6	4	2
3	Tanah Amblas	-	-	1
4	Gempa Bumi	1	-	16
5	Banjir	28	8	S22
6	Abrasi	-	-	-
7	Angin Kencang/Puting Beliung	26	29	37
8	Sambaran Petir	2	4	1
9	Kebakaran Hutan/Lahan	3	48	25
10	Kekeringan	-	18	9
11	Kebakaran Rumah/Gedung	16	15	29
12	Bangunan Ambruk	20	10	25
13	Orang Hanyut	-	2	-
14	Orang Tenggelam	4	-	5
	Orang Hilang	-	2	-
TOTAL		334	301	326

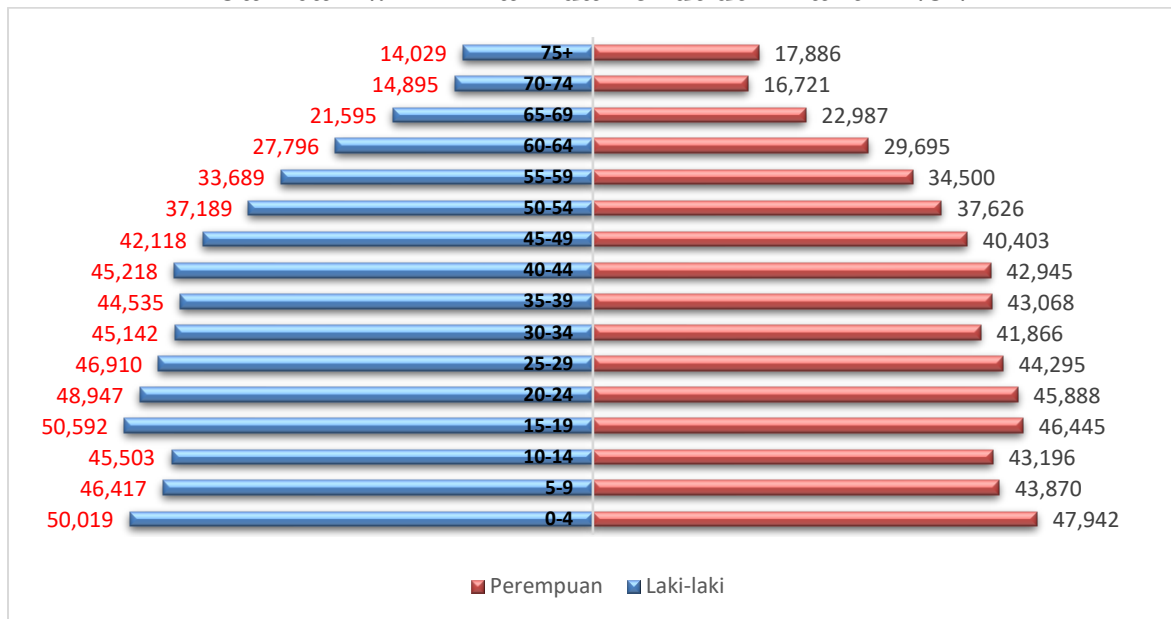
Sumber: BPBD Kabupaten Kuningan 2025

2.1.1.2 Gambaran Demografi

Kondisi demografi pada tahun 2024 berdasarkan data Kuningan Dalam Angka 2025 (BPS), jumlah penduduk mencapai 1.213.927 jiwa (Laki-laki: 614.594 jiwa; perempuan: 593.095 jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,04 persen. Kepadatan penduduk pada tahun 2024 tercatat 1.016,61 jiwa per km².

Komposisi penduduk menurut umur tergolong kedalam piramida *expansive* atau piramida penduduk muda, sesuai dengan tabel 2.16 dan gambar 2.11 di bawah ini.

Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kuningan 2025

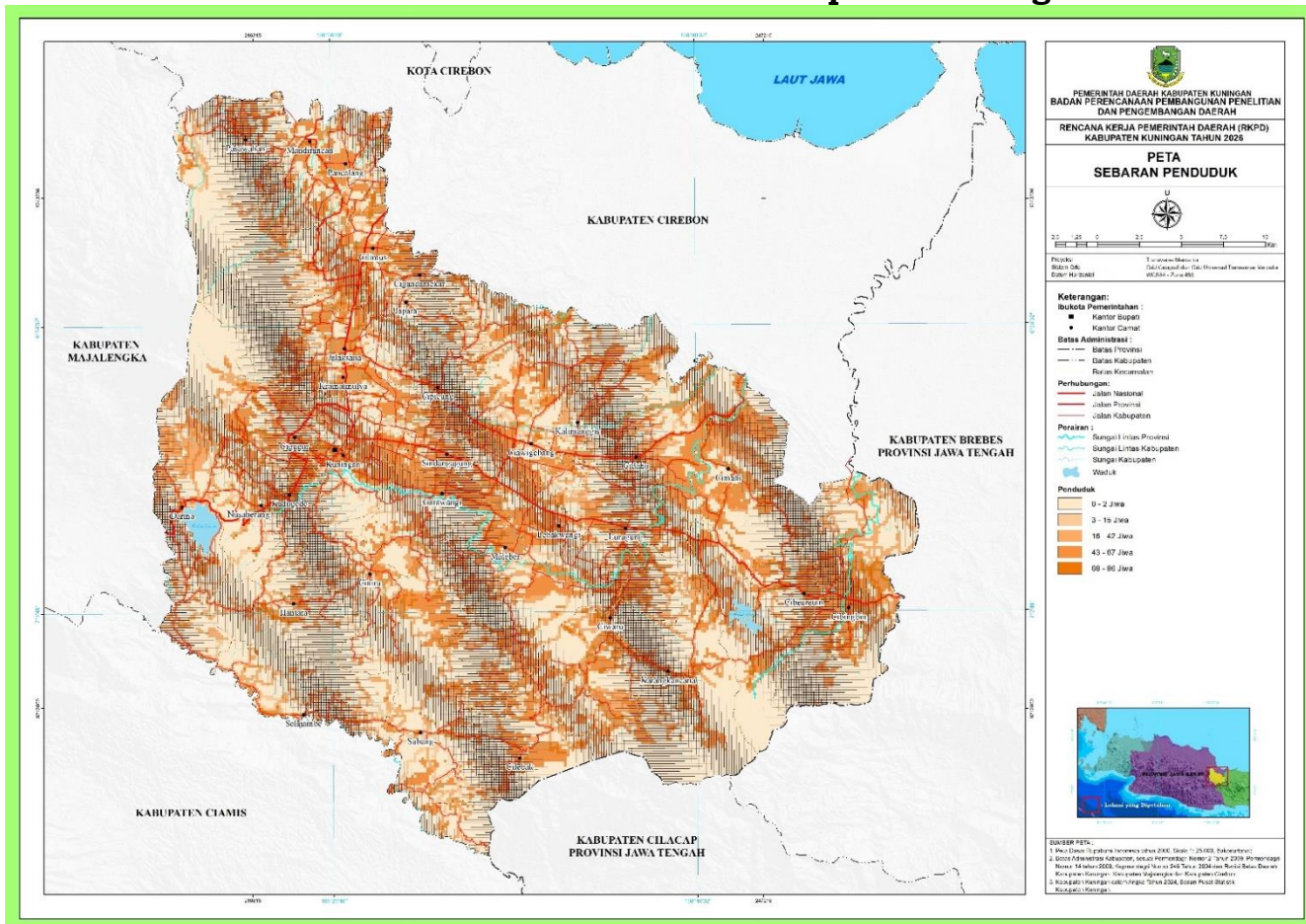
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2022-2024

INDIKATOR		TAHUN		
		2022	2023	2024
Demografi				
1.	Jumlah Penduduk	1.196.017	1.201.764	1.213.927
	a. Laki-laki	602.415	608.669	614.594
	b. Perempuan	586.596	593.095	593.095
	c. Rasio	102,70	102,63	102,55
2.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	995,74	1.006,42	1.016,61
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,04	1,05	1,04
4.	Jumlah Rumah Tangga	305.336	309.121	n/a
5.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur (jiwa)			
	a. 0-14	275.713	276.989	276.947
	b. 15-64	816.115	821.316	828.867
	c. 65+	74.347	103.459	108.113
6.	Angka Beban Tanggungan (ABT)	46,55	46,32	46,46

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Dari data di atas, pada Tahun 2024 komposisi penduduk menurut kelompok umur terdiri atas kelompok penduduk umur muda (<15 tahun) berjumlah 276.947 jiwa; kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 828.867 jiwa dan kelompok umur lanjut usia (>65 tahun) berjumlah 108.113 jiwa.

Gambar 2. 12 Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Kuningan



Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat disajikan dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan perhitungan IPM, selama kurun waktu Tahun 2022-2024 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan pengeluaran mengalami peningkatan, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.13.

Tabel 2.17 Indikator Umum Kesejahteraan Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	Capaian	Capaian	Capaian
		2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup	Tahun	74,03	74,91	75,22
Angka Kematian Ibu	kasus per 100 ribu orang	24	21	13
Angka Kematian Bayi	kasus per 1000	5,13	9,25	8,46
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,24	12,26	12,27

Indikator	Satuan	Capaian	Capaian	Capaian
		2022	2023	2024
(HLS)				
Rata -Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,88	7,89	7,90
Pengeluaran	000 Rp	9.620	10.011	10.418
Indeks Kesehatan	Poin	83,12	84,48	82,74*
Indeks HLS	Poin	68,00	68,11	70,47
Indeks RLS	Poin	52,53	52,60	53,32
Indeks Pendidikan	Poin	60,27	60,36	61,89
Indeks Daya Beli	Poin	68,95	70,17	n/a
IPM	Poin	70,16	70,99	71,56

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

)* data sementara

Berdasarkan tabel di atas, Perkembangan angka harapan hidup penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, seiring perbaikan pola hidup dan peningkatan sarana pendukung kesehatan bagi penduduk. Menurut angka UHH Tahun 2024, sejak umur nol tahun penduduk memiliki kesempatan hidup sampai dengan umur 75,22 tahun, untuk capaian angka kematian ibu dan kematian bayi cenderung fluktuatif pada 3 (tiga) tahun terakhir.

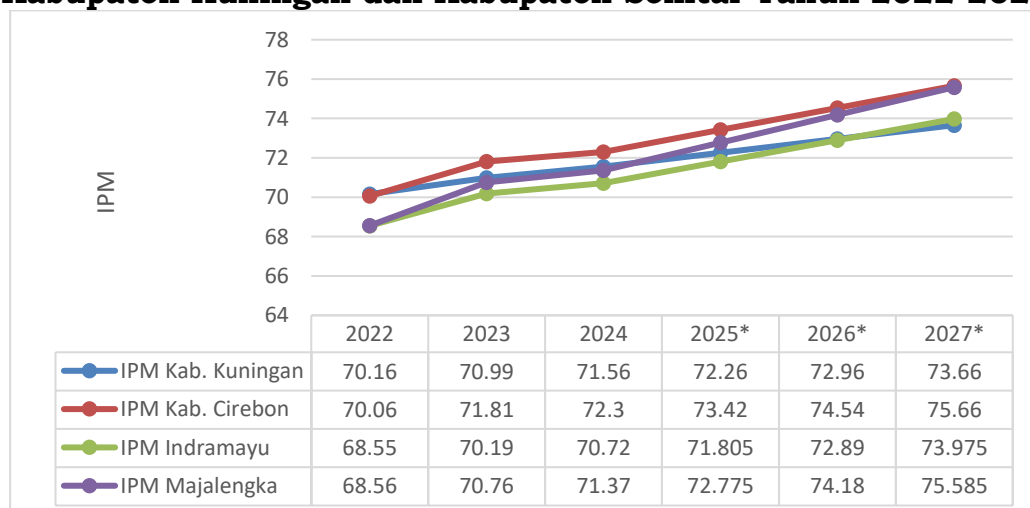
Dimensi pengetahuan yang meliputi indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah penduduk meningkat hingga mencapai kelas 3 SMA atau Diploma 1 sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari kontribusi penduduk berumur 7 tahun ke atas yang masih bersekolah pada pendidikan formal maupun non formal. Semakin besar mereka yang sedang mengikuti pendidikan pada umur 7 tahun ke atas, maka akan semakin tinggi harapan lama sekolah yang akan dicapai.

Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sudah menginjak pada tingkatan kelas 1 SMP atau paling tinggi kelas 2 SMP. Kemampuan penduduk dalam capaian rata-rata lama sekolah masih berada pada tingkatan pendidikan SMP ke bawah menunjukkan kualitas penduduk dilihat dari aspek pendidikan masih relatif rendah, dengan capaian hanya sampai kelas 1 atau 2 SMP.

Pengeluaran per kapita mencapai 9.620 juta rupiah pada Tahun 2022, 10.011 juta rupiah pada Tahun 2023 dan 10.418 juta rupiah pada Tahun 2024. Pengeluaran per kapita cenderung meningkat dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Sisi pengeluaran memberikan dampak kepada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada komoditas-komoditas yang sebagian besar dikonsumsi oleh penduduk.

Meskipun IPM terus mengalami peningkatan, akan tetapi lajunya relatif lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. IPM Kabupaten Kuningan pernah mengungguli ketiganya di tahun 2022, namun Kabupaten Cirebon mengejar dan lebih unggul di Tahun 2023 dan diperkirakan Kabupaten Majalengka akan mendahului di tahun 2025, lalu Kabupaten Indramayu di tahun 2027. Hal ini kemungkinan disebabkan terutama oleh adanya peningkatan daya beli masyarakat. Salah satu faktor penguatkannya yaitu meningkatnya investasi di bidang industri/manufaktur di ketiga kabupaten tersebut. Keberadaan industri manufaktur dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya upah yang stabil dan lebih tinggi dibandingkan sektor informal.

Gambar 2. 13 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022-2024



Sumber : Bappeda, Kab. Kuningan, 2025

* Data proyeksi

2.1.2.2. Kondisi Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi tidak terlepas dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2022-2024 mengalami kenaikan, lebih rinci sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				
a. Nilai PDRB				
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Miliar Rupiah	29.519,83	32.544,89	35.535,77
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Miliar Rupiah	18.450,34	19.418,73	20.507,27
b. PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	24,827,21	27,080,93	29.273,40

Sumber: Kuningan Dalam Angka 2025

Adapun untuk melihat nilai Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan per lapangan usaha disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2022–2024

Kategori	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.026,81	7.723,37	8.253,92
B	Pertambangan dan Penggalian	375,77	407,76	419,64
C	Industri Pengolahan	663,71	719,05	805,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,32	28,79	27,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,01	31,11	36,69
F	Konstruksi	2.533,80	2.750,90	2.868,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.106,71	4.424,73	4.773,35
H	Transportasi dan Pergudangan	4.353,13	5.194,09	6.276,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	568,47	641,89	692,77
J	Informasi dan Komunikasi	1.211,23	1.306,64	1.483,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /	1.667,16	1.789,77	1.913,27
L	Real Estat	798,74	865,88	913,01
M,N	Jasa Perusahaan	145,33	161,89	156,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	919,34	958,83	1.045,15
P	Jasa Pendidikan	3.638,16	3.924,13	4.127,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473,30	514,21	521,23

Kategori	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
R,S,T,U	Jasa lainnya	980,84	1.101,86	1.223,00
Produk Domestik Regional Bruto		29.519,83	32.544,89	35.535,77

Sumber : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2022 sd 2024

Tabel 2.20 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2022–2024

Kategori	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.812,90	3.894,39	3.644,68
B	Pertambangan dan Penggalan	243,51	245,97	262,35
C	Industri Pengolahan	453,98	475,00	502,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,36	17,90	19,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,85	18,36	20,81
F	Konstruksi	1.579,41	1.659,77	1.709,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.862,89	2.982,16	2.991,73
H	Transportasi dan Pergudangan	2.580,10	2.837,97	3.403,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	349,94	374,25	395,07
J	Informasi dan Komunikasi	1.304,80	1.402,17	1.655,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /	894,50	936,16	974,68
L	Real Estat	653,07	695,21	770,49
M,N	Jasa Perusahaan	92,48	98,86	91,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	525,34	538,67	566,57
P	Jasa Pendidikan	2.020,36	2.130,30	2.280,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333,66	350,25	372,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	708,17	761,35	844,38
Produk Domestik Regional Bruto		18.450,32	19.418,73	20.507,27

Sumber Data : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2022 sd 2024

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum menunjukkan percepatan yang memadai membutuhkan kebijakan akselerasi pembangunan terutama peningkatan potensi sektor-sektor unggulan. Kabupaten Kuningan dengan basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata dan jasa perdagangan serta usaha kecil dan menengah perlu memfokuskan prioritas pembangunan ke sektor-sektor tersebut, diantaranya adalah:

1. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih merupakan

penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Kuningan, namun setiap tahun distribusinya terus menurun. Data lima tahun terakhir menunjukkan produksi dan produktivitas pertanian berfluktuasi dan cenderung menurun, hal tersebut dimungkinkan disebabkan kondisi musim maupun terus berkurangnya luas lahan yang dimiliki petani, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b) Optimalisasi lahan tadah hujan;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan lahan;
 - d) Pemotongan rantai perdagangan saprotan;
 - e) Perlindungan terhadap kegagalan panen; dan
 - f) Diversifikasi usaha pertanian.
2. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja perempuan, perlu ada upaya terobosan untuk pengembangan industri rumah tangga yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana maupun pemasarannya serta peningkatan SDM.
 3. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah.
 4. Peningkatan promosi pariwisata.

1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian. Sejalan dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan yang mengacu pada implementasi kabupaten konservasi maka sektor ekonomi produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan.

Tabel 2.21 Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Target	1,90-3,00	2,00-3,45	0,19-7,20
Capaian	5,53	5,25	5,61

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi terhitung meningkat pada 2022 sebesar 5,53, namun di 2023 sedikit terkoreksi menjadi 5,25 dan

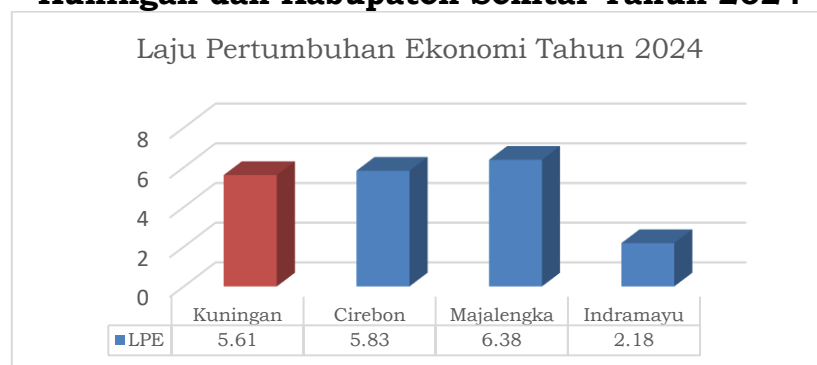
di 2024 sebesar 5,61, namun sampai 2024 capaian LPE masih diatas Provinsi Jawa Barat 4,95 dan Nasional 5,03. Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi dengan kabupaten tetangga Kabupaten Kuningan ada diatas Kabupaten Indramayu sebesar 2,18 dan dibawah LPE Kabupaten Cirebon sebesar 5,83 dan kabupaten Majalengka sebesar 6,38.

Tabel 2.22 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
LPE Kuningan	5,53	5,25	5,61
LPE Jabar	5,45	5,00	4,95
LPE Nasional	5,31	5,05	5,03

Sumber : BPS, Kab. Kuningan, 2025

Gambar 2. 14 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024



Sumber : Bappeda, Kab. Kuningan, 2025

1.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada Tahun 2024, perhitungan inflasi Kabupaten Kuningan, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Cirebon, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,10 persen.

Tabel 2. 23 Capaian Inflasi Kota Cirebon Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Capaian	4,86	3,22	1,10

Sumber : BPS, 2025

Data Infasi Kabupaten Kuningan diperoleh dari BPS dengan menggunakan pendekatan data inflasi Kota Cirebon. Sejak Tahun 2022 sampai Tahun 2024 inflasi selalu dibawah 5 persen sebagaimana tabel diatas.

Tabel 2. 24 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Inflasi Kota Cirebon	4,86	3,22	1,10
Inflasi Jabar	6,04	2,48	1,64
Inflasi Nasional	5,51	2,61	1,54

Sumber : BPS, 2025

Inflasi Kota Cirebon lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Jawa Barat dan Nasional masing-masing pada Tahun 2024 berturut-turut sebesar 1,10 persen, 1,64 persen dan 1,54 persen. Pada Tahun 2024 inflasi mengalami penurunan yang cukup besar baik di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

1.3. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 2.25 Target dan Capaian Indikator Indeks Gini Ratio Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Target	< 0,38	< 0,38	0,336
Capaian	0,345	0,351	0,372

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

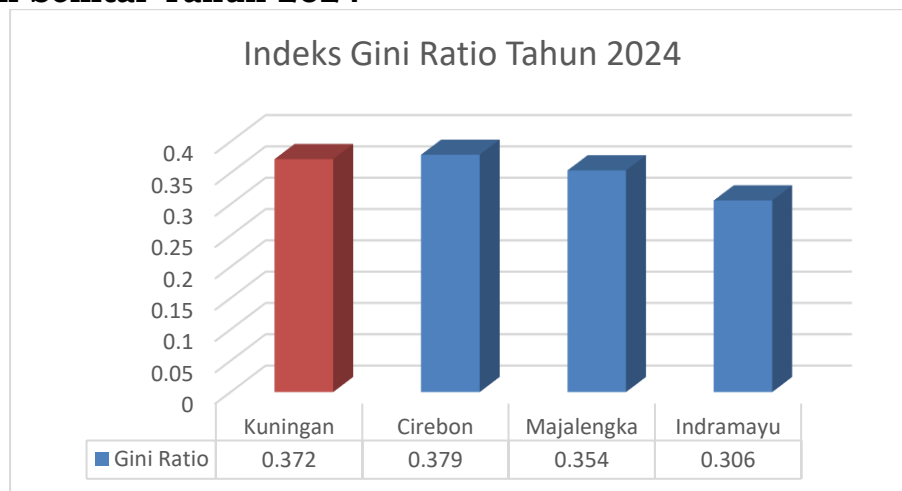
Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio Tahun 2024 berada pada level menengah dengan besaran 0,372, lebih tinggi dari Tahun 2023 sebesar 0,351 poin, namun kondisi ini masih dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,421 dan Nasional sebesar 0,381

Tabel 2.26 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Indeks Gini Ratio Kuningan	0,345	0,351	0,372
Indeks Gini Ratio Jabar	0,417	0,425	0,421
Indeks Gini Ratio Nasional	0,381	0,388	0,381

Sumber : BPS, Kab. Kuningan, 2025

Gambar 2. 17 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024



Sumber : Bappeda, Kab. Kuningan, 2025

Kabupaten Kuningan berada pada level menengah dengan besaran 0,372 yang masih cukup jauh dibawah angka Jawa Barat yang mencapai 0,421 Kondisi tersebut menggambarkan pendapatan masyarakat Kuningan masih relatif lebih merata dibandingkan Jawa Barat secara umum. Jika dihubungkan dengan pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kuningan cenderung merata di level menengah bawah. Kondisi tersebut juga didukung oleh data hasil PPLS, dimana tercatat masih cukup tinggi penduduk yang tidak tergolong miskin namun masih berada sedikit diatas garis kemiskinan (penduduk mendekati miskin dan rentan miskin).

Dengan demikian intervensi pemerintah di bidang ekonomi perlu mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga

tercipta pertumbuhan yang optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk (*redistribution with growth*). Seperti pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian lokal (*agroindustri*) yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat menstimulus perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian. Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulus pengembangan UKM, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung belanja produk-produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki daya beli masyarakat di wilayah Kuningan selatan yang masih banyak terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena minimnya investasi di wilayah tersebut. Pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan cara memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor.

Indeks Gini Ratio selalu dibawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada Tahun 2024 indeks gini ratio Kabupaten Kuningan sebesar 0,372, sedangkan di Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 0,421 dan 0,381 Selain itu, perbandingan indeks gini ratio Kabupaten kuningan sebesar 0,372 dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu masing-masing sebesar 0,379, 0,354, dan 0,306.

1.4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu penting nasional. Kemajuan sosial dan ekonomi saat ini masih menyisakan masalah kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun regional salah satunya terjadi di Kabupaten Kuningan. Adapun data dari kemiskinan Kabupaten Kuningan disajikan ditabel berikut.

Tabel 2.27 Kemiskinan Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	371.665	402.767	420.867
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	140,25	133,88	131,83
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	12,76	12,12	11,88

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Meskipun garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, namun persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Pada Tahun 2022 sebesar 12,76 persen, lalu mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2024 sebesar 11,88 persen.

Dari hasil pendataan dengan metode Garis Kemiskinan hasil SUSENAS, diprediksi pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 16.040 jiwa, atau dari semula 123.160 jiwa menjadi 139.200 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut menyebabkan naiknya persentase penduduk di Kabupaten Kuningan yang berada dibawah garis kemiskinan Tahun 2020 dan menjadi 13,10 persen pada Tahun 2021.

Memasuki Tahun 2024, walau masih sangat terasa dampak kenaikan harga barang di Kabupaten Kuningan namun pergerakan perekonomian membuat jumlah penduduk miskin mengalami sedikit penurunan. Menurut cacatan BPS, pada Tahun 2024 terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 2 ribu jiwa lebih, sehingga terjadi penurunan yang cukup persentase penduduk Kabupaten Kuningan yang berada di bawah GK, yakni menjadi sebesar 11,88 persen. pada Tahun 2020, penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan sebesar 1,41 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan persentase penduduk miskin ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Kuningan namun juga terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kenaikan ini dipicu oleh kondisi Pandemi Covid-19 baik secara lokal, nasional maupun internasional. Berdasarkan perbandingan penduduk miskin dengan Provinsi Jawa Barat, dapat dikatakan bahwa penduduk miskin Kabupaten Kuningan sudah lebih melambat

Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada Tahun 2024 persentase kemiskinan Kabupaten Kuningan sebesar 11,88 persen, sedangkan di provinsi Jawa

Barat dan Nasional masing-masing sebesar 7,46 persen dan 9,03 persen.

Tabel 2.28 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Persentase Kemiskinan Kuningan	12,76	12,12	11,88
Persentase Kemiskinan Jabar	8,06	7,62	7,46
Persentase Kemiskinan Nasional	9,57	9,36	9,03

Sumber : BPS, 2025

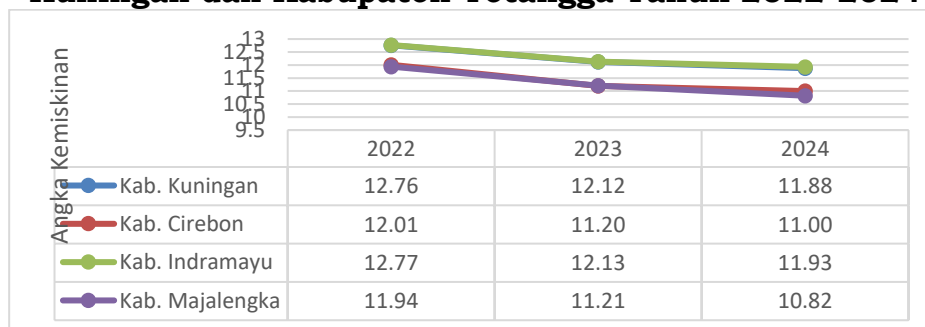
Pasca pandemi Covid-19, pemerintah pusat maupun daerah berusaha keras untuk membangkitkan aspek ekonomi dan menjaga agar inflasi dapat tetap terkendali. Upaya tersebut cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, besaran maupun laju penurunan angka kemiskinannya relatif sama sejak tahun 2022. Hal ini kemungkinan karena kabupaten-kabupaten tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama terutama dalam hal masih dominannya sektor pertanian sehingga masih banyak warganya yang bekerja di sektor pertanian.

Masyarakat petani cenderung miskin karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun struktural. Salah satu penyebab utamanya adalah kepemilikan lahan yang terbatas. Banyak petani hanya memiliki lahan kecil (kurang dari 0,5 hektare), bahkan sebagian besar hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang rendah. Selain itu, harga komoditas pertanian yang tidak stabil membuat pendapatan petani sering tidak menentu, terutama karena mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap tengkulak atau pasar. Di sisi lain, biaya produksi yang tinggi akibat mahalnya pupuk, benih, dan pestisida semakin memperparah kondisi mereka, sementara keuntungan yang diperoleh sering kali sangat kecil.

Ketergantungan petani terhadap tengkulak juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sulitnya akses terhadap modal menyebabkan petani terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang. Selain itu,

keterbatasan teknologi dan minimnya inovasi dalam pertanian membuat produktivitas mereka tetap rendah, karena banyak yang masih menggunakan metode tradisional. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan iklim dan risiko bencana alam seperti banjir atau kekeringan yang dapat merusak hasil panen. Hal ini semakin diperburuk dengan akses pasar yang tidak menguntungkan, di mana petani harus melewati rantai distribusi yang panjang, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan mereka sendiri.

Gambar 2. 18 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tetangga Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Adapun data tingkat pengangguran terbuka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,81	9,49	7,78

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 sebesar 9,49 persen, sedangkan pada Tahun 2024 TPT mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,71 persen dari 9,49 persen menjadi 7,78* persen. Ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 terdapat 7,78* persen dari

penduduk usia angkatan kerja yang menganggur/tidak bekerja.

Meskipun angka pengangguran terus menurun, tantangan masih ada, terutama dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Kabupaten Kuningan memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih di bawah rata-rata Jawa Barat, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat usia produktif yang belum terserap ke dalam dunia kerja. Oleh karena itu, upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja, investasi dalam pendidikan vokasi, serta pengembangan sektor industri yang lebih luas masih diperlukan untuk memastikan penurunan angka pengangguran yang berkelanjutan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Pada Tahun 2022 TPT sebesar 9,81 persen. Sedangkan untuk Tahun 2024 TPT mengalami penurunan menjadi 7,78 persen, namun hal ini masih berada diatas TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Sedangkan Perbandingan TPT dengan Kabupaten Tetangga yaitu Kabupaten Kuningan sebesar 7,78 persen, Kabupaten Cirebon sebesar 6,74 persen, Kabupaten Majalengka sebesar 4,01 persen dan Kabupaten Indramayu sebesar 6,25 persen.

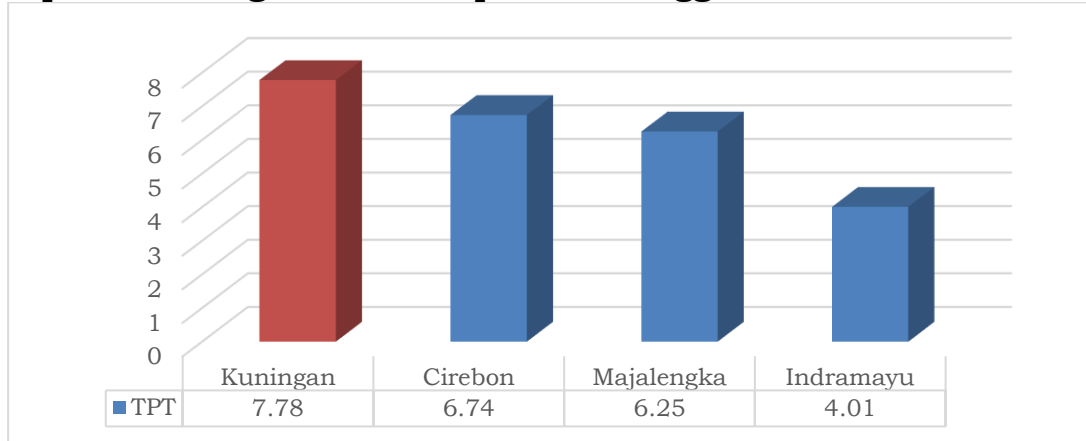
TPT yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu kemungkinan disebabkan oleh semakin berkembangnya investasi manufaktur di ketiga kabupaten tersebut. Semakin banyak investasi berarti semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, dan semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat diserap.

**Tabel 2.30 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kuningan, Provinsi dan Nasional**

Tahun	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka Kuningan	9,81	9,49	7,78
Tingkat Pengangguran Terbuka Jabar	8,31	7,44	6,75
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	5,86	5,32	4,91

Sumber : BPS, 2025

Gambar 2. 19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tetangga Tahun 2024



Sumber : Bappeda Kab. Kuningan, 2025

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Kondisi pelayanan di bidang pendidikan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk	1.196.017	1.201.764	1.213.927
2.	Sekolah Dasar (SD)			
	Jumlah Sekolah			
	- Negeri	635	635	635
	- Swasta	21	22	23
	Jumlah Murid			
	- Negeri	93.695	92.131	92.292
	- Swasta	4.607	4.816	5.053
	Jumlah Guru			
	- Negeri	6.367	6.602	5.793
	- Swasta	301	337	308
	Rasio Jumlah Murid dan Guru			
	- Negeri	1:14,7	1:14	1:15,9
	- Swasta	1:15,3	1:14,3	1:16,4
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)			
	Jumlah Sekolah	93	94	94
	Jumlah Murid	15.111	15.423	15.527
	Jumlah Guru	1.014	1.020	1.033
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	1:14,9	1:15,1	1:15
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
	Jumlah Sekolah	111	120	120
	- Negeri	78	78	78
	- Swasta	33	42	42
	Jumlah Murid	40.397	40.668	41.879
	- Negeri	35.495	35.792	36.659

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
	- Swasta	4.902	4.896	5.220
	Jumlah Guru	2.502	2.674	2.490
	- Negeri	2.122	2.213	2.080
	- Swasta	380	461	410
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	1:16,2	1:15,2	1:16,8
	- Negeri	1:16,7	1:16,2	1:17,6
	- Swasta	1:12,9	1:10,6	1:12,7
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)			
	Jumlah Sekolah	64	64	64
	Jumlah Murid	18.574	18.114	17.762
	Jumlah Guru	1.377	1.361	1.316
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	1:13,5	1:13,3	1:13,5
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)			
	Jumlah Sekolah	29	31	30
	Jumlah Murid	19.757	20.454	23.177
	Jumlah Guru	1.139	1.137	1.033
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	1:17,3	1:18	1:22,4
7.	Madrasah Aliyah (MA)			
	Jumlah Sekolah	33	34	34
	Jumlah Murid	6.235	6.192	6.250
	Jumlah Guru	672	697	692
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	1:9,3	1:8,9	1:09
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			
	Jumlah Sekolah	43	43	43
	Jumlah Murid	29.776	29.776	27.431
	Jumlah Guru	1.597	1.412	880
	Rasio Jumlah Murid dan Guru	1:18,6	1:21,1	1:31,2

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada jenjang pendidikan dasar (SD dan MI), kondisi relatif stabil baik dari sisi jumlah sekolah, murid, maupun guru, dengan rasio murid-guru yang masih cukup ideal. Sementara itu, pada tingkat SMP, terjadi peningkatan jumlah sekolah dan murid, tetapi jumlah guru justru menurun di 2024 sehingga rasio murid-guru memburuk.

Pada jenjang MTs, jumlah sekolah tetap, namun murid dan guru cenderung menurun meskipun rasio murid-guru masih terjaga. Kondisi SMA memperlihatkan peningkatan signifikan jumlah murid, tetapi tidak diimbangi penambahan guru, sehingga rasio murid-guru menjadi lebih tinggi dari tahun ke tahun.

Madrasah Aliyah (MA) relatif stabil dengan rasio murid-guru sangat ideal, bahkan terbaik dibanding jenjang lain. Sebaliknya, SMK menghadapi permasalahan serius, yaitu jumlah guru yang turun drastis sehingga rasio murid-guru membengkak hingga 1:31 di tahun 2024, yang berpotensi

mengganggu kualitas pembelajaran.

2) Kesehatan

Kondisi pelayanan di bidang kesehatan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Sakit	12	12	12	12
2.	Jumlah Puskesmas	37	37	37	37
	Terdiri dari :				
	Jumlah Puskesmas tanpa perawatan	31	31	31	31
	Jumlah Puskesmas dengan Perawatan	6	6	6	6
	Jumlah Puskesmas tanpa Perawatan + Poned	18	18	18	18
	Jumlah Puskesmas dengan Perawatan + Poned	6	6	6	6
3.	Jumlah Puskesmas Pembantu	69	68	68	68
4.	Jumlah Puskesmas Keliling	37	37	37	47
5.	Jumlah Posyandu	1433	1435	1438	1439
6.	Jumlah Poskesdes	251	226	281	260
7.	Jumlah Polindes	0	0	0	0
8.	Jumlah Balai Pengobatan	27	35	40	42
9.	Jumlah Apotek	110	166	168	188
10.	Jumlah Toko Obat	48	45	46	36
11.	Rasio Jumlah Penduduk Per Rumah Sakit	91.287	91.741	92.176	101.160
12.	Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas	29.607	29.754	29.895	32.808
13.	Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Pembantu	15.876	16.190	16.266	17.852
14.	Rasio Jumlah Penduduk Per Puskesmas Keliling	29.607	29.754	29.895	25.828
15.	Rasio Jumlah Penduduk Per Poskesdes	4.364	4.871	3.936	4.669
16.	Rasio Jumlah Penduduk Per Posyandu	764	767	769	844
17.	Rasio Jumlah Penduduk Per Balai Pengobatan	40.572	31.454	27.653	28.903
18.	Rasio Jumlah Penduduk Per Toko Obat	22.822	24.464	24.046	33.720

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, 2025

Dalam pemenuhan pelayanan dasar kesehatan perlu dilakukan penguatan kapasitas sarana dan prasarana serta kualitas SDM Kesehatan yang baik. Dilihat dari tren capaian bidang kesehatan cenderung mengalami kenaikan hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan dasar pada bidang kesehatan sudah hampir terpenuhi.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian	Capaian	Capaian	Capaian
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan	80,699	82,357	82,352
2.	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	62,23	63,81	66,97
3.	Penanganan jalan & jembatan (Km)	202,56	407,11	289,575
4.	Penanganan jaringan irigasi (Ha)	741,3	710	4.272
5.	Akses Air Minum Layak (%)	91,10	90,98	91,75
6.	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (%)	93,65	93,99	96,68
7.	Akses Air Minum Perpipaan (%)	35,87	35,80	42,44

Sumber : Dinas PUTR Kab. Kuningan, 2025

Secara umum, kondisi pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang menunjukkan tren yang cukup positif. Persentase kemantapan jalan dan jembatan meningkat dari 80,70% (2022) menjadi 82,35% (2024). Jaringan irigasi dalam kondisi baik juga naik dari 62,23% menjadi 66,97% pada periode yang sama. Penanganan jalan dan jembatan sempat melonjak di tahun 2023, namun menurun kembali pada 2024. Sementara itu, penanganan jaringan irigasi meningkat signifikan di 2024 dengan capaian 4.272 hektar.

Dari sisi pelayanan dasar, akses air minum layak tetap terjaga di atas 90% dengan tren meningkat, dan akses sanitasi layak juga menunjukkan kenaikan hingga mencapai 96,68% pada 2024. Akses air minum perpipaan mengalami peningkatan cukup signifikan dari 35,87% (2022) menjadi 42,44% (2024).

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi pelayanan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase rumah layak huni	97,21	97,54	97,63
2	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia / tersusun	16	16	16
5	Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani (%)	100	100	100
6	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)	35,94 Ha	0 Ha	9,6 Ha
7	Persentase rumah layak huni (%)	97,21	97,54	97,63
8	Panjang jalan lingkungan yang ditangani (Km)	128,59	117,65	95,82
9	Jumlah Bidang Tanah yang tersertifikasi	40000 Sertifikat	40000 Sertifikat	40000 Sertifikat

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuningan, 2025

Infrastruktur dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman telah menunjukkan kondisi yang sangat signifikan dalam kenaikan capaiannya, dimana nilai dari capaian tersebut telah memenuhi target.

5) Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kondisi pelayanan di bidang Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban (%)	84	85	86
2	Cakupan petugas pelindungan masyarakat (Orang)	115	115	90
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten/kota (%)	80	85	89
5	Tingkat Waktu tanggap (<i>response time rate</i>) (%)	100	100	100

Sumber : Satpol PP, BPBD Kab. Kuningan, 2025

Kondisi pelayanan pada aspek ketentraman dan ketertiban menunjukkan tren positif. Tingkat penyelesaian pelanggaran meningkat dari 84% pada 2022 menjadi 86% pada 2024. Cakupan pelayanan bencana kebakaran juga mengalami perbaikan, dari 80% menjadi 89% dalam periode yang sama. Sementara itu, waktu tanggap penanganan tetap terjaga di angka

100% setiap tahun, menandakan konsistensi pelayanan yang baik. Namun, jumlah petugas perlindungan masyarakat menurun dari 115 orang pada 2022–2023 menjadi 90 orang pada 2024, yang berpotensi memengaruhi kapasitas pelayanan di lapangan.

6) Sosial

Kondisi pelayanan di bidang Sosial, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Sosial

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2 Panti	8 Panti	4 Panti
2.	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	24,09	63,93	57,11
3.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	86,82	93,91	57,24
4.	Rata-rata waktu penanganan, kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar	1 hari/24 jam	1 hari/24 jam	1 hari/24 jam
5.	Cakupan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) (%)	81	97	93

Sumber : Dinas Sosial, BPBD Kab. Kuningan, 2025

Secara umum, pelayanan sosial menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Jumlah sarana sosial sempat meningkat dari 2 panti pada 2022 menjadi 8 panti di 2023, namun kembali turun menjadi 4 panti pada 2024. Persentase penyandang disabilitas dan lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial mengalami peningkatan signifikan pada 2023 (63,93%), meskipun menurun di 2024 (57,11%). Begitu juga dengan PMKS yang memperoleh bantuan sosial, naik menjadi 93,91% di 2023 lalu turun drastis menjadi 57,24% di 2024. Sementara itu, rata-rata waktu penanganan kedaruratan tetap konsisten 1 hari/24 jam, dan cakupan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) cenderung tinggi, meskipun sedikit menurun dari 97% pada 2023 menjadi 93% pada 2024.

7) Tenaga Kerja

Kondisi pelayanan di bidang Tenaga Kerja, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.37 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Tenaga Kerja

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,81	9,49	7,78
2.	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh (%)	122,19	131,39	n/a
3.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	65,37	70,03	n/a

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kuningan, 2025

Selama periode 2022-2024 kondisi pelayanan aspek tenaga kerja mengalami peningkatan capaian yang cukup signifikan seperti tingkat pengangguran terbuka yang setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini tentu menjadi hal positif untuk Pemerintah Kabupaten Kuningan. Selain itu pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh dan pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami kenaikan yang signifikan.

8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kondisi pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Gender	87,17	87,31	88,00
2.	Rasio KDRT	0,003	0,039	0,000043
3.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan, 2024

Secara umum, kondisi pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Gender meningkat stabil, kasus KDRT sempat melonjak pada 2023 namun berhasil ditekan signifikan pada 2024, sementara penyelesaian

pengaduan tetap terjaga di angka maksimal. Ini mengindikasikan adanya progres positif dalam aspek kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan serta anak.

9) Pangan

Kondisi pelayanan di bidang Pangan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pangan

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	-
2.	Ketersediaan pangan utama	293,61 (Kg/kap/th)	266,9 (Kg/kap/th)	272,03 (Kg/kap/th)
3.	Penanganan daerah rawan pangan	17	8	8
4.	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal (%)	45	50	55
5.	Skor Poka Pangan Harapan (%)	93,2	93,2	93,8
6.	Prevalensi Ketidacukupan konsumsi Pangan (PoU) (%)	6,63	6,43	5,83

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Kuningan, 2025

Secara umum, kondisi ketahanan pangan menunjukkan perkembangan positif. Meskipun ketersediaan pangan utama sempat menurun pada 2023, terdapat perbaikan di 2024. Jumlah daerah rawan pangan berhasil ditekan signifikan, konsumsi pangan lokal terus meningkat, skor Pola Pangan Harapan tetap tinggi, dan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan menurun. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek pemenuhan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

10) Pertanian

Kondisi pelayanan di bidang Pertanian, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.40 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanahan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Luas lahan bersertifikat	73,89	81,97	75

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kuningan, 2025

Penyelenggaraan urusan pemerintah aspek pertanahan mengalami fluktuasi terlihat dari capaian indikator kinerja persentase luas lahan bersertifikat yang mengalami peningkatan pada Tahun 2022 sebesar 73,89% menjadi 81,97% pada tahun 2023, lalu turun menjadi sebesar 75% di tahun 2024.

11) Lingkungan Hidup

Kondisi pelayanan di bidang Lingkungan Hidup, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Lingkungan Hidup

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,93	71,11	72,05
2.	Indeks Kualitas Air	51,11	53,83	54,44
3.	Indeks Kualitas Udara	86,96	89,04	92,84
4.	Indeks Tutupan Lahan	57,05	64,19	63,82
5.	Penanganan Sampah	107.441 Ton (61,09)	111.055 Ton (61,75)	108.189 Ton (59,76)
6.	Pengurangan Sampah	11.200 Ton (22)	11.718,40 Ton (27,61)	15.728 Ton (8,73)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan, 2025

Selama periode 2022-2024, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Selain itu penanganan sampah dan pengurangan sampah selama periode 2022-2024 mengalami kenaikan yang signifikan.

12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kondisi pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.42 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kepemilikan Kartu Keluarga	100	99,94	98,30
2	Kepemilikan KTP	99,40	99,16	98,52
3	Kepemilikan KIA	43,46	47,77	55,18
4	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	94,21	96,07	96,48
5	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	100	100	100
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kuningan, 2024

Secara umum, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan hasil yang cukup baik. Kepemilikan KK dan KTP masih sangat tinggi meski sedikit menurun, sementara kepemilikan KIA dan akta kelahiran terus mengalami peningkatan signifikan. Layanan akta perkawinan dan perceraian berjalan optimal dengan capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan relatif baik dan semakin inklusif, khususnya dalam pencatatan identitas anak.

13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kondisi pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	PKK aktif (%)	100	100	100
2.	Posyandu aktif (%)	100	100	100
3.	Jumlah Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal	Mandiri : 62 Maju : 183 Berkembang : 116 Tertinggal : 0	Mandiri : 95 Maju : 218 Berkembang : 48 Tertinggal : 0	Mandiri : 134 Maju : 215 Berkembang : 12 Tertinggal : 0
5.	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
6.	Prosentase Desa Tertinggal	0	0	0
7.	Prosentase Status Desa mandiri	17,17	26,31	37,12

Sumber : Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kuningan, 2025

Secara umum, penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan capaian yang sangat positif. PKK dan Posyandu tetap aktif penuh, lembaga kemasyarakatan konsisten berfungsi, serta tidak ada desa tertinggal. Jumlah desa mandiri meningkat tajam, sementara desa berkembang berkurang signifikan, yang menandakan adanya pergeseran ke arah kemandirian desa. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program pemberdayaan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevalance (CPR) (%)	71,94	72,24	66,40
2.	Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed) (%)	11,04	7,45	10,30
3.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita	22,70	22,80	22,90

Sumber : Dinas PPKBPP&PA Kab. Kuningan, 2025

Kinerja aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Tingkat penggunaan kontrasepsi sempat stabil namun turun pada 2024, sementara unmet need sempat membaik pada 2023 tetapi kembali meningkat di tahun berikutnya. Di sisi lain, usia kawin pertama wanita terus meningkat, yang mencerminkan perbaikan dalam kesadaran masyarakat terkait pernikahan pada usia yang lebih dewasa.

15) Perhubungan

Kondisi pelayanan di bidang Perhubungan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perhubungan

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah Prasarana Perhubungan: - PJU - Terminal - Terminal Penumpang Wisata Terpadu	496 Titik 10 1	7.822 titik 10 1	18.182 titik 10 1
2.	Jumlah Ketersediaan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan : - Traffic light - Warning Light - Rambu Lalulitas - Marka Zoss - Cermin Tikungan - Velican Crossing - ATCS	0 Titik 0 Unit 45 Unit 1 lokasi 0 Unit 2 Unit 8 Paket	0 Titik 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	1 Titik 0 Unit 47 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit
3.	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang melaksanakan Uji Berkala (unit)	9.237 Unit	8.258 Unit	8.163

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kuningan, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji berkala mengalami penurunan dari Tahun 2022 sebesar 9.237 unit menjadi 8.163 unit pada Tahun 2024. Begitu juga untuk capaian prasarana perhubungan khususnya PJU yang mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebesar 496 titik menjadi 18.182 titik pada Tahun 2024.

16) Komunikasi dan Informatika

Kondisi pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada
2.	Pameran/expo	Ada	Ada	Ada

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3.	Prosentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi	80	89	94
4.	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan (buah)	20	45	78
5.	Jumlah kelompok informasi masyarakat	1.165	1.213	1,216
6.	Jumlah BTS	325	326	326
7.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	8	8	8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.42 capaian kondisi pelayanan aspek komunikasi dan informatika dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk capaian prosentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegritasi pada Tahun 2022 sebesar 80 persen meningkat pada menjadi 94 persen pada Tahun 2024. Capaian jumlah informasi publik yang dipublikasikan pada Tahun 2022 sebanyak 20 buah meningkat menjadi 78 buah pada Tahun 2024. Capaian jumlah kelompok informasi masyarakat sebanyak 1.165 meningkat menjadi 1.216 pada Tahun 2024. Capaian jumlah BTS pada Tahun 2022 sebesar 325 meningkat menjadi 326 pada Tahun 2024.

17) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kondisi pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Koperasi aktif	492	520	573
2.	Jumlah Usaha Mikro	200	400	150

Sumber : Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, 2025

Pada diatas capaian kondisi pelayanan aspek koperasi dan usaha kecil menengah pada Tahun 2022 sampai 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Capaian koperasi aktif pada Tahun 2022 sebanyak 492 meningkat menjadi 573 koperasi pada Tahun 2024. Capaian jumlah usaha mikro pada

Tahun 2022 sebanyak 200 umk menurun menjadi 150 untuk pada tahun 2024.

18) Penanaman Modal

Kondisi pelayanan di bidang Penanaman Modal, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.48 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Penanaman Modal

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5.204.501.608.752	1.880.066.349.870	7.541.971.535.243
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (milyar rupiah)	7.004.865.478.704	8.884.931.828.574	16.426.903.363.817
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)	119.148	51.674	n/a

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan, 2025

Pada diatas capaian kondisi pelayanan aspek penanaman modal pada Tahun 2022 sampai Tahun 2024 mengalami data fluktuatif dimana untuk capaian nilai realisasi PMDN terdapat kenaikan pada Tahun 2023 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2024. Sama halnya dengan rasio daya serap tenaga kerja yang mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dan mengalami penurunan pada Tahun 2023. Sedangkan untuk jumlah nilai investasi berskala nasional mengalami kenaikan pada Tahun 2024 dengan nilai 7.341 milyar dan pada Tahun 2024 dengan nilai 16.426 milyar.

19) Kepemudaan dan Olahraga

Kondisi pelayanan di bidang Kepemudaan dan Olahraga, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.49 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kepemudaan dan Olahraga

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan (kecamatan)	4	6	7
2	Jumlah sarana prasarana olahraga (buah)	32	42	37

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan, 2024

Pada Tabel 2.45 kondisi pelayanan aspek kepemudaan dan olahraga pada Tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan pada jumlah sarana

dan prasarana olahraga pada Tahun 2022 sebanyak 32 dan Tahun 2024 sebanyak 37. Untuk capaian pembinaan organisasi kepemudaan sudah memenuhi target sebanyak 32 Kecamatan pada Tahun 2024.

20) Statistik

Kondisi pelayanan di bidang Statistik, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Statistik

No	Uraian	2022	2023	2024
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada edisi tahunan	Ada Edisi tahunan	Ada edisi tahunan
2.	Jumlah dokumen data/informasi/statistik daerah	65 Dokumen	65 Dokumen	66 Dokumen

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2025

Pada Tabel 2.46 Kondisi Pelayanan aspek statistik pada Tahun 2022 sampai 2024 telah memenuhi target capaian dimana buku "Kabupaten dalam angka" sudah ada edisi tahunannya. Namun untuk buku "PDRB Kabupaten" diterbitkan oleh BPS.

21) Persandian

Kondisi pelayanan di bidang Persandian, disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.51 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Persandian

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Prosentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	99,70	99	99

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan, 2025

22) Kebudayaan

Kondisi pelayanan di bidang Kebudayaan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kebudayaan

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2 Sarana	2 Sarana	2 Sarana
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan, 2025

Pada Tabel 2.48 kondisi pelayanan aspek kebudayaan pada Tahun 2022

sampai Tahun 2024 target capaian penyelenggara festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan telah memenuhi target capaian.

23) Perpustakaan

Kondisi pelayanan di bidang Perpustakaan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perpustakaan

No.	Uraian	2022	2023	2024
1.	Koleksi Buku di Perpustakaan	24.742 Judul Buku	29.005 Judul Buku	30.150 Judul Buku
2.	Pengunjung perpustakaan	13.719 Orang	10.446 orang	10.000 orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kuningan, 2025

Pada Tabel 2.49 kondisi pelayanan aspek perpustakaan pada Tahun 2022 sampai 2024 telah mengalami peningkatan capaian koleksi buku di perpustakaan pada Tahun 2022 sebesar 24.742 judul buku meningkat menjadi 30.150 judul buku pada tahun 2024. Sedangkan untuk pengunjung perpustakaan mengalami fluktuatif dimana meningkat pada Tahun 2022 dan menurun pada Tahun 2024.

24) Kearsipan

Kondisi pelayanan di bidang Kearsipan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.54 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kearsipan

No.	Uraian	2022	2023	2024
1.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)	85	90	92
2.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan(kegiatan)	5	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kuningan, 2025

Secara umum, pelayanan kearsipan menunjukkan tren positif dengan penerapan pengelolaan arsip yang semakin meningkat setiap tahun. Meski jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM berkurang, hasilnya tetap mendukung perbaikan tata kelola arsip, sehingga efektivitas sistem kearsipan semakin baik.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Kondisi pelayanan di bidang Kelautan dan Perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.55 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Kelautan dan Perikanan

No.	Uraian	2022	2023	2024
1	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (NTN) (%)	102,95	105,62	101
2	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap (ton)	368,31	483,35	440
3	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya (ton)	18.654,20	19.640,00	20.486,33
4	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	25	25	31

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Kuningan, 2025

2) Pariwisata

Kondisi pelayanan di bidang Pariwisata, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pariwisata

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kunjungan wisata	3.448.917	2.785.126	3.824.520

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan, 2025

Tabel diatas menunjukkan kondisi pelayanan aspek pariwisata pada Tahun 2022 sampai Tahun 2024 mengalami capaian yang fluktuatif dimana pada tahun 2024 capaiannya meningkat dari Tahun 2022. Namun untuk Tahun 2023 mengalami penurunan capaian.

3) Pertanian

Kondisi pelayanan di bidang Pertanian, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.57 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Pertanian

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha):			
	- Padi	61,92	61,91	61,92
	- Jagung	62,32	58,81	54,75
	- Kedelai	9,80	10,40	9,48
	- Kacang Tanah	14,33	12,76	13,77
	- Kacang Hijau	9,95	7,14	10

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	- Ubi Kayu	180,19	176,59	195,61
	- Ubi Jalar	214,80	215,96	211,88
2	Pertumbuhan Populasi Ternak (ekor):			
	- Sapi Perah	7.278	6.582	7.303
	- Sapi Potong	30.631	28.240	30.712
	- Domba	104.350	123.757	137.015
	- Kambing	7.630	9.099	9.086
	- Ayam Ras Petelur	1.900.399	2.231.239	2.340.353
	- Ayam Ras Pedaging	3.327.297	3.326.380	4.248.100
3	Tingkat Kemampuan Kelompok (%):			
	- Kelompok Pemula	1.028	1.131	1.158
	- Kelompok Lanjut	1.240	1.398	1.281
	- Kelompok Madya	103	138	131
	- Kelompok Utama	3	3	3
4	Cakupan Binaan Kelompok Tani (%)	23,83	35,17	
5	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Kw/Ha) :			
	- Bawang Merah	109,86	106,93	105,08
	- Tomat	199,23	146,67	143,78
	- Cabe Besar	65,04	104,04	71,06
	- Cabe rawit	64,96	89,08	66,89
	- Mangga	261.523	293.020	330.805
	- Rambutan	10.560	15.910	98.500
	- Durian	14.787	37.040	33.653

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Kuningan, 2025

4) Kehutanan

Fokus urusan layanan kehutanan bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Fokus urusan layanan energi dan sumber daya mineral bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

6) Perdagangan

Kondisi pelayanan di bidang Perdagangan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perdagangan

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Ekspor Bersih Perdagangan	\$ 6.861.579	\$ 3.608.007	\$ 3.579.914
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4	1	0
3.	Daerah Tertib Ukur	6.392	5.525	5.528

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, 2025

7) Perindustrian

Kondisi pelayanan di bidang Perindustrian, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59 Kondisi Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar Aspek Perindustrian

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Industri	13%	8,3%	2%
2.	Penerapan Standar Industri Hijau dan Penerapan Industri 4.0	65 Perusahaan	40 Perusahaan	55 Perusahaan
3.	Peningkatan daya saing untuk produk Home Industri	135 IKM	135 IKM	50 IKM

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan, 2025

8) Transmigrasi

Fokus urusan layanan transmigrasi bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

2.1.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Kondisi pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.60 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Perencanaan Pembangunan

No.	Uraian	2022	2023	2024
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan :	Ada	Ada	Ada

No.	Uraian	2022	2023	2024
	RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA			
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	100%
5.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	9	9	9
6.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEDA Kab. Kuningan, 2025

2. Keuangan

Kondisi pelayanan di bidang Keuangan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WDP
2.	Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung: - Jml Belanja Langsung/Total APBD - Jml Belanja Tidak Langsung/Total APBD	39% 61%	39,4% 58,5%	41,2% 5,8
3.	Penetapan APBD	Tepat Waktu 27 Desember 2021	Tepat Waktu 27 Desember 2022	Tepat Waktu 29 Desember 2023
4.	Prosentase SILPA	2,41%	0,48%	0,64%

Sumber : BPKAD Kab. Kuningan, 2025

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi pelayanan di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No.	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah Pegawai yang difasilitasi (Org)	940	2.887	1.772
2.	Jumlah Aparatur yang terbina (%)	100	100	100
3.	Tingkat Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat (%)	11.864	12.175	11.341
4.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	85	85	89

No.	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
5.	Prosentase Pegawai yang dilayani (%)	100	100	100
6.	Prosentase Layanan (%)	100	100	100
7.	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur (Kegiatan)	1	1	1

Sumber : BKPSDM Kab. Kuningan, 2025

4. Pengawasan

Kondisi pelayanan di bidang Pengawasan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Pengawasan

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Prosentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	82,01%	72,47	69,43
2.	Prosentase Pelanggaran Pegawai	0,07%	0,12%	0,07%
3.	Jumlah Temuan BPK	330	941	961

Sumber : Inspektorat dan BKPSDM Kab. Kuningan, 2025

5. Sekretariat Dewan

Kondisi pelayanan di Sekretariat Dewan Kabupaten Kuningan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64 Kondisi Pelayanan Penunjang Urusan Aspek Sekretariat Dewan Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Kuningan, 2025

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024, diperoleh skor total sebesar 3,82 dari skor maksimal 5,00, yang mencerminkan tingkat daya saing daerah yang cukup baik namun masih memiliki ruang untuk perbaikan di beberapa sektor. Gambaran pencapaian kinerja selama tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65 Kondisi Aspek Daya Saing Daerah

No.	Aspek Daya Saing Daerah	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Prestasi olahraga tingkat Regional (Porda)	Peringkat	-	-	58
2.	Nilai tukar petani (NTP)	Poin	100,83	113,92	113,86
3.	Indeks desa membangun	Desa	Mandiri: 62 Maju: 183 Berkembang: 116 Tertinggal: 0	Mandiri: 95 Maju: 218 Berkembang: 48 Tertinggal: 0	Mandiri: 134 Maju: 215 Berkembang: 0 Tertinggal: 0
4.	Cakupan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	100%	100%	100%
5.	Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	80,699	82,357	82,352
6.	Kondisi Baik Irigasi	Persen	62,93	63,81	66,97
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,93	71,11	72,05
8.	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	85,00	85,00	80,00
9.	Indeks toleransi beragama	Poin	78,27	74,10	70

Sumber: Data Olah Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, 2025

2.1.5. Evaluasi Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

- Menurunnya persentase kemiskinan pada tahun 2020 menjadi 13,58%. Karena Capaian 12,82% < 13,58% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

- Meningkatnya persentase penduduk di Kabupaten Kuningan yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan mencapai 89,16% pada tahun 2020.

Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

- Capaian penurunan prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada tahun 2020 menjadi 6,3%.
- Menurunnya prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita pada tahun 2020 menjadi 20%. Karena Capaian 7,4% < 20 Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

- Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 menjadi 22 kasus. Karena Capaian 27 kasus > 22 kasus Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2020 menjadi 91%. Karena Capaian 103,3% > 91% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Menurunnya prevalensi Malaria per 1000 orang pada tahun 2020 menjadi 0. Karena Capaian 0 = 0 Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2020 menjadi 70,21%. Karena Capaian 68,70% < 70,21% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

- Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2020 menjadi 99,89%. Karena Capaian 92,89% < 99,89% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2020 menjadi 91,22%. Karena Capaian 98,92% > 91,22% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan
- Meningkatnya capaian rasio Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 menjadi 78,03%.
- Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2020 menjadi 7,41 tahun. Karena Capaian 7,64 > 7,41 target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

- Tercapainya penurunan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan per 1000 penduduk anak perempuan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 menjadi 0,059.
- Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD 30%. Karena Capaian 22% < 30% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

- Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2020 menjadi 88,12%. Karena Capaian 85,92% > 88,12% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

- Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2020 menjadi 93,25%. Karena Capaian 85,47% < 93,25% target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

- Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 99,96% pada tahun 2020 (Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat).

Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

- Meningkatnya persentase tenaga kerja formal mencapai 47,86% pada tahun 2020.
- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka mencapai 15,25% pada tahun 2020. Karena Capaian 14,29% < 15,25% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

- Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur mencapai 2,25% pada tahun 2020.

Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

- Koefisien Gini pada tahun 2020 menjadi <0,38. Karena Capaian 0,361 < 0,38 Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

- Meningkatnya rumah layak huni menjadi 95,85%. Karena Capaian 95,94% > 95,85% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *sudah tercapai* di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80,25% pada tahun 2020. Karena Capaian 72,49% < 80,25% Target

SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

(Target RPJMD: cakupan pelayanan pengelolaan sampah kabupaten)

Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

- Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri), Capaian sebanyak 5 dokumen pada tahun 2020 .

Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

- Membuat daftar kecamatan yang masuk zona bencana alam. Tercatat ada 20 kecamatan yang masuk dalam daerah rawan longsor. Sebanyak 13 kecamatan di antaranya berada dalam kategori pergerakan tanah tinggi. Dari 20 kecamatan itu, tujuh kecamatan masuk pada potensi gerakan tanah menengah, dan 13 kecamatan sisanya masuk potensi gerakan tanah tinggi.
- Mewaspada kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ceremai dan beberapa wilayah lainnya di seputar lereng Gunung.
- Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang menjadi 0. Karena Capaian 8,37 > 0 Target SDGs, artinya target SDGs *belum tercapai* di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

- Kabupaten Kuningan tidak memiliki pantai dan laut.

Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

- Meningkatnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan mencapai 1,94% (2.317,38 hektar) pada tahun 2020.

Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akseskeadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

- Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi pada tahun 2020 tercapai sebanyak 60 orang.
- Meningkatnya Indeks Perilaku Korupsi (IPAK) mencapai 94,54% pada tahun 2020.
- Meningkatnya persentase Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah menjadi 66,95% pada tahun 2020 .
- Keberadaan PERDA/PerBup tentang Konsultasi Publik, dimana telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Informasi, media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) dan Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat,

Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

- Tercapainya penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 sebesar Rp 84,3 Milyar yang mencapai 28% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tercapainya total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB sebesar 2,77 Trilyun.

2.1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Institusi Pelayanan

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. SKM

dilakukan secara berkala minimal satu Tahun sekali. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian kepuasan masyarakat, terdapat 9 (sembilan) unsur penilaian antara lain: (1) persyaratan; (2) prosedur; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/tarif; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetisi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.

Tabel 2.66 Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Sekretariat DPRD	70,929	C (Kurang baik)	50	Manual	1. Alur pelayanan 2. Produk spesifikasi jenis pelayanan	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 2. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama Peningkatan Kecepatan Pelayanan, Peningkatan Kedisiplinan petugas pelayanan, Peningkatan pelayanan dengan penyederhanaan proses dan pemberian pelayanan yang lebih adil.
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	87	B (Baik)	291	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Prosedur pelayanan 3. Perilaku petugas	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.
3.	Dinas Perhubungan	79,38	B (Baik)	100	Online (Aplikasi Typeform)	1. Waktu penyelesaian 2. Kompetensi pegawai	1. Waktu penyelesaian : Penganggaran penambahan sarana dan prasarana. 2. Kompetensi pegawai: a. Mengadakan pengadaan pegawai ASN di Unit-unit pelayanan b. Peningkatan kompetensi pegawai.
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,14	A (Sangat Baik)	2.088	Online (Aplikasi SKM)	1. Waktu penyelesaian	1. Lebih meningkatkan mutu pelayanan. 2. Pentingnya kolaborasi yang lebih baik dan menyeluruh dari level atas sampai bawah.

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
5.	Dinas Lingkungan Hidup	77,78	B (Baik)	100	berbasis Android) Manual (typeform)	2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 1. Waktu penyelesaian 2. Kompetensi Pelaksana 3. Sarana dan prasarana	Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah dapat ditingkatkan secara optimal dan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi dapat dipertahankan secara optimal.
6.	Kecamatan Kuningan	80,9465	B (Baik)	200	Pengisian Kuesioner Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitasi sarana dan prasarana dan penambahan personel ASN di Kantor Kecamatan Kuningan bisa mendapatkan prioritas
7.	Kecamatan Luragung	80,715	B (Baik)	245	Pengisian Kuesioner Manual	1. Waktu penyelesaian pelayanan 2. Prosedur layanan 3. Perilaku pelaksana	1. Mengajukan rencana belanja modal AC untuk tahun depan 2. Mengajukan permohonan kekurangan pegawai ke BKPSDM Kab. Kuningan.
8.	Kecamatan Cimahi	80,615	B (Baik)	210	Pengisian Kuesioner Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku petugas	1. Waktu penyelesaian : a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent.
9.	Kecamatan Cidahu	78,97	B (Baik)	300	Pengisian Kuesioner Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Penanganan pengaduan 4. Waktu penyelesaian	Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Sehubungan kekurangan di Kantor Kecamatan Cidahu lebih kepada Sarana dan Prasarana , maka untuk penganggaran tahun berikutnya kami akan mengusulkan kepada Dinas terkait di Kabupaten Kuningan agar rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cidahu bisa mendapatkan prioritas.

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							Dan untuk penambahan pegawai kantor Kecamatan Cidahu akan berkoordinasi dengan Badan terkait untuk penambahan pegawai.
10.	Kecamatan Lebakwangi	86,29	B (Baik)	100	Pengisian Kuesioner Manual	1. Penanganan pengaduan 2. Sistem, mekanisme, prosedur	Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Namun demikian, sehubungan kekurangan di Kantor Kecamatan Lebakwangi lebih kepada Penanganan Pengaduan dan Sistem, Mekanisme, Prosedur, maka kami di Kantor Kecamatan Lebakwangi belum bisa memastikan Rencana Tindak Lanjut dari hasil analisa tersebut.
11.	Kecamatan Japara	77,62	B (Baik)	410	Pengisian Kuesioner Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 3. Perilaku petugas	1. Sarana dan prasarana: a. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai b. Penambahan SDM 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Adanya tempat pengaduan khusus 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan
12.	Kecamatan Mandirancan	84,45	B (Baik)	120	Pengisian Kuesioner Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan prasarana	1. Peningkatan sosialisasi registrasi "online". 2. Penyediaan printer KTP.
13.	Kecamatan Pasawahan	78,78	B (Baik)	200	Pengisian Kuesioner Manual	1. Penanganan pengaduan 2. Sarana dan prasarana	1. Memaksimalkan penggunaan aplikasi LAPOR 2. Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitasi sarana dan prasarana bisa mendapatkan prioritas.
14.	Dinas Sosial	81,12	B (Baik)	697	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku petugas	1. Waktu penyelesaian: Pengembangan pembuatan Aplikasi, sosialisasi operator Desa di Kecamatan 2. Prosedur pelayanan: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait aplikasi dan petugas layanan
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	81,38	B (Baik)	234	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online"

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
						3. Perilaku Petugas	b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Somplifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,945	B (Baik)	100	Manual	1. Persyaratan; 2. Kemudahan Prosedur Pelayanan; 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan; 4. Kesesuaian Produk Layanan; 5. Sarana dan Prasarana.	1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama Peningkatan Kecepatan Pelayanan, Peningkatan Kedisiplinan petugas pelayanan, Peningkatan pelayanandengan penyederhanaan proses dan pemberian pelayanan yang lebih adil; 2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon, SMS dan media on line (WEB); 3. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: a. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas; b. Memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan. 4. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							serta mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dalam bentuk insentif khusus dan juga sanksi bagi petugas yang melanggar aturan disiplin sebagai PNS; 5. Kegiatan penyusunan IKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 6. Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring pelanggan dalam pengisian: Kondisi pelayanan: jumlah antrian dan kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati.
17.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	87,04	B (Baik)	164	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 3. Persyaratan 4. Produk layanan	1. Lebih meningkatkan mutu pelayanan. 2. Pentingnya kolaborasi yang lebih baik dan menyeluruh dari level atas sampai bawah.
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87	B (Baik)	200	Manual	1. Penanganan pengaduan layanan 2. Biaya/tarif 3. Sarana dan Prasarana 4. Waktu penyelesaian 5. Perilaku pelaksana	1. Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah 2. Untuk proses pelayanan kepegawaian lebih ditingkatkan dan dipercepat agar tidak bolak-balik
19.	Sekretariat Daerah	75,295	C (Kurang baik)	615	Manual	1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 2. Biaya/tarif	1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: a. Diadakannya tempat pengaduan khusus (Media Whatsapp, email, nomor telepon/SMS)

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
						3. Waktu penyelesaian 4. Persyaratan 5. Perilaku pelaksana 6. Sarana prasarana	b. Memaksimalkan Website resmi Setda sebagai sarana pengaduan 2. Biaya/tarif: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan 3. Waktu penyelesaian: Memonitoring dan mengevaluasi SOP pelayanan 4. Persyaratan: Memonitoring dan mengevaluasi persyaratan dalam setiap layanan 5. Perilaku pelaksana: Meningkatkan SDM dalam pelayanan 6. Sarana prasarana: Mengadakan sarana dan prasarana yang belum tersedia, serta mengoptimalkan sarpras yang sudah ada
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	82,69	B (Baik)	40	Manual	Waktu pelayanan	Waktu dalam pemberian pelayanan agar lebih disingkat dan sesuai dengan SOP yang telah ada.
21.	Dinas Perikanan dan Peternakan	74,07	C (Kurang baik)	450	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Sompifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	80,03	B (Baik)	155	Database Google Form	1. Sarana dan prasarana 2. Perilaku pelaksana	1. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung fungsi pelayanan publik 2. Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
23.	Kecamatan Kramatmulya	79,295	B (Baik)	250	Manual	Sarana dan prasarana	Penganggaran tahun berikutnya kami akan mengusulkan kepada Dinas terkait di Kabupaten Kramatmulya agar pengadaan dan

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kramatmulya bisa mendapatkan prioritas.
24.	Kecamatan Cigugur	81,13	B (Baik)	260	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Penanganan pengaduan layanan 3. Kompetensi petugas pelayanan 4. Persyaratan 5. Waktu penyelesaian	1. Pengadaan sarana dan prasarana 2. Membuka hotline pelayanan 3. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas 4. Pengadaan informasi tentang persyaratan pelayanan 5. Peningkatan keterampilan karyawan.
25.	Kecamatan Cibingbin	77,19	B (Baik)	100	Manual	1. Penanganan pengaduan 2. Perilaku pelaksana	1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: - Tersedianya layanan aduan masyarakat secara <i>realtime</i> di Kecamatan 2. Perilaku pelaksana: - Memberikan pelatihan pelayanan prima, Bimtek, kursus
26.	Kecamatan Ciwaru	78,22	B (Baik)	200	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Produk/hasil layanan	1. Pengadaan sarana dan prasarana 2. Meningkatkan SDM dengan memberi pelatihan, Bimtek
27.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,67	B (Baik)	156	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Sompifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
28.	Kecamatan Karangancana	81,85	B (Baik)	184	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "online". - Pembuatan Aplikasi layanan <i>online</i> .

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							2. Prosedur pelayanan: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku petugas: - Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>.
29.	Kecamatan Garawangi	79,81	B (Baik)	350	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "<i>online</i>". - Penambahan SDM. 2. Prosedur pelayanan: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku petugas: Memberika pelatihan.
30.	Kecamatan Maleber	80,8	B (Baik)	200	Manual	Sistem, mekanisme dan prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur: - Sosialisasi Registrasi "<i>online</i>" kepada masyarakat; - Pembangunan Fasilitas Pelayanan <i>online</i> melalui Smartphone bagi masyarakat; - Pelatihan khusus kepada pegawai terkait pelayanan berbasis <i>online</i>.
31.	Kecamatan Ciawigebang	78,99	B (Baik)	250	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Prosedur Pelayanan 3. Perilaku Petugas	1. Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "<i>online</i>". - Penambahan SDM. 2. Prosedur pelayanan: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 3. Perilaku petugas: Memberika pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i> .
32.	Kecamatan Sindangagung	85,08	B (Baik)	130	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Produk/hasil layanan 3. Penanganan pengaduan	1. Waktu penyelesaian: - Peningkatan sosialisasi registrasi "<i>online</i>". - Penambahan SDM 2. Produk/hasil layanan: Mengadakan pelatihan, Bimtek

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							3. Penangan pengaduan: Tersedianya layanan aduan masyarakat secara <i>realtime</i> di Kecamatan
33.	Kecamatan Darma	78,52	B (Baik)	150	Manual	Sarana dan prasarana	1. Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitas sarana dan prasarana bisa mendapatkan prioritas 2. Penambahan pegawai.
34.	Kecamatan Cilimus	85,6	B (Baik)	245	Manual	Sarana dan prasarana	Mengusulkan kepada Dinas terkait agar rehabilitas sarana dan prasarana bisa mendapatkan prioritas
35.	Kecamatan Cigandamekar	82,235	B (Baik)	200	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Sarana prasarana 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 4. Biaya/tarif 5. Penanganan pengaduan, saran	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi online b. Integrasi secara online terhadap kebutuhan pelayanan Masyarakat dengan Dinas/Instansi di Kab. Kuningan 2. Sarana prasarana: Penyediaan printer KTP 3. Sistem, mekanisme dan prosedur: a. Sosialisasi registrasi online kepada Masyarakat b. Pembangunan fasilitas pelayanan online melalui smartphone bagi Masyarakat c. Pelatihan khusus kepada pegawai terkait pelayanan berbasis online 4. Biaya/tarif: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan 5. Penanganan pengaduan, saran: Tersedianya layanan aduan Masyarakat secara <i>realtime</i> di kecamatan.
36.	Kecamatan Jalaksana	78,22	B (Baik)	200	Manual	1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 2. Sarana dan prasarana 3. Produk spesifikasi jenis pelayanan	Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah 10 hasilnya. Namun demikian, sehubungan kekurangan yang ada di Kantor Kecamatan Jalaksana lebih kepada Sarana dan Prasarana bersifat fisik masih belum mendapat prioritas karena keterbatasan anggaran, maka kami di Kantor Kecamatan Jalaksana belum bisa

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							memastikan Rencana Tindak Lanjut dari hasil 16nalisa tersebut.
37.	Kecamatan Subang	78,68	B (Baik)	140	Manual	1. Produk spesifikasi jenis pelayanan 2. Sarana dan prasarana	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perangkat kantor kecamatan subang tentang pengetahuan mengenai tata naskah dinas dan pengetahuan mengenai regulasi pemerintahan
38.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	84,13	B (Baik)	73	Database Google Form	1. Waktu penyelesaian 2. Kemudahan prosedur	1. Perlu dilakukan pembinaan terhadap petugas yang melayani agar lebih ramah dan jelas dalam memberikan prosedur pelayanan. 2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan monitoring terhadap program yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan di Desa.
39.	Kecamatan Hantara	85,08	B (Baik)	70	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Produk/hasil layanan 3. Penanganan pengaduan	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi online b. Integrasi secara online terhadap kebutuhan pelayanan Masyarakat dengan Dinas/Instansi di Kab. Kuningan 2. Produk/hasil layanan: Mengadakan pelatihan, Bimtek 3. Penangan pengaduan: Tersedianya layanan aduan masyarakat secara <i>realtime</i> di Kecamatan
40.	UPTD Puskesmas Cigandamekar	81,1	B (Baik)	77	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Waktu pelayanan 3. Produk layanan	1. Sarana dan prasarana: a. Dibuat tim pengelola sarana dan prasarana Puskesmas yang solid dan terkoordinir dengan baik b. Menunjuk 1 (satu) orang petugas disetiap unit/ruang/bagian tersebut (koordinator ruangan) untuk merawat sarana dan prasarana c. Membuat SOP perawatan sarana dan prasarana sebelum dan setelah pelayanan d. Usulan peningkatan kapasitas pengelola barang

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							2. Waktu pelayanan: Menambah personel di unit dengan waktu tunggu relative lama (unit pendaftaran dan rekam medis) 3. Produk layanan: - Buat media sosialisasi tentang produk layanan yang up to date berupa neon box, banner, leaflet, spanduk, flyer, tv spot atau artikel di media social - Melakukan sosialisasi tentang produk layanan ke semua lini Masyarakat, termasuk para stakeholder.
41.	UPTD Puskesmas Cilimus	85,37	B (Baik)	357	Manual	- Sarana prasarana - Prosedur - Perilaku pelaksana	- Waktu penyelesaian: Pembuatan/perbaikan petunjuk arah agar lebih dimengerti pasien. - Prosedur: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. - Perilaku pelaksana: Memberikan pembinaan kepada karyawan.
42.	UPTD Puskesmas Jalaksana	81,935	B (Baik)	750	Manual	- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - Waktu pelayanan	- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: - Menambah petugas pendaftaran dan informasi - Membuat Google form untuk pengaduan - Menyediakan kotak saran di setiap unit pelayanan - Mengingatkan kepada pasien untuk memberikan saran atau masukan setelah diberikan pelayanan. - Waktu pelayanan: - Mengefektifkan waktu pelayanan melalui pembaharuan rekam medik elektronik - Menambah petugas rekam medik.
43.	Dinas Kesehatan	81,86	B (Baik)	92	Manual	- Penanganan, pengaduan, saran dan masukan - Sarana dan prasarana	- Yang saat ini sudah kami lakukan pada tanggal 29 Desember 2023 adalah : - Penambahan prasarana lemari untuk penyimpanan ramuan sebanyak 2 buah, penyimpanan prasarana baby spa 1 buah

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							b. Penambahan prasarana meja untuk pendaftaran sebanyak 1 buah c. Penambahan prasarana kursi tunggu pasien stainles (isi 4) d. Penampahan kursi untuk petugas sebayak 2 buah. 2. Rencana yang akan kami lakukan : a. Membuat SOP pelayanan Griya Sehat b. Membuat Alur pendaftaran dan alur pelayanan c. Membuat banner dan leaflet terkait penambahan jadwal buka Griya Sehat yang asalnya 2 hari/ minggu menjadi 3 hari/ minggu) d. Membuat kotak saran, masukan dan pengaduan e. Menambahkan nomor kontak (Whatsapp) sebagai nomor saran, masukan dan pengaduan
44.	Satuan Polisi Pamong Praja	77,256	B (Baik)	50	Manual	1. Persyaratan 2. Waktu penyelesaian pelayanan 3. Kompetensi pelaksanaan 4. Sarana dan prasarana	1. Kenyamanan lingkungan: Pemeliharaan Gedung dan kantor
45.	UPTD Puskesmas Lamapayung	89,54	A (Sangat Baik)	341	Manual	Sistem mekanisme dan prosedur	Meningkatkan system mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pasien secara maksimal.
46.	UPTD Puskesmas Subang	86,24	B (Baik)	240	Manual	1. Prosedur pelayanan 2. Produk layanan	1. Prosedur pelayanan: a. Buat media sosialisasi tentang system, mekanisme dan prosedur yang up to date berupa: banner, leaflet, tv spot atau artikrl di media sosial. b. Melakukan sosialisasi tentang system, mekanisme dan prosedur pelayanan kesemua lini masyarakat, termasuk para stakeholder terkait melalui kegiatan pertemuan yang ada. 2. Produk layanan:

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							a. Dibuat tim pelayanan diluar Gedung puskesmas yang solid dan terkoordinir dengan baik b. Membuat inovasi pelayanan luar Gedung c. Membuat SOP kegiatan inovasi pelayanan luar gedung
47.	UPTD Puskesmas NUSAHERANG	82,87	B (Baik)	722	Manual	Pengaduan	1. Pembuatan kotak saran 2. Media pengaduan melalui telekomunikasi
48.	UPTD Puskesmas Cimahi	81,17	B (Baik)	379	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Waktu layanan	1. Sarana dan prasarana: a. Pembentukan tim sarpras b. Penambahan dan peningkatan sarpras 2. Waktu layanan: a. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis
49.	UPTD Puskesmas Garawangi	84,03	B (Baik)	740	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Kompetensi pelaksana	1. Sarana dan prasarana: Disesuaikan dengan RAK yang sudah ada 2. Kompetensi pelaksana: Untuk petugas baru melaksanakan orientasi dan latihan ke setiap unit layanan secara intensif.
50.	UPTD Puskesmas Sindangagung	86,535	B (Baik)	776	Manual	1. Waktu Pelayanan 2. Perilaku layanan	1. Waktu Pelayanan: Penyusunan Sistematis/Alur Pelayanan yang lebih efektif 2. Perilaku layanan: Melakukan Pembinaan terhadap pegawai secara berkala
51.	UPTD Puskesmas Kuningan	78,12	B (Baik)	750	Manual	1. Persyaratan 2. Waktu pelayanan dan prosedur pelayanan	1. Persyaratan: Lakukan sosialisasi dan simplifikasi aturan terhadap masyarakat secara terus menerus baik melalui media sosial maupun lintas sektor. 2. Waktu pelayanan dan prosedur pelayanan: Meningkatkan kedisiplinan pegawai puskesmas Kuningan, melakukan monitoring secara periodic untuk setiap proses yang dilakukan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang perlu perbaikan

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pelatihan ERM kepada seluruh pegawai.
52.	UPTD Puskesmas Selajambe	90,79	A (Sangat Baik)	258	Manual	Produk layanan	1. Melakukan sosialisasi tentang produk spesifikasi jenis layanan 2. Membuat media sosialisasi tentang produk spesifikasi jenis pelayanan berupa banner yang dipasang di ruang informasi
53.	UPTD Puskesmas Windusengkahan	80,5	B (Baik)	300	Manual	1. Sarana prasarana 2. Waktu penyelesaian 3. Produk layanan	1. Sarana prasarana: a. Pengajuan sarpras b. Lakukan pemantauan/monitoring sarpras 2. Waktu penyelesaian: Kepatuhan pengorganisasian penyimpanan rekam medis/perubahan pencarian dan penyimpanan rekam medis secara online 3. Produk layanan: Pengajuan media penunjang/sarpras.
54.	UPTD Puskesmas Ciawigebang	82,57	B (Baik)	335	Manual	1. Sarana prasarana 2. Waktu penyelesaian 3. Produk layanan	1. Sarana prasarana: Pengajuan perbaikan dan atau kelengkapan sarpras 2. Waktu penyelesaian: Penerapan RME 3. Produk layanan: Pembuatan jadwal difokuskan oleh pihak manajemen
55.	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	83,785	B (Baik)	245	Manual	1. Persyaratan 2. Sarana dan prasarana 3. Biaya/tarif 4. Pengaduan 5. Prosedur	1. Adanya penambahan jenis pemeriksaan untuk klinik yaitu pemeriksaan elektrolit 2. Bisa dilayani dengan menggunakan kartu BPJS
56.	UPTD Puskesmas Cilebak	81,83	B (Baik)	357	Manual	Produk layanan	1. Melakukan sosialisasi tentang produk spesifikasi jenis layanan 2. Membuat media sosialisasi tentang produk spesifikasi jenis pelayanan berupa banner yang dipasang di ruang informasi
57.	UPTD Puskesmas Cidahu	82,45	B (Baik)	740	Manual	1. Produk layanan 2. Penanganan pengaduan	1. Produk layanan: Melakukan sosialisasi mengenai maklumat pelayanan melalui forum-forum resmi

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							ataupun tidak resmi dengan sasaran semua masyarakat. 2. Penanganan pengaduan: Melakukan sosialisasi mengenai maklumat pelayanan melalui pertemuan-pertemuan untuk membahas tindak lanjut dari masukan pasien yang berkunjung
58.	UPTD Puskesmas Cibingbin	81,75	B (Baik)	375	Manual	Produk layanan	Melakukan sosialisasi mengenai maklumat pelayanan melalui forum-forum resmi ataupun tidak resmi dengan sasaran semua masyarakat
59.	UPTD Puskesmas Linggarjati	80,805	B (Baik)	729	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Layanan pengaduan, masukan dan saran 3. Sarana prasarana	1. Waktu penyelesaian: a. Mengaktifkan Kembali mesin antrian b. Menambah petugas pelayanan 2. Layanan pengaduan, masukan dan saran: Mengaktifkan kotak saran, dan akun sosial media Puskesmas sehingga masyarakat dapat langsung melakukan aduan, saran, dan masukan 3. Sarana prasarana: Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan layanan
60.	UPTD Puskesmas Ciwaru	78,16	B (Baik)	375	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Pengaduan, saran dan masukan 3. Kompetensi pelaksana	1. Sarana dan prasarana: Lakukan movev terhadap kelengkapan dan perawatan sarpras 2. Pengaduan, saran dan masukan: Peningkatan sosialisasi penyampaian pengaduan saran dan masukan 3. Kompetensi pelaksana: Pengusulan pemenuhan tenaga dokter gigi atau ATLM
61.	UPTD Puskesmas Cibeureum	77,852	B (Baik)	364	Manual	1. Persyaratan pelayanan 2. Pemahaman prosedur layanan 3. Waktu layanan	1. Persyaratan pelayanan: Sosialisasi jenis layanan Puskesmas baik dalam Gedung maupun luar gedung 2. Pemahaman prosedur layanan: Pengaktifan CS dan sosialisasi layanan 3. Waktu layanan: a. Melakukan sosialisasi jenis-jenis layanan yang ada

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
							b. Penambahan loket layanan dan adanya petugas CS
62.	UPTD Puskesmas Kalimanggis	81,79	B (Baik)	703	Manual	Penanganan aduan	Perbaikan dalam manajemen pelayanan
63.	UPTD Puskesmas Mandirancan	88,87	A (Sangat Baik)	750	Manual	1. Sarana dan prasarana 2. Perilaku petugas	1. Sarana dan prasarana: a. Dibuat tim pengelola sarana dan prasarana Puskesmas yang solid dan terkoordinir dengan baik b. Membuat SOP perawatan sarpras sebelum dan setelah pelayanan c. Usulan peningkatan kapasitas pengelola barang d. Terjadwalnya Kalibrasi pengajuan barang 2. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent
64.	UPTD Puskesmas Manggari	87,7	B (Baik)	387	Manual	1. Produk layanan 2. Waktu penyelesaian	1. Produk layanan: a. Membuat usulan untuk perbaikan Dental Unit b. Membuat usulan agar melengkapi pemeriksaan di laboratorium 2. Waktu penyelesaian: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap Waktu pelayanan
65.	UPTD Puskesmas Darma	84,03	B (Baik)	357	Manual	Waktu pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan terutama penambahan petugas di nursing center
66.	UPTD Puskesmas Sukamulya	80,7	B (Baik)	163	Manual	Waktu pelayanan	a. Pemenuhan jumlah petugas tiap unit sesuai standar kebutuhan b. Melaksanakan evaluasi waktu pelayanan tiap unit
67.	UPTD Puskesmas Kadugede	81,215	B (Baik)	738	Manual	1. Persyaratan pelayanan 2. Prosedur pelayanan	1. Persyaratan pelayanan: Peningkatan sosialisasi terkait persyaratan pelayanan 2. Prosedur pelayanan: Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
68.	UPTD Puskesmas Pasawahan	78,15	B (Baik)	734	Manual	1. Waktu Penyelesaian 2. Sarana dan Prasarana	Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama pada unsur waktu penyelesaian dan unsur sarana dan prasarana. Serta memperbaiki sistem penanganan pengaduan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga seluruh pengaduan dapat diatasi dengan cepat dan transparan.
69.	UPTD Puskesmas Luragung	81,05	B (Baik)	900	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Prosedur pelayanan 3. Perilaku petugas	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis 3. Perilaku petugas: Memberikan pelatihan khusus terkait service layanan
70.	UPTD Puskesmas Karangancana	82,42	B (Baik)	383	Manual	1. Waktu penyelesaian 2. Prosedur pelayanan	1. Waktu penyelesaian: a. Peningkatan sosialisasi registrasi "online" b. Penambahan loket layanan 2. Prosedur pelayanan: a. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan b. Simplifikasi proses bisnis
71.	Kelurahan Cipari	83,94	B (Baik)	56	Manual	4. Sistem, mekanisme dan prosedur 5. Biaya/tarif 6. Waktu penyelesaian pelayanan dan produk spesifikasi jenis pelayanan	3. Sistem, mekanisme dan prosedur: - Sosialisasi Registrasi "online" kepada masyarakat; - Pembangunan Fasilitas Pelayanan <i>online</i> melalui Smartphone bagi masyarakat; - Pelatihan khusus kepada pegawai terkait pelayanan berbasis <i>online</i> .

No.	PD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut
						7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 3.	4. Biaya/tarif: - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan. 5. Waktu penyelesaian pelayanan dan produk spesifikasi jenis pelayanan: - Integrasi secara <i>online</i> terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat dengan Dinas/Instansi di Kabupaten Kuningan. 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: 3. Tersedianya layanan aduan masyarakat secara <i>realtime</i> di Kelurahan.
	Rata-rata	81,727	B (Baik)				

Dari hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dilakukan terhadap 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah, 29 (dua puluh sembilan) Unit, dan 1 (satu) Kelurahan yang disurvei rata-rata masyarakat merasa Puas atau Baik dengan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Diketahui 1 (satu) Perangkat Daerah dan 3 (tiga) Unit memperoleh penilaian SKM hasil sangat baik, 64 (enam puluh empat) terdiri dari Perangkat Daerah, Unit, dan Kelurahan memperoleh penilaian SKM hasil baik, serta 3 (tiga) Perangkat Daerah memperoleh penilaian SKM dengan hasil kurang baik. Dari hasil tersebut maka Nilai SKM sebesar 81,727 dengan kategori Baik, namun terjadi penurunan yang signifikan dari Tahun 2022 yang memiliki nilai SKM 84,07. Hasil tersebut diharapkan Pemerintah Daerah ke depan akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan telah disusunnya rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

2.1.7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yaitu:

A. Urusan Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan dasar
- b. Pendidikan kesetaraan
- c. Pendidikan anak usia dini

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Pendidikan Tahun 2024.

Tabel 2.67 Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini	96,07 %
2 .	Pendidikan Dasar	97,00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan	95,46 %
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		96,15 % (Tuntas Utama)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata indeks pencapaian sebesar 96,15% (kategori Tuntas Utama). Indikator Pendidikan Dasar Usia Dini mencapai 96,07%, Pendidikan Dasar 97,00%, dan Pendidikan Kesetaraan 95,46%, yang mencerminkan tingginya akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar di daerah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus / HIV*)

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Kesehatan pada Tahun 2024.

Tabel 2.68 Capaian SPM Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69,15 %
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	74,39 %
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97,97 %
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	83,16 %
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	96,39 %
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	64,23 %
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	92,44 %
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87,51 %
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	84,23 %
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	97,29 %
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	86,64 %
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	80,55 %
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		82,83 % (TUNTAS Madya)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor kesehatan tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan rata-rata mencapai 82,83%, tergolong dalam kategori Tuntas Madya. Pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir (97,97%) dan orang dengan gangguan jiwa berat (97,29%) menunjukkan tingkat pencapaian tertinggi, diikuti oleh pelayanan pada usia pendidikan dasar (96,39%) dan usia lanjut (92,44%). Sementara itu, pelayanan kesehatan pada ibu hamil (69,15%) dan usia produktif (64,23%) masih menunjukkan pencapaian yang relatif rendah dibandingkan indikator lainnya. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan kemajuan dalam penyediaan layanan kesehatan dasar, namun perlu adanya peningkatan fokus pada kelompok ibu hamil dan usia produktif untuk mencapai target pelayanan yang lebih optimal.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum adalah:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang pekerjaan umum Tahun 2024.

Tabel 2.69 Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (2024)
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100.00 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	90,49 %
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		95,24 % (Tuntas Utama)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor Pekerjaan Umum tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan indeks pencapaian keseluruhan sebesar 95,24%, yang masuk dalam kategori Tuntas Utama. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berhasil mencapai 100%, menandakan pemenuhan layanan air bersih yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, pelayanan pengolahan air limbah domestik juga menunjukkan pencapaian tinggi sebesar 90,49%, yang mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan lingkungan dan sanitasi.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota. Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang perumahan dan permukiman Tahun 2024.

Tabel 2.70 Capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (2024)
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.00 %
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		100,00 % (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Disajikan pada tabel diatas bahwa capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 berada pada kategori “Tuntas Paripurna” atau sebesar 100%.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan cakupan indikator SPM Satpol PP menjadi :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

Tabel 2.71 Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100 %
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		100,00 % (Tuntas Paripurna)
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100.00 %
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		100,00 % (Tuntas Paripurna)
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100.00 %
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		100.00 % (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Disajikan pada tabel diatas bahwa capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 sudah sangat baik, dengan mencapai kategori “Tuntas Paripurna”.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan meliputi 5 (Lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten.

Berikut ini merupakan Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang sosia Kabupaten Kuningan Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.72 Capaian SPM Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian 2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100.00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	100.00 %
5	Kabupaten/Kota	100.00 %
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		100.00 % (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Disajikan pada tabel diatas bahwa capaian SPM Sosial Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 mencapai kategori “Tuntas Paripurna” atau sebesar 100%.

Tabel 2.73 Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2022 – 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	2022		2023		2024	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,16	69,45	70,16	69,66	70,99	70,86-71,40	71,56
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,32	0,60	1,04	0,60	1,05	1,28	1,04
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,76	13,06	12,76	12,74	12,12	11,12-12,72	11,88
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,81	11,01	9,81	10,14	9,49	9,04-11,21	7,78
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,53	1,90 - 3,00	5,53	2,00-3,45	5,25	0,19-7,20	5,61
6	Indeks Gini	Poin	0,345	<0,38	0,345	<0,38	0,351	0,336	0,372
7	Pendapatan per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	24,68	24,68	24,83	-	27,08	25,22	29,30

Sumber: BAPPEDA Kab. Kuningan, BPS Kab. Kuningan, 2025

2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dalam kerangka RPD

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam kerangka RPD Tahun 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Kuningan memuat 5 (lima) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi pembangunan dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPD Tahun 2024-2026, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2024 dan evaluasi terhadap capaian indikator. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi pembangunan Kabupaten Kuningan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.74 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Daerah RPD Kab. Kuningan 2024 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target				Kondisi Akhir RPD
					2024	Capaian	2025	2026	
T1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah		Indeks Gini	Poin	0,336	0,379	0,332	0,328	0,328
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,764	0,7936	0,783	0,793	0,793
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	11,12-12,72	11,88	10,82-12,86	10,68-12,98	10,68-12,98
			Pengeluaran per kapita	Ribu	9.933	10.418	10.071	10.210	10.210
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	97,54	96,42	97,54	97,94	97,94
T2	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,28	71,56	71,79	72,31	72,31
		Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	7,90	12,79	12,89	12,89
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8	12,27	8,09	8,18	8,18
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,6	75,22	74,84	75,08	75,08
			Prevalensi Stunting	Persen	16	22,7	15	14	14
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,49	87,49	87,75	88,01	88,01
		Terkendalinya Pertumbuhan dan	Laju Pertumbuhan	Persen	1,28	1,04	1,26	1,24	1,24

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target				Kondisi Akhir RPD
					2024	Capaian	2025	2026	
		Distribusi Penduduk	Penduduk						
T3	Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,46	3,82	3,51	3,56	3,56
			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	130	105,27	129	128	128
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,98	72,05	66,28	66,58	66,58
		Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon dan Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	129	141,55	128	128	128
		Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Pelayanan Infrastruktur	Tingkat Konektivitas Tingkat kemantapan jalan	Persen	86	82,352	86.8	87,79	87,79
T4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,16-5,66	5,61	5,18-5,71	5,66-5,76	5,66-5,76
		Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang Disertai dengan Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51-9,21	7,78	8,32-9,05	8,13-8,89	8,13-8,89
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi	Kontribusi Sektor Penyediaan	Persen	1,75-1,92	1,95	1,75-1,94	1,75-1,96	1,75-1,96

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target				Kondisi Akhir RPD
					2024	Capaian	2025	2026	
		Makan dan Minum	Akomodasi Makan dan Minum PDRB /Pariwisata						
		Meningkatnya Pertumbuhan Perindustrian Perdagangan	Laju pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,31	5,83	2,32	2,34	2,34
			Laju Pertumbuhan sektor perdagangan	persen	4,83		4,84	4,85	4,85
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,91	113,86	105,22	105,52	105,52
			Kontribusi Sektor Pertanian	Persen	7,93		8,21	8,36	8,36
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87,01	93,8	88,04	89,03	89,03
T5	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	BB	B	B	B
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,7	82,23	86,4	87,1	87,1
		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	BB	B	B	B
		Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45,03	29,82	53,76	62,49	62,49

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, 2025

Tabel 2.75 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Sampai Tahun 2024 (Dokumen RPD)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,53	-1,11 – 6,04	5,61	-1,50 – 5,66	-1,88 – 5,27	-1,88 – 5,27	BPS
2	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp. (juta)	18.450.340	18,615,813 – 20.580.520	20,51	19.115.365 - 21490552	19.619.790 – 22.395.712	19.619.790 – 22.395.712	BPS
3	Indeks Gini	Poin	0,345	0,336	0,372	0,332	0,328	0,328	BPS
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,76	11,12-12,72	11,88	10,82-12,86	10,68-12,98	10,68-12,98	BPS
6	Garis Kemiskinan	Rp	371.665	374.473 – 414.273	420.867	382.600 – 429.041	391.138 – 443.398	391.138 – 443.398	BPS
8	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional (PPMI)/Miskin Ekstrim	persen	10,83	9,02	8.80	8.92	8.12	8.12	Dinsos
9	Indeks Kedalaman Kemiskinan	persen	2,14	1,09 – 2,52	2,02	1,06 – 2,51	1,04 – 2,49	1,04 – 2,49	BPS
10	IPM :	Poin	70,16	70,86-71,40	71,56	71,31-71,85	71,76-72,52	70,86-71,40	BPS
	- Indeks Pendidikan	Poin	60,27	61,68-61,96	61,89	61,89-62,66	62,64-63,28	62,64-63,28	BPS
	- Indeks Kesehatan	Persen	83,12	83,78-84,24	82,74	84,14-84,70	84,62-84,83	84,62-84,83	BPS
	- Indeks Pengeluaran	Poin	68,95	69,72-70,24	71,39	70,18-70,68	70,62-70,98	70,62-70,98	BPS
11	Angka Harapan Lama sekolah / EYS	Tahun	12,24	12,68	12,27	12,79	12,89	12,89	Disdikbud
12	Indeks Harapan Lama sekolah	Poin	68	70,47	70,47	71,05	71,64	71,64	Disdikbud
13	Angka Rata-rata Lama Sekolah / MYS	Tahun	7,88	8	7,90	8,09	8,18	8,18	Disdikbud
14	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Poin	52,53	53,32	53,32	53,94	54,57	54,57	Disdikbud
15	Umur harapan hidup (UHH)	Tahun	74,03	74,6	75,22	74,84	75,08	75,08	BPS
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	55	65	79,83	70	75	75	Dinkes
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	61,8	62,57-65,03	65,84	63,54-66,02	64,51-67,01	64,51-67,01	BPS / Bappeda
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,81	9,04-11,21	7,78	9,26-11,49	9,47-11,77	9,47-11,77	BPS / Bappeda
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	12,93	15,49	10,91	15,94	16,31	16,31	Bappenda
20	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,89	1,75 – 1,92	1,95	1,75 – 1,94	1,75 – 1,96	1,75 – 1,96	BPS/Bappeda
21	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,32**	1,28	1,04	1,26	1,24	1,24	BPS / Bappeda
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,53	0,19-7,20	5,61	-7,06	-7,12	-7,12	BPS / Bappeda
23	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	24,68	25,22		25,76	26,3	26,3	BPS / Bappeda
24	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Ribu (Rp)	9.620	9.933	10.418	10.071	10.210	10.210	BPS / Bappeda
25	Rasio Penduduk yang Bekerja / Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	86,07	86,5	92,22	86,75	87	87	Disnakertrans
26	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	542.782	552.782	618.129	562.782	572.782	572.782	Disnakertrans
27	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	6	10	14,97	15	20	20	Diskatan
28	Angka Kematian Bayi (/1000)	Poin/ 1000	7,1	6.32	8,46	6,31	6,3	6,3	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
		Kelahiran							
28	Angka Kematian Ibu (/ 100.000)	Kasus	24	23	13	22	22	22	Dinkes
29	Persentase Stunting pada balita	Persen	19,4	16	7,9	15	14	14	Dinkes
30	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	98,41	94	95	95	Dinkes
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,17	87,02	88	87,04	87,06	87,06	BPS
32	Persentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan/ODF	Persen	66,49	80	100	83	85	85	Dinkes
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.211.684*	1.195.965-1.580.871	1.161.901	1.260.149-1.655.840	1.324.436-1.730.706	1.324.436-1.730.706	BPS/Bappeda
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,29	104,91	113,86	105,22	105,52	105,52	DKPP
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (cek data)	Persen	44,79*	28,40-62,57	45,98	26,22-64,67	24,25-66,56	24,25-66,56	BPS/Bappeda
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,7446	0,764	0,7936	0,783	0,793	0,793	DPMD
9	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	131,13*	130	141,55	129	128	128	BPBD
10	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,68	0,7	0,68	0,71	0,72	0,72	BPBD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85	85,7	82,23	86,4	87,1	87,1	Bappeda
12	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Kuningan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan untuk menggunakan produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil Produk Dalam Negeri (PDN).	Persen	40	50	40	55	60	60	DKUKMPERIND AG
13	Nilai SAKIP	level / skor	B	B	B	B	BB	BB	Bag. Org / Inspektorat
14	Indeks Reformasi Birokrasi	level / skor	CC	CC	BB	CC	B	B	Bag. Org / BKPSDM
15	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	74,75	74	76,5	75	76	76	Satpol PP, BPBD
16	Opini BPK	Kategori / Opini	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
17	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Skor	3,02	1,30 – 1,44	3,82	1,45 – 1,60	1,61 – 1,95	1,61 – 1,95	Bappeda
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	PENDIDIKAN :								Disdikbud
1	APK PAUD usia 5-6 tahun	Persen	93,58	93,98	98,05	94,25	94,6	94,6	
2	Jumlah lembaga PAUD	Lembaga	910	920	933	925	930	930	
3	Jumlah PAUD Holistik integrative	Lembaga	100	150	200	200	300	300	
4	APK SD/Paket A	Persen	100,01	100,02	100	100,02	100,03	100,03	
5	APM SD/Paket A	Persen	99,9	99,91	99,91	99,92	99,92	99,92	
6	APK SMP/Paket B	Persen	99,35	99,52	100	99,65	99,8	99,8	
7	APM SMP/Paket B	Persen	93,25	93,65	97,5	93,95	94,05	94,05	
8	Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi	Lembaga	50	55	85	57	60	60	
9	Angka Partisipasi usia 7-18 tahun pendidikan kesetaraan	Persen	95,15	95,4	96,1	95,55	95,7	95,7	
10	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,81	1,9	89,09	1,9	1,9	1,9	
11	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,7	1,8	85,31	1,8	1,8	1,8	
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,84	1,9	79,68	1,9	1,9	1,9	
13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,73	1,8	75,64	1,8	1,8	1,8	
14	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi Minimal B	Persen	36,06	36,7	40,7	37,05	37,65	37,65	
15	Persentase SD berakreditasi minimal B	Persen	97,56	97,6	97,8	97,65	97,98	97,98	
16	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Persen	84,82	85,1	92,5	85,55	85,8	85,8	
17	Guru PAUD professional	Persen	23,37	23,5	67,85	23,87	24,17	24,17	
18	Guru Profesional SD	Persen	59,08	59,3	71,77	59,65	59,9	59,9	
19	Guru Profesional SMP	Persen	58,98	59,25	68,3	59,85	60,05	60,05	
20	Persentase kepala sekolah profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase Guru Layak PAUD	Persen	74,08	74,28	76,94	74,75	74,94	74,94	
23	Persentase Guru Layak SD	Persen	95,56	95,76	97,74	95,9	96,1	96,1	
24	Persentase Guru Layak SMP	Persen	98,92	98,96	98,98	98,98	98,99	98,99	
25	Rasio Kelas Layak PAUD	Persen	73,69	73,94	87,08	74,19	74,5	74,5	
26	Rasio Kelas Layak SD	Persen	85,66	86,26	90,27	86,86	87,3	87,3	
27	Rasio Kelas Layak SMP	Persen	97,95	97,99	98,08	98,08	98,2	98,2	
	KESEHATAN :								
1	Prevalensi Wasting pada Balita	Persen	6,5	6	4,54	5,5	4	4	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Poin/ 1000 Kelahiran	7,1	6,32	8,46	6,31	6,3	6,3	
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Kasus	24	23	13	22	22	22	
4	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	56	56	54	57	58	58	
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	127	100	100	100	
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,16	98	72,4	98	98	98	
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	94,59	95	54,3	96	97	97	
8	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Poin/ 100.000 Penduduk	4,5	4,5	7	4,5	4,5	4,5	
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC semua kasus	Persen	88	95	72	95	97	97	
10	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	54	40	7	35	35	35	
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
13	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	83,81	100	100	100	
14	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	90	95	70	95	96	96	
15	Cakupan pelayanan nifas	Persen	96,3	97	70	97	98	98	
16	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	53,4	100	58	100	100	100	
17	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	100	81,2	100	100	100	
18	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	99,41	100	99,67	100	100	100	
19	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	98,41	94	95	95	
21	Jumlah PBI BPJS/KIS	Orang	619.894	1.114.110	761.161	1.215.392	1.316.675	1.316.675	
22	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase Puskesmas yang melaksanakan PISPK dengan Intervensi keluarga	Persen	99,12	100	100	100	100	100	
24	Persentase puskesmas yang melakukan tata kelola masyarakat dengan indikator kinerja baik	Persen	13,51	25	40,54	35	45	45	
25	Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan tradisional	Persen	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase puskesmas yang melaksanakan asuhan keperawatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
27	Persentase puskesmas yang melaksanakan layad rawat tidak terencana	Persen	0	40	40	60	70	70	
28	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	8,16	9,96	9,62	10,86	11,76	11,76	
29	Proporsi kusta baru tanpa cacat	Persen	67,3	70	50	80	90	90	
30	Release From Treatment (RFT) rate kusta PB dan MB	Persen	91	92	84,5	93	95	95	
31	Persentase ODHA yang menjalani terapi ARV	Persen	95	95	70	95	95	95	
32	Insidensi HIV	Per 1.000 Penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
33	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolosis	Persen	92	92	83,2	92	92	92	
34	Prevalensi Malaria (Annual Parasite Incidence/API)	API per 1000 penduduk	0,0000009	<1	0	<1	<1	<1	
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	49%	60%	53%	65%	70%	70%	RSUD 45
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	hari	4 hari	6 hari	3 hari	6 hari	6 hari	6 hari	RSUD 45
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	4 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	RSUD 45
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	per 1000	54 per 1000	40 per 1000	51 per 1000	38 per 1000	38 per 1000	38 per 1000	RSUD 45
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	per 1000	29 per 1000	24 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	RSUD 45
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	kali	52 kali	50 kali	67kali	50 kali	50 kali	50 kali	RSUD 45
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	76.95	78	80,49	79	80	80	RSUD 45
8	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	standar akreditasi	paripurna	-	paripurna	-	paripurna	paripurna	RSUD 45
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	67,67	68,77	51,71	69,37	70	70	RSUD Linggarjati
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	hari	3,67	4	2,69	5	6	6	RSUD Linggarjati
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	2,29	2,59	4,1	2,89	3	3	RSUD Linggarjati

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	persen	32,53	32	19,33	31,5	30	30	RSUD Linggarjati
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	persen	18,05	17,5	10,44	17	16,5	16,5	RSUD Linggarjati
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	kali	51,45	51,3	47,04	51	50	50	RSUD Linggarjati
7	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	standar akreditasi	paripurna	-	paripurna	-	paripurna	paripurna	RSUD Linggarjati
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	73,3	75	81,49	78	80	80	RSUD Linggarjati
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :								DPUTR
1	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik	Persen	63,23	64	66,97	65	66	66	
2	Akses Pelayanan Air minum	Persen	91,1	94,19	91,75	95,74	97,29	97,29	
3	Akses Sanitasi Layak	Persen	93,65	96,33	96,68	97,68	99,02	99,02	
4	Persentase Kemantapan jalan	Persen	80,69	86	82,352	86,8	87,9	87,9	
5	Persentase keselamatan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Persen	30	60	-	75	100	100	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN :								DPKPP
1	Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)	Ha	54,35	2	9,6	2	2	60,35	
3	Persentase rumah layak huni	Persen	97,21	97,55	96,42	97,75	97,94	97,94	
4	Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani	Km	149,96	50	95,82	50	50	299,96	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :								
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Persen	N/A	90	90	91	92	92	Satpol PP
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	84	85	86	86	87	87	
3	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	93	95	96	96	97	97	
4	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persen	95	95	96	96	97	97	
5	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab./Kota	Persen	80	88	89	89	90	90	
6	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab./Kota	Persen	80	88	89	89	90	90	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	100	100	100	100	100	100	
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	90.98	100	100	100	100	100	BPBD
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	92.02	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	30	10	18	10	10	30	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	92	100	100	100	100	100	
5	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	81	75	93,47	80	85	85	
	SOSIAL :								Dinsos
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	24.09	30	4,31	40	45	45	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	Persen	70.40	75	100	80	80	80	
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
	TENAGA KERJA :								
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat	Orang	470	304	426	336	368	1008	Disnakertrans
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	50	50	93	55	60	60	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :								DPPKBP3A
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100%	80%	11%	80%	80%	80%	
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100%	80%	76%	80%	80%	80%	
4	Rasio KDRT	Persen	0,0001	0,0001	0,000043	0,0001	0,0001	0,0001	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per-100.000 penduduk perempuan)	per-100.000	8	8	6,9	7,8	7,6	7,6	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dari Belanja Langsung APBD	persen	55%	8%	32%	10%	12%	12%	
7	Persentase perempuan kepala keluarga berdaya ekonomi yang dibina	persen	0,626	0,645	0,645	0,657	0,669	0,669	
	PANGAN :								
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	93,2	87,01	93,8	88,04	89,03	89,03	Diskatan
2	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	68	2	4	2	2	74	Diskatan
	PERTANAHAN :								DPKPP
1	Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	Bidang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	
	LINGKUNGAN HIDUP :								DLH
1	Penanganan Sampah	Ton	107.441	103,946	108189	104.439	105.929	105.929	
1	Penanganan Sampah	Persen	61,09	58,2	59,76	57,8	57,4	57,4	
2	Pengurangan Sampah								
1	Penanganan Sampah	Ton	11.200	10.716	15.728	11.022	11.333	11.333	
2	Pengurangan Sampah								
2	Pengurangan Sampah	Persen	22	6	8,73	6,1	6,2	6,2	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)								
2	Pengurangan Sampah	Poin	66,93	65,98	72,05	66,28	66,58	66,58	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)								
	a. Indeks Kualitas Air	Poin	51,11	50,1	54,44	50,2	50,3	50,3	
	b. Indeks Kualitas Udara	Poin	86,96	84,5	92,84	84,6	84,7	84,7	
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	57,05	59	63,82	60	61	61	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :								Disdukcapil
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	100	83	98,34	84	85	85	
2	Cakupan Kepemilikan KTP eL	Persen	99,4	98,5	99,06	98,75	99	99	
3	Cakupan Kepemilikan KIA	Persen	43,46	35	55,20	37,5	40	40	
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	94,21	89	96,36	90	91	91	
5	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	24	39	74,54	44	49	49	
8	Persentase pemenuhan layanan pengolahan dan penyajian data kependudukan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	Kependudukan (SIAK)								
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :								DPMD
	Indeks Desa Membangun (IDM)								
1	Desa Status : Mandiri	Desa	183	10	134	10	10	213	
2	Desa Status : Maju	Desa	62	15	215	15	15	107	
	- Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	48	60	49,86	70	80	80	
	- Jumlah BUMDES yang berbadan hukum	Unit	53	7	132	8	8	23	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA :								DPPKBP3A
1	MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern : Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW))	persen	67,24	67,24	66,4	67.34	68	68	
2	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga)	point	52,73	52,73	62,68	52.93	53,15	53,15	
3	Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi)	persen	20,86	20,76	10,3	20,56	20,46	20,46	
4	ASFR (Angka Kelahiran Remaja)	kelahiran	17,1	17	18,7	16,9	16,8	16,8	
5	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	tahun	20	20	20,9	20,5	20,5	20,5	
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	anak	2,3	2,3	2,03	2,25	2,2	2,2	
	PERHUBUNGAN :								
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	49	53	55,58	55	57	57	Dishub
2	Persentase orang yang menggunakan angkutan umum	Persen	27,12*	30	30,20	32	34	34	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:								Diskominfo
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (LPPD)	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
2	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	1,162	8	8	8	8	8	Diskominfo
3	Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Diskominfo
4	Indeks SPBE	Point	2.88	3	3,57	3.1	3.2	3.2	Diskominfo
5	Pengentasan Desa Blank Spot	Desa	1	5	2	5	5	5	Diskominfo
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (LPPD)	Persen	80	82	84	85	89	89	Diskominfo
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH:								
1	Jumlah koperasi aktif	Unit Usaha	492	20	537	25	30	567	Diskopdagperin
2	Jumlah koperasi sehat	Unit usaha	75	75	85	75	75	300	Diskopdagperin
3	Jumlah koperasi binaan	Orang	100	50	799	50	50	250	Diskopdagperin

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah koperasi modern	Orang	N/A	50	70	50	50	150	Diskopdagperin
5	Jumlah UKM binaan	Unit Usaha	1317	100	254	100	100	1617	Diskopdagperin
6	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	200	200	563	250	300	950	Diskopdagperin
PENANAMAN MODAL:									
1	Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi	1	3	0	3	3	10	DPMPTSP
2	Jumlah Data Potensi Investasi	Objek Potensi	3	2	2	2	2	9	
3	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Laporan	1	2	2	2	2	2	
4	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	2	4	4	4	4	4	
5	Media informasi perizinan dan nonperizinan	Media	2	2	2	2	2	2	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA :									
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,03	0,5	0,5	0,5	0,5	10,53	Dispora
2	Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan	Orang	150	200	200	250	300	300	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	19	6	58	8	10	43	
STATISTIK :									
1	Jumlah Produsen Data	SKPD/NON SKPD	60	60	70	70	80	80	Diskominfo
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
4	Jumlah Metadata Statistik	OPD/NON OPD	26	40	60	50	60	60	Diskominfo
PERSANDIAN :									
1	Jumlah Sertifikat TTE yang diterbitkan	Sertifikat TTE	997	1200	1350	1400	1600	1600	Diskominfo
KEBUDAYAAN :									
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	Disdikbud
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	143	143	143	143	143	143	
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya	24	24	24	24	24	24	
5	Jumlah Pengunjung Museum	Orang	34.489	36.390		38.392	40.192	40.192	
	PERPUSTAKAAN :								Dinas Arsip Perpus
1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan daerah	buku	26150	30150	16943	32150	34150	34150	
2	Jumlah Perpustakaan Binaan	perpustakaan	70	100	1180	125	150	150	
3	Jumlah SDM Perpustakaan Binaan	orang	70	100	207	125	150	150	
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	8750	10000	101052	11000	12000	12000	
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (LPPD)	Persen	0	32,5	79,85	34,5	36	36	
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (LPPD)	poin	0	68,5	70,85	69	70	70	
	KEARSIPAN :								Dinas Arsip Perpus
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	85	90	90	92	93	93	
2	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang dibina	Orang	62	124	80	186	186	186	
3	Tingkat Ketersediaan Arsip (LPPD)	Box	0	5	5	8	10	10	
	Layanan Urusan Pilihan								
	PARIWISATA :								Dispar
1	Kunjungan Wisata	Orang	3.448.917	3.793.809	3.824.520	4.173.190	4.590.509	4.590.509	
2	Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan	Daya Tarik Wisata (DTW)	12	3	15	4	5	24	
3	Pembinaan Fasilitas HAKI Ekonomi Kreatif	Orang	N/A	50	50	50	75	175	
4	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	Orang	25	50	75	50	75	200	
	PERTANIAN :								
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	N/A	7,93		8,21	8,36	8,36	Diskatan
	Meningkatnya Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil	Ekor		4678		4702	4725	4725	DISKANNAK
	Produksi Daging (Ton) :								DISKANNAK
1	1. Daging Sapi	Ton	2.352	2.259	2.866	2.282	2.305	2.305	DISKANNAK
2	2. Daging Domba/Kambing	Ton	1.430	1.348	1.488	1.361	1.375	1.375	DISKANNAK
3	3. Daging Ayam Buras	Ton	591	648	716	681	715	715	DISKANNAK

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	4. Daging Ayam Ras Petelur	Ton	1.777	1.479	2.179	1.509	1.539	1.539	DISKANNAK
5	5. Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	30.006	31.679	33.415	32.63	33.609	33.609	DISKANNAK
	Produksi Telur (Ton) :								DISKANNAK
6	1. Telur Ayam Buras	Ton	1.361	1.493	1.496	1.568	1.646	1.646	DISKANNAK
7	2. Telur Ayam Ras Petelur	Ton	21.823	18.168	26.763	18.531	18.902	18.902	DISKANNAK
8	3. Telur Itik	Ton	469	484	559	499	514	514	DISKANNAK
9	Produksi Susu Sapi (Ton) :								DISKANNAK
10	Susu Sapi Perah	Ton	18.402	18.979	18.107	19.074	19.17	19.17	DISKANNAK
	Populasi Ternak (Ekor) :								DISKANNAK
11	1. Sapi Perah	Ekor	7.278	7.943	7.943	8.022	8.102	8.102	DISKANNAK
12	2. Sapi Potong	Ekor	30.631	30.559	30.559	31.17	31.794	31.794	DISKANNAK
13	3. Kerbau	Ekor	4.647	4.678	4.678	4.702	4.725	4.725	DISKANNAK
14	4. Domba	Ekor	136.620	133.79	133790	134.459	135.131	135.131	DISKANNAK
15	5. Kambing	Ekor	7.725	7.718	7.718	7.756	7.795	7.795	DISKANNAK
16	6. Ayam Buras	Ekor	634.796	696.545	696.545	731.373	767.941	767.941	DISKANNAK
17	7. Ayam Ras Petelur	Ekor	1.908.399	1.588.772	2.340.353	1.620.548	1.652.959	1.652.959	DISKANNAK
18	8. Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.814.651	4.027.412	4.248.100	4.148.235	4.272.682	4.272.682	DISKANNAK
19	9. Itik	Ekor	74.710	75.836	89.072	76.595	77.361	77.361	DISKANNAK
20	Bahan Pangan Asal Hewan (Ton)	Ton	-	surplus	surplus	surplus	surplus	surplus	DISKANNAK
21	Penanggulangan Kemiskinan (RTP)	RTP	304	731		733	774	774	DISKANNAK
22	Terlaksananya kegiatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	-	7	-	8	10	10	
	PERDAGANGAN :								
1	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Unit	4	1	-	1	1	7	Diskopdagperin
2	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	Laporan	8	5	5	5	5	23	Diskopdagperin
3	Nilai ekspor bersih perdagangan	US\$	6.861.579	1.772.802	3.579.914	1.882.802	1.992.802	12.509.985	Diskopdagperin
4	Jumlah alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	6.392	5.000	5.528	5.000	5.000	21.392	Diskopdagperin
5	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	produk	N/A	50	352	50	50	150	Diskopdagperin
	PERINDUSTRIAN :								
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	2,27	2,31	1	2,32	2,34	2,34	Diskopdagperin
2	Pertumbuhan industri	Persen	13	2	2	2	2	2	Diskopdagperin
3	Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	40	50	77	50	50	190	Diskopdagperin

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	TRANSMIGRASI :								Disnakertrans
1	Jumlah Translok yang diberdayakan	Orang	N/A	40	N/A	60	80	80	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN :								
1	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Budiaya Ikan Kecil	Ton	24.567,65	28.500	27.000	30.500	32.500	32.500	Diskanak
2	Tingkat kesejahteraan pembudi daya ikan (NTP)	Persen	102,75	104,2	113,86	104,5	105	105	Diskanak
3	Tingkat produksi perikanan budidaya	Ton	24.567,65	28,5	27.000	30,5	32,5	32,5	
4	Cakupan kelompok pembudi daya ikan	Kelompok	700	1000	680	1100	1200	1200	
5	Jumlah Rumah Tangga perikanan	Orang	12.238	23	22.026	24	25	25	
6	Pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar berbasis kearifan lokal	Unit	N/A	2	0	4	6	6	
7	Peningkatan Produksi Non Kosumsi	Persen	N/A	10.5	0	15	20	20	
8	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	350,95	420	440	450	475	475	
9	Tingkat kesejahteraan nelayan (NTN)	Persen	102,95	102,75	101	103	103,25	103,25	Diskanak
10	Tingkat produksi perikanan tangkap	Ton	350,95	420	440	450	475	475	
11	Cakupan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kelompok	13	20	13	25	30	30	
12	Jumlah Rumah Tangga Nelayan	Orang	1,85	1.800	1.500	1.900	2.000	2.000	
13	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	210,59	250	923	260	275	275	
14	Tingkat kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan	Persen	102,1	101,5	99	102,25	103	103	Diskanak
15	Tingkat produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	210,59	250	923	260	275	275	
16	Cakupan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelompok	37	40	40	50	60	60	
17	Jumlah Rumah Tangga pengolah dan pemasar	Orang	1.750	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000	
18	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	25	27	31	27	27	27	
19	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Ha	200	200	200	200	200	200	
20	Rasio Kawasan Perairan terhadap total lindung luas nelayan	Ha	200	200	200	200	200	200	Diskanak
21	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	14	8	14	5	2	2	
22	cakupan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan	Kelompok	3	4	4	5	6	6	
	Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
	SEKRETARIAT DAERAH :								Setda
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	N/A	70-75	100	75-80	>80	>80	Barjas

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat Ketepatan Waktu Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	N/A	85	100	90	95	95	
3	Persentase Nilai Paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) yang diuput pada Aplikasi SIRUP LKPP	Persentase	N/A	90	100	95	100	100	
4	Persentase Perumusan Kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek pembangunan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Adpem
5	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
6	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari BUMD dan BLUD	Persentase	N/A	5	1,5	5	5	5	Ekonomi
7	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	N/A	85	100	85	85	85	
8	Nilai LPPD Kabupaten di Tingkat Provinsi/Nasional	Level & Score	N/A	3,1	belum tersedia	3,2	3,3	3,3	Tapem
9	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	N/A	84	100	85	86	86	
10	Persentase Penyelesaian Perkara Hukum	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	Hukum
11	Persentase Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan : Jumlah Bahan Kebijakan Daerah yang diusulkan sebagai Produk Hukum	Persentase	N/A	>80	100	>90	>90	>90	
12	Pengelolaan Sistem Informasi Hukum terintegrasi	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	
13	Persentase Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/ Individu yang dibina dan difasilitasi	Persentase	20	20	100	20	20	20	Kesra
14	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
15	Persentase bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan	Persentase	N/A	80	66,69	80	80	80	
16	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal SETDA	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Umum
17	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Program, Penaggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Perencanaan & Keuangan
18	Persentase Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan bagian pada Sekretariat Daerah	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
19	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Berbasis SPBE	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
20	Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keprotokolan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Prokompim
21	Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
22	Jumlah viewer hasil publikasi dan Dokumentasi	Orang	N/A	750	750	1000	1080	1080	
23	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja yang Efektif dan Efisien	Persentase	N/A	80	100	80	85	85	Organisasi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN :								Bappeda
1	Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kesesuaian Program/kegiatan di RKPD dan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan	Dokumen	4	4	4	4	4	12	
4	Dokumen Perencanaan (RPJP; RPD dan RKPD)	Dokumen	2	4	4	4	2	10	
	KEUANGAN :								
1	Penetapan APBD tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
2	Persentase Laporan Aset Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
1	Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	0.5	1	0,42	1.5	1.5	1.5	Bappenda
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	Persen	68	70	80	75	80	80	
3	Jumlah Layanan Pajak Daerah	WP	3630	800	5335	900	1000	1000	
4	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Persen	89,98	95	94,99	96	97	97	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :								BKPSDM
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	57	57	78,23	60	63	63	
2	Indeks Sistem Merit	Point	282	290	289	290	325	325	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :								Bappeda
1	Kajian Isu Pembangunan	Dokumen	5	2	2	2	2	6	
2	Inovasi Daerah	Buah	1	1	1	1	1	3	
	SEKERTARIAT DPRD :								Sekretariat DPRD
1	Pelayanan Administrator Pemerintahan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	PENGAWASAN :								Inspektorat
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kabupaten Kuningan	Persen	71,65	70	76	71	72	72	
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Persen	76,7	74	75	74	75	75	
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	82,31	82	69	83	83	83	
4	Jumlah SKPD yang memiliki nilai SAKIP minimal BB	OPD	26	10	29	12	15	15	
5	Level SPIP	Level	3	2	3	2	3	3	
6	Capaian Nilai MCP	Nilai	91	70	88	73	75	75	
7	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3	
	Layanan Unsur Pemerintahan Umum								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :								Kesbangpol
1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	74,11* (2019)	75	76,44	-	-	75	
2	Pembinaan Kesadaran Politik Masyarakat	Orang	340	300	450	300	300	300	
3	Pembinaan Ideologi Negara dan Karakter Kebangsaan	Orang	400	300	558	300	300	300	
4	Indeks Toleransi Beragama	Poin	72,39	70	76,49	70	70	70	
	Layanan Unsur Kewilayahan								
	KECAMATAN :								32 Kecamatan
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	63	64	65	65	66	66	Karangkencana
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan Karangkencana	Persen	63	65	66	-	-	65	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	190	195	196	200	210	210	
5	Jumlah KK Miskin	KK	300	309	310	290	261	261	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Karangkencana	Keluarga	70	60	61	40	25	25	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	71	75	76	83	95	95	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam	Persen	76	77	78	78	79	79	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan								
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	83	84	85	85	86	86	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	251	252	253	253	254	254	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Ciniru
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	90	80.30%	-	-	90	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	78	75%	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	815	820	810	850	870	870	
5	Jumlah KK Miskin	KK	409	390	380	350	330	330	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	380	350	345	300	280	280	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	97	97	315	97	99	99	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92	90%	95	96	96	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	85	90	87	95	96	96	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	324	325	324	330	335	335	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	40	60	60	70	80	80	Jalaksana
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	90	70	72	-	-	70	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	302	302	302	302	302	302	302	
5	Jumlah KK Miskin	KK	7768	7768	7768	7768	7768	7768	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7768	7768	7768	7768	7768	7768	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	90	90	60	90	90	90	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	168	168	168	168	168	168	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	24	24	24	24	24	24	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	600	600	600	600	600	600	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	900	900	900	900	900	900	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	93	65	96	100	100	Lebakwangi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	100	100	66	-	-	100	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	100	74	76	76	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	331	365	196	400	450	450	
5	Jumlah KK Miskin	KK	100	95	310	90	85	85	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1705	1875	1896	2062	2268	2268	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	155	155	15	155	155	155	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	83	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1		1	1	1	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	450	470	303	525	575	575	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	90	100	100	100	Darma
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	90	-	-	85	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	100	90	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	600	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	6.125	5.500	5,5	5.000	4.500	4.500	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	6.125	5.500	5,5	5.000	4.500	4.500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	100	100	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	1	1	90	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	150	200	90	250	300	300	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	90	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85	85	90	95	95	Maleber
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	80	80	70	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	100	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	2148	2198	2158	2248	2298	2298	
5	Jumlah KK Miskin	KK	268	750	750	98	48	48	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	940	900	900	880	850	850	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	185	185	185	185	185	185	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	95	95	97	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	957	1000	960	1070	1100	1100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	384	404	385	408	412	412	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100%	100	100	100	Ciwaru
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	90	58.53%	-	-	90	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80	80	80%	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	745	715	603	625	550	550	
5	Jumlah KK Miskin	KK	4294	3894	1800 KK	2294	1294	1294	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	85%	137	137	137	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	90%	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Jenis Pelayanan	1 125	1 130	1	1 140	1 150	1 150	
12	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Jenis Pelayanan Dokumen	1 125 298	1 130 300	1 196	1 140 310	1 150 320	1 150 320	
13	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Jenis Pelayanan Dokumen	1 125 298	1 130 300	1 196	1 140 310	1 150 320	1 150 320	
	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Jenis Pelayanan Dokumen Persen	1 125 298 62	1 130 300 63	1 196 70	1 140 310 64	1 150 320 66	1 150 320 66	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi								
1	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis Pelayanan Dokumen	1	1	1	1	1	1	Pancalang
	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan		125	130		140	150	150	
	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya		298	300	196	310	320	320	
2	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen Persen	62	63	70	64	66	66	
	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan		62	65	65	-	-	65	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	95	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	128	140	140	154	169	169	
5	Jumlah KK Miskin	KK	342	308	308	278	251	251	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	66	50	50	35	22	22	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	77	65	84	92	92	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	76	76	78	79	79	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	85	80	86	87	87	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	251	240	252	253	253	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	75	80	75	85	90	90	Cimahi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	87	67,87	-	-	87	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	78	80	85	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1231	350	355	380	400	400	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	1880	1573	1180	1180	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	2415	1875	1880	1573	1180	1180	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	60	70	75	85	85	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	85	90	95	111	111	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	70	85	88	85	90	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	230	245	75	250	280	280	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	115	135	67,87	145	175	175	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	95	100	100	100	Kadugede
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	85	75.6	-	-	85	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	75	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1500	1725	91	2000	2314	2314	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3724	3500	2997	3000	2500	2500	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	3724	3500	2997	3000	2500	2500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	120	133	120	120	120	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	70	85	80	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	95	100	130	130	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	80	85	75.6	120	150	150	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	79	81	80	83	87	87	Cibingbin

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	82	82	-	-	82	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	80	82	80	84	88	88	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	700	705	700	710	750	750	
5	Jumlah KK Miskin	KK	5854	5854	5850	5854	5854	5854	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	5854	5854	5850	5854	5854	5854	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	200	200	200	200	200	200	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515	515	517	519	519	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	120	125	122	127	130	130	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	80	80	82	84	84	Cigandamekar
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	65.8	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.744	1.918	1,918	2.110	2.321	2.321	
5	Jumlah KK Miskin	KK	7.096	6.386	6,386	5.748	5.173	5.173	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7.096	6.386	6,386	5.748	5.173	5.173	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	107	117	117	128	140	140	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	490	500	500	550	600	600	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	301	331	331	364	400	400	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Mandirancan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	70	70	70	-	-	70	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	77	74	80	83	83	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	600	620	615	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1570	1410	1320	1294	1120	1120	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	700	750	750	950	1050	1050	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	130	130	140	130	130	130	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	80	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	70	75	75	80	85	85	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya(katagori Perizinan)	Dokumen	245	250	250	255	260	260	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85	75	90	95	95	Japara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	60	65	65	-	-	65	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	77	80	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1007	1015	1010	1025	1035	1035	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3075	2767	2499	2490	2241	2241	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	480	500	2958	525	550	550	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	108	108	108	108	108	108	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	350	355	98	360	365	365	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	724	120	125	125	
	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	724	120	125	125	
	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	724	120	125	125	
	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
1	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	724	120	125	125	Garawangi
	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	96	-	-	80	
2	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	724	120	125	125	
	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	96	-	-	80	
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	80	85	90	90	
3	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	724	120	125	125	
4	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Persen	-	80	100	-	-	80	
		Persen	75	80	96	85	90	90	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	550	80 550	600	630	630	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	231	1573	1180	1180	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2415	1875	231	1573	1180	1180	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	60	60	65	60	60	60	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	178	178	95	178	178	178	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	139	100	160	160	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	80	85	426	100	120	120	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Cilebak
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	85	75	-	-	85	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	75	80	80	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	237	262	250	300	300	300	
5	Jumlah KK Miskin	KK	415	400	300	385	360	360	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	109	109	260	100	100	100	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	79	80	80	80	80	80	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	85	100	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	60	70	60	70	70	70	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	255	245	255	260	260	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Subang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	75	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	72	75	75	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	560	670	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	1050	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	630	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	105	105	112	105	105	105	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	85	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	145	200	235	235	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	183	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	73	71	75	78	78	Ciawigebang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	75	80	70.30%	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	95%	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	9,253	5.000	5.500	5.500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102	10,343	8.192	7.373	7.373	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520	4,528	4.957	5.000	5.000	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312	315	320	325	325	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90	75%	95	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515	71	517	519	519	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	280	70.30%	285	290	290	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	99	100	100	100	100	100	Cibeureum
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	95	63	-	-	95	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	77	93	85	94	95	95	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	0	0	0	0	0	0	
5	Jumlah KK Miskin	KK	576	500	480	450	400	400	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	95	95	89	95	95	95	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92	90	95	97	97	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	85	90	92	95	100	100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	210	230	225	245	250	250	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	95	100	100	100	Nusaherang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	72.36%	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	75	80%	77	79	79	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	550	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	14,539	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	120	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	90	90	100%	90	90	90	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90%	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	100	125	1,425	140	200	200	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	220	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	80	80	82	84	84	Kramatmulya
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	80	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	471	471	663	874	874	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	2,355	1.717	1.142	1.142	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	3.065	2.355	2,355	1.717	1.142	1.142	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	100	100	112	112	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	230	250	600	280	310	310	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	280	80	313	349	349	
1	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Cigugur

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	80	-	-	80	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	>90	>90	>90	>90	>90	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Cigugur	Lokasi	78	>78	8	>78	>78	>78	
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	5	5	15	10	15	15	
6	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	500	620	640	640	
7	Jumlah Keluarga Miskin Yang Diberdayakan di Wilayah Kecamatan	Keluarga	462	82	82	100	130	130	
8	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	90	70	100	120	120	
9	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	90	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	107	316	132	316	316	316	
13	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	2041	646	1840	650	650	650	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	90	100	100	100	Cidahu
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	72	82	65%	-	-	82	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	75	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	350	325	400	500	500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1.349	1.200	1,1	1.000	900	900	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1.290	1.000	700	900	800	800	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	90	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	144	150	150	150	150	150	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang	Jenis	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	dilimpahkan kepada Camat								
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	305	510	530	530	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	300	175	320	350	350	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	75	100	100	100	Hantara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	70	72	81%	-	-	72	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	75%	74	76	76	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	705	776	327	854	862	862	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1586	1427	379	1284	1156	1156	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	777	855	340	941	1035	1035	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	172	172	100%	172	172	172	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	80	90%	85	90	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	87	101	111	111	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen			324				
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Pasawahan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	76	76	-	-	76	
3	partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	80	82	82	84	88	88	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	156	159	159	162	165	165	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2051	1876	1876	1576	1500	1500	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	110	110	110	110	110	110	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	486	506	100	528	548	548	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (Kategori Perizinan)	Dokumen	568	588	76	608	628	628	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	0	10	8%	10	10	10	Cipicung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	85	78%	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	65	70	65%	74	77	77	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	885	850	950	1055	1055	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1476	1358	1458	1277	1179	1179	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1476	1358	1358	1277	1179	1179	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	70	68	80	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	80	80	90	130	130	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	90	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	120	130	125	140	150	150	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	576	720	700	750	780	780	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	120	240	240	360	480	480	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Selajambe
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	80	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	Persen	72	75	73	77	79	79	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan								
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	560	670	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	1050	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	635	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	105	105	105	105	105	105	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	182	200	235	235	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	86	100	100	100	Sindangagung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	85	90	80	-	-	90	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	85	90	>90	95	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	3139	3139	3139	3139	3139	3139	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3898	3508	3508	3157	2841	2841	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	842	757	757	682	613	613	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	137	137	137	137	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	94	94	96	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitasi Non Perizinan	Pelayanan	300	350	1000	375	400	400	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	200	225	55	250	275	275	
1	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Kuningan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	76	77	77	-	-	77	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Kuningan	Lokasi	70	75	75	85	95	95	
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	20	20	20	20	20	20	
6	Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk Diberdayakan	UMKM	32	32	20	32	32	32	
7	Jumlah KK Miskin	KK	8042	7882	7882	7725	7571	7571	
8	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1203	1180	1180	1157	1134	1134	
9	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	80	90	90	100	120	120	
10	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
12	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Dokumen	900	1000	1000	1000	1000	1000	
14	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Pelayanan	540	600	600	660	726	726	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	92	92	95	98	98	Cilimus
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	80	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	80	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.600	1,65	1,6	1700	1750	1750	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2.838	2,5	2500	2,3	2,1	2,1	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2.520	2.600	2,6	2.710	0.282	0.282	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	507	507	507	507	507	507	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	490	510	530	530	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	299	310	310	330	350	350	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	73	74	75	78	78	Luragung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	80	81	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	4,957	5.000	5.500	5.500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102	9,104	8.192	7.373	7.373	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520	4,521	4.957	5.000	5.000	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312	314	320	325	325	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90	91	95	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	93	101	111	111	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	280	74	285	290	290	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Kalimanggis
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	60	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	80	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	150	324	300	516	727	727	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	2,086	1.717	1.142	1.142	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah	Keluarga	3.065	2.355	2,086	1.717	1.142	1.142	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	kecamatan								
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	96	100	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Non Perizinan	Pelayanan	75	85	80	90	100	100	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	100	130	124	150	200	200	

Sumber: Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, 2025

Dari hasil evaluasi RPD dan RKPD menunjukkan banyaknya target capaian yang tercapai selama periode 2024-2026. Adapun untuk target capaian yang masih belum tercapai dapat dikarenakan beberapa faktor salah satunya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, sehingga belum bisa mengakomodir seluruhnya.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator makro pembangunan maupun Indikator Kinerja Utama pembangunan, terdapat permasalahan pembangunan daerah yang perlu ditangani melalui intervensi kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya spesifik pada Tahun 2024. Penentuan permasalahan pembangunan daerah selain memperhatikan data sebagaimana telah diuraikan di atas, juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD 2024-2026 dan hasil penjaringan permasalahan tim monitoring dan evaluasi musrenbang Tahun 2024.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan-permasalahan pada bagian ini diperoleh dari hasil analisis data pada bagian sebelumnya dan telaahan terhadap permasalahan yang tertuang dalam dokumen RPD 2024-2026. Permasalahan tersebut kemudian dikaji atas dasar sasaran pembangunan daerah dan arah pembangunan untuk Tahun 2026. Berdasarkan dokumen RPD, terdapat 12 (dua belas) sasaran pembangunan daerah. Adapun arah pembangunan di Tahun 2026 yaitu Pengembangan industri menuju pertumbuhan ekonomi inklusif, tenaga teknis maupun masyarakat yang sehat, unggul, produktif serta berintegritas yang akan mempengaruhi produktivitas dan memunculkan inovasi-inovasi sebagai modal awal menumbuhkan ekonomi kreatif yang dapat berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.

Tabel 2.76 Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran RPD	Permasalahan
1. Menurunnya Tingkat kemiskinan	1) Masih tingginya angka kemiskinan; 2) Masih rendahnya akurasi data dalam rangka penyaluran bantuan sosial bagi keluarga miskin.
2. Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	1) Belum optimalnya pengembangan IKM/UKM, yang ditunjukkan masih terdapatnya produk pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan legalisasi/sertifikasi industri; 2) Masih rendahnya penerapan teknologi industri yang baik oleh IKM/UKM; 3) Penyediaan bahan baku IKM/UKM belum mengutamakan bahan baku lokal; 4) Kapasitas produksi IKM yang belum mampu memenuhi permintaan pasar; 5) Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 6) Belum terintegrasinya produk unggulan dan potensi ekonomi perdesaan serta belum dilakukannya mapping potensi; 7) Masih rendahnya daya ungkit hasil produk unggulan desa dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan.
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Belum optimalnya pelayanan fasilitas kesehatan 2) Masih adanya Penanganan pasien tidak mampu yang belum tercover jaminan kesehatan 3) Belum terjaminnya penyelesaian biaya bagi pasien tidak mampu oleh program jaminan kesehatan 4) Masih kurangnya Jumlah SDM jabatan fungsional Kesehatan dan dokter spesialis 5) Masih terbatasnya sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan, kondisi sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan tuntutan pengembangan pelayanan
4. Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga	1) Belum optimalnya peningkatan Kualitas Pendidikan dan Apresiasi Kebudayaan Daerah; 2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan; 3) Belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan SDM olahraga yang memadai.
5. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan; 2) Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender; 3) Rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan; 4) Kurang optimalnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk ke fasilitas kesehatan/rehabilitasi; 5) Belum optimalnya penyelenggaraan UPTD PPA sebagai One Stop Service bagi pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak.
6. Terkendalnya pertumbuhan penduduk	1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB; 2) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern masih stagnan; 3) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); 4) Masih banyaknya perkawinan usia muda (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria).

Sasaran RPD	Permasalahan
7. Meningkatnya investasi daerah	1) Masih rendahnya tingkat investasi sehingga berpengaruh pada sedikitnya serapan tenaga kerja; 2) Belum optimalnya nilai investasi pada berbagai sektor; 3) Kurangnya peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 4) Masih belum berkembangnya sentra industry.
8. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	1) Belum adanya skill khusus dari pendidikan yang akan menjadi keunggulan lulusan dalam menghadapi pasar kerja dan dunia usaha; 2) Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang professional; 3) Masih tingginya angka pengangguran; 4) Rendahnya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat; 5) Terbatasnya lapangan pekerjaan dari sektor industri ramah lingkungan.
9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	1) Kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata diseluruh daerah terutama disentra produksi pangan daerah; 2) Kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumber daya air; 3) Masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/ sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan pedesaan; 4) Masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman di area perkotaan dan pedesaan; 5) Masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal; 6) Kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan untuk menjamin konektivitas dalam dan antar wilayah; 7) Kuantitas dan kualitas jalan penghubung, jalan poros yang masih belum merata untuk mendukung pertumbuhan pembangunan; 8) Masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan lingkar yang menghubungkan pusat pertumbuhan pembangunan daerah; 9) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga ahli jasa konstruksi untuk memenuhi syarat penjaminan kualitas pekerjaan fisik infrastuktur daerah; 10) Masih lemahnya pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan fasilitas umum bidang pekerjaan umum; 11) Belum ditetapkan regulasi penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku; 12) Alokasi ruang untuk pengembangan Investasi Daerah; 13) Sarana prasarana perhubungan belum terdata dengan baik; 14) Belum adanya dokumen rencana induk lalu lintas dan angkutan Jalan; 15) Belum tersedianya fasilitas parkir yang aman, nyaman, tertib dan teratur; 16) Belum tersedianya sarana prasarana jalan yang aman, nyaman, tertib dan berkeselamatan; 17) Kurang efektifnya kinerja pelayanan uji KIR, dan perparkiran;

Sasaran RPD	Permasalahan
	18) Meningkatnya fenomena ODOL (Over Dimension Over Load); 19) Mulai menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum; 20) Cakupan pelayanan persampahan masih rendah baik ditinjau dari luasan wilayah maupun besaran timbulan sampahnya; 21) Potensi ancaman bencana di Kabupaten Kuningan yang cukup tinggi; 22) Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum didukung optimal oleh sumber daya manusia, sarana prasarana serta penyediaan anggaran; 23) Masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
10. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	1) Semakin berkurangnya lahan pertanian dan menurunnya minat berusaha di bidang pertanian; 2) Masih rendahnya penggunaan benih yang bermutu; 3) Pengetahuan petani yang masih terbatas dalam proses produksi; 4) Minimnya generasi penerus muda yang bergerak disektor pertanian; 5) Menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian; 6) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian; 7) Belum meratanya kebutuhan sarana prasarana pertanian; 8) Besarnya potensi kepariwisataan belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana; 9) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan kepariwisataan; 10) Belum maksimalnya aksesibilitas dan amenitas untuk kaum lansia dan difabel di jasa usaha pariwisata; 11) Kemudahan investasi sektor pariwisata belum optimal; 12) Sadar wisata masyarakat di sekitar destinasi pariwisata belum optimal; 13) Masih rendahnya kompetensi pekerja pada sektor kepariwisataan; 14) Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan pariwisata baik pada aturan maupun kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata; 15) Belum optimalnya pengembangan sistem pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; 16) Belum optimalnya event kepariwisataan sebagai promosi wisata dan pameran kepariwisataan yang berbasis audio visual; 17) Akses permodalan bagi pelaku ekraf belum optimal; 18) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual belum terbangun.
11. Meningkatkan Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik	1) Belum optimalnya profesionalitas ASN; 2) Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik; 3) Belum optimalnya ketercapaian nilai SAKIP; 4) Kurangnya Pemahaman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; 5) Belum Optimalnya Kualitas Koordinasi, Sistem Pengawasan Internal, Pelaporan Kinerja Pemerintahan

Sasaran RPD	Permasalahan
	Daerah dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah.
12. Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	1) Tahun 2024 merupakan tahun politik yang dapat mempengaruhi masalah ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Kabupaten Kuningan.

2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Permasalahan-permasalahan pada bagian ini selain didasarkan pada hasil analisis data dan telaahan terhadap permasalahan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, juga didasarkan pada hasil penjaringan permasalahan dari seluruh perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan maupun penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.4 Permasalahan pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan utama urusan pendidikan, yaitu:

- 1) Kurangnya sarana prasarana dan Tenaga Pendidik PAUD;
- 2) Belum optimalnya angka partisipasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- 3) Distribusi guru belum merata;
- 4) Partisipasi Sekolah untuk jenjang SD dan SMP belum 100%;
- 5) Masih ada Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD 0,01 dan SMP 0,15;
- 6) Belum optimalnya sarana prasarana dan SDM Perpustakaan;
- 7) Kurang memadainya fasilitas perpustakaan yang dapat mengurangi kinerja dalam pengelolaan perpustakaan;

- 8) Masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah (Putus Sekolah), dan belum meratanya penerima bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin/ Berprestasi.

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan utama urusan kesehatan, yaitu:

- 1) Penemuan kasus stunting yang masih tinggi;
- 2) Masih ditemukannya balita gizi buruk (Sangat kurus dan Kurus);
- 3) Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga Aktif di Desa/Kelurahan;
- 4) Belum terpenuhinya 9 tenaga dasar di puskesmas;
- 5) Rendahnya kompetensi tenaga kesehatan yang update;
- 6) Masih terdapatnya kasus komplikasi kebidanan;
- 7) Masih ada persalinan yang ditolong oleh non nakes;
- 8) Belum seluruh desa/kel menjadi desa UCI;
- 9) Masih ditemukannya kasus AFP setiap tahunnya;
- 10) Masih meningkatnya kasus TB;
- 11) Masih terjadinya peningkatan kasus HIV/AIDS setiap tahunnya;
- 12) Masih terjadi kasus kematian bayi;
- 13) Masih ada ibu hamil yang ditemukan pada kunjungan kehamilan K4;
- 14) Masih terdapat bayi baru lahir dengan komplikasi;
- 15) Masih rendahnya capaian penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;
- 16) Masih rendahnya intervensi keluarga program PISPK;
- 17) Masih rendahnya cakupan penderita HT yang dilayani sesuai standar;
- 18) Masih tingginya penduduk yang merokok;
- 19) Masih tingginya proporsi cacat tingkat 2 pada kasus baru kusta;
- 20) Belum optimalnya pelayanan RSUD 45;;
- 21) Belum optimalnya mutu pelayanan rumah sakit.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu:

- 1) Kondisi irigasi dengan kualitas baik belum merata diseluruh daerah terutama disentra produksi pangan daerah;

- 2) Kondisi sungai, embung, danau, bendungan yang belum optimal dalam mendukung pelestarian sumber daya air;
- 3) Masih kurangnya cakupan pelayanan dan jangkauan pipanisasi/sarana prasarana air bersih di lingkungan perkotaan dan pedesaan;
- 4) Masih terbatasnya layanan pengolahan air limbah fasilitas kesehatan, industri, pemukiman di area perkotaan dan pedesaan;
- 5) Masih belum memadainya keberadaan gedung pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
- 6) Kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan untuk menjamin konektivitas dalam dan antar wilayah;
- 7) Kuantitas dan kualitas jalan penghubung, jalan poros yang masih belum merata untuk mendukung pertumbuhan pembangunan;
- 8) Masih dibutuhkannya penyediaan akses baru berupa jalan lingkar yang menghubungkan pusat pertumbuhan pembangunan daerah;
- 9) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga ahli jasa konstruksi untuk memenuhi syarat penjaminan kualitas pekerjaan fisik infrastuktur daerah;
- 10) Masih lemahnya pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan fasilitas umum bidang pekerjaan umum;
- 11) Belum ditetapkannya regulasi penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 12) Alokasi ruang untuk pengembangan Investasi Daerah.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utama urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yaitu :

- 1) Pendataan Rumah belum menggunakan standar ketentuan yang berlaku;
- 2) Belum dilaksanakan identifikasi kawasan dan pemukiman kumuh secara menyeluruh dan mendalam;
- 3) Penentuan kawasan pedesaan dan perkotaan dalam penentuan SK Kumuh;

- 4) Dokumen perencanaan sektoral (RPKP, RP2KP, RP3KP, RP2KPKPK, RPLP, MASTERPLAN Kawasan Kumuh dll) belum sesuai dengan ketentuan dan regulasi terbaru;
- 5) Penentuan kriteria rumah tidak layak huni belum terpadu antar sektor;
- 6) Masih banyak masyarakat bermukim dilokasi yang tidak sesuai tata ruang;
- 7) Masih banyaknya warga yang bermukim dilokasi rawan bencana.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan utama urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, yaitu :

- 1) Masih kurang optimalnya penegakan peraturan daerah yang berlaku;
- 2) Kurang memadainya sarana, prasarana serta SDM Satpol PP, Linmas, dan Damkar;
- 3) Rendahnya pendidikan berpolitik dan wawasan kebangsaan;
- 4) Masih terdapatnya konflik yang belum terselesaikan;
- 5) Belum optimalnya pelayanan pra bencana, penanganan darurat bencana dan pasca bencana sehingga tingginya risiko bencana;
- 6) Belum optimalnya ketercapaian nilai ketahanan daerah;
- 7) Potensi ancaman bencana di Kabupaten Kuningan yang cukup tinggi;
- 8) Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum didukung optimal oleh sumber daya manusia, sarana prasarana serta penyediaan anggaran;
- 9) Masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 10) Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor.

f. Urusan Sosial

Permasalahan utama urusan sosial, yaitu :

- 1) belum optimalnya pelayanan kebutuhan dasar di luar panti;
- 2) belum optimalnya pelayanan pasca tanggap darurat bencana;

- 3) Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tersentuh penanganan;
- 4) Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum sepenuhnya valid dan belum terintegrasi antar perangkat daerah;
- 5) Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial;
- 6) Belum tersedianya rumah singgah dan/atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk penanganan PPKS terlantar, jalanan dan anak berhadapan dengan hukum.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan utama urusan tenaga kerja, yaitu :

- 1) Tingginya tingkat pengangguran;
- 2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
- 3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- 4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial;
- 5) Kompetensi pencari kerja relatif belum memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- 6) Kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah;
- 7) Pertumbuhan pencari kerja tidak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja;
- 8) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu:

- 1) Kurang optimalnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- 2) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan;
- 3) Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender;
- 4) Rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan.

c. Urusan Pangan

Permasalahan utama urusan pangan, yaitu :

- 1) Ketersediaan pangan cenderung menurun;
- 2) Belum meratanya Distribusi pangan;
- 3) Belum terjaminnya Keamanan Pangan;
- 4) Belum optimalnya konsumsi pangan local.

d. Urusan Pertanahan

Permasalahan utama urusan pertanahan, yaitu masih terdapat tanah negara yang belum jelas legalitas kepemilikannya.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup, yaitu :

- 1) Pola pengelolaan sampah masih didominasi oleh penanganan sampah sehingga perlu didorong terus upaya peningkatan pola pengurangan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak di sumber;
- 2) Perlu adanya optimalisasi pemanfaatan fungsi ruang terbuka hijau serta upaya penyedia fasilitas umum di RTH;
- 3) Pencemaran air yang semakin meningkat setiap tahunnya terutama dari limbah domestik perumahan dan limbah kotoran hewan yang belum terkendali dan terkelola dengan baik sehingga mencemari DAS yang dijadikan sumber air untuk kegiatan sehari-hari;
- 4) Belum tersedianya laboratorium lingkungan sebagaimana mestinya, sedangkan fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian lingkungan;
- 5) Rendahnya kesadaran Pemilik kendaraan bermotor melakukan pengujian secara berkala.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

- 1) belum optimalnya kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan;

- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Finger Print, Card Reader, Camera, Iris Scanner, Signature Pad, Printer KRp-eL Printer KIA dan Komputer, Mobil Pelayanan);
- 3) Kurangnya informasi mengenai pembuatan dokumen administrasi kependudukan.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, yaitu belum optimalnya keberdayaan masyarakat dan desa.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan utama urusan perhubungan, yaitu:

- 1) Sarana prasarana perhubungan belum terdata dengan baik;
- 2) Belum adanya dokumen rencana induk lalu lintas dan angkutan Jalan;
- 3) Rendahnya kesadaran Pemilik kendaraan bermotor melakukan pengujian secara berkala;
- 4) Belum tersedianya fasilitas parkir yang aman, nyaman, tetib dan teratur;
- 5) Rendahnya kontribusi retribusi dan pajak parkir terhadap PAD;
- 6) Belum tersedianya sarana prasarana jalan yang aman, nyaman, tertib dan berkeselamatan;
- 7) Belum tersedianya sistem transportasi cerdas.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama urusan komunikasi dan informatika, yaitu :

- 1) Belum terintegrasi jaringan komunikasi dan informatika perangkat daerah;
- 2) Masih adanya desa/kelurahan Blank Spot.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan utama urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, yaitu :

- 1) belum optimalnya peran koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian daerah;

- 2) Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan untuk menjadi anggota koperasi;
- 3) Tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian daerah, tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang dinamis.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan penanaman modal, yaitu :

- 1) Masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 2) Belum memadainya sarana prasarana yang mendukung pengembangan investasi.

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olah raga, yaitu:

- 1) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 2) Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumberdaya kepeloporan;
- 3) Belum optimalnya peran Organisasi kepemudaan;
- 4) Masih kurangnya wirausahawan-usahawan muda;
- 5) Belum optimalnya pendidikan kepramukaan dalam membentuk kepribadian pemuda;
- 6) Belum adanya pendamping pengembangan kepemudaan;
- 7) Belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan SDM olahraga yang memadai.

n. Urusan Kebudayaan

Permasalahan utama urusan kebudayaan, yaitu :

- 1) Masih terbatasnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah;
- 2) Rendahnya apresiasi terhadap seni, karya, dan budaya daerah;
- 3) Terbatasnya kapasitas dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.

o. Urusan Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan, yaitu:

- 1) belum optimalnya sarana prasarana dan SDM Perpustakaan;
- 2) rendahnya minat baca masyarakat.

p. Urusan Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan, yaitu :

- 1) Kurangnya sarana prasarana dan SDM kearsipan;
- 2) Belum terselamatkannya Arsip Statis.

Urusan Pemerintahan Pilihan**a. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan, yaitu:

- 1) Masih rendahnya tingkat produksi perikanan;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengolahan hasil perikanan.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan utama urusan pariwisata, yaitu:

- 1) Belum optimalnya penataan Daya Tarik Wisata;
- 2) Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 3) Belum optimalnya kapasitas Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

c. Urusan Pertanian

Permasalahan utama urusan pertanian, yaitu :

- 1) Menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian;
- 2) Masih rendahnya penggunaan benih yang bermutu;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian;
- 4) Belum meratanya kebutuhan sarana prasarana pertanian;
- 5) Belum optimalnya pendampingan secara intensif kepada petani;
- 6) Belum optimalnya produksi peternakan baik daging, telur, maupun susu, dan produk turunannya untuk meningkatkan pendapatan peternak;
- 7) belum termanfaatkannya kotoran ternak yang siap pakai untuk kebutuhan pertanian;
- 8) Belum tersedianya Rumah Potong Unggas.

d. Urusan Perdagangan

Permasalahan utama urusan perdagangan, yaitu kenaikan inflasi yang disebabkan oleh gejolak harga pangan (Belum terpenuhinya kualitas, kuantitas, kontinuitas produk).

e. Urusan Perindustrian

Permasalahan utama urusan perindustrian, yaitu belum pulihnya kegiatan di sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB pasca pandemi covid-19.

f. Urusan Transmigrasi

Permasalahan utama urusan perindustrian, yaitu belum optimalnya pemberdayaan transmigrasi lokal.

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu :

- 1) Data sektoral yang tidak *up to date*;
- 2) Mekanisme usulan perencanaan daerah yang belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para mitra pembangunan;
- 3) Belum optimalnya perencanaan yang partisipatif;
- 4) Masih rendahnya ketersediaan data sektoral yang berkualitas;
- 5) Kurangnya pemahaman terkait mekanisme usulan perencanaan daerah.

b. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu belum berkembangnya penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah.

c. Keuangan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu

- 1) masih belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pengelolaan barang milik daerah;
- 2) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 3) Belum maksimalnya Pelayanan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;

- 4) Belum optimalnya penyusunan / pembuatan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah;
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan program aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah.

d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu belum optimalnya profesionalitas ASN

e. Pengawasan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik.

Fungsi Penunjang Lainnya

a. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- 1) Terbatasnya Sarana Prasarana Kerja Untuk Mendukung Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Minimnya Informasi Hasil Pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Kurangnya Pemahaman Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah;
- 4) kurangnya pemahaman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- 5) Belum Optimalnya Kualitas Koordinasi, Sistem Pengawasan Internal, Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah;
- 6) Adanya Perkara Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang harus ditindak lanjuti di Daerah;
- 7) Belum optimalnya pembangunan Jaring Pengaman Sosial (Keagamaan, Pangan, Kesehatan, Kepemudaan dan Pendidikan) dalam Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan;

- 8) Masih rendahnya penggunaan Produk Lokal dalam kegiatan belanja pemerintah;
- 9) Belum optimalnya kualitas Pengendalian Kegiatan Pembangunan, Pelaporan Hasil Kinerja Pembangunan dan Tata Kelola Administrasi Pembangunan;
- 10) Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;
- 11) Belum optimalnya Pengendalian Stabilitas Harga Komoditas Bahan Pokok;
- 12) Masih belum optimalnya penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponomi (alam, buatan, dan budaya).

b. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu penyusunan dan pembentukan peraturan daerah tidak bisa maksimal sesuai target dikarenakan terkendala lama waktu pembahasan yang sangat variatif dan bahan bahan pendukung dari perangkat daerah yang bersangkutan masih banyak kekurangan.

c. Kecamatan

Permasalahan utama fungsi ini, yaitu:

- 1) Adanya konflik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- 2) Belum optimalnya partisipasi demokrasi;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan ekonomi;
- 4) Belum optimalnya koordinasi perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- 5) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan atau Kelurahan.

2.3.3. Permasalahan Utama Pembangunan

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kuningan yang ingin ditangani di Tahun 2026 ada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) permasalahan utama, yaitu :

1. Permasalahan daya saing sumberdaya manusia

Permasalahan ini antara lain masih rendahnya kompetensi dan

daya saing ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan di mana TPAK-nya hanya sebesar 61,91% pada Tahun 2023, masih relatif tingginya kasus stunting, kematian bayi dan kematian ibu masing-masing sebesar 7,81% perhitungan EPPBGM (Tahun 2023), 9,25% (Tahun 2023), dan 24 kasus (Tahun 2023).

2. Permasalahan daya saing perekonomian

Permasalahan ini antara lain belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dengan angka kemiskinan sebesar 12,12% Tahun 2023 (terbesar kedua di Jawa Barat), dan masih tingginya angka pengangguran sebesar 9,49% Tahun 2023.

Pembangunan ekonomi perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur wilayah dan layanan dasar yang memadai serta menjamin adanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Beberapa capaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023 masih di bawah target seperti persentase kamantapan jalan baru mencapai 82,357% dari target 85,9%, persentase jaringan irigasi kondisi baik baru mencapai 63,81% dari target 70%, persentase akses air minum layak sebesar 90,98% dari target 97,03%, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 93,99% dari target 98,31%, dan persentase akses air minum perpipaan sebesar 35,8% dari target 41,73%.

3. Permasalahan kebencanaan dan lingkungan hidup

Permasalahan ini disebabkan karena sebagian wilayah Kabupaten Kuningan merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana alam khususnya bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti banjir bandang, banjir geomorfologis, kebakaran hutan, dan gerakan tanah/longsor. Kejadian bencana di Kabupaten Kuningan cenderung mengalami peningkatan dari 220 kejadian di Tahun 2019 menjadi 310 kejadian di Tahun 2023. Kurang optimalnya penanganan kebencanaan dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur, menurunnya produktivitas pembangunan, dan kemungkinan banyaknya korban jiwa.

4. Tantangan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Kuningan menghadapi tantangan dalam

meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus utama diarahkan pada penguatan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, serta peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik. Meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kuningan telah mencapai angka 75,40 pada tahun 2024, upaya perbaikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai target indeks sebesar 82,00 pada tahun 2026.

2.3.4. Isu Strategis Pembangunan

Dengan mempertimbangkan isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 yaitu masih tingginya angka kemiskinan dan masih tingginya tingkat pengangguran, serta memperhatikan permasalahan utama pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, maka isu strategis untuk pembangunan Tahun 2026, yaitu:

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan;
2. Pengurangan pengangguran;
3. Penurunan Stunting;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi keunggulan lokal;
5. Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa;
6. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing;
7. Tata kelola pemerintahan;

2.4. Inovasi Daerah

2.4.1. KABISA DESA (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa)

Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang menjadikan sektor pertanian termasuk peternakan di dalamnya sebagai sektor basis dan memegang peranan penting perekonomian daerah. Pembangunan peternakan merupakan bagian dari reorientasi kebijakan pertanian yang memiliki paradigma baru, yakni: secara makro berpihak kepada rakyat, adanya pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan usaha yang berkelanjutan, modern, serta profesional dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Salah satu inovasi yang dilakukan yaitu

dengan mengembangkan program Kabisa Desa (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa).

Kabisa Desa merupakan suatu konsep pengembangan pertanian terpadu antara sektor pertanian (tanaman sorgum, cabe jawa, hortikultura dan padi organik) dengan agribisnis ternak (domba, ayam, pengolahan pakan ternak, pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik) dan dengan agribisnis ikan (ikan nila dengan sistem bioplok). Program Kabisa Desa mulai dilaksanakan pada Tahun 2023.

2.4.2. GERBANG KAYA, Pelaksanaan Inovasi Gerakan Pengembangan Kambing dan Ayam.

Gerbang Kaya selaras dengan konsep *integrated farming system* yang dicirikan dengan adanya interaksi dan keterkaitan yang sinergis antar berbagai aktivitas pada sektor pertanian (padi organik, sorgum, Cabe jawa dan hortikultura) dalam mewujudkan peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Adanya keterkaitan dalam sistem produksi dapat mengurangi penggunaan dan ketergantungan pada masukan produksi eksternal baik berupa pupuk, pestisida dan benih. Berkurangnya masukan eksternal dapat mendatangkan nilai tambah yang menjadi pendapatan petani.

Gerbang Kaya di arahkan pada desa desa miskin ekstrim di kecamatan darma, yaitu Desa Tugumulya, Karangsari, Cageur, Situsari dan Paninggaran. Gerbang Kaya suatu upaya penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan ekonomi masyarakat, optimalisasi usaha ternak yang lebih efisien dan produktif yang ramah lingkungan. Nilai kebaruan kegiatan ini yaitu pengembangan usaha ternak domba yang terintegrasi dengan unit pengolahan pakan dan unit pengolahan pupuk organik dari limbah ternak padat dan cair. Dengan adanya unit pengolahan pakan dari limbah silase dan rumput odod, para peternak akan lebih efisien dalam pemberian pakan yang lebih efisien dan efektif karena tidak perlu mencari rumput setiap hari. Selanjutnya, para peternak juga dilatih dan diberi bantuan sarana prasarana untuk pengolahan pupuk organik padat dan cair dari limbah ternak domba.

Berdasarkan rangkaian tersebut para peternak selain mendapat pendapatan dari usaha ternak domba juga mendapat penghasilan dari usaha pupuk organik dan silase (pakan ternak) Ternak ayam yang dikembangkan jenisnya adalah ayam sentu diberikan pada sasaran manfaat pada keluarga miskin sebanyak 2.600 orang yang tersebar pada 5 desa miskin ektrim di Kecamatan Darma, Kebaharuan kegiatan ternak ayam diantaranya adalah jenis ayam unggul yang mempunyai produktivitas pedaging dan memiliki potensi ayam telur yang diarahkan para penerima manfaat selain bisa mengkonsumsi telur dan daging juga dikembangkan pada pengembangan usaha menjual DOC ayam sentul yang saat ini harga dan pasarannya sangat prospektif.

2.4.3. SI KOBOI NAEK KUDA PONI, Pelaksanaan inovasi sistem kolam bioflock optimalisasi ideal naikan ekonomi keluarga pelaku budidaya pondasi nikmat illahi

Produk pangan berbasis ikan menjadi andalan pemerintah dalam menopang kebutuhan pangan nasional. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah melalui teknik bioflock yang banyak diterapkan pada budidaya perikanan. Teknologi budidaya ikan sistem bioflock adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaat mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai pencernaan pakan.

Salah satu tantangan perikanan budidaya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang efisien dan berkualitas, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Isu ini menjadi penting, karena pakan merupakan penyusun terbesar dalam struktur biaya produksi usaha budidaya ikan yang mencapai lebih dari 70%. Di sisi lain, harga pakan pabrikan cenderung menunjukkan tren kenaikan, sehingga akan menyebabkan turunnya efisiensi usaha budidaya. Kondisi ini dipicu karena keterbatasan industri pakan dalam memanfaatkan bahan baku lokal untuk dijadikan pakan ikan, sehingga industri masih sangat tergantung pada bahan baku pakan impor, terutama tepung ikan. Dengan mekanisme Kegiatan KABISA Desa pembudidaya ikan akan dibekali juga dengan keterampilan pembuatan pakan ikan dengan memanfaatkan bahan baku

yang ada di sekitarnya.

Kegiatan Sistem Kolam *Bioflock* Optimalisasi Ideal Naikkan Ekonomi Keluarga Pelaku Budidaya Pondasi Nikmat Illahi (Si Kobo Naek Kuda Poni) adalah sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial pada sektor kelautan dan perikanan. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan yaitu meliputi:

1. Pengadaan prasarana budidaya perikanan, terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan beton, pekerjaan pasangan bak bulat, pekerjaan lantai, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan instalasi air, pekerjaan instalasi aerasi, pekerjaan saluran outlet dan pekerjaan lain-lain;
2. Pengadaan sarana budidaya perikanan, meliputi pengadaan benih ikan nila ukuran 8-10 cm, pengadaan pakan *starter* ukuran 1 mm, pakan pembesaran ukuran 2 mm dan pakan pembesaran ukuran 3 mm.
3. Pengadaan obat ikan dan vitamin, meliputi pengadaan probiotik serbuk, gara, gula pasir, kapur
4. Pengadaan mesin meliputi pengadaan timbangan duduk digital, Hiblow LW 240 Yasunaga, Genset 1.5 KVA setara krisbow, dan Pompa air in/out dia 1 inc 200 watt Sanyo.
5. Biaya Penunjang untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan yang meliputi rapat persiapan, atk kegiatan, persiapan kontraktual, *monitoring* dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan.

2.4.4. SIPANDUK (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)

Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan telah meningkatkan model pelayanan baik yang datang secara langsung ke kantor, langsung jemput bola ke lapangan, melalui Media sosial WhatsApp (WA) ataupun melalui aplikasi berbasis Android. Sejak merebaknya Pandemi Virus Corona-19, semua pelayanan publik mengalami imbasnya tak terkecuali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Selanjutnya pelayanan melalui

WA dan aplikasi berbasis android juga belum bisa memberikan pelayanan Adminduk secara optimal, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan mengembangkan aplikasi pelayanan adminduk online atau digital berbasis Web, dengan tema “Layanan Adminduk secara Online dan Digital untuk Membahagiakan Masyarakat Kabupaten Kuningan”

Tujuan dan sasaran dalam Program SIPANDUK adalah Untuk memberikan Kemudahan dan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan secara online dan digital, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mewujudkan pelayanan agar lebih efektif an efisien dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat kabupaten Kuningan, mafaat aplikasi ini Sebagai secara edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan teknologi informasi pentingnya kepemilikan dokumen dan pemutakhiran data kependudukan dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus bolak balik datang ke kantor.

Layanan Inovasi Program SIPANDUK merupakan kategori inovasi di Bidang Tata kelola Pemerintah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Sejalan dengan semangat informasi birokrasi yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya manusia aparatur, inovasi Program SIPANDUK diharapkan dapat memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam mengurus semua dokumen kependudukan.

Adapun metode Pelayanan Program SIPANDUK adalah sebagai berikut:

1. SIPANDUK merupakan aplikasi usulan pelayanan Adminduk secara online dan digital pada DISDUKCAPIL Kabupaten Kuningan yang berbasis Web dan Android yang memiliki Fitur.
2. Pembagian Akun dan User yang terbagi menjadi 4 level, yaitu :
 - a. Level Operator Disdukcapil
 - Berbasis Web dengan alamat:

<https://opr.sipanduk.kuningankab.go.id/>

- Untuk keamanan akun dan user, user nama dan Password ditetapkan oleh Admin dengan ditetapkan oleh SK Kadisdukcapil
- Pemroses atau verifikator usulan, baik Password maupun kolektif secara digital untuk diserahkan ke operator SIAK.

b. Level Masyarakat Secara Personal atau Mandiri

- Berbasis Web dengan alamat:
<https://sipanduk.kuningankab.go.id/>
- Berbasis Android dengan mendonlod aplikasi SIPANDUK di Playstore.
- Untuk keamanan akun atau user, user name dan password diisi dengan NIK dan Nomor KK serta diwajibkan registrasi terlebih dahulu melalui Email aktif pribadi sebelum LOGIN.
- Mengusulkan semua jenis layanan, konsolidasi data dan Nomor antrian.

c. Level Desa/Kelurahan sebagai layanan Kolektif

- Berbasis Web dengan alamat :
<https://opr.sipanduk.kuningankab.go.id//>
- Untuk keamanan akun dan user, user name dan Password ditetapkan oleh Admin dengan menandatangani Surat Pernyataan serta wajib mencantumkan Email yang aktif.
- Pengusul layanan dan konsolidasi secara kolektif bagi masyarakat yang kurang menguasai IT dimasing-masing Desa/kelurahannya.
- Pelaporan kematian, apabila ada penduduk yang meninggal dunia dimasing-masing desa/kelurahannya.
- Mengusulkan semua jenis layanan dan konsolidasi data.

d. Level Lembaga /Instansi Hasil Kerjasama Program Inovasi :

- Berbasis Web dengan alamat :
<https://opr.sipanduk.kuningankab.go.id/>
- Untuk keamanan akun dan user, User name dan Passwor ditetapkan oleh Admin dengan menandatangani Surat Pernyataan serta wajib mencantumkan Email aktif

- Pengusul layanan dan konsolidasi secara kolektif bagi masyarakat berdasarkan Program Inovasi hasil kerjasama dengan stakeholders terkait yaitu Program PULPEN PNS, PATURAI, PADUKA dan PANUTAN
- Mengusulkan jenis layanan tertentu sesuai jenis-jenis Program Inovasi dan konsolidasi data

1. Jenis-Jenis Layanan

a. KTP-el dan KIA

- KTP-el rusak atau hilang
- KIA baru

b. Kartu Keluarga (KK)

- Pembuatan KK baru
- Penambahan Anggota Keluarga (kelahiran)
- KK rusak atau hilang
- Penambahan anggota keluarga (Numpang KK)
- Pengurangan anggota keluarga

c. Akte

- Pembuatan Akte Kelahiran yang sudah masuk KK
- Pembuatan Akte Kematian
- Pembuatan Akte Perkawinan dan Perceraian (Non Muslim)

d. Surat Keterangan

Perpindahan keluar kabupaten atau Provinsi

2. Pelaporan kematian dari level Desa/kelurahan secara kolektif

3. Konsolidasi Perbedaan data secara Personal maupun kolektif

4. Nomor Antrian untuk level Personal.

2.4.5. GERBANG BERKAH (Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah)

Gerbang berkah merupakan inovasi bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar siswa dimulai dari jenjang Pendidikan PAUD, SD, dan SMP. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kuningan, Nomor: 420/3012/Disdikbud, tentang Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah (Gerbang Berkah),

pelaksanaan program ini dalam rangka implementasi kurikulum merdeka dan upaya mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta menumbuhkan kehidupan sosial di sekolah dengan kondisi lingkungan yang menyenangkan, melalui pengembangan nilai moral, etika baik, dan sikap toleransi di antara warga sekolah yang berlandaskan pada agama.

Tujuan pelaksanaan program Gerbang Berkah adalah gerakan dalam membangun kebersamaan, kekompakan antar siswa, guru, tenaga kependidikan di sekolah, termasuk dengan masyarakat setempat guna menyatukan perbedaan menjadi landasan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan rasa toleransi yang disinergikan dengan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari Jumat, Kegiatan Gerbang Berkah meliputi:

1. Mengaji bersama
2. Sholat Dhuha
3. Tausiah atau kuliah 7 (tujuh) menit (kultum)
4. Sholat Jum'at berjamaah di Masjid
5. Makan bersama (berbagi bekal makanan)

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah pada bab ini akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global terhadap perekonomian daerah. Didalamnya termasuk estimasi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar bagi pengambilan kebijakan anggaran. Tujuan utamanya adalah perencanaan anggaran berbasis kinerja melalui pengalokasian belanja yang efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rumusan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2026 memuat penjelasan capaian ekonomi di awal tahun 2025 dan target capaian tahun 2026, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah dalam perekonomian. Arah kebijakan ekonomi tersebut memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Barat. Sesuai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Wilayah Jawa akan fokus pada pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, serta kawasan komoditas unggulan terutama untuk Kabupaten Kuningan pada energi di Citarum-Cimanuk-Cisanggarung serta penguatan pengelolaan hutan lestari di Taman Nasional Ciremai.

Sementara itu, untuk mendukung arah kebijakan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Barat sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintah di daerah dan bagian integral dari pembangunan nasional juga memiliki tema pembangunan tahun 2026 yaitu Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar.

Selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, Kabupaten Kuningan sesuai yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 memiliki Arah Kebijakan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026

adalah Pemenuhan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pariwisata, dan SDM.

Penetapan arah kebijakan daerah dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pencapaian pembangunan yang diwakili oleh indikator kinerja yang mencerminkan penuntasan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat sebagaimana disajikan dalam tabel pencapaian indikator makro pembangunan berikut.

Tabel 3.1 Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,16	70,99	71,56	1,4
2	Prosentase Kemiskinan (%)	12,76	12,12	11,88	-0,88
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,81	9,49	7,78	-2,03
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53	5,25	5,61	0,08
5	Pengeluaran perkapita (Rp)	9.620.000,-	10.011.000,-	10.418.000	798.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,345	0,351	0,372	0,027

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2024

Keterangan: * data belum dikeluarkan BPS

3.1.1. Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2022 - 2024

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

Secara umum, indikator makro pembangunan ekonomi pada periode 2022–2024 menunjukkan arah perbaikan yang positif. IPM yang terus meningkat menandakan kualitas pembangunan manusia mengalami kemajuan. Kemiskinan dan pengangguran berhasil ditekan, dengan penurunan signifikan terutama pada tingkat pengangguran terbuka.

Pertumbuhan ekonomi yang kembali menguat pada 2024 menunjukkan adanya pemulihan setelah sedikit melambat pada 2023.

Untuk mengetahui besaran ekonomi secara aktual dan struktur perekonomian antar-sektor (sektor mana yang paling besar kontribusinya) di Kabupaten Kuningan dapat dilihat dari nilai PDRB ADHB. Analisis terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut, selama periode 2020–2024 struktur perekonomian Kabupaten Kuningan menunjukkan tren pertumbuhan positif. Nilai PDRB meningkat konsisten setiap tahun dengan kontribusi terbesar masih berasal dari sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, dan transportasi. Perkembangan paling menonjol terlihat pada sektor transportasi dan pergudangan yang hampir menggandakan kontribusinya dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan semakin kuatnya aktivitas logistik, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi juga terus tumbuh, sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital. Sektor jasa, baik pendidikan maupun jasa lainnya, menunjukkan kontribusi besar dan pertumbuhan yang stabil. Di sisi lain, beberapa sektor seperti listrik dan gas serta jasa perusahaan mengalami fluktuasi pada tahun terakhir, yang bisa menjadi catatan untuk evaluasi kebijakan sektor tersebut. Secara keseluruhan, ekonomi daerah semakin terdiversifikasi, tidak hanya bertumpu pada sektor primer (pertanian), tetapi juga didukung sektor sekunder dan tersier yang berkembang pesat.

**Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024
(Miliar Rupiah)**

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.302,21	6.435,08	7.026,81	7.723,37	8.253,92
2.	Pertambangan dan Penggalian	312,73	369,59	375,77	407,76	419,64
3.	Industri Pengolahan	577,69	610,72	663,71	719,05	805,34
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	22,38	25,49	27,32	28,79	27,63
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26,32	28,56	30,01	31,11	36,69
6.	Konstruksi	2.090,20	2.342,69	2.533,80	2.750,90	2.868,04
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	3.586,95	3.785,58	4.106,71	4.424,73	4.773,35
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.591,64	3.673,81	4.353,13	5.194,09	6.276,13

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	466,23	484,72	568,47	641,89	692,77
10.	Informasi dan Komunikasi	1.094,15	1.154,70	1.211,23	1.306,64	1.483,02
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.414,09	1.557,61	1.667,16	1.789,77	1.913,27
12.	Real Estate	655,42	732,08	798,74	865,88	913,01
13.	Jasa Perusahaan	112,74	123,82	145,33	161,89	156,32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	940,97	932,41	919,34	958,83	1.045,15
15.	Jasa Pendidikan	3.182,13	3.374,44	3.638,16	3.924,13	4.127,25
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401,02	440,21	473,30	514,21	521,23
17.	Jasa Lainnya	842,00	847,60	980,84	1.101,86	1.223,00
PDRB		25.618,87	26.919,10	29.519,83	32.544,89	35.535,77

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) Angka Sementara, **): Angka Sangat Sementara

Selanjutnya, untuk menilai pertumbuhan ekonomi riil (seberapa besar volume produksi meningkat), digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), karena pengaruh inflasi dihilangkan. Selama periode 2020–2024, perekonomian daerah menunjukkan pertumbuhan riil yang konsisten, dengan PDRB meningkat dari Rp16,88 triliun menjadi Rp20,51 triliun. Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

Sektor pertanian masih menjadi salah satu penyumbang terbesar, meskipun pada 2024 terlihat adanya penurunan kinerja. Hal ini dapat menjadi peringatan terkait tantangan sektor primer, seperti keterbatasan produktivitas atau dampak perubahan iklim. Sebaliknya, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling pesat, hampir 50% dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan meningkatnya aktivitas logistik, distribusi, dan mobilitas masyarakat. Informasi dan komunikasi juga tumbuh kuat, menandakan transformasi digital dan pergeseran menuju ekonomi berbasis teknologi. Sektor perdagangan masih besar kontribusinya, tetapi pertumbuhannya mulai melambat. Sektor jasa, terutama pendidikan dan kesehatan, tumbuh stabil dan semakin memperkuat fondasi pembangunan manusia.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi daerah semakin beragam. Pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada pertanian, tetapi juga ditopang oleh sektor jasa modern dan transportasi. Namun, ada catatan bahwa

pertanian dan perdagangan besar cenderung stagnan, sehingga perlu perhatian agar tidak tertinggal dibanding sektor lain.

**Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2024
(Miliar Rupiah)**

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.591,62	3.675,49	3.812,90	3.894,39	3.644,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	217,43	245,14	243,51	245,97	262,35
3.	Industri Pengolahan	416,25	430,15	453,98	475,00	502,71
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	14,79	16,77	17,36	17,90	19,20
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16,32	17,36	17,85	18,36	20,81
6.	Konstruksi	1.433,51	1.534,20	1.579,41	1.659,77	1.709,76
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	2.655,96	2.751,05	2.862,89	2.982,16	2.991,73
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.287,91	2.293,42	2.580,10	2.837,97	3.403,93
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	307,84	310,70	349,94	374,25	395,07
10.	Informasi dan Komunikasi	1.142,56	1.223,60	1.304,80	1.402,17	1.655,75
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	859,97	903,64	894,50	936,16	974,68
12.	Real Estate	554,89	618,42	653,07	695,21	770,49
13.	Jasa Perusahaan	75,83	82,81	92,48	98,86	91,96
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	540,31	531,67	525,34	538,67	566,57
15.	Jasa Pendidikan	1.843,53	1.896,95	2.020,36	2.130,30	2.280,56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	292,77	314,78	333,66	350,25	372,65
17.	Jasa Lainnya	631,27	636,86	708,17	761,35	844,38
PDRB		16.882,76	17.483,02	18.450,34	19.418,73	20.507,27

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Struktur ekonomi daerah dalam periode 2020–2024 mengalami pergeseran yang cukup berarti. Pertanian masih menjadi sektor terbesar, namun kontribusinya terhadap PDRB terus menurun. Sebaliknya, transportasi dan pergudangan tumbuh pesat hingga mencapai 17,66% di tahun 2024, menandakan semakin pentingnya sektor logistik dan mobilitas dalam mendorong perekonomian daerah.

Sektor perdagangan besar dan eceran, yang sebelumnya menjadi salah satu penopang utama, menunjukkan tren menurun. Demikian pula, jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan mengalami penurunan peran relatif. Hal ini mengindikasikan terjadinya pergeseran kontribusi dari sektor

tradisional dan layanan publik ke arah sektor jasa modern dan transportasi.

Sementara itu, sektor-sektor seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil. Industri pengolahan justru masih rendah kontribusinya (sekitar 2%), yang berarti industrialisasi di daerah belum berkembang signifikan.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bahwa perekonomian daerah sedang bergerak menuju diversifikasi yang lebih kuat, dengan transportasi dan jasa modern semakin mendominasi, sementara peran pertanian dan perdagangan relatif menurun.

Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020–2024 (%)

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,60	23,91	23,80	23,73	23,23
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,22	1,37	1,27	1,25	1,18
3.	Industri Pengolahan	2,25	2,27	2,25	2,21	2,27
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10
6.	Konstruksi	8,16	8,70	8,58	8,45	8,07
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	14,00	14,06	13,91	13,60	13,43
8.	Transportasi dan Pergudangan	14,02	13,65	14,75	15,96	17,66
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,82	1,80	1,93	1,97	1,95
10.	Informasi dan Komunikasi	4,27	4,29	4,10	4,01	4,17
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,52	5,79	5,65	5,50	5,38
12.	Real Estate	2,56	2,72	2,71	2,66	2,57
13.	Jasa Perusahaan	0,44	0,46	0,49	0,50	0,44
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,67	3,46	3,11	2,95	2,94
15.	Jasa Pendidikan	12,42	12,54	12,32	12,06	11,61
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,57	1,64	1,60	1,58	1,47
17.	Jasa Lainnya	3,29	3,15	3,32	3,39	3,44
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Selama 2020–2024, perekonomian daerah mengalami pemulihan signifikan setelah pandemi. Pertumbuhan ekonomi total kembali stabil di atas 5% sejak 2022, menandakan perbaikan aktivitas produksi dan konsumsi.

Sektor yang menjadi motor utama pertumbuhan adalah transportasi dan pergudangan serta informasi dan komunikasi. Transportasi bangkit seiring meningkatnya mobilitas dan logistik, sementara sektor informasi mencerminkan transformasi digital. Selain itu, real estate, jasa lainnya, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan tren positif yang mendukung pertumbuhan jangka menengah.

Namun, ada tantangan serius pada sektor pertanian, yang justru berkontraksi tajam pada 2024 setelah sebelumnya tumbuh stabil. Hal ini berpotensi mengganggu struktur ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor primer. Perdagangan juga menunjukkan gejala stagnasi, sementara jasa perusahaan berfluktuasi tajam.

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan adanya pergeseran kekuatan ekonomi dari sektor tradisional ke sektor jasa modern dan digital, dengan tetap menjaga peran penting sektor sosial (pendidikan dan kesehatan).

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Sektor pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020–2024 (%)

No.	Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,44	2,34	3,74	2,14	-6,41
2.	Pertambangan dan Penggalan	-2,70	12,74	-0,66	1,01	6,66
3.	Industri Pengolahan	1,08	3,34	5,54	4,63	5,83
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,99	13,34	3,56	3,07	7,30
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,85	6,39	2,79	2,87	13,36
6.	Konstruksi	-7,15	7,02	2,95	5,09	3,01
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	-3,00	3,58	4,07	4,17	0,32
8.	Transportasi dan Pergudangan	-1,51	0,24	12,50	9,99	19,94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,82	1,10	12,44	6,95	5,56
10.	Informasi dan Komunikasi	24,27	7,09	6,64	7,46	18,08
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	5,08	-1,01	4,66	4,11
12.	Real Estate	0,34	11,45	5,60	6,45	10,83
13.	Jasa Perusahaan	-2,83	9,21	11,68	6,89	-6,98
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	-3,79	-1,60	-1,19	2,54	5,18
15.	Jasa Pendidikan	1,69	2,90	6,51	5,44	7,05
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,26	7,52	6,00	4,97	6,40
17.	Jasa Lainnya	-2,83	0,89	11,20	7,51	10,91
PDRB		0,11	3,56	5,53	5,25	5,61

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Ketenagakerjaan

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketenagakerjaan, antara lain, yaitu melalui: a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); b) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan c) Angka Beban Ketergantungan. TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada Tahun 2024 tercatat TPAK penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 65,84 persen. Pada

Tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 7,78 persen, mengalami penurunan sebesar 0,71 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 yang berada pada angka 8,49 persen. Penurunan jumlah pengangguran terbuka sejalan dengan mulai pulihnya sektor ekonomi produktif yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi Angkatan kerja produktif di Kabupaten Kuningan.

Menurut BPS Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024, dari 938.846 jiwa penduduk usia kerja, 618.129 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran) dan 320.717 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari penduduk yang sekolah, mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dsb)

Tabel 3.6 Tabel Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia 15 Tahun keatas	936.247	987.056	920.304	926.786	938.846
Angkatan Kerja	521.677	542.782	530.825	574.169	618.129
- Bekerja	463.164	479.405	478.750	519.658	570.023
- Pengangguran Terbuka	58.513	63.377	52.075	54.511	48.106
Bukan Angkatan Kerja	320.072	307.770	328.136	352.617	320.717
- Sekolah	55.411	53.583	58.196	73.855	66.284
- Mengurus Rumah Tangga	205.229	193.093	216.398	239.617	209.637
- Lainnya	59.432	61.094	53.542	39.145	44.796
TPAK (%)	61,98	63,82	61,80	61,95	65,84
TPT (%)	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
TKK (%)	88,78	88,32	90,19	90,51	92,22

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2024

*) : Angka Sementara

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi untuk melihat tingkat beban ekonomi individu dan rumah tangga. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 3. 7 Angka Beban Ketergantungan
Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024**

Tahun	Angka Beban Ketergantungan
2020	46,31
2021	46,40
2022	46,55
2023	46,32
2024	46,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2024

Selama periode 2020-2024 angka beban ketergantungan cenderung mengalami kenaikan yang mengindikasikan program pembangunan belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya pada penduduk usia non produktif sehingga beban tanggungan kelompok usia produktif menjadi meningkat. Pada tahun 2020, ABT tercatat sebesar 46,31, kemudian meningkat sedikit menjadi 46,40 di tahun 2021, dan mencapai puncaknya di 46,55 pada tahun 2022. Namun, di tahun 2023, angka ini menurun menjadi 46,32, sebelum kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 46,46 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 jumlah usia produktif di Kabupaten Kuningan lebih banyak dari pada usia tidak produktif.

2. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sedangkan indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah

indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan Tahun 2024 mengalami penurunan 0,24% yaitu menjadi 11,88%. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin pun berkurang sekitar 2 ribu orang dengan garis kemiskinan naik Rp18.100,- perkapita perbulan.

Tabel 3.8 Angka Kemiskinan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Angka Kemiskinan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	139,20	143,35	140,25	133,88	131,83
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	352.358	358.069	371.665	402.767	420.867
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

3. Gini Rasio

Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna.

Selama periode 2020–2022, Gini Ratio menunjukkan tren penurunan sehingga ketimpangan pendapatan semakin berkurang. Namun, sejak 2023 hingga 2024 terjadi peningkatan kembali, bahkan cukup tajam pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan baru dalam pemerataan ekonomi yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

Tabel 3.9 Gini Ratio Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Ratio	0,361	0,349	0,345	0,351	0,379

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) Angka Belum dikeluarkan oleh BPS

4. Inflasi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Kota Cirebon sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 0,09 persen, dan hal tersebut jauh lebih rendah dibanding rata-rata inflasi Provinsi Jawa Barat (1,64 %). Angka ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi kenaikan harga

secara umum yang relatif rendah. Data ini mengacu pada hasil Survei Harga Konsumen (SHK) dan digunakan juga sebagai acuan oleh Kabupaten Kuningan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2026

Prospek perekonomian Kabupaten Kuningan, tidak terlepas dari tantangan dan prospek pada tataran lingkungan sekitarnya baik itu secara global, nasional maupun perkembangan perekonomian regional Provinsi Jawa Barat serta perekonomian Kabupaten Kuningan sendiri. Tahun 2026, target pencapaian pembangunan ekonomi daerah diproyeksikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.10 Target Kinerja Indikator Makro Pembangunan Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,09	71,43	72,00
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,70	10,42-11,5	10,72
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,04	6,15-6,7	6,76
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,81	02,58-7.03	5,99
5	Rasio Gini	Poin	0,336	0,347-0,36	0,339
6	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	Juta Rupiah	18,90	28,95	33,71
7	Kontribusi PDRB	Persen	n/a	1,25	1,26

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

A. Tantangan serta Prospek Perekonomian Global dan Nasional

Memasuki tahun 2026, perekonomian global dan nasional menghadapi dinamika yang kompleks dan saling berkaitan. Ketidakpastian eksternal seperti proteksionisme perdagangan, ketegangan geopolitik, hingga perubahan iklim memberikan tekanan tersendiri terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka menengah hingga panjang.

Ekonomi global diperkirakan tumbuh moderat pada kisaran 3,0–3,1% berdasarkan proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Dimana pertumbuhan ekonomi ini dibayangi sejumlah resiko:

- 2.5. Meningkatnya proteksionisme dan ketidakpastian kebijakan dagang, khususnya dari negara-negara maju, menghambat arus perdagangan internasional dan merusak integrasi ekonomi global;
- 2.6. Gangguan rantai pasok dan proses deglobalisasi memperlambat efisiensi produksi dan distribusi global;
- 2.7. Ketegangan geopolitik dan konflik regional meningkatkan volatilitas harga komoditas dan memperlemah sentimen pasar;
- 2.8. Keterbatasan kebijakan fiskal dan moneter akibat tingginya utang publik dan inflasi yang belum sepenuhnya terkendali.

Di tengah kondisi global yang menantang, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik, dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 4,8% pada 2026. Namun demikian, sejumlah tantangan perlu dicermati:

- a. Tekanan fiskal dan pengelolaan defisit anggaran, seiring ekspansi belanja dan pembentukan dana abadi strategis.
- b. Inflasi dan depresiasi nilai tukar, yang dapat menekan daya beli masyarakat dan stabilitas harga domestik.
- c. Defisit transaksi berjalan yang berpotensi membebani sektor eksternal.
- d. Hambatan struktural dalam investasi asing, termasuk birokrasi dan ketidakefisienan BUMN.
- e. Risiko iklim dan pangan yang mulai berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dan ketahanan energi.

Tahun 2026 merupakan masa transisi menuju tatanan ekonomi global yang baru, dengan tantangan besar namun juga peluang strategis. Bagi Indonesia, menjaga momentum pertumbuhan sambil mengakselerasi reformasi struktural akan menjadi kunci. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Tantangan serta Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat

Memasuki tahun 2026, perekonomian Jawa Barat berada pada momentum strategis yang penuh potensi namun juga dibayangi tantangan yang kompleks. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di

Indonesia dan salah satu pusat industri nasional, Jawa Barat memiliki peran kunci dalam pencapaian target pembangunan ekonomi nasional. Namun, untuk memaksimalkan peran tersebut, diperlukan upaya terarah dalam menghadapi berbagai dinamika global, nasional, dan regional.

Berbagai tantangan struktural dan sektoral masih membayangi perekonomian Jawa Barat. Ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan, terutama dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan pelayanan dasar, masih menjadi hambatan utama. Keterbatasan konektivitas wilayah, terutama di daerah selatan dan perbatasan, berdampak pada rendahnya produktivitas serta terhambatnya distribusi barang dan jasa.

Selain itu, transformasi digital yang berkembang pesat belum sepenuhnya merata. Masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini berisiko memperlebar jurang ketimpangan ekonomi, terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil di daerah terpencil.

Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi serta kebutuhan akan tenaga kerja terampil juga menjadi tantangan tersendiri. Sementara sektor industri masih menjadi penopang utama perekonomian daerah, ketergantungan pada manufaktur konvensional menghadirkan risiko bila tidak diiringi dengan inovasi dan peningkatan daya saing. Selain itu, perubahan iklim, ancaman bencana, serta isu ketahanan pangan turut memperumit dinamika pembangunan ekonomi di daerah ini.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekonomi Jawa Barat tetap terbuka lebar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui RPJMD 2025–2029 telah menargetkan pertumbuhan ekonomi regional sebesar 7–8% dalam lima tahun ke depan. Untuk mendukung target tersebut, berbagai kebijakan prioritas telah dirancang, mulai dari percepatan pembangunan kawasan industri baru seperti Rebana Metropolitan, penguatan konektivitas wilayah, hingga pengembangan ekonomi digital berbasis inklusi.

Kawasan Rebana yang mencakup Cirebon, Subang, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan sekitarnya diharapkan menjadi episentrum baru pertumbuhan industri, investasi, dan lapangan kerja. Dengan dukungan

infrastruktur strategis seperti Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban, wilayah ini berpotensi menjadi daya tarik utama investasi domestik dan asing.

Di sisi lain, ekonomi digital Jawa Barat juga menunjukkan geliat yang positif. Nilai transaksi digital di wilayah ini terus tumbuh pesat, khususnya di kota-kota seperti Bandung, Cimahi, dan Bogor. Program akselerasi UMKM digital, digitalisasi rantai pasok, serta penguatan ekosistem startup turut menjadi motor pertumbuhan baru yang inklusif dan berbasis inovasi.

Upaya pemerataan pembangunan juga terus didorong melalui penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, serta pengembangan sektor pertanian modern yang adaptif terhadap perubahan iklim.

C. Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Pada tahun 2026, Kabupaten Kuningan menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari kawasan penyangga pertumbuhan industri di wilayah Rebana Metropolitan, Kuningan memiliki posisi strategis, namun harus berjuang mengatasi sejumlah persoalan struktural, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan kualitas sumber daya manusia.

Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 berada di 7,78%, menurun dari tahun sebelumnya, namun tetap tergolong tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Di sisi lain, tingkat kemiskinan tercatat masih di 11,88%, menandakan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah.

Minimnya sektor industri formal di wilayah ini menjadi penyebab utama keterbatasan serapan tenaga kerja, terutama bagi lulusan SMA dan perguruan tinggi. Sebagian besar angkatan kerja masih bergantung pada sektor pertanian tradisional, perdagangan kecil, dan pekerjaan informal lainnya. Keterbatasan akses pelatihan vokasi dan rendahnya daya saing SDM

turut memperburuk tantangan ini.

Meski demikian, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mendorong peningkatan ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Kuningan bekerja sama dengan berbagai pihak telah menyelenggarakan bursa kerja serta program pelatihan dan pemberdayaan, yang telah menjangkau kelompok perempuan dari berbagai kecamatan guna mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga melalui usaha mikro.

Kedepan, integrasi Kabupaten Kuningan ke dalam pengembangan kawasan Rebana menjadi peluang besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, hal ini menuntut kesiapan dari sisi SDM, infrastruktur, dan kebijakan lintas sektor yang mendukung. Transformasi ekonomi yang berorientasi pada penguatan sektor agroindustri, pariwisata berbasis potensi lokal, dan ekonomi kreatif menjadi langkah strategis untuk membuka lapangan kerja baru yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Prakiraan Perekonomian Kedepan

Memasuki tahun 2026, Kabupaten Kuningan berada dalam fase penting untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, sekaligus merespons tantangan struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan. Dengan posisi strategis di wilayah selatan Rebana Metropolitan, Kuningan berpeluang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru jika mampu memanfaatkan momentum kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan tetap signifikan. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional dan sektor informal, yang menyerap banyak tenaga kerja namun dengan produktivitas rendah. Keterbatasan sektor industri formal serta minimnya investasi dalam hilirisasi produk lokal menjadi penghambat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

E. Tantangan serta Prospek Perekonomian Kabupaten Kuningan

Analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Kabupaten Kuningan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Analisis SWOT Ekonomi Kabupaten Kuningan

<i>Strengths</i>	<i>Weakness</i>	<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
- Kepemilikan potensi sumberdaya pertanian sebagai sektor dominan perekonomian. - Kekayaan destinasi pariwisata alami sebagai sektor unggulan yang dikembangkan untuk sumber pendapatan daerah. - Ketersediaan SDM yang sebagian besar adalah usia produktif. - Keberadaan IKM berbahan baku produk pertanian. - Stabilitas makro ekonomi daerah yang terjaga	- Sektor Pertanian sebagai sektor dominan mengalami penurunan. - Ketersediaan SDM yang terbatas dan kualitas SDM di bidang pertanian dan pariwisata yang masih rendah. - Terbatasnya sarana prasarana pertanian dan pariwisata. - Rendahnya pengembangan produk, destinasi dan daya tarik wisata. - Inovasi dan kualitas produk masih rendah dan sebagian bahan baku produksi masih tergantung pada daerah lain - Pertumbuhan ekonomi disertai meningkatnya ketimpangan pendapatan dan wilayah. - Pertumbuhan ekonomi belum berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan secara signifikan - Keterbatasan wirausahawan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah.	- Memiliki topografi yang indah dan tanah yang subur sehingga dapat mendukung aktivitas di sektor pertanian dan pariwisata. - Peluang pasar dalam negeri dan luar negeri produk pertanian Kuningan terus berkembang. - Stabilitas ekonomi regional, global dan nasional. - Infrastruktur (Tol Cipali, Cisumdawu dan BIJB) yang telah mempercepat jarak tempuh wisatawan dalam dan luar negeri masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan. - Adanya tematik sektoral dan kewilayahan. - Adanya arah pengelolaan metropolitan Cirebon Raya dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Cirebon. - Masuknya Kuningan sebagai bagian dari pengembangan Kawasan metropolitan REBANA	- Potensi bencana akibat aktivitas gunung berapi (Gunung Ciremai) yang bisa terjadi kapan saja dapat mengganggu aktivitas perekonomian. - Daya saing ekonomi Kabupaten tetangga yang meningkat. - Persaingan produk serupa yang semakin tinggi. - Masuknya produk impor yang lebih bersaing dari produk lokal. - Infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi yang lebih baik di daerah tetangga yang lebih menarik investor dari luar untuk masuk.

3.1.3. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi tidak terpisah dari permasalahan-permasalahan diluar kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kuningan dirancang untuk bersifat ramah lingkungan hidup dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth* dan *pro-environment*. Masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, pemulihan ekonomi, peningkatan daya beli, pemberdayaan masyarakat, serta kondisi lingkungan hidup tetap menjadi dasar dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan kedepan.

Aspek kehidupan sosial ekonomi mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan untuk merespon pengentasan kemiskinan dan pengangguran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan Tahun 2025 diarahkan dalam rangka Mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Terdapat target utama pembangunan yang akan menjadi konsentrasi utama pada Tahun 2025, antara lain:

A. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sedangkan indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan Tahun 2024 mengalami penurunan 0,24% yaitu menjadi 11,88%. Jika dilihat dari jumlah penduduk

miskin pun berkurang sekitar 2 ribu orang dengan garis kemiskinan naik Rp18.100,- perkapita perbulan

Tabel 3. 12 Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Angka Kemiskinan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	139,20	143,35	140,25	133,88	131,83
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	352.358	358.069	371.665	402.767	420.867
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

*) : Angka Sementara, **) : Angka Sangat Sementara

B. Pembangunan Manusia

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan tercatat sebesar 71,56. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat yang telah mencapai 74,92. Capaian IPM 71,56 juga mencerminkan masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi demografis, terutama dari kelompok usia produktif. Untuk itu, strategi pembangunan manusia ke depan perlu difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk penguatan program pencegahan penyakit, layanan ibu-anak, dan percepatan penanganan stunting.
2. Perluasan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, dengan dukungan fasilitas serta peningkatan kompetensi guru.
3. Penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan pelibatan masyarakat dalam sektor produktif.

C. Angkatan Kerja

Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 mencapai 65,84%. Angka ini mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif

secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 7,78% pada tahun 2024, menempatkan Kuningan sebagai salah satu wilayah dengan angka pengangguran yang masih relatif tinggi di wilayah Jawa Barat.

Pengangguran terbuka di Kuningan tidak hanya mencakup mereka yang belum bekerja namun aktif mencari pekerjaan, tetapi juga termasuk individu yang sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Kondisi ini mencerminkan masih adanya ketimpangan antara pasokan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja produktif, terutama di daerah perkotaan, yang menunjukkan angka pengangguran lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

D. Kesehatan

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi kualitas kesehatan seseorang semakin tahan terhadap gangguan kesehatan, dan semakin preventif terhadap ancaman penyakit. Derajat kesehatan penduduk Kabupaten Kuningan relatif baik, diantaranya ditunjukkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2024 yang relatif tinggi sebesar 75,22 Tahun, tetapi tetap perlu dilakukan pengawasan (*controlling*) terhadap kegiatan pelayanan kesehatan (dasar dan rujukan) dan kegiatan promotif dan rehabilitatif kesehatan secara kontinu.

Hasil survey nasional menunjukkan, aspek yang berpengaruh terhadap UHH di Kabupaten Kuningan meliputi perlunya peningkatan pelayanan bagi penduduk yang berobat jalan ke fasilitas medis, peningkatan penolong kelahiran oleh petugas medis, peningkatan balita yang pernah diberi imunisasi, penurunan gini ratio, peningkatan jumlah dokter, dan peningkatan rumah tangga menggunakan sumber air minum bersih.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Faktor kemampuan keuangan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor yang penting, ditunjang kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang

cermat dan akurat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset daerah karena menjadi sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan laporan yang diterima, kontribusi CSR di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2019 mencapai Rp3.266.707.632,00 yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

- Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dan kegiatan perbaikan sarana prasarana sekolah.
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
- Bidang ekonomi, berupa pemberian bantuan untuk UMKM.
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana.
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi penduduk miskin, bantuan air bersih, pembagian zakat kepada masyarakat miskin yatim dan dhuafa, dan pemberian bahan makanan untuk santri dan siswa Sekolah Dasar.
- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, serta program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Pada Tahun 2020 dana CSR di Kabupaten Kuningan mengalami

penurunan, hanya sebesar Rp1.575.193.945,00. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya jumlah perusahaan yang melaporkan program dan kegiatan CSR. Dana CSR tersebut oleh perusahaan dilaksanakan untuk kegiatan:

- Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa.
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana.
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa kegiatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), membantu pasien tidak mampu dan orang terlantar, anak yatim di berbagai yayasan panti, gerakan wakaf Al-Qur'an, dan sumbangan sosial keagamaan lainnya, mendukung kegiatan pengadaan dan perbaikan sarana prasarana umum seperti rehabilitasi jalan, pembangunan masjid, dan pengadaan perlengkapan olahraga.
- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan, dan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
- Bidang ekonomi, membantu pengembangan sektor pertanian, pariwisata, peternakan, dan UMKM.

Berdasarkan laporan sementara, dana CSR Kabupaten Kuningan Tahun 2022 mencapai sebesar Rp2.011.080.900,00 yang telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

- Bidang pendidikan, pemberian berupa perlengkapan sekolah dan buku bacaan.
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
- Bidang ekonomi, berupa pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan untuk Usaha Mikro Kecil.

- Bidang sosial dan keagamaan, berupa bantuan program bakti sosial berupa pengobatan gratis, khitanan massal, donor darah, santunan anak yatim, santunan kepada lansia, santunan kepada penderita stunting, pemberian makanan tambahan gizi ke balita dan ibu hamil.
- Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, serta program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan mengadakan sosialisasi kesehatan ibu menyusui dan ibu hamil.
- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Pada Tahun 2023 terjadi penurunan realisasi pendanaan melalui CSR. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan tidak melaporkan kegiatan CSR nya pada tahun 2023. Kegiatan CSR tersebut dilakukan diberbagai sektor yang mendukung pencapaian target dan tujuan Kabupaten Kuningan. Berikut ini sektor dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan melalui dana CSR:

- Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dan kegiatan perbaikan sarana prasarana sekolah.
- Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
- Bidang ekonomi, berupa pemberian bantuan untuk UMKM.
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana.
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi penduduk miskin, bantuan air bersih, pembagian zakat kepada masyarakat miskin yatim dan dhuafa, dan pemberian bahan makanan untuk santri dan siswa Sekolah Dasar.
- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan laporan sementara, dana CSR Kabupaten Kuningan Tahun 2024 mencapai sebesar Rp5.130.065.362,00 yang telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

- Bidang Pendidikan, berupa kegiatan *Factorytour* dalam rangka pengembangan pendidikan 3 (tiga) sekolah, beasiswa pendidikan, bantuan sarana pendidikan dan kegiatan bidang pendidikan lainnya.
- Bidang Kesehatan, berupa kegiatan sahabat posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Balita, BPJS Ketenagakerjaan Warga, Pemberian makanan tambahan balita (Stunting), Menyiapkan konsumsi sehat dan bergizi untuk peserta posyandu (Anak Stunting), Program Posyandu Binaan, Konsultasi Gizi dan Skrining Anak Sekolah, Seminar Awam Demam Berdarah, Bakti sosial Pengobatan Gratis, Skrining Stunting, Hari Kesehatan Nasional, Kesehatan (Pengobatan Gratis, Khitanan Massal, Seminar dan Penyuluhan Kesehatan)
- Bidang lingkungan hidup, berupa Festival Ciremai 2024, Hari Lingkungan Hidup Dunia 2024, Pengadaan Alat Berta Bulldozer. Penataan Lingkungan perbaikan saluran drainase dan rehabilitasi, partisipasi pengadaan bak sampah, serta penanaman pohon.
- Bidang ekonomi, berupa Bantuan Kegiatan Pengemasan UMKM, pemberian bantuan untuk UMKM, kegiatan Maremaan UMKM 2024, Penyediaan Sarana Prasarana Pengrajin Anyaman Rotan.
- Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan, berupa Pegelaran Wayang Golek, Rehabilitasi Stadion Mashud Wisnusaputra, Penataan Lapangan Sepakbola, kegiatan Darma Sagara Fest, Bulan Bakti Karang Taruna.
- Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana, Pengadaan Tabung APAR, Bantuan Sosial Kebencanaan.
- Bidang sosial dan keagamaan, berupa Pembangunan Masjid, Pembangunan Sarana Prasarana Mushola, Kegiatan berbagi takjil, Bantuan kegiatan peringatan HUT RI, Bantuan kegiatan sosial dalam rangka HUT Dharma Wanita, Pemberian sembako kepada masyarakat

kurang mampu, Pemberian Bantuan tunai kepada Tokoh Agama dan Ormas, Distribusi Hewan Kurban, Kegiatan Tilawatil Quran, Partisipasi Wakaf Gedung MUI Kuningan, Sponsorship HUT Bhayangkara, Bantuan Dana Ponpes, Kegiatan Tabligh Akbar, Santunan Anak Yatim piatu dan lansia.

- Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Untuk pelaksanaan CSR Tahun 2025 Pemerintah Daerah akan menawarkan dan mengarahkan alokasi CSR pada program dan kegiatan dalam upaya menunjang penanggulangan kemiskinan, pengangguran, stunting, pengendalian inflasi, serta berbagai bentuk kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan selaras dengan isu Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keberlangsungan pembangunan daerah sangat tergantung dari kemandirian keuangan daerah atau kemampuan fiskal daerah. Daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatannya. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Mengingat karakteristik pendapatan yang berbeda, proyeksi pendapatan diperhitungkan dari perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah dan berbagai asumsi yang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan di masa mendatang. Beberapa asumsi digunakan dalam memproyeksi besaran pendapatan daerah. Asumsi perhitungan PAD menggunakan pendekatan pertumbuhan rata-rata untuk setiap jenis pajaknya.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026 diawali dengan merasionalisasi PAD di Tahun 2025 (mengalami penurunan 27,50 persen dari target PAD di Tahun 2024). Hal ini sebagai respon dari perhitungan yang terlalu optimis terhadap dampak pemulihan ekonomi masyarakat yang perlu

dikoreksi. Selanjutnya untuk Tahun 2026 proyeksi PAD dibangun atas asumsi bahwa PAD tidak mengalami kenaikan dari target RKPD Perubahan 2025 karena target tersebut sudah diperhitungkan dengan kondisi yang akan terjadi pada tahun 2026 yang tidak jauh berbeda dengan kondisi aktual tahun 2025.

Selanjutnya apabila memperhatikan realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2023, pendapatan daerah mengalami perbaikan kondisi, dimana pada tahun 2020 terjadi bencana pandemi wabah Covid-19 yang memberikan hambatan kepada hampir seluruh sektor perekonomian. Sehingga pada Tahun 2020 ke tahun 2021 penerimaan sektor PAD terkoreksi dengan penyesuaian penurunan target yang cukup signifikan. Capaian realisasi PAD tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai rata-rata sebesar 1 persen setiap tahunnya. Adapun kinerja realisasi pendapatan daerah dapat tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.13 Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2025

Kode	URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025 (Per 09 Mei 2025)
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	2.778.618.768.752	2.679.853.810.091	2.842.014.448.932	2.861.962.617.798	697.905.518.197
4.1	Pendapatan Asli Daerah	343.864.589.959	346.586.033.112	350.362.663.121	313.331.431.619	116.484.565.874
4.1.01	Pajak Daerah	92.331.986.827	107.678.513.745	122.612.598.317	135.980.403.833	70.677.346.150
4.1.02	Retribusi Daerah	68.297.563.893	77.239.874.431	55.688.506.176	11.718.429.098	2.489.797.028
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.907.864.248	7.138.783.168	6.674.861.370	6.644.943.280	2.768.115.753
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	177.327.174.991	154.528.861.768	165.386.697.258	158.987.655.408	40.549.306.943
4.2	Pendapatan Transfer	2.296.874.103.593	2.323.312.627.999	2.486.364.664.961	2.502.511.523.398	565.965.502.240
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.024.757.150.132	2.072.355.555.913	2.124.497.547.732	2.240.840.890.755	542.287.292.140
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	272.116.953.461	250.957.072.086	361.867.177.229	261.670.632.643	23.678.210.100
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	137.880.075.200	9.755.148.980	5.287.120.850	46.119.662.781	15.455.450.083
4.3.01	Hibah	9.205.007.200	9.755.148.980	5.287.120.850		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	128.675.068.000			46.119.662.781	15.455.450.083

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Periode 09 Mei 2025 Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kondisi pendapatan daerah Tahun 2026 tidak jauh berbeda dengan kondisi keuangan pada Tahun 2025, dimana tantangan dan hambatan yang dihadapi masih relatif sama. Diantaranya kemandirian keuangan daerah

yang masih rendah yakni sebesar 10,95 persen, serta penerapan kebijakan penyaluran DAU dengan sistem *mandatory spending* yang membuat penggunaan fiskal menjadi lebih terarah, dan menuntut Pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan sektor PAD dalam pendanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi misi daerah.

Berikut gambaran proyeksi target pendapatan daerah tahun 2024-2026:

Tabel 3.14 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026

URAIAN	APBD TA. 2023	APBD TA 2024	PERUBAHAN RKPD TA 2025	RKPD TA 2026
PENDAPATAN DAERAH	2.870.865.870.222	3.154.882.748.400	2.830.145.830.255	2.796.962.665.257
Pendapatan Asli Daerah	366.122.431.705	386.370.523.173	475.151.693.350	475.041.696.513
Pajak Daerah	118.620.000.000	143.249.772.509	235.353.291.920	232.056.546.506
Retribusi Daerah	63.626.544.012	36.522.292.664	39.151.299.448	27.617.836.941
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.589.371.352	6.644.943.280	6.667.050.651	6.989.655.258
Lain-lain PAD Yang Sah	177.286.516.341	199.953.514.720	193.980.051.331	208.377.657.809
Pendapatan Transfer	2.498.743.438.517	2.721.579.319.604	2.305.952.726.922	2.272.879.558.762
Transfer Pemerintah Pusat	2.113.432.942.000	2.457.865.655.093	2.176.282.517.000	2.148.669.153.000
Transfer Antar-Daerah	385.310.496.517	263.713.664.511	129.670.209.922	124.210.405.762
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000	46.932.905.623	49.041.409.983	49.041.409.983
Hibah	6.000.000.000	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	46.932.905.623	49.041.409.983	49.041.409.983

Sumber: Data Olah Bappenda Kabupaten Kuningan, Juli 2025

Berdasarkan realisasi sampai Bulan Mei 2025, target Pendapatan Daerah tahun 2025 baru mencapai 24,66 % dari perubahan target APBD TA 2025 sehingga pada tahun 2026 nilai PAD disamakan dengan tahun 2025 namun pada Pendapatan Transfer terdapat penurunan karena komponen DAK Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi dikeluarkan dari perhitungan terlebih dahulu. Dengan melihat kebijakan pemerintah pasca perubahan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka proyeksi perubahan target pendapatan Tahun 2025 dibanding target APBD 2024 di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa jenis pendapatan asli daerah yang naik yang didalamnya mencakup:

1. Terjadinya kenaikan Pajak Daerah dibanding APBD tahun 2024 hampir mencapai 65% (64,3%).
2. Terjadinya kenaikan Retribusi Daerah sebesar 7,2%.
3. Terjadinya kenaikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,33%

2.8.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan melalui upaya, antara lain:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 3) Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan daerah;
- 4) Meminimalkan terjadinya pengurangan potensi melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- 5) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
- 6) Meningkatkan penerimaan bagian laba dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten melalui peningkatan besaran angka investasi.

Untuk merealisasikan rencana penerimaan pendapatan daerah Tahun 2026 dilakukan melalui strategi pencapaian target sebagai berikut:

- 1) Peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyebaran informasi dan sosialisasi yang sesuai perkembangan jaman serta berkesinambungan di bidang pendapatan daerah;

- 3) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- 4) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah
- 5) Peningkatan Pengawasan pada proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 6) Optimalisasi sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB dan BBNKB.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penggunaan belanja APBD ditujukan untuk membiayai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Bila melihat realisasi belanja daerah dalam kurun waktu Tahun 2021-2022, belanja daerah Kabupaten Kuningan mengalami penurunan sebesar 1,92 persen dan pada Tahun 2022. Penurunan capaian realisasi belanja Tahun 2021-2022 disebabkan oleh masih terdampaknya penurunan pendapatan daerah pasca Covid 19. Tahun 2023 mulai menunjukkan perbaikan, dengan realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan positif, dengan kenaikan mencapai 4,5 persen. Adapun kinerja realisasi belanja daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Belanja Tahun 2021-2025

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025
BELANJA DAERAH	2.742.154.197.356	2.708.515.650.596	2.832.406.522.597	2.874.451.183.026	505.885.181.019
Belanja Operasi	1.951.840.892.690	2.010.061.509.032	2.071.607.933.939	2.026.035.316.758	457.295.814.845
Belanja Pegawai	1.152.944.764.985	1.146.569.988.635	1.236.027.150.638	1.251.541.466.011	407.933.411.279
Belanja Barang dan Jasa	729.215.570.980	787.351.371.791	740.038.445.929	664.165.620.222	44.238.613.066
Belanja Bunga	-	-	2.619.236.622	3.218.634.875	-
Belanja Subsidi		1.408.740.156		-	
Belanja Hibah	59.840.624.500	66.576.805.450	83.430.575.750	102.204.015.650	2.946.525.500
Belanja Bantuan Sosial	9.839.932.225	8.154.603.000	9.492.525.000	4.905.580.000	2.177.265.000
Belanja Modal	320.727.654.180	229.856.933.449	254.910.604.687	326.882.705.076	1.775.473.153
Belanja Modal Tanah	7.612.718.068	26.751.824.467	11.192.050.724	181.406.240	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.329.063.606	49.977.556.706	67.447.867.808	179.123.746.097	609.200.600
Belanja Modal	88.667.096.663	66.623.156.876	81.763.034.176	107.056.681.172	1.016.755.553

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025
Gedung dan Bangunan					
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	119.717.944.843	79.711.956.467	86.485.838.150	43.225.942.800	-
Belanja Aset Tetap lainnya	400.831.000	6.792.438.933	7.989.804.829	5.225.946.850	-
Belanja Aset lainnya		-	32.009.000	292.960.000	149.517.000
Belanja Tidak Terduga	25.272.600.802	11.870.504.527	9.491.497.400	9.226.991.000	4.461.708.000
Belanja Tidak Terduga	25.272.600.802	11.870.504.527	9.491.497.400	9.226.991.000	4.461.708.000
Belanja Transfer	444.313.049.684	456.726.703.588	496.396.486.571	504.082.192.109	42.352.185.021
Belanja Bagi Hasil	13.580.038.690	15.921.642.838	18.185.397.238	17.543.860.517	-
Belanja Bantuan Keuangan	430.733.010.994	440.805.060.750	478.211.089.333	486.538.331.592	42.352.185.021

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kuningan. Periode 30 April 2025

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Bulan April 2025 baru mencapai 17,05% atau sebesar Rp505.885.181.019,- dari total proyeksi belanja sebesar Rp2.966.250.552.926,- dengan rincian sebagai berikut (sesuai tabel 3.14):

1. Belanja Operasi, dengan realisasi mencapai 20,12%.
2. Belanja Modal, dengan realisasi mencapai 0,94%.
3. Belanja Tidak Terduga, dengan realisasi mencapai 37,18%.
4. Belanja Transfer, dengan realisasi mencapai 8,60%.

Analisis proyeksi belanja dan pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Format laporan keuangan yang dibuat mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang membagi postur belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi belanja dilakukan dengan menggunakan pendekatan linier.

Mencermati pola belanja dalam laporan keuangan yang tersedia, belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp2.273.443.733.083,- sementara pada target perubahan tahun 2025 sebesar Rp2.973.671.459.064,- yang sudah mengakomodir kegiatan-kegiatan pembangunan daerah, dapat diambil beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Belanja Operasi mengalami penurunan signifikan (-22,17%) khususnya pada belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan sebesar 59,54

- persen. Hal ini karena pada bagian pendapatan transfer, pendapatan DAK dan Bantuan Keuangan dihilangkan sementara.
2. Pada belanja modal pada tahun 2026 terdapat perubahan dengan menghilangkan nominal belanja modal karena diasumsikan pada tahun tersebut pemerintah daerah tidak mengeluarkan anggaran belanja modal dalam bentuk apapun.
 3. Pada Belanja Tidak Terduga Tahun 2026 tidak mengalami kenaikan/penurunan.
 4. Sementara pada belanja transfer Tahun 2026 tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.16 Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2026

URAIAN	2023	2024	PERUBAHAN 2025	RKPD 2026
BELANJA DAERAH	2.832.406.522.597	3.194.961.260.660	2.966.250.552.926	2.765.560.727.341
Belanja Operasi	2.050.927.037.669	2.308.724.729.405	2.272.740.742.284	2.162.901.055.266
Belanja Pegawai	1.156.334.253.676	1.340.172.985.214	1.412.821.586.683	1.412.507.517.583
Belanja Barang dan Jasa	798.540.060.243	843.588.100.941	789.305.645.851	662.641.360.433
Belanja Bunga	0	4.000.000.000	1.700.000.000	12.350.000.000
Belanja Hibah	81.576.613.750	115.665.018.250	61.264.982.250	66.928.467.250
Belanja Bantuan Sosial	14.476.110.000	5.298.625.000	7.648.527.500	8.473.710.000
Belanja Modal	290.211.343.128	377.256.885.831	188.850.103.642	99.999.965.075
Belanja Modal Tanah	29.450.000.000	181.406.240	0	15.789.480.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.735.765.273	196.866.679.346	58.890.823.884	40.992.764.383
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.951.963.440	121.585.489.807	52.248.862.459	24.710.288.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.940.000.000	51.856.098.350	55.306.190.833	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.602.473.519	6.130.988.273	22.104.995.716	18.583.032.692
Belanja Aset Lainnya	531.140.896	636.223.815	299.230.750	14.400.000
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Transfer	474.983.763.424	496.979.645.424	492.659.707.000	492.659.707.000
Belanja Bagi Hasil	11.269.123.424	18.669.123.424	14.658.000.000	14.658.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	463.714.640.000	478.310.522.000	478.001.707.000	478.001.707.000

Sumber: Data Olah Bappeda, Bappenda dan BPKAD Kabupaten Kuningan, Juni 2025

Pada tabel diatas disampaikan total belanja daerah Kabupaten Kuningan sebesar **Rp2.273.443.733.083,-**. Jika angka belanja tersebut disandingkan dengan pendapatan daerah Tahun 2026 (Rp2.273.443.733.083,-) maka tidak terjadi defisit maupun surplus pada belanja daerah.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau memanfaatkan surplus APBD. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu (Silpa);
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 3) Pencairan Dana Cadangan; dan
- 4) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal daerah;
- 3) Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo.

Tabel 3.17 Realisasi Pembiayaan Tahun 2021-2025

URAIAN	REALISASI				
	2021	2022	2023	2024	2025 (sampai Maret 2025)
PEMBIAYAAN DAERAH	28.802.221.262	44.766.793.268	5.725.071.348	0	0
Penerimaan Pembiayaan Daerah	32.302.221.262	65.266.792.658	72.294.861.048	0	0
SILPA Sebelumnya	32.302.221.262	65.266.792.658	15.908.071.348	0	0
Pencairan Dana Cadangan	-	-	17.400.000.000	0	0
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	38.986.789.700	0	0
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	0	0
				0	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.500.000.000	20.499.999.390	66.569.789.700	0	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yg Jatuh Tempo	-	-	38.986.789.700	0	0
Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000	5.499.999.390	4.083.000.000	0	0
Pembentukan Dana Cadangan	-	15.000.000.000	23.500.000.000	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode Maret 2025

**Tabel 3.18 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2023-2026**

URAIAN	2023	2024	PERUBAHAN 2025	2026
PEMBIAYAAN DAERAH	-26.500.000.000	36.440.516.965	136.104.722.671	0
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	96.440.516.965	161.104.722.671	0
SILPA Tahun Sebelumnya	0	15.340.516.965	23.945.412.687	0
Pencairan Dana Cadangan	0	21.100.000.000	-	0
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	60.000.000.000	137.159.309.984	0
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	0
Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.500.000.000	60.000.000.000	25.000.000.000	31.401.937.916
Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0	60.000.000.000	25.000.000.000	22.500.000.000
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	-	-	0
Pembentukan Dana Cadangan	23.500.000.000	-	-	8.901.937.916
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0

Sumber: BAPPEDA (data diolah), 2025

Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2026 sudah tidak terdapat SILPA tahun sebelumnya, namun pada komponen pembayaran cicilan pokok utang terdapat penambahan menjadi sebesar Rp28.039.827.496,-. Hal ini merupakan hasil dari pembayaran pokok utang pada penerimaan pinjaman daerah tahun 2025 yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah.

3.2.5 Arah Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah sudah dilaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Didalam aplikasi ini bertujuan untuk menyelaraskan tahapan pembangunan daerah dimulai dari perencanaan, penganggarannya, penatausahaan dan pelaporan. Aplikasi ini memuat informasi mengenai APBD, Dana Transfer, SILPA, dan Analisis Standar Belanja yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi berbasis *online ini* memuat informasi anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan beserta masing-masing *outputnya*.

Khusus untuk *e-procurement*, Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah mempunyai e-katalog lokal sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat

Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan pada RKPD Tahun 2026 melalui pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik akan melaksanakan kegiatan konvergensi lintas Perangkat Daerah dan lintas program.

Tabel 3.16 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan 2026

KODE	URAIAN	RKPD 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	2.797.112.495.258
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	475.041.696.512
4.1.01	Pajak Daerah	232.056.546.505
4.1.02	Retribusi Daerah	27.617.836.940
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.989.655.258
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	208.377.657.809
4.2	Pendapatan Transfer	2.272.879.558.762
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.148.669.153.000
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	124.210.405.762
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	49.041.409.983
04:03:03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.041.409.983
	Jumlah Pendapatan	2.797.112.495.258
5	BELANJA DAERAH	2.765.710.557.342
5.1	Belanja Operasi	2.162.901.055.266
5.1.01	Belanja Pegawai	1.412.507.517.583
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.641.360.433
	Belanja Bunga	12.350.000.000
	Belanja Subsidi	-
5.1.04	Belanja Hibah	66.928.467.250
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	8.473.710.000,
5.2	Belanja Modal	99.999.965.075
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.769.480.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.922.764.383
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.710.288.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jarigan dan Irigasi	-
5.2.05	Belanja Aset Tetap lainnya	18.583.032.692
5.2.06	Belanja Aset lainnya	14.400.000

KODE	URAIAN	RKPD 2026
5.3	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	<i>10.000.000.000</i>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	<i>Belanja Transfer</i>	<i>492.659.707.000</i>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.658.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	478.001.707.000
	<i>Jumlah Belanja</i>	<i>2.765.710.557.342</i>
	<i>Total Surplus/ (Defisit)</i>	<i>31.401.937.916</i>
6	<i>PEMBIAYAAN DAERAH</i>	
6.1	<i>Penerimaan Pembiayaan Daerah</i>	<i>-</i>
6.1.01	SILPA Sebelumnya	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Pinjaman Dalam Negeri	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-
	<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>-</i>
6.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</i>	<i>31.401.937.916</i>
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yg Jatuh Tempo	22.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	8.901.937.916
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>	<i>31.401.937.916</i>
	<i>Pembiayaan Netto</i>	<i>(31.401.937.916)</i>
6.3	DEFISIT	0

3.3 Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sehingga evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai dasar perencanaan di Tahun berikutnya dan pengambilan kebijakan dalam upaya memenuhi kebutuhan publik/ masyarakat serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi berupa

Investasi Pemerintah berupa investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana DAU, DAK, dan Dana Daerah (skema pendanaan dengan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)).

Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu alternatif KPS yaitu pembiayaan pembangunan transportasi.

Dan skema pendanaan melalui Kerjasama dengan pihak dunia usaha melalui program TJSL dan PKBL untuk mendukung “CSR Jabar untuk kemanusiaan dan lingkungan”. Program TJSL dan PKBL Kabupaten Kuningan melibatkan beberapa perusahaan yang difokuskan pada penanganan:

- 1) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- 3) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;

- 5) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
- 6) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
- 7) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- 8) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten.

3.4 Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang terbentuk sudah sesuai dengan kelembagaan yaitu dari 62 Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya, Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sudah dan akan terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 500/KPTS.265-PEREK&SDA/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, disertai dengan kegiatan-kegiatan lanjutannya.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan pelaksanaan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih periode 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 memperhatikan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

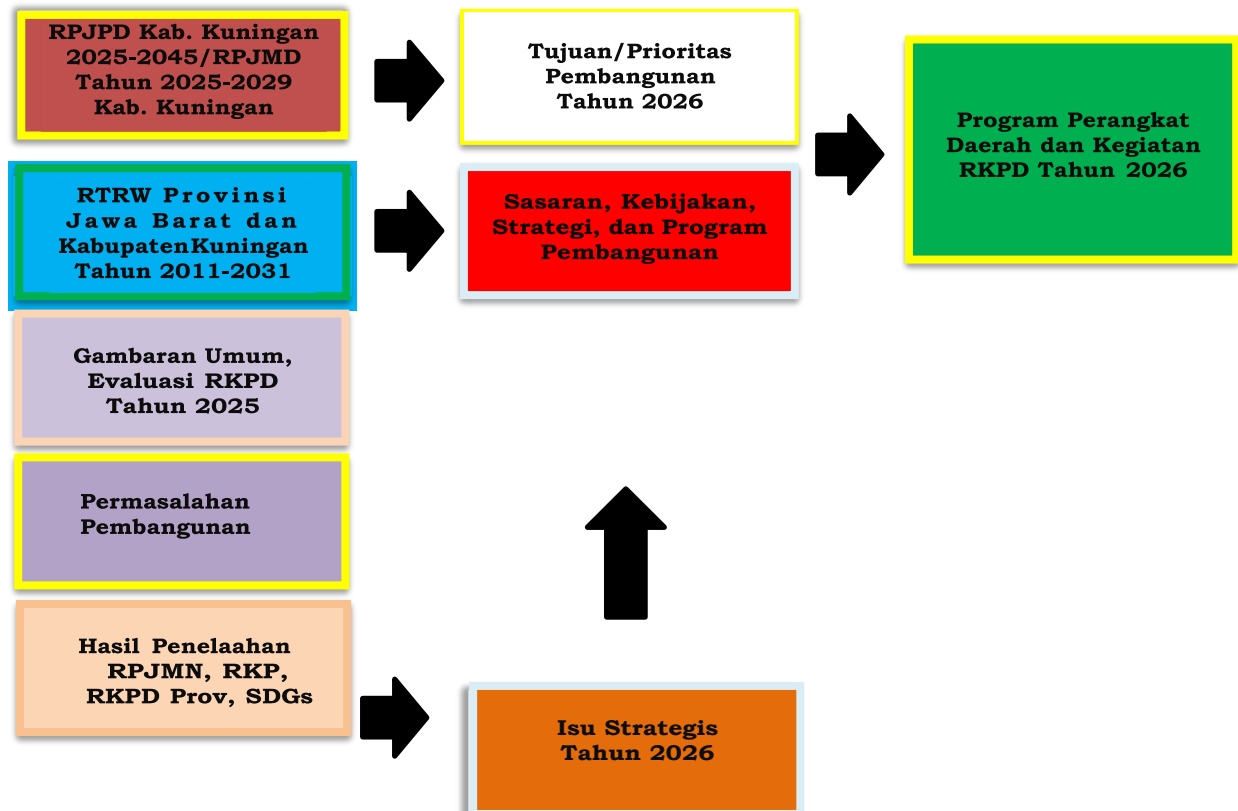
RKPD ini menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan menengah daerah kabupaten, provinsi dan nasional. Selain itu, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 juga disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2026 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2026;
2. Prioritas dan tujuan, sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
3. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031;

4. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
5. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada Tahun 2026; dan
6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kuningan 2026.

Sebagai upaya mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029, maka RKPD Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2025-2029 (RPJMN) serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah.

Gambar 4. 1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Program Pembangunan Antara Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah



4.1 Visi dan Misi Nasional, Provinsi dan Kabupaten

4.1.1 Visi Misi Nasional

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.

- **Asta Cita (1)** : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- **Asta Cita (2)** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
- **Asta Cita (3)** : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- **Asta Cita (4)** : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- **Asta Cita (5)** : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- **Asta Cita (6)** : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- **Asta Cita (7)** : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

- **Asta Cita (8)** : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

4.1.2 Visi Misi Provinsi Jawa Barat

Visi Gubernur Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu **“JAWA BARAT ISTIMEWA”**, Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa : Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa. Dengan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter.
- 2) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploratif.
- 3) Menjaga Keseimbangan Disparitas Pembangunan Utara-Selatan, Miskin dan Kaya, serta Perkotaan dan Perdesaan.
- 4) Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

4.1.3 Visi Misi Kabupaten Kuningan

Visi Bupati Kuningan Tahun 2025-2029 yaitu **“Kuningan MELESAT (Maju, Empowering, LEStari, Agamis dan Tangguh)”**. Dengan harapan besar agar Kabupaten Kuningan bisa melesat ke barisan paling atas dalam pencapaian Pembangunan diantara Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan berbagai target dari arahan pembangunan daerah mempunyai 6 (enam) misi yaitu:

- 1) Percepatan reformasi birokrasi yang berintegritas, dan professional melalui pemerintahan modern dan melayani;
- 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa yang maju dengan pemanfaatan sumberdaya lokal;

- 3) Membangun daya kreasi, inovasi, dan produktivitas masyarakat berbasis pemberdayaan (Empowering);
- 4) Menjaga komitmen kelestarian sumberdaya alam, daerah tangkapan air dan mengurangi emisi lingkungan;
- 5) Penerapan nilai-nilai agamis dalam kehidupan berbudaya dan bermasyarakat;
- 6) Pembangunan yang tangguh dengan orientasi pada layanan Pendidikan, Kesehatan, kesetaraan gender, infrastruktur untuk penguatan ketahanan dan modal sosial.

Seluruh Pembangunan harus sejalan dengan arahan Pembangunan Nasional, satu agenda dan satu tujuan. Untuk itu kebijakan dan arahan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan harus sejalan dengan arahan Pembangunan Nasional. Visi Misi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Visi Misi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan

Visi Indonesia 2025-2045 <i>INDONESIA EMAS 2045</i>	Visi Jawa Barat 2025-2045 <i>Jabar Termaju Indonesia Emas 2045</i>	Visi Kuningan 2025-2045 <i>Kuningan Gemilang</i>
Bersatu Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan Semangat Bhineka Tunggal Ika Berdaulat Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman Tangguh Maju Berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil Berkelanjutan Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan	Termaju Provinsi Jawa Barat berada pada tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan yang paling tinggi dibanding dengan provinsi lainnya Berdaya Saing Dunia Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan kompetitif di tingkat dunia dalam berbagai aspek Berkelanjutan Menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang secara berkesinambungan selama 4 (empat) tahap periodisasi pembangunan untuk mencapai Visi Jawa Barat pada tahun 2045	Gemah Ripah Mengamankan pembangunan yang selaras dengan nilai kelestarian alam, mampu menyediakan sandang, pangan, papan, jaminan pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat Maju Berkelanjutan Mengamankan pembangunan yang bertumpu pada karakteristik dan keunggulan lokal untuk mampu bersaing secara global, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sinergi dan kolaborasi Berdaya Saing Mengamankan pembangunan yang mampu membentuk SDM unggul secara utuh lahir dan batin, iman dan akal, membangun masyarakat yang harmonis dan agamis berahlaqul kharimah
Visi Indonesia 2025-2029 <i>Bersama Indonesia maju, Menuju Indonesia Emas 2045</i>	Visi Jawa Barat 2025-2029 <i>Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata</i>	Visi Kabupaten Kuningan 2025-2029 <i>Kuningan Melesat</i>
Membangun memerlukan kerjasama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045	Istimewa Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pembangunan dan pelayanan publik yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Lembur Diurus pembangunan wilayah perdesaan sebagai kawasan pertanian dan konservasi yang dikelola untuk memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup Kota Ditata pembangunan wilayah perkotaan sebagai kawasan perdagangan barang dan jasa serta Kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah	Maju Akselerasi Ekonomi Empowering Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat Lestari Pembangunan berkelanjutan Agamis Pendekatan Nilai agama Tangguh Penguatan ketahanan dan modal sosial

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2025

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan ini telah menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kuningan turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada Tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 - 2029.

4.2.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029

disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.

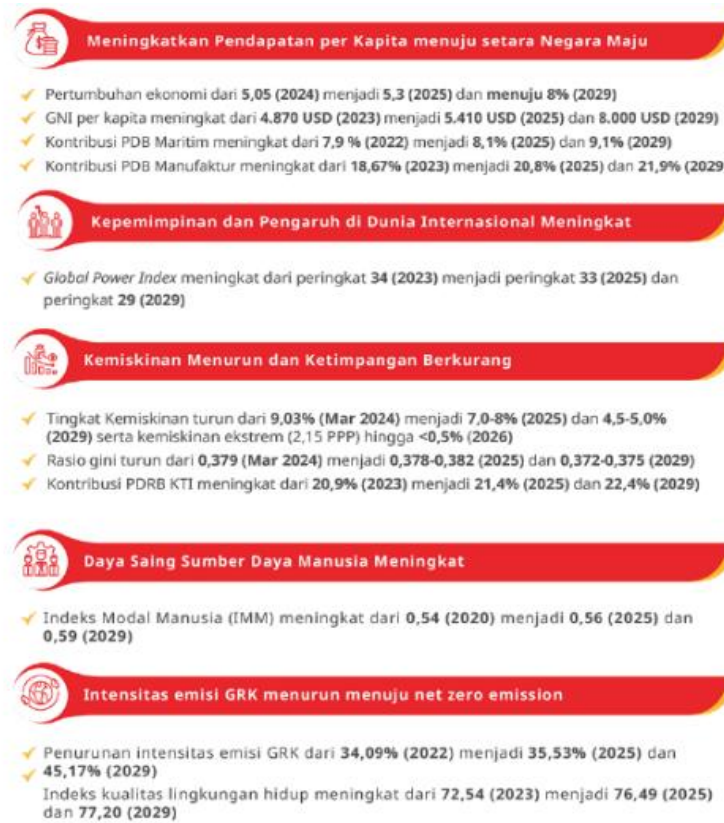
Gambar 4. 2 Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029



Sumber : Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat dalam 5 (lima) sasaran pembangunan nasional yaitu (1) Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju; (2) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat; (3) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang; (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; serta (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emission*. Kelima sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut.

Gambar 4.3 Target sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2045



Sumber: Dokumen RPJMN 2025-2029, 2025

Rencana pembangunan nasional Tahun 2025-2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen memiliki beberapa upaya atau strategi sebagai berikut.

Gambar 4. 4 Strategi Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 Persen



Sumber: Dokumen RPJMN 2025-2029, 2025

Adapun prayarat penurunan kemiskinan memiliki beberapa strategi sebagai berikut.

Gambar 4. 5 Prasyarat Penurunan Kemiskinan



Sumber: Dokumen RPJMN 2025-2029, 2025

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi “**Pusat Cutting-edge industri, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional**”. Tema tersebut memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada Tahun 2026 adalah:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);

4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global brain hub;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure* terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multi ancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Indikasi intervensi/ProP per Prioritas Nasional (PN) di Kabupaten Kuningan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4.2 Indikasi intervensi per Prioritas Nasional di Kabupaten Kuningan

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	➤ Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat ➤ Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	➤ Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan ➤ Fasilitasi <i>business matchmaking startup</i> digital ➤ Fasilitasi digital <i>technopreneur</i> ➤ Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian ➤ Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah <i>reduce-reuse-recycle</i>, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya ➤ Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan ➤ Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan ➤ Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	➤ Pengembangan Kertajati <i>Aerocity</i> ➤ Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman ➤ Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki ➤ Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif ➤ Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim ➤ Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi ➤ Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan (Kab. Kuningan) ➤ Bendungan yang direhabilitasi/ ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	➤ Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat ➤ Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pengajaran dan Pembelajaran ➤ Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas ➤ Peningkatan Produktivitas, daya saing, dan Kemampuan Kerja ➤ Pengelolaan dan Pengembangan BLUD SMK ➤ Pemenuhan Pendidik Inklusivitas dan Pendidikan Luar Biasa ➤ Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang lebih berkualitas ➤ Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM ➤ Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan ➤ Penurunan kematian ibu dan bayi ➤ Pembangunan kualitas keluarga ➤ Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ➤ Fasilitasi literasi digital

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	➤ Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar ➤ Hilirisasi industri kelapa ➤ Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi ➤ Pengembangan industri alat angkut termasuk <i>electric vehicle</i> dan kedirgantaraan ➤ Pengembangan industri elektronik dan digital
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	➤ Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola ➤ Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	➤ Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis <i>online single submission</i> dan mal pelayanan publik digital
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	➤ Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

Sumber: Kementerian Bappenas 2025

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (blue food) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program MBG. Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/ sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin.

Hal ini dilaksanakan untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional Tahun 2026 yang diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan

Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk mendukung capaian target Sasaran Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026 s, Kabupaten Kuningan berupaya mendukung pencapaian beberapa indikator makro. Pencapaian dan target indikator makro di Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan pencapaian target Sasaran Pembangunan Nasional dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Kuningan

No	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	71,56	72,00
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,72
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	7,78	6,76
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Juta Rupiah	5,61	5,99
5	Indeks Gini	Persen	0,379	0,339
6	Pendapatan per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	29,27	33,71
7	Kontribusi PDRB	Persen	1,25	1,27
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO ₂ eq/Miliar)	n/a	7,77
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	72,05	72,20
10	Prevalensi Stunting	Persen	22,7	17,44

Sumber: BAPPEDA Kab. Kuningan, BPS Kab. Kuningan, 2023

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Selain itu, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola untuk mencapai tujuan global. Pengarusutamaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Kesenjangan Gender

Pembangunan nasional memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu diselaraskan dengan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Sebagaimana sasaran global pada *The 2030 Agenda for Sustainable Development*, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan/goals yaitu

1. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

2. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

3. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua.

4. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

6. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

7. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

8. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Tujuan 9 - Industri, inovasi, dan infrastruktur

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

11. Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

12. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

14. Tujuan 14 - Ekosistem laut

Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15. Tujuan 15 - Ekosistem daratan

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17. Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Evaluasi Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Kuningan sebagai berikut :

Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

- Menurunnya persentase kemiskinan pada tahun 2020 menjadi 13,58%. Karena Capaian 12,82% < 13,58% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan;
- Meningkatnya persentase penduduk di Kabupaten Kuningan yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan mencapai 89,16% pada tahun 2020.

Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

- Capaian penurunan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2020 menjadi 6,3%;
- Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita pada tahun 2020 menjadi 20%. Karena Capaian 7,4% < 20 Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

- Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 menjadi 22 kasus. Karena Capaian 27 kasus > 22 kasus Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

- Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2020 menjadi 91%. Karena Capaian 103,3% > 91% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.
- Menurunnya prevalensi Malaria per 1000 orang pada tahun 2020 menjadi 0. Karena Capaian 0 = 0 Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2020 menjadi 70,21%. Karena Capaian 68,70% < 70,21% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

- Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2020 menjadi 99,89%. Karena Capaian 92,89% < 99,89% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya rasio Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2020 menjadi 91,22%. Karena Capaian 98,92% > 91,22% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan
- Meningkatnya capaian rasio Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 menjadi 78,03%.
- Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2020 menjadi 7,41 tahun. Karena Capaian 7,64 > 7,41 target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

- Tercapainya penurunan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan per 1000 penduduk anak perempuan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 menjadi 0,059.
- Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPRD 30%. Karena Capaian 22% < 30% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

- Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2020 menjadi 88,12%. Karena Capaian 85,92% > 88,12% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2020 menjadi 93,25%. Karena Capaian 85,47% < 93,25% target SDGs dalam RPJMD. artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 99,96% pada tahun 2020 (Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat).

Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

- Meningkatnya persentase tenaga kerja formal mencapai 47,86% pada tahun 2020.
- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka mencapai 15,25% pada tahun 2020. Karena Capaian 14,29% < 15,25% Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur mencapai 2,25% pada tahun 2020.

Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

- Koefisien Gini pada tahun 2020 menjadi $< 0,38$. Karena Capaian 0,361 $< 0,38$ Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

- Meningkatnya rumah layak huni menjadi 95,85%. Karena Capaian 95,94% $> 95,85\%$ Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs sudah tercapai di Kabupaten Kuningan.
- Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80,25% pada tahun 2020. Karena Capaian 72,49% $< 80,25\%$ Target SDGs dalam RPJMD, artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan. (Target RPJMD: cakupan pelayanan pengelolaan sampah kabupaten)

Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri), Capaian sebanyak 5 dokumen pada tahun 2020 .

Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

- Membuat daftar kecamatan yang masuk zona bencana alam. Tercatat ada 20 kecamatan yang masuk dalam daerah rawan longsor. Sebanyak 13 kecamatan di antaranya berada dalam kategori pergerakan tanah tinggi. Dari 20 kecamatan itu, tujuh kecamatan masuk pada potensi gerakan tanah menengah, dan 13 kecamatan sisanya masuk potensi gerakan tanah tinggi.
- Mewaspada kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ceremai dan beberapa wilayah lainnya di seputar lereng Gunung.
- Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang menjadi 0. Karena Capaian 8,37 > 0 Target SDGs, artinya target SDGs belum tercapai di Kabupaten Kuningan.

Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Kuningan tidak memiliki pantai dan laut.

Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Meningkatnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan mencapai 1,94% (2.317,38 hektar) pada tahun 2020.

Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

- Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi pada tahun 2020 tercapai sebanyak 60 orang.
- Meningkatnya Indeks Perilaku Korupsi (IPAK) mencapai 94,54% pada tahun 2020.
- Meningkatnya persentase Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah menjadi 66,95% pada tahun 2020 .
- Keberadaan PERDA/PerBup tentang Konsultasi Publik, dimana telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Informasi, media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) dan Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat,

Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

- Tercapainya penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2020 sebesar Rp 84,3 Milyar yang mencapai 28% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Tercapainya total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB sebesar 2,77 Trilyun.

4.2.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode tahun 2025-2029, yaitu **“JAWA BARAT ISTIMEWA”**. Adapun tujuan dan sasaran pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, Bertaqqa dan Profesional, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata;
2. Meningkatnya Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata;
3. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju;
4. Meningkatnya kerukunan umat beragama dan pemajuan kebudayaan;
5. Meningkatnya kualitas keluarga, anak, pemuda, dan kesetaraan gender.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang ramah lingkungan;
2. Meningkatnya integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global;
3. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah;
4. Meningkatnya penerapan ekonomi hijau dan biru;
5. Mewujudkan transformasi digital.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas serta Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pembentukan kawasan perkotaan yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan;
2. Meningkatnya jumlah Desa Mandiri;
3. Meningkatnya aksesibilitas wilayah;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi;
6. Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.

Tujuan 4

Terciptanya transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif;
2. Meningkatnya kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah;
3. Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas;
4. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2026**

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	KOND ISI AWAL	TARGET	
						INDIKATOR	2024	2025	2026
-1	-2		-3		-4	-5	-6	-7	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	1.1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer				Indeks Modal Manusia	N/A	0,57	0,58
			1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan yang sangat baik bahkan di atas rata-rata nasional menjadikan SDM Jawa Barat yang unggul dari kesehatan mental dan fisik (jiwa & raga)	a. Usia Harapan Hidup (UHH)	75,16	75,29	75,56
						b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,52	19	17,86
			1.1.2	Terbentuknya Individu Beragama, Beretika, dan Berbudaya	Masyarakat yang beretika, toleran, dan berbudaya	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	74,79 -	75,13 -
						b. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Belum Rilis	54,70 -	55,29 -
								54,73	55,33
						a. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Belum Rilis	51,78	52,53
						b. Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Belum Rilis	3,02	3,08
						c. Indeks Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	50,01

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET				
						INDIKATOR		2024	2025	2026			
-1	-2		-3		-4	-5		-6	-7				
			1. 1.4	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Jawa Barat memiliki SDM potensial yang berilmu dan beradab serta berdayasaing tinggi pada seluruh lapangan kerja potensial yang ada	a.	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	9,24	9,33	9,43			
						b.	Harapan Lama Sekolah	12,8	12,87 – 12,88	12,88 – 12,96			
			1. 1.5	Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	SDM Jawa Barat unggul dan berperan aktif dalam pembangunan	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	61,1	62,51	63,94			
						b.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	66,44*	69,71	70,61			
						c.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,482*	0,46	0,457			
						d.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,15*	71,95	73,12			
			Mengembangkan Ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis Kearifan Lingkungan yang tidak Eksploitatif	2. 1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdayasaing Tinggi Berbasis Sumber Daya				Laju Pertumbuhan Ekonomi		4,95	5,1	6,2
									Kontribusi PDRB Provinsi		12,82	12,72	12,6
Indeks Ekonomi Hijau Daerah		Belum Rilis							61,3	61,73			
Indeks Ekonomi Biru Indonesia		45,29							48,19	51,38			
Tingkat Pengangguran Terbuka		6,75							6,42 - 6,99*	6,31 - 6,66			
PDRB Per Kapita		56,08							59,6	66,02			
		Lokal dan Teknologi	2.1. 1	Meningkatnya produktivitas	Meningkatkan Produksi dan	a.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	41,39	41,87 - 42	41,51 - 41,67			

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KONDISI AWAL	TARGET	
						INDIKATOR		2024	2025	2026
-1	-2		-3		-4	-5		-6	-7	
				sektor industri pengolahan yang berdayasaing	Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri	b .	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum Rilis	6,4	6,55
						c .	Indeks Transformasi Digital Nasional	Belum Rilis	60,8	61,3
			2.1.2	Meningkatnya kinerja	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	a .	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	4,85	4,17	5,51
				perdagangan yang berkualitas						
			2.1.3	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kehutanan, dan perikanan berbasis teknologi untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan kesejahteraan petani & nelayan	a .	Prevalence of Undernourishment (PoU)	Belum Rilis	4,58	4,42
						b .	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,59	1,77	2,6
						c .	Nilai Tukar Petani (NTP)	Belum Rilis	112-117	114-119
			2.1.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta penciptaan tenaga kerja	Meningkatnya nilai investasi dan PDRB sektor ekonomi	a .	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Belum Rilis	24,72	23,84 - 24,73
						b .	Rasio Kewirausahaan Daerah	Belum Rilis	3,5	3,79

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KOND ISI AWAL 2024	TARGET	
									2025	2026
-1	-2		-3		-4	-5		-6	-7	
				kompete n						
			2.1.5	Terkenda linya stabilitas ekonomi makro	Laju inflasi Jawa Barat dapat ditekan dibawah rata-rata nasional dan cenderung stabil	a .	Tingkat Inflasi	Belu m Rilis	3,3 - 3,8	3,12 - 3,77
						b .	Inklusi Keuangan	N/A	94,22	94,45
						c .	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	1,99*	1,71	1,69
						d .	Total Kredit/PDR B	33,7*	34,61 - 34,81	33,44 - 33,96
			2.1.6	Meningk atnya produktiv itas sektor pariwisata a dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Meningkat nya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam PDRB Jawa Barat	a .	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	N/A	22,81	22,58
						b .	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	3,07	3,15	3,21- 3,46
Menguran gi Disparitas Pembangu nan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	3 . 1	Terwuju dnya Pemerat aan Pembang unan Kewilaya han, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkung an				Rasio Gini		0,43	0,383 - 0,39	0,381 - 0,42
						Penurunan Intensitas Emisi GRK		N/A	6,61	6,97
			3.1.1	Meningk atnya layanan Infrastru ktur kewilaya han, infrastru ktur dasar di perdesaa n dan Sekitar Kawasan Konserva si, serta penataa n perkotaa n yang berbasis	Terbentukn ya kawasan perkotaan dan perdesaan yang nyaman, layak huni, dan ramah bagi berbagai kelompok dengan ekosistem yang terjaga dan berkesinam bungan	a .	Indeks Kualitas Infrastrukt ur	75,91	59,51	62,31
						b .	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau , dan Berkelanjut an	56,25	56,95	58,11
						c .	Indeks Desa	Belu m Rilis	77,46	79
						d .	Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup	66,02	64,06	64,31

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KOND ISI AWAL	TARGET	
						INDIKATOR		2024	2025	2026
-1	-2		-3		-4	-5		-6	-7	
				lingkung an			Daerah			
						e .	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif dan Tahunan			
							Kumulatif	N/A	2,66	3,31
							Tahunan	N/A	9,27	10,63
			3.1.2	Meningk atnya ketahan an sosial masyara kat	Menurun nya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat serta meningkat nya pendapa tan dan kesejahtera an masyaraka t.	f .	Indeks Risiko Bencana	114,15	112,15	110,15
						a .	Tingkat Kemiskinan	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02
						b .	Indeks Kesejahtera an Sosial	44,57	45,07	46,57
Mewujudkan Masyarakat at dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governanc e</i>	4 . 1	Terwuj dnya Masyara kat Mandiri dan Adaptif Terhada p Perkemb angan Sosial dan Teknolog i				Indeks Daya Saing Daerah		3,88	3,9	3,96
			4.1.1	Meningk atnya penerapa n Iptek, riset, dan inovasi dalam pembang unan	Ekosistem riset dan penerapan IPTEK menjadika n Jawa Barat terbuka untuk berbagai inovasi pembangu nan dan menarik SDM serta potensi investasi yang berkaitan dengan teknologi inovatif dan ramah lingkungan	a .	Indeks Inovasi Daerah	81,27	81,28	81,28

VISI/MISI	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		KOND ISI AWAL	TARGET	
-1	-2		-3		-4	-5		-6	-7	
			4.1.2	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Transparansi, Akuntabilitas, dan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	a.	Indeks Demokrasi Indonesia	N/A	86,03	87,525
	4.2	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan				Indeks Reformasi Birokrasi		A	A	A
			4.2.1	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Jawa Barat yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memiliki daya saing yang semakin kuat.	a.	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General) (Persen)	-97,86	-90,7	-91,14
								86,44	86,45	86,47

Sumber : Ranwal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, 2025

Keterangan: Target 2025 berdasarkan baseline 2025 RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sesuai tabel diatas dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 8 sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan

mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi

4.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka penentuan Tujuan dan Sasaran harus disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.

Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan dan sasaran termasuk indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilannya pada Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						PD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
KUNINGAN MELESAT (MAJU, EMPOWERING, LESTARI, AGAMIS, TANGGUH)											
Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern Dan Melayani											
1.1 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan akuntabel serta responsif terhadap penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	A	A	A	A	A	A	
	1.1.1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi	Persen	75,4	80	82	84	86	88	90	
Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan Dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal											
2.1 Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalaka		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,61	5,18 – 5,71	5,50-5,99*	5,51-6,04	5,53-6,09	5,54-6,14	5,56-6,19	
		Kontribusi PDRB Kabupaten/kota	Persen	1,25	1,28	1,29	1,31	1,32	1,34	1,35	
		Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,10	3,3 – 3,9	3,18-3,86	3,06-3,82	2,95-3,78	2,83-3,75	2,7-3,7	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						PD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
n potensi sumber daya lokal dan keunggulan wilayah	2.1.1 Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	2,27	2,272	2,273	2,274	2,275	2,276	2,277	Dinas KUKM, Perdagin
		Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)	Persen	13,43	13,46	13,49	13,52	13,55	13,58	13,6	Dinas KUKM, Perdagin
		Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM	Persen		10	10	15	15	25	25	Dinas KUKM, Perdagin
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen	1,95	2,03	2,06	2,09	2,13	2,16	2,16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)	Persen	23,23	24,49	24,57	24,64	24,72	24,80	24,88	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan
		Kelas Kelompok Petani	Kelompok Tani	2.573	2.623	2.673	2.725	2.775	2.825	2.825	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						PD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	Persen	17,66	14,43-18,13	14,37-18,53	14,31-18,93	14,26-19,33	14,20-19,72	14,09-20,12	Dinas Perhubungan
		Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi	poin	-	64,98	65,93	66,88	67,82	68,77	69,72	Bappeda
Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, Dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (Empowering)											
3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional		Indeks Daya Saing Daerah	Persen	3,82	3,51	3,85	3,89	3,94	3,98	4,02	Bappeda
	3.1.1 Meningkatnya investasi, kerjasama yang baik antar daerah dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	7,78	7,71-8,81	6,76-7,13*	6,63-7,01	6,51-6,9	6,40-6,79	6,27-6,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	22,6	24,40	24,43	24,47	24,50	24,53	24,57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3.1.2 Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat	Indeks Inovasi Daerah	Poin	29,82	53,76	61,22	68,68	76,14	83,6	91,06	Bappeda
	3.1.3 Meningkatnya kesejahteraan	Indeks Pembangunan	Poin	62,68	62,84	63	63,16	63,32	63,48	63,64	Dinas Pengendalian Penduduk,

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						PD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda	Kualitas Keluarga (poin)									Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88	88,12	88,24	88,36	88,48	88,6	88,72	DPPKBPPPA
		Indeks Perlindungan Anak	Persen		100	100	100	100	100-	100	DPPKBPPPA
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	0,9	DPPKBPPPA
		Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	indeks	-	63,28	63,88	64,48	65,08	-65,68	-66,28	DPPKBPPPA
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Skala 0-100	-	63	65	67	69	71	73	DPPKBPPPA
Misi 4 : Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air Dan Mengurangi Emisi Lingkungan											
4.1 Terwujudnya kelestarian serta keseimbangan lingkungan dan pembangunan dalam pemanfaatan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,05	72,05	72,20	72,31	72,36	72,41	72,46	Dinas Lingkungan Hidup
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	Ton CO2eq/2010 IDR Milyar	-	7,14	7,58	8,02	8,46	8,9	9,35	Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						PD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,98	68,16	68,41	68,66	68,92	69,17	69,42	Dinas Lingkungan Hidup
		Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	Ton CO2eq	-	393.756,10	512.676,81	631.597,53	750.518,24	869.438,96	988.359,67	Dinas Lingkungan Hidup
			Ton CO2eq/2010 IDR Milyar	-	7,14	7,58	8,02	8,46	8,90	9,35	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis Dalam Kehidupan Berbudaya Dan Bermasyarakat											
5.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,9	77,33	77,75	78,18	78,61	81,05	Kesatuan Polisi Pamong Praja
	5.1.1 Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,9	77,33	77,75	78,18	78,61	81,05	Kesatuan Polisi Pamong Praja
	5.1.2 Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)	Poin	76,49	76,9	77,33	77,75	78,18	78,61	79,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						PD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 6: Pembangunan Yang Tangguh Dengan Orientasi Pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan Dan Modal Sosial											
6.1 Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan sejahtera melalui optimalisasi pendidikan dan kesehatan yang prima untuk semua		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,56	71,65	71,75	72,07	72,39	72,71	73,03	
		Pengeluaran Per Kapita	ribu	10.418,00	10.599,49	10.781,49	10.963,48	11.145,48	11.327,47	11.509,47	
		PDRB per Kapita	juta/kap/Tahun	29,27	29,09-29,45	32,16-35,41*	32,68-62,13	34,48-63,93	36,27-65,72	38,07-67,52	
	6.1.1 Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	7,9	8,72	9,54	10,36	11,18	12,00	12,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,27	12,37	12,43	12,49	12,54	12,6	12,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	6.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,22	75,27	75,47	75,66	75,86	76,06	76,25	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	Persen	23,4 (2023)	19,43	17,44	15,46	13,47	11,49	9,50	Dinas Kesehatan
6.2 Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,5	9,88-10,95	9,34-10,40	8,80-9,85	8,26-9,30	7,72-8,75	Dinas Sosial
	6.2.1 Penurunan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,5	9,88-10,95	9,34-10,40	8,80-9,85	8,26-9,30	7,72-8,75	Dinas Sosial
	6.2.2. Meningkatnya ketersediaan pemenuhan pangan masyarakat	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	-	4,23	4,02	3,82	3,61	3,40	3,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						PD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
serta ketahanan pangan	6.2.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber air baku	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	-	2,40	2,60	2,80	3,01	3,21	3,41	Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang
6.3 Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam menopang perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan daerah		Indeks Gini	Poin	0,379	0,34 - 0,347	0,346-0,353*	0,337-0,346	0,336-0,345	0,334-0,345	0,333-0,344	
	6.3.1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa sebagai penggerak pembangunan di desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	poin	0,79	0,78	0,80	0,83	0,85	0,87	0,89	Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa
	6.3.2 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Poin	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Kualitas infrastruktur	poin	81,9	83,61	85,42	85,96	86,53	87,08	87,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	6.3.3.Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	-	78,60	79,73	80,85	81,98	83,11	84,23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	6.3.4 Meningkatnya Penyelenggaraan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	130	129,00	127,95	126,89	125,84	124,79	123,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						PD Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Penanggulangan Bencana										

Sumber : RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

Dari ke-17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional Tahun 2026 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kuningan

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kuningan tentu perlu dijabarkan kepada strategi dan arah kebijakan yang relevan untuk pembangunan Kabupaten Kuningan, adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026, disajikan pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
KUNINGAN MELESAT (MAJU, EMPOWERING, LESTARI, AGAMIS, TANGGUH)				
Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, dan Professional Melalui Pemerintahan Modern dan Melayani	1.1 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan akuntabel serta responsif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1 Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan	1. Penyelenggaraan transformasi tata kelola pemerintahan untuk penguatan ideologi, politik, integritas dan kondusifitas daerah 2. Penguatan pembangunan sosial, ekonomi,	1. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital 2. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		teknologi	lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.	3. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan 4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 5. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja 6. Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 7. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 9. Pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan 10. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Jasa Maju dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal	2.1 Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalakan potensi sumber daya lokal dan keunggulan wilayah	2.1.1	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat	1. Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy. 2. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 3. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 4. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan 5. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan dan petambak serta
		Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				penguatan kolaborasi dengan 6. market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan. 7. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas Pertanian 8. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan 9. memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. 10. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan. 11. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata, pengolahan hasil pertanian dan industri pengolahan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				primer lainnya padat modal dan padat karya 12. Penyediaan dan penataan 13. infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal 14. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya. 15. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan. 16. Peningkatan ketahanan bencana 17. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy 18. Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah 19. Penataan dan pengembangan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				20. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik 21. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik 22. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. 23. Pengembangan sumber daya manusia dan para pelaku usaha di sektor pariwisata 24. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa 25. Pembangunan Jalan untuk konektivitas antar daerah pada wilayah Jawa Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasoklogistik, terutama pada ruas: - Cirebon-Kuningan Ciamis. 26. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global. 27. Penataan dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran 28. berbasis kinerja (result base payment) 29. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. 30. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. 31. Penataan dan restrukturisasi BUMD.
Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (Empowering)	3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional	3.1.1 Meningkatnya investasi, kerjasama yang baik antar daerah dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, berintegritas, inovatif, responsif dan transparan	1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta perlindungan anak, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 2. Penguatan
		3.1.2 Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		3.1.3 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda		pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 3. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. 4. Penyediaan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif serta industri primer lainnya 5. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR
Misi 4: Menjaga Komitmen Kelestarian Sumberdaya Alam, Daerah Tangkapan Air dan Mengurangi Emisi Lingkungan	4.1 Terwujudnya kelestarian serta keseimbangan lingkungan dan pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	4.1.1 Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan	1. Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah 2. Percepatan penetapan Revisi Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis 3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				pada wilayah perkotaan 4. Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek strategis/prioritas. 5. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisata, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan) 6. Perencanaan dan implementasi Reforma Agraria. 7. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global. 8. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim 9. Sinkronisasi periodisasi RPJPD,

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR
Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis dalam Kehidupan Berbudaya dan Bermasyarakat	5.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila		Peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan wawasan lingkungan	1. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan pendidikan menengah) 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah 3. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama 4. Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter digital literacy dan kondisi lokal daerah 5. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
		5.1.1 Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum		
		5.1.2 Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama		
Misi 6: Pembangunan Yang Tangguh Dengan	6.1 Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan sejahtera melalui		1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan,	3. Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Orientasi pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur untuk Penguatan Ketahanan dan Modal Sosial	optimalisasi pendidikan dan kesehatan yang prima untuk semua	6.1.1 Meningkatnya akses pendidikan Masyarakat	pendidikan dan jaminan sosial untuk semua 2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan merata	sanitasi, kesehatan ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan 4. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 5. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas 7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 8. Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting 9. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima 10. Eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan 11. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan pendidikan
		6.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		
	6.2 Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan			
		6.2.1 Penurunan angka kemiskinan		
		6.2.2. Meningkatnya ketersediaan pemenuhan pangan masyarakat		
	6.3 Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam menopang perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan daerah	6.2.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber air baku		
		6.3.1 Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa sebagai penggerak pembangunan di desa		
		6.3.2 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah		
		6.3.3 Meningkatnya kualitas hunian masyarakat		
		6.3.4 Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		Bencana		menengah) 12. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah 13. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah 14. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama 15. Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter digital literacy dan kondisi lokal daerah 16. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 17. Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital TIK 18. Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi 19. Penyiapan dan penataan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah 20. Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan lainnya 21. Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi 22. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dengan karakteristik wilayah 23. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak diperkotaan/perdesaan

Sumber : RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu pedoman bagi pelaksanaan program-program perangkat daerah untuk fokus pada penanganan yang bersifat prioritas dalam rangka

pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang bersinergi dengan pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2026 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, serta pokok-pokok pikiran DPRD.

4.3.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan ditetapkan pada RKP Tahun 2026 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2026 meliputi:

1. Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Sasaran PN 1 yaitu Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Prioritas Nasional/PN 2, yaitu, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan Sasaran PN 2 yaitu mendorong:
(a) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan; (b) Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal; (c) Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih; (d) Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas

- ekonomi; (e) Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB; (f) Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; dan (g) Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru.
3. Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan Sasaran PN 3 yaitu mendorong: (a) Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan; (b) Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB; (c) Meningkatnya nilai tambah pariwisata; (d) Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas; dan (e) Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
4. Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4, yaitu mendorong: (a) Pendidikan Berkualitas yang Merata; (b) Kesehatan untuk Semua; (c) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif; (d) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; dan (e) Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga.
5. Prioritas Nasional/PN 5 yaitu, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5, yaitu mendorong: (a) Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan; (b) Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; dan (c) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.
6. Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6, yaitu mendorong: (a) Mempercepat

pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan; (b) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; (c) Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; dan (d) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

7. Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 yaitu mendorong: (a) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi; (b) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani; (c) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (d) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan; (e) Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan; (g) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi; dan (h) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
8. Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8, yaitu mendorong: (a) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; dan (b) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

4.3.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas

pembangunan daerah yang ditetapkan padatahun 2026 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan, Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk tahun 2026.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. **Prioritas 1** yaitu mewujudkan sumberdaya manusia berkarakter unggul
2. **Prioritas 2** yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif
3. **Prioritas 3** yaitu mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan pedesaan serta miskin dan kaya
4. **Prioritas 4** yaitu mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, sesuai dengan prinsip good and clean governance

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2026, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ditetapkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026.

4.3.3 Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Kabupaten Kuningan Tahun 2026 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Bab II, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional dan provinsi Jawa barat. Berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal serta mempertimbangkan isu strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 yaitu masih tingginya angka kemiskinan dan masih tingginya tingkat pengangguran, maka isu strategis untuk pembangunan Tahun 2026, yaitu:

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan;
2. Pengurangan pengangguran;
3. Penurunan Stunting;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi keunggulan lokal;
5. Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa;
6. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing;
7. Tata kelola pemerintahan;

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan diatas, dan merujuk pada Tema RPJPD I (2025-2029) Kabupaten Kuningan yaitu **Meningkatkan Produktivitas dan Inovasi Pertanian, Pariwisata, dan SDM**, serta berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuningan 2025-2029, maka ditetapkan penahapan Tahap I pada tahun 2026 yaitu **Pemenuhan Infrastruktur dan pelayanan dasar untuk peningkatan Produktivitas Pertanian, Pariwisata, dan SDM**.

4.3.3.1. Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan

Keterkaitan isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029 yang sekaligus merupakan isu strategis pembangunan Tahun 2026, dengan permasalahan pembangunan dituangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026

Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029		Permasalahan Pembangunan RKPD 2026		Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026	
1	Pengentasan Kemiskinan melalui pengembangan ekonomi	1	Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem dan jumlah keluarga fakir miskin	1	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
		2	Masih rendahnya akurasi data dalam rangka penyaluran bantuan sosial bagi keluarga miskin		
		3	Belum optimalnya pengembangan IKM/UKM, yang ditunjukan masih terdapatnya produk pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan legalisasi/sertifikasi industri		
		4	Masih rendahnya penerapan teknologi industri yang baik oleh IKM/UKM		
		5	Penyediaan bahan baku IKM/UKM belum mengutamakan bahan baku lokal		
		6	Kapasitas produksi IKM yang belum mampu memenuhi permintaan pasar		
		7	Masih rendahnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		
		8	Belum terintegrasinya produk unggulan dan potensi ekonomi perdesaan serta belum dilakukannya mapping potensi		
		9	Masih rendahnya daya ungkit hasil produk unggulan desa dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan		
		1	Belum adanya skill khusus dari pendidikan yang akan menjadi keunggulan lulusan dalam menghadapi pasar kerja dan dunia usaha	2	Pengurangan Pengangguran

Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029		Permasalahan Pembangunan RKPD 2026		Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026	
		2	Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang professional		
		3	Masih tingginya angka pengangguran		
		4	Rendahnya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat		
		5	Terbatasnya lapangan pekerjaan dari sektor industri ramah lingkungan		
		1	Belum optimalnya pelayanan fasilitas kesehatan	3	Penurunan Stunting
		2	Masih adanya Penanganan pasien tidak mampu yang belum tercover jaminan Kesehatan		
		3	Belum terjaminnya penyelesaian biaya bagi pasien tidak mampu oleh program jaminan Kesehatan		
		4	Masih kurangnya Jumlah SDM jabatan fungsional Kesehatan dan dokter spesialis		
		5	Masih terbatasnya sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan, kondisi sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan tuntutan pengembangan pelayanan		
		6	Belum optimalnya peningkatan Kualitas Pendidikan dan Apresiasi Kebudayaan Daerah		
		7	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan		
		8	Belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan SDM olahraga yang memadai		
		9	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan		
		10	Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender		

Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029		Permasalahan Pembangunan RKPD 2026		Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026	
		11	Rendahnya pemberdayaan ekonomi Perempuan		
		12	Kurang optimalnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk ke fasilitas kesehatan/rehabilitasi		
		13	Belum optimalnya penyelenggaraan UPTD PPA sebagai One Stop Service bagi pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak		
		14	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB		
		15	Angka pemakaian kontrasepsi cara modern masih stagnan		
		16	Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		
		17	Masih banyaknya perkawinan usia muda (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 Tahun bagi perempuan dan 25 Tahun bagi pria)		
		1	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa terutama dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di desa	4	Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi keunggulan lokal
2	Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa	1	Cakupan pelayanan sampah belum optimal	5	Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa
		2	Pengelolaan TPA belum optimal		
		3	Cakupan pelayanan persampahan masih rendah baik ditinjau dari luasan wilayah maupun besaran timbulan sampahnya		
		4	Pola pengelolaan sampah masih didominasi oleh penanganan sampah sehingga perlu didorong upaya peningkatan pola pengurangan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak di sumber.		

Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029		Permasalahan Pembangunan RKPD 2026		Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026	
3	Peningkatan kualitas pendidikan untuk mendukung pengembangan SDM yang berdaya saing	1	Belum adanya skill khusus dari pendidikan yang akan menjadi keunggulan lulusan dalam menghadapi pasar kerja dan dunia usaha	6	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing
		2	Kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah		
		3	Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, tidak sesuai dengan nilai upah yang diberikan		
		4	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja		
4	Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan efektif	1	Belum optimalnya profesionalitas ASN	7	Tata Kelola Pemerintahan
		2	Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik		
		3	Belum optimalnya ketercapaian nilai SAKIP		
		4	Kurangnya Pemahaman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
		5	Belum Optimalnya Kualitas Koordinasi, Sistem Pengawasan Internal, Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah		

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2025

4.3.3.2. Keterkaitan Isu Strategis dengan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat dan RKP Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema pembangunan “**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonoomi yang Produktif dan Inklusif**”. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025-2029, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, ditetapkan 3 (tiga) pilar utama pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029 atau sasaran pembangunan tahun 2026 yang disebut Trisula Pembangunan, yaitu:

1. **Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan** dengan target indikator:

Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
GNI per Capita	5.870
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67

2. **Penurunan Kemiskinan** dengan target indikator:

Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4.96
Kemiskinan Ekstrem (%)	0
Rasio Gini	0,377 – 0,380

3. **Sumber Daya Manusia Berkualitas** dengan target indikator:

Indeks Modal Manusia	0,57

Berkaitan dengan intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di Pulau Jawa tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;

3. Penurunan *logistic cost* guna meningkatkan *comparative advantage* investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);
4. Pengelolaan urban governance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global brain hub;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green, gray, dan social infrastructure), terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, dan banjir.

Keselarasan Isu Strategis Kabupaten Kuningan Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, serta Isu Strategis/Tantangan dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat dan RKP 2026, dituangkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.7 Keselarasan Isu Strategis Kabupaten Kuningan Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan 2025-2029, serta Isu Strategis/Tantangan dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dan RKP 2026

Isu Strategis RKPd Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPd Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
1 Penanggulangan Kemiskinan	1 Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi 2 Penyiapan dan penataan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah 3 Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan	1 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1 Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 2 Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 3 Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	1 Kualitas pendidikan masih rendah 2 Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi 3 Kualitas lulusan masih rendah

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
	4 hari tua dan lainnya Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis		4 Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	4 Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun
2 Pengurangan Pengangguran	1 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta perlindungan anak, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan		5 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	5 Angka Kematian Ibu masih tinggi
	2 Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan		6 Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan	6 Stunting masih tinggi

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
	3 Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR		7 keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal	7 Prevalensi obesitas terus meningkat
3 Penurunan Stunting	1 Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 2 3 Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya		8 Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu. 9 Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global 10 Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan	8 Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia 9 Kasus baru Kusta peringkat ke 3 dunia 10 Puskesmas tidak tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
	4 Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting 5 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima		11 bertaraf global. Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan 12 Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	11 Akurasi Program Bantuan Sosial masih rendah 12 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal dan inklusif
4 Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	1 Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) 2 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai		13 Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan 14 Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya	13 Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga 14 Tingginya ketimpangan gender

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
	kondisi daerah 3 Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah 4 Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		15 Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini/screening, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya 16 Peningkatan penuntasan dan pencegahan stunting 17 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	15 Belum kokohnya karakter dan jati diri bangsa
5 Pemberdayaan Ekonomi masyarakat	1 Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Cimanuk-Cisanggarung dan	2 Pembangunan Ekonomi Berkualitas	1 Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik	1 Pertumbuhan Ekonomi Potensial

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
berbasis potensi keunggulan lokal	Citanduy 2 Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global 3 Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif	dan Berkelanjutan	yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi). Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen 2 4	Indonesia dalam tren Melambat 2 Ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata 5,0% dalam 20 tahun terakhir 3 Total Factor Productivity (TFP) Indonesia dalam Tren Menurun

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
	4 Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan		5 Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif 6 Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis 7 Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif	

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
			8 antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM	
6 Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa	1 Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy 2 Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	3 Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1 Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan 2 Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik	3 Gap Pengelolaan Sampah

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
			dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb	
7 Tata kelola pemerintahan yang baik	1 Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital 2 Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 3 Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan	4 Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	1 Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah 2 Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan 3 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur	1 Kontribusi Iptek dan Inovasi terhadap Pembangunan Indonesia masih rendah Terdapat desa/kelurahan serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum mendapatkan akses internet blankspot Penguatan pemerintah digital (SPBE 2 3

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
	utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan. 4 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah 5 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja		daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah 4 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja 5 Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah	dan SDI) dan Keamanan Siber Nasional

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
	6 Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 7 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja 8 Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 9 Pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang		yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan 6 Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko 7 Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah 8 Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah 9 Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat	

Isu Strategis RKPD Kab. Kuningan 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029	Isu Strategis RKPD Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Jabar 2025-2029	Isu Strategis / Tantangan RKP 2026
	lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan 10 Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko		10 Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Peningkatan aspek- aspek Indeks Demokrasi 11 melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2025

4.3.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2026

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing Tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap Tahunnya. Tema Pembangunan Tahun 2026 adalah "Pemenuhan Infrastruktur dan pelayanan dasar untuk peningkatan Produktivitas Pertanian, Pariwisata, dan SDM".

Sektor pertanian dan pariwisata berkembang ke arah industri yang lebih maju dan memiliki komoditas yang berdaya saing, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan guna menjaga kelestarian alam. Industrialisasi sektor pertanian (agroindustri) dan pariwisata merupakan salah satu upaya mendongkrak sektor unggulan Kabupaten Kuningan agar bisa lebih maju dan berdaya saing. Agroindustri merupakan integrasi sumber daya pertanian, ilmu, manusia, teknologi, ekonomi dan informasi. Arah kebijakan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan skala (scale up) usaha sektor pertanian tidak hanya berkonsentrasi pada aktivitas budidaya tetapi juga menambah rangkaian aktivitasnya sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah yang langsung dapat dikonsumsi oleh konsumennya. Agroindustri mencakup industri di hulu hingga hilir, industri hulu termasuk peralatan yang digunakan untuk aktivitas pertanian, sedangkan industri hilir mengelola hasil pertanian menjadi bahan baku dan atau produk akhir. Industri pariwisata adalah kumpulan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Industrialisasi sektor pariwisata akan mendorong pengelolaan pariwisata lebih terorganisir meliputi seluruh aspek pendukung pariwisata dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi dan terkontrol.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan

daerah dituangkan ke dalam 10 (Sepuluh) Program Unggulan Melesat yang merangkum semua aspek Pembangunan. Sepuluh Program Unggulan Melesat Kabupaten Kuningan Tahun 2026 meliputi :

1. ASPEK AGAMA dan SOSIAL: NGAJI DIRI - Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pasantren Mandiri Target : Bantuan Air Bersih dan Sanitasi ke 100 Pesantren, Beasiswa Santri 5.000 orang dan Insentif Guru Ngaji 1.000 orang;
2. ASPEK KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN : GEMA SADULUR Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia dan Pengangguran Target: Bantuan Sosial 25.000 Paket, Bursa Kerja 10.000 lowongan kerja ; Rutilahu 1.000 paket (Pusat & Daerah);
3. ASPEK INFRASTRUKTUR DAN PERTANIAN: JAWARA TANI Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti Target Pemeliharaan dan Pembangunan 500 Unit Irigasi, Optimalisasi Subsidi Pupuk (Pusat& Daerah), Insentif Petani Muda;
4. ASPEK INVESTASI DAN TATA RUANG: SOMEAH KA SEMAH Sistem Online Modern, Efesien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan Target 500 Investor Baru, 10 RDTR Wilayah Unggulan;
5. ASPEK PENDIDIKAN DAN KESEHATAN: PERTAMA Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna Target: RLS 9 Tahun, Rehab Kelas 1.000 unit, RKB 500 unit, Prevalensi Stunting dibawah 10%;
6. ASPEK WISATA DAN DESA: NATA DAYA- Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata Target: 100 Alun-Alun Sentra Ekonomi dan Wisata Desa
7. ASPEK KETAHANAN PANGAN DAN INFLASI: TATAPAKAN JATI Tanam Tanah Pakarangan Jaga dan Tekan Inflasi Target: Produksi Cabe dan Bawang 32 Kecamatan
8. ASPEK PERENCANAAN DAN PENDAPATAN DAERAH: AJEG TIMBANGAN APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan Berimbang: Target: Optimasilasi PAD, Belanja Selektif dan Sinergi Perencanaan Kabupaten, Provinsi dan Nasional;

9. ASPEK EKONOMI KREATIF DAN UMKM : PASAR RAYA Pemberdayaan Sanggar Ekraf dan Usaha Rakyat Target: Sanggar Ekraf di 32 Kec daan IRT untuk 1.000 UMKM
10. ASPEK BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK: ABDI NEGARA: ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah Melayani Target: Nilai RB Baik, Nilai SAKIP Baik, WTP

Sepuluh Program Unggulan Melesat yang merangkum semua aspek Pembangunan dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 dituangkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.8 Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
KUNINGAN MELESAT (MAJU, EMPOWERING, LESTARI, AGAMIS, TANGGUH)													
Misi 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Dan Professional Melalui Pemerintahan Modern Dan Melayani													
1.1 Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan akuntabel serta responsif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	A-	A-	A-	A-	A-	A-	A-	Sekretariat Daerah	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75,02	80	82	84	86	88	88	90	Sekretariat Daerah	Indikator Sasaran RPJMD
Misi 2: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pariwisata, Pertanian, Perdagangan Dan Jasa Maju Dengan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal													
2.1 Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalk		Laju Pertumbuha n Ekonomi	Persen	5,61	5,18-5,71	5,20-5,76	5,21-5,81	5,23-5,86	5,24-5,91	5,24-5,91	5,56-6,19		Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Kontribusi PDRB Kabupaten/k ota	Persen	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29	1,3	1,3	1,31		Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,1	3,3 – 3,9	3,18-3,86	3,06-3,82	2,95-3,78	2,83-3,75	2,83-3,75	2,7-3,7		Indikator Utama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
an potensi sumber daya lokal dan keunggulan wilayah													Pembangunan RPJPD
	2.1.1 Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	2,27	2,272	2,273	2,274	2,275	2,276	2,276	2,277	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)	Persen	13,43	13,46	13,49	13,52	13,55	13,58	13,58	13,6	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Sasaran RPJMD
		Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM	Persen	N/a	10	10	15	15	25	25	25	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Sasaran RPJMD
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen	1,95	2,03	2,06	2,09	2,13	2,16	2,16	2,16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)	Persen	23,23	24,49	24,57	24,64	24,72	24,8	24,8	24,88	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
												Dinas Perikanan dan Peternakan	
		Kelas Kelompok Petani	Kelompok Tani	2.573	2.623	2.673	2.725	2.775	2.825	2.825	2.835	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Sasaran RPJMD
												Dinas Perikanan dan Peternakan	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	Persen	17,66	14,43-18,13	14,37-18,53	14,31-18,93	14,26-19,33	14,20-19,72	14,20-19,72	14,09-20,12	Dinas Perhubungan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi	poin	-	64,98	65,93	66,88	67,82	68,77	68,77	69,72	Bappeda	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
Misi 3: Membangun Daya Kreasi, Inovasi, Dan Produktivitas Masyarakat Berbasis Pemberdayaan (Empowering)													
3.1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional		Indeks Daya Saing Daerah	Persen	3,82	3,51	3,85	3,89	3,94	3,98	3,98	4,02	Bappeda	Indikator Sasaran Visi RPJPD
	3.1.1 Meningkatkan investasi, kerja sama yang baik antar daerah dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	7,78	7,71-8,81	7,58-8,69	7,45-8,57	7,33-8,46	7,21-8,35	7,21-8,35	6,27-6,67	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	22,6	24,4	24,43	24,47	24,5	24,53	24,53	24,57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	3.1.2 Meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat	Indeks Inovasi Daerah	Poin	29.82	30	32	34	36	38	38	40	Bappeda	Indikator Utama Pembangunan RPJPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	3.1.3 Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin)	Poin	62,68	62,84	63	63,16	63,32	63,48	63,48	63,64	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88	88,12	88,24	88,36	88,48	88,6	88,6	88,72	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
		Indeks Perlindungan Anak	Persen	N/a	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1	1	0,9	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
		Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	Poin	N/a	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	52.73	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan	Indikator Sasaran RPJMD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
												dan Perlindungan anak	
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kategori	n/a	63	65	67	69	71	71	73	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
Misi 4 : Menjaga Komitmen Kelestarian Sumber Daya Alam, Daerah Tangkapan Air Dan Mengurangi Emisi Lingkungan													
4.1 Terwujudnya kelestarian serta keseimbangan lingkungan dan pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,05	68,16	68,41	68,66	68,92	69,17	69,17	69,42	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	Ton CO2eq/2010 IDR Milyar	N/a	7,14	7,58	8,02	8,46	8,9	8,9	9,35	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Visi RPJPD
	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,05	68,16	68,41	68,66	68,92	69,17	69,17	69,42	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	Ton CO2eq	N/a	393.756,10	512.676,81	631.597,53	750.518,24	869.438,96	869.438,96	988.359,67	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
Misi 5: Penerapan Nilai-Nilai Agamis Dalam Kehidupan Berbudaya Dan Bermasyarakat													
5.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat		Indeks Ketenteraman dan	Poin	76,5	76,7	76,78	77,42	78,63	79,84	79,84	81,05	Kesatuan Polisi Pamong Praja	Indikator Utama Pembangunan RPJPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila		Ketertiban Umum											
	5.1.1 Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,7	76,78	77,42	78,63	79,84	79,84	81,05	Kesatuan Polisi Pamong Praja	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	5.1.2 Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)	Poin	76,49	76,9	77,33	77,75	78,18	78,61	78,61	79,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
Misi 6: Pembangunan Yang Tangguh Dengan Orientasi Pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Untuk Penguatan Ketahanan Dan Modal Sosial													
6.1 Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan sejahtera melalui optimalisasi pendidikan dan kesehatan		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,56	71,65	71,75	72,07	72,39	72,71	72,71	73,03		Indikator Sasaran Visi RPJPD
		Pengeluaran Per Kapita	ribu	10.418,00	10.599,49	10.781,49	10.963,48	11.145,48	11.327,47	11.327,47	11.509,47		Indikator Sasaran RPJMD
		PDRB per Kapita	juta/kap/Tahun	29,27	29,09-29,45	30,89-60,34	32,68-62,13	34,48-63,93	36,27-65,72	36,27-65,72	38,07-67,52		Indikator Sasaran Visi RPJPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029					
yang prima untuk semua	6.1.1 Meningkatkan akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	7,9	8,2	8,5	8,9	9,3	9,7	9,7	10,1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD	
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,27	12,37	12,43	12,49	12,54	12,60	12,60	12,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD	
	6.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,22	75,27	75,47	75,66	75,86	76,06	76,06	76,25	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD	
		Prevalensi Stunting	Persen	22,7	20,51	19,71	18,92	18,12	17,33	17,33	16,53	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD	
6.2 Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan		Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,5	9,88-10,95	9,34-10,40	8,80-9,85	8,26-9,30	8,26-9,30	7,72-8,75	Dinas Sosial	Indikator Utama Pembangunan RPJPD	
	6.2.1 Penurunan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,50	9,88-10,95	9,34-10,40	8,80-9,85	8,26-9,30	8,26-9,30	7,72-8,75	Dinas Sosial	Indikator Utama Pembangunan RPJPD	
	6.2.2. Meningkatkan ketersediaan pemenuhan pangan masyarakat	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	-	4,23	4,02	3,82	3,61	3,4	3,4	3,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Utama Pembangunan RPJPD	
	6.2.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	-	2,4	2,6	2,8	3,01	3,21	3,21	3,41	Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang	Indikator Utama Pembangunan RPJPD	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	sumber air baku												
6.3 Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam menopang perekonomian masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa dan ketahanan daerah		Indeks Gini	Poin	0,379	0,34-0,347	0,339-0,346	0,337-0,346	0,336-0,345	0,334-0,345	0,334-0,345	0,333-0,344		
	6.3.1 Meningkatkan kapasitas pengelolaan desa sebagai penggerak pembangunan di desa	Indeks Desa Membangun (ID)	poin	0,79	0,78	0,8	0,83	0,85	0,87	0,87	0,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	6.3.2 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Poin	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Sasaran RPJMD
		Persentase Kualitas infrastruktur	poin	81,9	83,61	85,42	85,96	86,53	87,08	87,08	87,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Sasaran RPJMD
	6.3.3. Meningkatkan kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	N/a	78,60	79,73	80,85	81,98	83,11	83,11	84,23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
	6.3.4 Meningkatkan Penyelenggara	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	130	129	127,95	126,89	125,84	124,79	124,79	123,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indikator Utama Pembangunan RPJPD

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					Kondisi Akhir RPJMD	Target 2030	PD Penanggung Jawab	Keterangan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	aan Penanggulangan Bencana												

Sumber: RPJMD Kab. Kuningan 2025-2029, Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis pembangunan Tahun 2026, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ditetapkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029, permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kuningan

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Program Unggulan Kuningan Melesat
1 Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem dan jumlah keluarga fakir miskin	1 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	1 Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan lainnya Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi	GEMA SADULUR Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia dan Pengangguran
2 Masih rendahnya akurasi data dalam rangka penyaluran bantuan sosial bagi keluarga miskin		2	
3 Belum optimalnya pengembangan IKM/UKM, yang ditunjukkan masih terdapatnya produk pangan industri rumah tangga yang belum mendapatkan legalisasi/sertifikasi industri		3 Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	
4 Masih rendahnya penerapan teknologi industri yang baik oleh IKM/UKM		4 Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dengan karakteristik wilayah	
5 Penyediaan bahan baku IKM/UKM belum mengutamakan bahan baku lokal			
6 Kapasitas produksi IKM yang belum mampu memenuhi permintaan pasar			
7 Masih rendahnya perlindungan konsumen dan			

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Program Unggulan Kuningan Melesat
pengamanan perdagangan 8 Belum terintegrasinya produk unggulan dan potensi ekonomi perdesaan serta belum dilakukannya mapping potensi 9 Masih rendahnya daya ungkit hasil produk unggulan desa dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan			
1 Belum adanya skill khusus dari pendidikan yang akan menjadi keunggulan lulusan dalam menghadapi pasar kerja dan dunia usaha 2 Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang professional 3 Masih tingginya angka pengangguran 4 Rendahnya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat 5 Terbatasnya lapangan pekerjaan dari sektor industri ramah lingkungan	2 Pengurangan Pengangguran	1 Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal	
1 Belum optimalnya pelayanan fasilitas kesehatan 2 Masih adanya Penanganan pasien tidak mampu yang belum tercover jaminan Kesehatan 3 Belum terjaminnya penyelesaian biaya bagi pasien tidak mampu oleh program jaminan kesehatan 4 Masih kurangnya Jumlah SDM jabatan fungsional Kesehatan dan dokter spesialis	3 Penurunan Stunting	1 Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan 2 Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan 3 Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya 4 Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	PERTAMA Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Program Unggulan Kuningan Melesat
5 Masih terbatasnya sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan, kondisi sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan tuntutan pengembangan pelayanan 6 Belum optimalnya peningkatan Kualitas Pendidikan dan Apresiasi Kebudayaan Daerah 7 Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan 8 Belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan SDM olahraga yang memadai 9 Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan 10 Masih rendahnya pembangunan berperspektif kebutuhan berbasis gender 11 Rendahnya pemberdayaan ekonomi perempuan 12 Kurang optimalnya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk ke fasilitas kesehatan/rehabilitasi 13 Belum optimalnya penyelenggaraan UPTD PPA sebagai One Stop Service bagi pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak 14 Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB 15 Angka pemakaian kontrasepsi cara modern masih stagnan 16 Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 17 Masih banyaknya perkawinan usia muda (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 Tahun bagi perempuan dan 25 Tahun bagi pria)		5 Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 6 Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting 7 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima 11 Eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	
1 Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa terutama dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di desa	4 Pemberdayaan Ekonomi masyarakat berbasis potensi keunggulan lokal	1 Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	NATA DAYA- Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Program Unggulan Kuningan Melesat
		2 Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 3 Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan 4 Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan 5 Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis 6 penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan 7 Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor pengolahan hasil pertanian 8 Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif 9	TATAPAKAN JATI Tanam Tanah Pakarangan Jaga dan Tekan Inflasi PASAR RAYA Pemberdayaan Sanggar Ekraf dan Usaha Rakyat

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Program Unggulan Kuningan Melesat
		10 Pengembangan sumber daya manusia dan para pelaku usaha di sektor pariwisata 12 Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya 13 Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan 14 Peningkatan ketahanan bencana 15 Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa 16 Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. 17 Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis 18 Penataan dan restrukturisasi BUMD Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah 19 Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi asset serta CSR 20	

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Program Unggulan Kuningan Melesat
1 Cakupan pelayanan sampah belum optimal 2 Pengelolaan TPA belum optimal 3 Cakupan pelayanan persampahan masih rendah baik ditinjau dari luasan wilayah maupun besaran timbulan sampahnya 4 Pola pengelolaan sampah masih didominasi oleh penanganan sampah sehingga perlu didorong upaya peningkatan pola pengurangan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak di sumber.	5 Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan desa	1 Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah 2 Percepatan penetapan Revisi Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan 3 4 Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek strategis/prioritas 5 Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment) 6 Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisata, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan) 7 Perencanaan dan implementasi Reforma Agraria	

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Program Unggulan Kuningan Melesat
		8 Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.	
		9 Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy	
		10 Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR	
1 Belum adanya skill khusus dari pendidikan yang akan menjadi keunggulan lulusan dalam menghadapi pasar kerja dan dunia usaha	6 Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	1 Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta perlindungan anak, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	PERTAMA Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna NGAJI DIRI - Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pasantren Mandiri
2 Kualitas SDM pencari kerja relatif masih rendah		2 Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	
3 Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, tidak sesuai dengan nilai upah yang diberikan		3 Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama	
4 Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep industri hijau yang menghambat penyerapan tenaga kerja		4 Meningkatkan pembinaan untuk lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	
		5 pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	
		6 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Program Unggulan Kuningan Melesat
		7 Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah	
		8 Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama	
		9 Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter digital literacy dan kondisi lokal daerah	
		10 Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	
		11 Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital TIK	
		12 Penyiapan dan penataan <i>government induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah	
		13 Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik	
		14 Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak diperkotaan/perdesaan	
		15 Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	
1 Belum optimalnya profesionalitas ASN	7 Tata Kelola Pemerintahan	1 Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	SOMEAH KA SEMAH Sistem Online Modern, Efesien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Program Unggulan Kuningan Melesat
2 Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik		2 Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	AJEG TIMBANGAN APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan Berimbang ABDI NEGARA: ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah Melayani
3 Belum optimalnya ketercapaian nilai SAKIP		3 Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	
4 Kurangnya Pemahaman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		4 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
5 Belum Optimalnya Kualitas Koordinasi, Sistem Pengawasan Internal, Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah		5 Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
		6 Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan. Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	
		7 Meningkatkan ketaatan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap perundang-undangan daerah	
		8 Pembinaan aparatur dan masyarakat desa	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2025

4.3.4.1. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan diselaraskan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Perangkat Daerah dan Kunjungan Kerja Dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Kuningan dan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Keterkaitan Program Unggulan dengan Pokok-Pokok DPRD Tahun 2026

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Program Unggulan Kuningan Melesat
Bidang Hukum, Administrasi Pemerintahan dan Keuangan : Berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah hendaknya dalam merencanakan target pendapatan asli daerah pada tahun 2026 untuk dilakukan kajian secara komprehensif dan berdasarkan objek yang akan dipungut Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hendaknya pemerintah daerah menyediakan program dan kegiatan yang bersifat prioritas	SOMEAH KA SEMAH Sistem Online Modern, Efesien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan AJEG TIMBANGAN APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan Berimbang

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Program Unggulan Kuningan Melesat
3. Bahwa dalam rangka tertib administrasi mengenai aset daerah Kabupaten Kuningan hendaknya pemerintah daerah menyediakan sistem terhadap pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kuningan 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepegawaian serta meningkatkan indeks profesionalitas ASN hendaknya pemerintah daerah melakukan pelatihan dan bimbingan secara berkala	ABDI NEGARA: ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah Melayani
Bidang Perekonomian 1. Pemerintah daerah harus berkomitmen dan fokus dalam menyelesaikan angka kemiskinan ekstrim yang masih menjadi masalah serius, berdasarkan data BPS 19% angka kemiskinan berasal dari sektor petani. Oleh karenanya kami DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung anggaran program peningkatan kualitas petani di Kabupaten Kuningan 2. Kami DPRD menyikapi mengenai kondisi lahan produktif khususnya lahan pertanian di Kabupaten Kuningan yang saat ini semakin berkurang akibat alih fungsi dan sangat memprihatinkan. Kami berharap pemerintah daerah agar serius dan fokus pada penyelamatan lahan produktif pertanian dan membuat Grand Desain Ketahanan Pangan di Kabupaten Kuningan 3. Keberadaan kualitas sapi pasundan di Kabupaten Kuningan sudah diakui oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sapi pasundan terbaik di Jawa Barat dan sejalan (mendapat dukungan) dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hendaknya pemerintah daerah agar segera membuat konsep pemberdayaan sapi pasundan baik itu sektor budidaya maupun dijadikan sektor pariwisata.	NATA DAYA- Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata TATAPAKAN JATI Tanam Tanah Pakarangan Jaga dan Tekan Inflasi PASAR RAYA Pemberdayaan Sanggar Ekraf dan Usaha Rakyat

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Program Unggulan Kuningan Melesat
Pemerintah daerah agar serius dalam mendukung program pencegahan penyakit pada hewan, mengingat dalam beberapa tahun Kabupaten Kuningan masih kesulitan dalam menangani permasalahan penyakit hewan karena tidak didukung dengan anggaran optimal. 4. Berkenaan dengan rencana pemerintah daerah untuk melakukan pemanfaatan air dari Curug Mangkok Desa Cisantana. Kami DPRD merekomendasikan agar dikaji ulang dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan ekonomis (manfaat) khususnya bagi masyarakat Desa Cisantana. 5. Keberadaan Pasar modern di Kabupaten Kuningan perlu ditangani secara serius termasuk penyesuaian peraturan daerah Kabupaten Kuningan nomor 11 tahun 2011 tentang penataan toko modern yang saat ini perlu segera dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum peraturan perundang-undangan yang di atasnya sehingga permasalahan muncul akibat regulasi perda yang sudah tidak sesuai 6.	
Bidang Pembangunan Pemerintah daerah agar serius pada penyelesaian Program Rehabilitasi Jalan yang rusak di setiap wilayah Kabupaten Kuningan dan meningkatkan kualitas kemantapan jalan sesuai dengan standar usia ekonomis bangunan 1. Pemerintah daerah agar serius pada Program Rehabilitasi Drainase jalan di wilayah yang menjadi rawan banjir 2. Pemerintah Daerah untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk menyelesaikan Program Pembebasan Lahan Dan Pembangunan Lanjutan Jalan Lingkar Timur Selatan. 3. Pemerintah Daerah agar secara serius melakukan koordinasi untuk penyelesaian regulasi tentang RTRW dan RDTR Kabupaten Kuningan agar penataan ruang di Kabupaten Kuningan jelas dasar hukumnya. 4.	NATA DAYA- Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata JAWARA TANI Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Program Unggulan Kuningan Melesat
Bahwa dalam rangka menyelesaikan persoalan dampak lingkungan khususnya yang berasal dari sampah, 5. hendaknya Pemerintah Daerah agar secara serius segera membangun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang baru.	
Bidang Kesejahteraan Rakyat Bahwa dalam rangka meningkatkan rata – rata lama sekolah dikabupaten Kuningan yang saat ini hanya rata – rata 7 sampai 8 tahun dan sesuai arahan bapak Gubernur Jawa Barat terpilih rata – rata lama sekolah harus sampai 1. ke 12 tahun, untuk itu kami mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarana Prasarana Sekolah dan Peningkatan Kualitas Pendidik (Guru) serta kegiatan sekolah lainnya yang berbentuk ekstra kulikuler Pelayanan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama, untuk itu hendaknya Pemerintah Daerah harus 2. serius memperbaiki kualitas pelayanan dasar kesehatan pada puskesmas seiring dengan telah berubahnya status menjadi puskesmas badan layanan umum daerah Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan keluarga, kami mendorong kepada Pemerintah Daerah 3. meningkatkan upaya pencegahan HIV AIDS terutama pada tingkatan remaja Kesejahteraan masyarakat miskin menjadi prioritas utama, untuk itu hendaknya Pemerintah Daerah 4. menyiapkan program pahlawan ekonomi nasional (PENA) yang berkolaborasi dengan para usha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan	GEMA SADULUR Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia dan Pengangguran PERTAMA Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna NGAJI DIRI - Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pasantren Mandiri

Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2026	Program Unggulan Kuningan Melesat
Bahwa Pemerintah Daerah belum adanya program dan kegiatan yang kongkrit terhadap desa-desa miskin ekstrim angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kuningan masih cukup besar 9,96 % Oleh karena itu kedepan 5. Pemerintah Daerah perlu memberikan alokasi anggaran khususnya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran secara bertahap dapat diselesaikan dengan baik melalui pemberdayaan, pelatihan maupun padat karya	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2025

Usulan desa dan Pokok-pokok Pikiran DPRD sesuai dengan tahapan perencanaan dalam SIPD telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi oleh TAPD untuk disetujui menjadi bagian dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Jumlah usulan yang telah masuk sebanyak 1.030 untuk Usulan Desa dan 1.831 untuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

4.3.4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan / Program Unggulan Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional (RKP 2026) dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Oleh karena itu, untuk menggambarkan keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, merupakan hal yang menjadi keharusan dilakukan dengan tujuan salah satunya adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam dokumen RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Adapun program prioritas Nasional tersebut terdiri dari:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Setelah penjelasan Sasaran Pembangunan Nasional diatas, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan juga mengacu pada Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 meliputi:

1. Infrastruktur Istimewa
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Istimewa
3. Pendidikan Istimewa
4. Kesehatan Istimewa
5. Pertanian Istimewa
6. Lingkungan Hidup Istimewa
7. Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa
8. Kesejahteraan Perangkat Desa Istimewa

Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026, dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2026, disajikan pada tabel 4.12.

**Tabel 4.11 Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2026 Antara Pemerintah Pusat,
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan**

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2026		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2026 Kab. Kuningan		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait dengan PD
PN1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	P1	Mewudujkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	PD1	Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif	PD 1 terkait dengan : Prioritas Nasional : PN7, PN 4 • Prioritas Provinsi : P4
PN2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	PD2	Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	PD 2 terkait dengan : • Prioritas Nasional : PN2, PN6 • Prioritas Provinsi : P2
PN3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	P3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	PD3	Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif	PD 3 terkait dengan : • Prioritas Nasional : PN3, PN6 ; • Prioritas Provinsi : P3
PN4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	P4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	PD4	Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan	PD 4 terkait dengan : • Prioritas Nasional : PN2, PN 8 • Prioritas Provinsi : P2
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			PD5	Penguatan Nilai-Nilai Religius dan Budaya dalam Kehidupan Sosial	PD 5 terkait dengan : • Prioritas Nasional : PN4, PN 8 • Prioritas Provinsi : P1
PN6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,			PD6	Pembangunan Infrastruktur Sosial	PD 6 terkait dengan : • Prioritas Nasional :

Prioritas Nasional RKP 2026		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2026		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2026 Kab. Kuningan		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait dengan PD
	Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	PN3, PN5 • Prioritas Provinsi : P3
PN7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan					
PN8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur					

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2025

Berdasarkan keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 pada Tabel 4.12 diatas, akan diturunkan kembali untuk keterkaitan Prioritas, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas, Sasaran Prioritas serta Indikator Sasaran Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance		PPD 1 : Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif	
S1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan	S15. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Provinsi	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Predikat Indeks Reformasi Birokrasi
	2. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga				
	3. Indeks Kemerdekaan Pers				
	4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik				
	5. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik				
	6. Persentase kader yang menempati Jabatan Strategis				
	7. Indeks Demokrasi Indonesia				
	8. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi				
	9. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	Kesetaraan				
	10. Indeks Hak Asasi Manusia				
	11. Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
	12. Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik				
	13. Indeks Akses terhadap Keadilan				
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	
S2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	1. Asia Power Index (Military Capability)	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	-	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)
	2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)		-		
	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	4. Global <i>Cybersecurity Index</i>		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5. Indeks Keamanan Laut Nasional		-		
S3. Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	6. Indeks Ketahanan Pangan	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)
	7. Prevalensi Ketidacukupan Pangan		-		
	8. Meningkatkan Produksi Pangan		-		
	9. Berkurangnya Impor Pangan		-		
	10. Nilai Tukar Petani Indeks Kesejahteraan Petani		Nilai Tukar Petani		
S4. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih	11. Indeks Ketahanan Energi	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan	Persentase Penurunan Emisi GRK	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)
	12. Pasokan Energi Primer		a. Kumulatif		
	13. Konsumsi Energi Final per Kapita		b. Tahunan		
	14. Porsi EBT dalam Bauran Energi				
	15. Intensitas Energi Primer				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	16. Kapasitas Tampung Air per Kapita	perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah	Persentase Kualitas infrastruktur
	17. Meningkatnya Air Minum Jaringan				
	Perpipaan				
	18. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman				
	19. Menurunnya luas lahan kritis				
	20. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman				
	21. Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka				
S5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	22. Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Inklusi Keuangan	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
	Tingkat Global (Peringkat GIEI)				
	23. Kontribusi PDB Syariah				
S6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	24. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	25. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)				
S7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk	26. Indeks Ekonomi Hijau	S8. Meningkatnya produksi dan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian,	Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan,

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi		produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan Petani/Nelayan	Kehutanan, dan Perikanan	hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Perkebunan dan Perikanan (%)
	27. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	S12. Meningkatnya layanan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
	Pengolahan Sampah (%)	Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di			
	28. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)
	29. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		a. Kumulatif		
	30. Proporsi Tenaga Kerja Hijau		b. Tahunan		
	31. Tingkat Input Material Sirkular				
S8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	32. Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru	S8. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)
	33. Perlindungan Kawasan Perairan				
	34. Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Ekonomi Biru				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
		kesejahteraan Petani/Nelayan			
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	
		Miskin dan Kaya			
S9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah	Persentase Kualitas infrastruktur
	2. Waktu Tempuh pada Lintas Utama				
	(Jam/100 Km)				
	3. Peningkatan Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan (%)				
	4. On Time Performance Udara (%)				
	5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan (%)				
	6. Kondisi Jalur KA sesuai Standar (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)				
	7. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	8. Indeks Pembangunan TIK Nasional				
	9. Konsumsi Listrik per Kapita (kwh)				
S10. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	10. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
	11. Aset Perbankan/PDB (%)		Kapasitas Fiskal Daerah		
	12. Aset Dana Pensiun/PDB (%)				
	13. Aset Asuransi/PDB (%)				
	14. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		Total Kredit/PDRB		
	15. Total Kredit/PDB (%)				
	16. Inklusi Keuangan (%)				
S11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	17. Rasio PDB Pariwisata (%)	S11. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB		
	18. Devisa Pariwisata (Miliar USD)		Ekonomi Kreatif Nasional		
			Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum		
S12. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	19. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM
	20. Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDB (%)		Rasio Kewirausahaan Daerah		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	21. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan	Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten			
	Menengah (%)				
	22. Rasio Kewirausahaan (%)				
S13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi	23. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S11. Meningkatnya produktivitas sektor	Proporsi PDRB Ekonomi	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB		pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional		
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovati	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	
S14. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15	S4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
	tahun keatas (tahun)		diatas 15 Tahun		Harapan Lama Sekolah
	2. Harapan Lama Sekolah (tahun)		Harapan Lama Sekolah		
	3. Rata-rata nilai PISA				
	a. Membaca				
	b. Matematika				
	c. Sains				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional 17.03				
	a. Literasi Membaca				
	b. Numerasi				
	5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)				
	6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)				
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)				
	8. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran				
S15. Kesehatan untuk Semua	9. Usia Harapan Hidup (tahun)	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
	10. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	11. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)				Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita
	12. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita		
	13. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
	14. Prevalensi obesitas >18 tahun				
	15. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)				
S16. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	16. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga) (Poin)
	17. Indeks Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (Poin)
	18. Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
	19. Indeks Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender		
	20. Indeks Pembangunan Gender				
	21. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan	Persentase penduduk miskin (persen)
	22. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	23. Peringkat Indeks Inovasi Global	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
	24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Rasio Kewirausahaan Daerah		
	25. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	S14. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat	Indeks Inovasi Daerah
	26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				
S18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	27. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*
	28. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games				
	29. Peringkat pada Asian Games				
	30. Peringkat pada Asian Para Games				
	31. Peringkat pada SEA Games				
	32. Peringkat pada ASEAN Para Games				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	33. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang aktif berolahraga (%)				
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan		Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	
untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		lingkungan yang tidak eksploitatif			
S19. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalakan potensi sumber daya lokal dan keunggulan wilayah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
	2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)				
	3. Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA)				
	per Kapita (Rp Juta)				
	4. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB				
	Industri Pengolahan (%)				
S20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik	5. Biaya Logistik (%PDB)	S7. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, inklusif dan berdaya saing dengan mengoptimalakan potensi sumber daya lokal dan keunggulan wilayah	Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)
	6. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)				
S21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	S9. Meningkatnya		Meningkatnya investasi, kerja sama yang baik antar daerah dalam skala	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	8. Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)	nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta Aktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto	regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	
	9. Nilai PMA dan PMDN (Rp. Triliun)				
	10. Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia (%)				
	11. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%)				
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	
S22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	1. Tingkat Kemiskinan	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang baik dan sejahtera dalam upaya menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan	Persentase penduduk miskin (persen)
	2. Proporsi penduduk kelas menengah				
	3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal				
	4. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
S23. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	5. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S24. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	6. Persentase desa mandiri (%)	infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan	Indeks Desa	Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa sebagai penggerak pembangunan di desa	Indeks Desa Membangun
S25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	7. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan			
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif.	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		Terwujudnya kehidupan masyarkat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila	
		P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi		Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovati	
		Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance			
S26. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	1. Indeks Integritas Partai Politik	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional	Indeks Daya Saing Daerah
	2. Indeks Pembangunan Hukum				
	3. Indeks Materi Hukum				
	4. Indeks Persepsi Korupsi				
	5. Indeks Integritas Nasional				
	6. Indeks Pelayanan Publik	S16. Meningkatnya	Persentase capaian	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	reformasi birokrasi general (RB General)	efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	
	8. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri				
S28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	9. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum
S29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	10. <i>Clearance rate</i> tindak pidana judi				
	11. <i>Clearance rate</i> tindak pidana penyelundupan				
S30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	12. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Kapasitas Fiskal Daerah	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kreatif dan inovatif melalui pemberdayaan masyarakat dalam mendukung persaingan ekonomi regional	Indeks Daya Saing Daerah
S31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	13. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%)				
	14. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
S32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	15. Tingkat Inflasi (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya dan ideologi Pancasila	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif.	
S33. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	S2. Terbentuknya Individu Bertaqwa, Beretika, dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				
	3. Indeks Layanan Keagamaan				
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		Indeks Pembangunan Kebudayaan		
	5. Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas				
S34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
	7. Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada empat sektor prioritas (kelautan & pesisir, air, pertanian dan kesehatan)	kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan			
	8. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana				

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2024

4.3.5 Program Prioritas Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 diimplementasikan melalui program prioritas dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Kuningan. Program prioritas ditetapkan sebagai upaya transformasi pembangunan dengan melanjutkan Program Unggulan, sedangkan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2026 ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	10 Program Unggulan
PPD1: Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif	☐ Talent Pool ASN dan Pelaksanaan Sistem Merit	ABDI NEGARA: ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah Melayani
	☐ Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Penerapan E- Government	
	☐ Peningkatan Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	AJEG TIMBANGAN: APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan Berimbang
	☐ Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	
	☐ Peningkatan Capaian Nilai SPBE	
	☐ Kuningan <i>Fast Respon Multiplatform</i>	
PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	☐ Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Pangan	JAWARA TANI: Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti
	☐ Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi	
	☐ Peningkatan Minat Usaha Tani Pada Kaum Muda	SOMEAH KA SEMAH: Sistem Online Modern, Efisien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan
	☐ Peningkatan Produktifitas Lahan dan Indeks Pertanaman (IP)	
	☐ Peningkatan Produktifitas Peternakan , Perikanan dan Perkebunan	NATA DAYA: Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata
	☐ Peningkatan minat investor industri ramah lingkungan	

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	10 Program Unggulan
	☐ Peningkatan Kemantapan Jalan melalui Pembangunan Jalan Baru dan Rehabilitasi Jalan Eksisting	
	☐ Penyediaan pusat kegiatan ekonomi sosial budaya di desa dan kelurahan	
PPD3: Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif	☐ Penyediaan Sanggar Ekonomi Kreatif sesuai dengan Potensi UMKM Setempat	PASAR RAYA : Pemberdayaan Sanggar ekraf dan Usaha Rakyat
	☐ Peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha dan perdagangan	
	☐ Peningkatan Kapasitas UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif	
	☐ Program Peningkatan SDM pelaku usaha dan perdagangan serta Wirausahawan Baru	
	☐ Perluasan Akses Pasar produk unggulan daerah	
	☐ Dukungan legalitas bagi pelaku usaha dan perdagangan	
PPD 4: Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan	☐ Pemanfaatan Lahan untuk penyediaan komoditas pangan rawan inflasi	TATAPAKAN JATI : Tanam Tanah Pakarangan Jaga dan Tekan Inflasi
	☐ Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga tutupan lahan berbasis vegetasi	
	☐ Peningkatan inisiatif pemanfaatan energi hijau dan terbarukan	
	☐ Mendorong pemanfaatan jasa lingkungan untuk ekonomi berbasis kearifan lokal	
PPD 5: Penguatan Nilai-Nilai Religius dan Budaya dalam Kehidupan Sosial	☐ Meningkatkan tingkat pendidikan formal bagi santri	NGAJI DIRI : Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pasantren Mandiri
	☐ Mendukung penyediaan fasilitas umum , air bersih dan sanitasi untuk kegiatan pesantren	
	☐ Peningkatan kesejahteraan bagi guru ngaji	
	☐ Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial masyarakat	
	☐ Meningkatkan tingkat ketentraman dan ketertiban umum	
PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	☐ Peningkatan dan perluasan akses pendidikan dasar dan menengah	PERTAMA : Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna
	☐ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang Kegiatan Belajar dan Mengajar	
	☐ Penguatan nilai-nilai muatan lokal melalui pada semua level pendidikan	GEMA SADULUR:
	☐ Penanaman nilai moral dan etika sejak usia sekolah	Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia dan Pengangguran

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	10 Program Unggulan
	☐ Peningkatan dan perluasan akses layanan kesehatan yang paripurna	
	☐ Peningkatan kualitas SDM dan Pelayanan Kesehatan	
	☐ Peningkatan Akses Jaminan Kesehatan bagi kelompok rentan	
	☐ Promosi dan edukasi kesehatan bagi masyarakat	
	☐ Pengurangan angka stunting melalui peningkatan kesehatan untuk remaja putri, Calon Pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita	
	☐ Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui perlindungan kesempatan berusaha dan perbaikan infrastruktur	
	☐ Menjalin link and match kebutuhan tenaga kerja dengan dunia usaha dan industri	
	☐ Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	
	☐ Penggunaan Skema Padat Karya dalam pekerjaan pemerintah	
	☐ Penguatan jaringan pengaman sosial bagi kelompok rentan	
	☐ Peningkatan kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam situasi kebencanaan	
	☐ Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pendukung layanan publik	
	☐ Peningkatan layanan perhubungan dan konektivitas wilayah	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2025

4.3.5.1 Penjabaran Prioritas Pembangunan kedalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas serta program pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder. Penjabaran keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 kedalam program prioritas dan program pembangunan daerah, disertai strategi, arah kebijakan, indikator kinerja program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggung jawab, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.690.473.285.303.-, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.14 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
PPD1: Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	82	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	1. Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja	1. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
						2. program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
						3. program perekonomian dan pembangunan
						4. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
						5. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
						6. program perencanaan,

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
						pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
						7. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
						8. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
						9. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
						10. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
						11. program pengelolaan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
						pendapatan daerah
						12. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
						13. program pengelolaan keuangan daerah
						14. program pengelolaan barang milik daerah
						15. program kepegawaian daerah
						16. program kepegawaian daerah
						17. program pengembangan sumber daya manusia
						18. program penunjang urusan pemerintahan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
						daerah kabupaten/kota
						19. program pengelolaan aplikasi informatika
						20. program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
						21. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
				Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan	2. Pemberian insentif dan disinsentif dalam peningkatan profesionalisme ASN	22. program penyelenggaraan statistik sektoral
					1. membangun ruang diskusi publik	23. program pengelolaan arsip
					2. Pelayan pengaduan masyarakat	24. program perlindungan dan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				pengawasan pembangunan.		penyelamatan arsip
				Pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	1. Melakukan sinergi pembangunan bersama pemerintah provinsi dan Pusat dalam penanganan isu strategis daerah	25. program penyelenggaraan pengawasan
					2. menentukan lokasi-lokasi penanganan tepat sasaran	26. program penyelenggaraan pengawasan
				Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	1. penajaman manajemen risiko dalam setiap rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah	27. program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
				Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	1. membangun sarana dan prasarana teknologi yang memadai dalam mendukung digitalisasi	28. program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
					2. mendorong inovasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan	29. program pendaftaran penduduk
					3. mendorong keterbukaan informasi publik	30. program pencatatan sipil
						31. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
						32. program pengelolaan profil kependudukan
						33. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
						34. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
						35. program koordinasi ketenteraman

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
						dan ketertiban umum
						36. program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
						37. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
				Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	1. membangun sinergi lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien	
					2. mengembangkan kompetensi lintas sektor dalam membentuk Aparatur yang adaptif	
				Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan	1. mendorong inovasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan.	2. memperluas jangkauan jaringan internet	
					3. Meningkatkan SDM pengelola layanan berbasis digital	
				Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	1. Meningkatkan penggunaan media digital dalam pelaksanaan pemerintahan	
					2. pengukuran yang tepat terhadap pelaksanaan SPBE	
PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Meningkatnya produktivitas dan pemanfaatan dalam penambahan nilai hasil sektor Pertanian dan Pariwisata sebagai sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,273	Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	1. identifikasi komoditas unggulan sektor pertanian	1. Perencanaan dan pembangunan industri
		Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)	13,49			2. Pengendalian izin usaha industri
		Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM	10		2. Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Sektor Pertanian	3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	2,06		3. membangun jaringan pasok	4. Peningkatan sarana distribusi perdagangan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
		Makan dan Minum (%)*			dan pemasaran hasil pertanian	
		Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)	24,57	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	1. Meningkatkan penggunaan pupuk organik dan obat-obatan Nabati	5. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
					2. Penggunaan pupuk dan obat-obatan tepat guna serta tepat sasaran	6. Program pengembangan ekspor
		Kelas Kelompok Petani	2.673		3. Mempermudah akses pupuk dan pakan untuk petani	7. Standarisasi dan perlindungan konsumen
					4. Menjaga ketersediaan pupuk, obat dan pakan	8. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	14,37-18,53	Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan	1. mempertahankan Lahan Sawah Dilindungi/LP2B	9. Pelayanan izin usaha simpan pinjam
		Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi	65,93	Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan dan	1. memberikan kemudahan akses perbankan untuk petani	10. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan.	2. memperkuat koperasi tingkat desa	11. Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
				Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian	1. memperluas cakupan layanan jaringan irigasi kondisi baik	12. Pendidikan dan latihan perkoperasian
					2. memperluas cakupan layanan jaringan jalan usaha tani kondisi baik	13. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
				Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, pengindraan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	1. meningkatkan inovasi digital dalam sektor perikanan	14. Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
					2. memberikan pelatihan penggunaan teknologi untuk nelayan	15. Pengembangan UMKM
					3. memperluas cakupan infrastruktur sumber daya air untuk nelayan	16. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
					4. Penyediaan Saran dan Prasarana serta SDM pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan	17. Program pemasaran pariwisata
				Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor pengolahan hasil pertanian	1. meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas dan pemasaran pertanian dan produksi pengolahannya	18. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
				Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pariwisata	1. meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas dan pemasaran pariwisata	19. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
				Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara	1. Pengembangan pariwisata daerah sebagai destinasi wisata berbasis komunitas dan desa,	20. Program pengembangan kebudayaan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				kolaboratif dan partisipatif.	2. Melakukan kajian potensi wisata tingkat desa	21. Program pengembangan kesenian tradisional
				Pengembangan sumber daya manusia dan para pelaku usaha di sektor pariwisata	1. memberikan kemudahan investasi untuk pelaku usaha sektor pariwisata	22. Program pembinaan sejarah
					2. meningkatkan kualitas SDM penyediaan layanan jasa pariwisata	23. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
				Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal	1. meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas rantai pasok hulu-hilir	24. Program pengelolaan permuseuman
				Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya.	1. Memberikan kemudahan dalam layanan pengembangan perumahan tanpa mengenyampingkan kelestarian lingkungan	25. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
				Percepatan penyediaan infrastruktur air baku	1, perlindungan terhadap mata air	26. Penyuluhan pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan.	2. menjaga kualitas lingkungan di kawasan hulu	27. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
					3. memperluas jangkauan akses air bersih	28. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
				Peningkatan ketahanan bencana	1. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana	29. Program pengelolaan perikanan budidaya
					2. Edukasi kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	30. Program pengelolaan perikanan tangkap
				Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa	1. pemeliharaan jalan daerah dan jalan desa	31. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
				Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah	2. Meningkatkan peran aktif pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi daerah	32. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna.	1. Penguatan kelembagaan koperasi	33. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
					2. Membangun jejaring usaha	34. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	1. Perluasan peran ekosistem digital pada UMKM	35. Program perencanaan tenaga kerja
					2. Perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	36. Program Kesejahteraan Masyarakat
				Penataan dan restrukturisasi BUMD.	1. melakukan audit berkala terhadap BUMD	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah	2. Mengoptimalkan Dana Sosial Syariah melalui pengumpulan dana zakat 3. Mengoptimalkan Sistem Keuangan Syariah	
PPD3: Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif	Meningkatnya investasi, kerja sama yang baik antar daerah dalam skala regional dan tenaga kerja yang ditempatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,58-8,69	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah	1. Peningkatan Promosi dan Kerja sama antar daerah	1. Program penempatan tenaga kerja
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,43		2. Penguatan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah	2. Program hubungan industrial
	Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas masyarakat	Indeks Inovasi Daerah	32	Penyiapan kompetensi SDM yang unggul kompetitif dan penempatan tenaga kerja	1. Melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	3. Program pengembangan iklim penanaman modal
	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga, keluarga,	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin)	63		2. Menjalin Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja	4. Program promosi penanaman modal

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
	pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,24		3. Menjalin Kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam penyaluran tenaga kerja	5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
		Indeks Perlindungan Anak	100	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, optimalisasi aset serta CSR	1. Peningkatan Inovasi Daerah	
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,03	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta perlindungan anak, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	1. Pengarusutamaan Gender	
		Indeks Pembangunan Keluarga	52.73	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	1. Mengikutsertakan keterlibatan gender dalam pembangunan	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	65	Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	1. Penguatan kelembagaan dan sistem kerja sama antar daerah	
PPD 4: Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,41			1. Program pelayanan penanaman modal
		Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	512.676,81			2. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
						3. Program pelayanan penanaman modal
						4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
						5. Program penelitian dan pengembangan daerah
						6. Program penelitian dan pengembangan daerah
						7. Program pengarusutamaan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
						gender dan pemberdayaan perempuan
						8. Program peningkatan kualitas keluarga
						9. Program perlindungan perempuan
						10. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
						11. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
						12. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
				Percepatan penetapan Revisi Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis	1. Berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	13. Program pengelolaan sistem data gender dan anak

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
					(RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan strategis	
				Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan	1. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang berbasis risiko	14. Program pemenuhan hak anak (PHA)
				Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek strategis/prioritas.	1. Penguatan basis data spasial lahan	15. Program perlindungan khusus anak

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment)	1. Inventarisasi data stok karbon	16. Program pengendalian penduduk
				Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan	1. Memberikan kemudahan perizinan sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif	17. Program pembinaan keluarga berencana (kb)
				insentif fiskal/non fiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri, pariwisata, sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan)		18. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
				Perencanaan dan implementasi	1. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik pemerintah	19. Program pembinaan keluarga berencana (KB)

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				Reformasi Agraria.	2. Memberi kemudahan hak akses terhadap Reformasi Agraria	20. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
				Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global.	1. Membangun kelembagaan riset dan inovasi IPTEK daerah	21. Program peningkatan kualitas keluarga
					2. Menjalinkan kerja sama dengan akademisi	22. Program pengendalian penduduk
				Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular economy	1. Optimalisasi dan Pembangunan TPST	23. Program pengendalian penduduk
					2. Penyebarluasan informasi terkait 3R (Reduce Reuse Recycle) tingkat rumah tangga	24. Program pengendalian penduduk
				Sinkronisasi periodisasi RPJPD, RPJMD dengan RTRW Kabupaten dan RDTR	1. Menyelaraskan dokumen perencanaan tingkat daerah, provinsi dan pusat	25. Program peningkatan kualitas keluarga

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
PPD 5: Penguatan Nilai-Nilai Religius dan Budaya dalam Kehidupan Sosial	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76,78	Meningkatkan ketaatan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap perundang-undangan daerah	1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum peraturan daerah	1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)	77,33		2. Penegakan hukum peraturan daerah	2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
				Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kehidupan beragama, berpolitik, berbangsa dan bernegara	1. Penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	3. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
					2. Menggalakkan pendidikan wawasan kebangsaan dalam pendidikan formal atau informal	4. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
						politik dan pengembangan etika serta budaya politik
				Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama	1. Memberikan kemudahan perizinan pendirian sekolah dan pesantren	5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
					2. Memberikan masukan tentang kurikulum berbasis penguatan karakter dan kearifan lokal	6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
					3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah dan pesantren	
				Meningkatkan pembinaan untuk	1. Memberikan fasilitasi	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	perizinan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	
					2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	
PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,5	Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan)	1. Penyediaan akses pendidikan bagi kelompok rentan atau daerah terpencil, misalnya melalui program beasiswa atau bantuan khusus.	1. Program pengelolaan pendidikan
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,43	dasar dan pendidikan menengah)	2. Peningkatan Kompetensi dan Redistribusi Tenaga Pendidik	2. Program pendidik dan tenaga kependidikan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi Stunting	19,71		3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pendidikan dasar	3. Program pengelolaan pendidikan
		Usia Harapan Hidup	75,47	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	1. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pendidikan	4. Program pendidik dan tenaga kependidikan
	Penurunan angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	9,88-10,95	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi dan keunggulan daerah	Mendorong kurikulum yang berbasis pedagogi dan mengintegrasikan pembelajaran non-akademik, dan muatan lokal	5. Program pengelolaan pendidikan
	Meningkatnya ketersediaan pemenuhan pangan masyarakat	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	4,02	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren serta pengembangan sekolah berbasis asrama	1. Memberikan kemudahan perizinan pendirian sekolah dan pesantren	6. Program pendidik dan tenaga kependidikan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber air baku	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	2,6		2. Memberikan masukan tentang kurikulum berbasis penguatan karakter dan kearifan lokal	7. Program pengelolaan pendidikan
	Meningkatnya kapasitas pengelolaan desa sebagai penggerak pembangunan di desa	Indeks Desa Membangun (ID)	0,8		3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah dan pesantren	8. Program pembinaan perpustakaan
	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas dalam menunjang mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah	Tingkat Konektivitas antar wilayah	1,52			9. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Persentase Kualitas infrastruktur	85,42	Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter digital literacy dan kondisi lokal daerah	1. Identifikasi Dini dan Pemetaan Bakat, dengan tujuan untuk menciptakan profil bakat siswa yang terintegrasi dari PAUD hingga pendidikan menengah	10. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
	Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	79,73		2. Mendorong implementasi pembelajaran terdiferensiasi di kelas, di mana guru menyesuaikan metode pengajaran, materi, dan penilaian berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar individu siswa	11. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	127,95		3. Membangun kemitraan dengan praktisi, seniman, ilmuwan, dan profesional di berbagai bidang untuk memberikan bimbingan dan kesempatan belajar yang relevan bagi siswa dengan talenta khusus	12. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	1. Peningkatan Kompetensi dan Redistribusi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan	13. Program pemberdayaan sosial
				Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital TIK	1. Penyediaan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital	14. Program rehabilitasi sosial
					2. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis digital	15. Program perlindungan dan jaminan sosial
				Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	1. Penyiapan dan Pemenuhan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	16. Program penanganan bencana
					2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	17. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
					3. Penyediaan fasilitas Komunal Pendukung Kesehatan (Sarana Olah raga dan Rekreasi, Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu)	18. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
				Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	1. Standarisasi Sarana Prasarana Puskesmas	19. Program penanganan kerawanan pangan
					2. Pemenuhan Alat Kesehatan Esensial	20. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
					3. Penyediaan Obat dan vaksin yang cukup	21. Program penataan desa
					4. Pengelolaan Limbah Medis yang aman	22. Program peningkatan kerja sama desa
				Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap	1. Melakukan Edukasi pola hidup bersih dan sehat Berbasis Komunitas	23. Program administrasi pemerintahan desa

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				dengan pendekatan budaya.	2. Penguatan Peran Kader Kesehatan dan Organisasi Masyarakat	24. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
				Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	1. Pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan lokal	25. Program penyelenggaraan penataan ruang
					2. Sosialisasi dan penjangkaran bakat berbasis komunitas	26. Program penyelenggaraan jalan
					3. Pendidikan berjenjang berbasis kompetensi	27. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
				Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Peningkatan Kompetensi dan Redistribusi Tenaga Kesehatan	28. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
				Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	1. Integrasi Program penanganan Stunting	29. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	2. Pendampingan ibu hamil dan remaja usia produktif	30. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
					1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan di Tingkat Pelayanan Dasar (Puskesmas dan Posyandu)	31. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
					2. Penguatan Sistem Rujukan dan Jaringan Pelayanan	32. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
					3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Data Akurat	33. Program penataan bangunan gedung
				Eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	1. Deteksi dini dan pengobatan masal	34. Program penataan bangunan dan lingkungannya
					2. Peningkatan Sanitasi, Higiene, dan Pengendalian Vektor	35. Program pengembangan jasa konstruksi

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
					3. Edukasi dan promosi Kesehatan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma buruk dan diskriminasi	36. Program pengembangan perumahan
				Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua dan lainnya	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar	37. Program kawasan permukiman
					2. Pemutakhiran data kepersertaan penerima jaminan kesehatan	38. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan bantuan pembiayaan kesehatan bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi	1. Memberikan bantuan sosial	39. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
				Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	1. Meningkatkan sarana prasarana air minum dan sanitasi masyarakat	40. Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan tanah dan program abstentee
				Pembinaan aparatur dan masyarakat desa	1. Melaksanakan diklat bagi aparatur desa	41. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
					2. Meningkatkan sinergi Pembangunan bottom up	42. Program penanggulangan bencana

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
				Penyiapan dan penataan <i>government induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah	1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana konektivitas masyarakat	
				Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik	1. Meningkatkan layanan transportasi publik yang murah dan berkualitas	
				Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dengan karakteristik wilayah	1. Meningkatkan kualitas hunian masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah	
				Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan/ perdesaan	1. Meningkatkan kualitas hunian masyarakat di perkotaan/ perdesaan	
				Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	1. Peningkatan Mitigasi Bencana	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2026	Arah Kebijakan	Strategi	Dukungan Program
					2. Peningkatan standar bangunan yang tahan bencana dan perubahan iklim	

4.3.5.2 Dukungan Program/Kegiatan yang Menjawab Isu Strategis Tahun 2026

Dukungan program/kegiatan yang menjawab Isu Strategis Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15 Kerangka Pendanaan Teknokratis untuk Program/Kegiatan yang Menjawab Isu Strategis Tahun 2026

No	Program Unggulan	Satuan	2026		PD Penanggung Jawab
			Target	Pagu	
1	TOTAL PAGU			84.899.706.000	
	Ngaji Diri			3.500.000.000	
	Bantuan Air Bersih dan Sanitasi	Pesantren	25	1.250.000.000	DPUTR
	Beasiswa Santri	Orang	1.250	1.250.000.000	Bag. Kesra Setda
2	Insentif Guru Ngaji	Orang	1.000	1.000.000.000	Bag. Kesra Setda
	Gema Sadulur			9.925.000.000	
	Bantuan Sosial Alat Disabilitas	Orang	250	375.000.000	Dinsos
	Bantuan Sosial Pangan/Tunai lainnya		5.200	5.200.000.000	Dinsos/Bag. Kesra Setda
3	Bursa Kerja	Lowongan Kerja	2.500	150.000.000	Disnakertrans
	Rutilahu	unit	210	4.200.000.000	Disnakertrans
	Jawara Tani			6.337.000.000	
	Pemeliharaan dan Pembangunan Irigasi	Unit	100	5.000.000.000	Diskatan
4	Subsidi Pupuk	Ton	30.000	752.000.000	Diskatan
	Insentif Petani Muda	Orang	45	585.000.000	
	Someah Kasemah			10.500.000.000	
	Investor Baru (Menengah Kebawah)	Investor baru	100	500.000.000	DPMPSTP
5	RDTR (ditunda menunggu RTRW Selesai)	Dokumen	0	-	DPUTR
	Kemantapan Jalan (Berdasarkan Survey Provinsi)	Persen	84,22	10.000.000.000	DPUTR
	Pertama			50.949.706.000	
	Peningkatan RLS	Tahun	8,5	2.292.160.000	
	- Kejar Paket/ Pendidikan Penyetaraan	Orang (APS 2025)	1.763	2.292.160.000	

No	Program Unggulan	Satuan	2026		PD Penanggung Jawab
			Target	Pagu	
6	Rehab Kelas	Unit	200	20.000.000.000	DISDIKBUD
	Ruang Kelas Baru	Unit	100	15.000.000.000	DISDIKBUD
	Perpustakaan	Unit	50	250.000.000	DISARSIPUS
	Prevalensi Stunting	Persen	19,71	13.407.546.000	DINKES
	Pemberian Makanan Tambahan				
	a. Ibu Hamil KEK	Orang	698	1.800.840.000	
	b. Balita Gizi Kurang	Orang	3.000	2.772.000.000	
	c. Ibu Hamil Anemia	Orang	1.223	3.155.340.000	
	d. Balita BB Kurang	Orang	1.619	747.978.000	
	e. Balita Tidak naik BB	Orang	21.348	4.931.388.000	
7	Nata Daya			1.600.000.000	
	Alun-alun sentra ekonomi dan wisata desa	Unit	8	1.600.000.000	DPUTR
8	Tatapakan Jati			188.000.000	
	Demplot Cabai dan Bawang (32 Kecamatan)	Unit	376	188.000.000	Diskatan
9	Ajag Timbangan			-	
	Optimalisasi PAD				BAPPENDA
	Belanja Selektif				BPKAD
	Sinergi Perencanaan				BAPPEDA
10	Pasar Raya			700.000.000	
	Sanggar Ekraf	Kecamatan	8	400.000.000	Disporapar
	Sertifikasi PIRT	UMKM	200	300.000.000	Diskopdagperin
10	Abdi Negara			1.200.000.000	
	Nilai RB	Predikat	A	1.200.000.000	Bag. Organisasi Setda
	Nilai SAKIP	Poin	B		Bag. Organisasi Setda
	Opini BPK	Predikat	WTP		BPKAD

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2025

4.3.5.3 Dukungan Program Prioritas dan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Kuningan terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Provinsi

Dalam rangka penyelerasan pembangunan di Kabupaten Kuningan maka dilakukan persandingan yang menunjukkan dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten pada RKPD 2026 terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026 pada RKP Tahun 2026 serta Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi dan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 pada RKPD Tahun 2026 Provinsi Jawa Barat yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 terhadap Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026 serta Prioritas Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia							
1	Memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia	1. Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PPD5 : Penguatan Nilai-Nilai Religius dan Budaya dalam Kehidupan Sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi negara serta menguatnya karakter kebangsaan masyarakat (Persen)
		2. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tersampainya Informasi Pembangunan Daerah (Persen)
PN.02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru							
1	Keamanan siber, sandi, dan sinyal	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	PPD1 : Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (OPD)
		Fasilitasi business matchmaking startup digital	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD1 : Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
					Digital dan Responsif		Kabupaten Kuningan (Persen)
			PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengembangan UMKM	PPD 2 : Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Peningkatan jumlah UKM (Unit Binaan Usaha)
		Fasilitasi digital <i>technopreneur</i>	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD1 : Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)
			PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengembangan UMKM	PPD 2 : Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Peningkatan jumlah UKM (Unit Binaan Usaha)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)
			PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana pertanian (Unit)
2	Peningkatan kualitas lingkungan	Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Persampahan	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Program Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah (Persen) dan Pengurangan Sampah (Persen)
3	Swasembada pangan, energi, dan air	Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pertanian (Unit) Meningkatnya populasi ternak besar dan ternak kecil (Ekor)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
			dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya		Inklusif		
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana pertanian (Unit)
		Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun dari Waduk Kuningan (Daerah Irigasi Cileuweung)	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA (Persen)
		Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Waduk Kuningan	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya cakupan air bersih kepada masyarakat (Persen)
		Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pertanian (Unit)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
			dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya				
PN. 03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi							
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Kertajati Aerocity	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang (Persen)
		Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk)
		Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
			dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya				
		Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Orang)
						Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (Orang)
		Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan game	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)
		Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD1: Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan (Kab. Kuningan)	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Penyelenggaraan Jalan	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan jalan (Persen)
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA (Persen)
PN 04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas							
1	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal)	PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengelolaan Pendidikan	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (Persen) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A (Persen) Angka Partisipasi Kasar (APK)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/ sederajat					SMP/Paket B (Persen)
							Angka Partisipasi Murni (APM)
							SMP/Paket B (Persen)
		Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan	PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	PPD 4: Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (Persen)
		Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran	PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PPD3: Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perempuan dalam Jabatan Struktural/ Eksekutif yang dibina (Orang)
							Jumlah Perempuan dalam Politik yang dibina (Orang)
							Jumlah anggota Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dibina (Orang)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
							(31 Kelp))
							Jumlah Organsiasi Perempuan yang dibina (Organisasi)
				Program Perlindungan Perempuan	PPD3: Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang)
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	PPD3: Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Desa responsif perempuan dan anak (Desa)
				Program pemenuhan hak anak (PHA)	PPD3: Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina (Forum Anak)
				Program perlindungan khusus anak	PPD3: Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Kreatif, dan Inovatif	Program perlindungan khusus anak	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas terlatih dalam Unit

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
							Pelayanan Terpadu (Orang)
		Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di kabupaten/kota	PPP3 : Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Persen)
						Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Promotif preventif untuk pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)
		Fasilitasi literasi digital	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD1: Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)
2	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penurunan kematian ibu dan bayi	PPP3 : Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	PPD1: Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
				Masyarakat	Digital dan Responsif	Upaya Kesehatan Masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Persen)
						Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Promotif preventif untuk pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)
		Pembangunan kualitas keluarga	PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengendalian Penduduk	PPD 4: Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan	Program Pengendalian Penduduk	GDPK yang diimplementasikan sebagai dasar perencanaan (Dokumen)
							Jumlah sekolah formal/ non formal yang melakukan pendidikan kependudukan (Sekolah)
							Jumlah Rumah Data Paripurna (Rumah Data)
							Cakupan penyediaan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
							Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (Desa)
							Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan Sistem Informasi Keluarga (Petugas KB ASN)
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PPD 4: Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (Persen)
							Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB (Fasilitas)
							Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)
							Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
							Jangka Panjang (MKJP)
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	PPD 4: Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) (Tahun)
							Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kelompok Akseptor (Kelompok)
							Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub PPKBD (Institusi)
PN 05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri							
1	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		Hilirisasi industri kelapa	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk)
2	Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional	Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen)
		Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		Pengembangan industri elektronik dan digital	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2: Akselerasi Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Sektor Strategis.	Program perencanaan dan pembangunan industri Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen) Peningkatan jumlah pendataan SIINAS
PN 06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan							
1	Pemerataan ekonomi	Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengembangan Perumahan	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Perbaikan rumah bagi korban bencana dan Pembangunan PSU yang terdampak bencana (Unit)
		Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Kawasan Permukiman	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh (Ha)
PN 07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
1	Membangun <i>Single Identity Number</i> dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu	Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis <i>online single submission</i> dan mal pelayanan publik digital	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD1: Transformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Digital dan Responsif	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)
					PPD 4: Harmonisasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan selaras terhadap lingkungan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Media informasi perizinan dan nonperizinan (Media)
PN 08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur							
1	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan	PPP4 : Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	PPD 6: Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif	Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Dokumen)
						Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Penanganan Bencana (Dokumen)

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2024

4.3.5.4 Dukungan Program Strategis Nasional

Dukungan program prioritas daerah lainnya yang mendukung program-program yang bersifat mandatori dari pusat sebagai bagian dari program strategis nasional yaitu proyek strategis yang menjadi amanat **Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**, yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Konsep pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan ini menggunakan konsep Integrasi, Inovatif, Kolaboratif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, kemudian di kembangkan ke dalam konsep struktur ruang kawasan pengembangan polysentric smart region merupakan struktur ruang yang didalamnya terdapat kawasan perkotaan inti (Growth Pole) dan kawasan perkotaan sekitarnya (Growth Foundation). Growth Pole di Kawasan Rebana adalah Kertajati Aerocity, Kota Baru Patimban, dan Kota Cirebon yang saling meningkatkan kualitas dan daya saing dari masing-masing wilayah. Untuk Growth Foundation di Kawasan Rebana terdiri dari pengembangan 13 kawasan peruntukan industri (KPI) dan 20 sentra industri Kecil Menengah (SIKM) yang ada di Kawasan Rebana. Dalam pengembangan industri di kawasan Rebana perlu adanya insentif dari pemerintah untuk perusahaan di kawasan rebana yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga proyek pembangunan yang ternaungi dalam perpres Rebana dapat bermanfaat bagi pengembangan wilayah di kawasan Rebana, terutama Kabupaten Kuningan.

Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten penyangga bagi kabupaten sekitarnya khususnya di wilayah Ciayumajakuning, sesuai dengan rencana induk Kawasan Rebana, Kabupaten Kuningan sebagai bagian infrastruktur transportasi di antaranya:

Pada tahun 2022-2026

1. Pembangunan jalan alternatif Cirebon-Ciamis (segmen Cipasung-Cikijing-Panawangan) untuk mendukung aksibilitas BIJB Kertajati dan jalur logistik Cisundawu-Ciamis
2. Pengembangan jalan Lingkar Timur-Selatan untuk mendukung konektivitas jalan poros Tengah pada jalur Nasional Pantura, Pansela dan Tol Cipali

Pada tahun 2023-2027

3. Peningkatan ruas jalan Cipasung-Subang-Cilebak-Cilacap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Selatan yang terisolir, untuk membuka peluang jalur alternatif ekonomi baru dari Cilacap menuju Ciayumajakuning dan BIJB Kertjati.

Pada tahun 2024-2028

4. Pembangunan SPAM Skala Kota Daerah Pelayanan Kuningan-Cirebon-Brebes, Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten pendukung pemasok air minum di Kawasan Rebana.

Pada tahun 2022-2024

Kabupaten Kuningan sendiri mempunyai keunggulan dan potensi pada sektor pariwisata melaksanakan pembangunan jalan lingkar Cigugur-Cisanta untuk meningkatkan akses menuju obyek wisata Palutungan dan sekitarnya.

Gambar 4.6 Proyek Strategis Kawasan Rebana di Kabupaten Kuningan



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Harapan dengan adanya pembangunan kawasan Rebana ini bagi Kabupaten Kuningan adalah :

- Ada Akselerasi untuk investasi di kawasan Rebana tersebut dan untuk memenuhi sumber daya yang diperlukan agar memanfaatkan dari daerah sekelilingnya/Kabupaten/Kota tetangga.
- Prioritas utama tenaga kerja dari Kabupaten/Kota di Kawasan Rebana ketika Kawasan Industri yang sudah berjalan.
- Promosi wisata dan ketersediaan pangan kepada pihak-pihak luar di kawasan Rebana.
- Infrastruktur penunjang agar dibantu untuk dimaksimalkan, khususnya kepada K/L atau yang potensial untuk dikerjasamakan
- Proyek Strategis Kawasan Rebana dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pembangunan di kawasan Rebana, seperti Pembangunan Polman Kampus Majalengka yang sudah dibangun dalam proyek Rebana, agar dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan pendidikan tinggi dalam menunjang kualitas SDM di Kabupaten Kuningan.

Program Strategis lainnya dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 ini juga perlu diperhatikan mandatory khusus lainnya yang merupakan pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah (*mandatory spending*) sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Program Anggaran fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan sebesar 20 persen dari belanja daerah. Alokasi Anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan program prioritas bidang pendidikan dalam RKPD.
2. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan pembangunan kesehatan yang mengacu pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran yang mendukung pencapaian indikator-indikator dalam RIBK serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan..
3. Program Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa.

Dalam sektor pendidikan yang menjadi program yaitu ikut menyaksikan dalam peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan dalam sektor kesehatan yaitu ikut menyaksikan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional,

seperti penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan Malaria (ATM) sesuai amanat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/479/2017 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan Aids, Tuberkulosis dan Malaria di Indonesia. Pada saat ini, Kabupaten Kuningan telah melakukan Penanggulangan HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB), sedangkan untuk malaria hanya program pelayanan saja, karena Kabupaten Kuningan sudah eliminasi malaria (zero kasus).

4.3.5.5 Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Dukungan PPD RKPD Tahun 2026 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDG's) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
Aspek I : Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun	
1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anakanak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
1.4 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan	
2.1 Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi. 2.2 Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada Tahun 2026 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 Tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.3 Pada Tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non- pertanian. 2.4 Pada Tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. 2.5 Pada Tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita per 1000. 3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Rehabilitasi Sosial Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Penanggulangan Bencana

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
3.8 Pada Tahun 2030, Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	
4.1 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.2 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Kurikulum
4.3 Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	
4.5 Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	
4.6 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	
6.1 Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
6.2 Pada Tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.3 Pada Tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 6.4 Pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	Hukum Adat
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PPKS)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Tujuan 7: Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua	
7.1 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. 7.2 Pada Tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. 7.3 Pada Tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
	Program Hubungan Industrial
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per Tahun di negara kurang berkembang.	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Penempatan Tenaga Kerja
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Penilaian dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
8.6 Pada Tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan UMKM
8.9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Daerah
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Pengelolaan Permuseuman
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Program Hubungan Industrial
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada Tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
9.4 Pada Tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara	
10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Program Kesejahteraan Rakyat
	Program Hubungan Industrial
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	
11.1 Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua	Program Kawasan Permukiman

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. 11.5 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 11.6 Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Program Penanggulangan Bencana Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengembangan Perumahan Program perencanaan lingkungan hidup Program Kesejahteraan Rakyat Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Pengelolaan Persampahan Program penanganan bencana Program pengelolaan keuangan daerah Program Pengembangan Perumahan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	Tujuan 12: Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab
12.4 Pada Tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 12.5 Pada Tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. 12.8 Pada Tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH) Program Perizinan Usaha Pertanian Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penanganan Bencana

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tujuan 14: Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan	
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Perencanaan Lingkungan hidup Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pelestarian sumberdaya pesisir dan perairan umum Pengembangan sentra perikanan dan penguatan kelembagaan usaha Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghilangkan kehilangan keanekaragaman hayati	
15.1 Pada Tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengelolaan Hutan Program Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Perekonomian dan Pembangunan
15.4 Pada Tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan	
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan Khusus Anak Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Program Pembangunan Daerah
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
	Program Penataan Organisasi
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pemasaran Pariwisata
Aspek II : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penataan Organisasi
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Aspek III : Gender	
Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
Aspek IV : Modal Sosial Budaya dan Transformasi Digital	
1. Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (<i>local knowledge</i>), kearifan lokal (<i>local wisdom</i>), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Penataan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman
	Program Pembinaan Sejarah
2. Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, Tahun 2024

4.3.6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program pembangunan daerah Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah

kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2024 di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

A. Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 4.18 Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

Kegiatan/Sub Kegiatan		Jumlah Anggaran	Realisasi		Fisik	Ket
			Rp.	%		
1		2	3	4	5	6
APBD KABUPATEN						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PENDIDIKAN		1.163.958.107.459	1.051.406.134.544			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		15.328.645.589	11.242.494.128			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		5.646.317.767	4.194.506.084			
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	91.533.419	91.533.419	100		
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	150.000.000	139.115.485	92,74	0	

Kegiatan/Sub Kegiatan		Jumlah Anggaran	Realisasi		Fisik	Ket
			Rp.	%		
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.219.119.222	1.287.405.827	58,01	0	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000	91.525.500	91,53	100	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	196.266.283	187.586.325	95,58	100	
6	Pengadaan Mebeleur Sekolah	150.000.000	149.325.558	99,55	100	
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	750.000.000	695.500.000	92,73	100	
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000	400.000.000	100	100	
8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	75.000.000	74.800.000	99,9	100	
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	100.000.000	100	100	
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000	0	0	100	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.214.398.843	977.713.970	80,51	0	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.849.749.822	1.088.973.653			
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.074.749.822	518.473.653	48,24		
2	Pengadaan Mebeluer Sekolah	100.000.000	0	0	0	
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000	99.900.000	99,9	0	
3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000	100.000.000	100	0	
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	250.000.000	220.600.000	88,24	100	

Kegiatan/Sub Kegiatan		Jumlah Anggaran	Realisasi		Fisik	Ket
			Rp.	%		
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000	50.000.000	100	100	
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	50.000.000	100	100	
7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	125.000.000	50.000.000	40	100	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		4.942.578.000	3.537.224.391			
1	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	92.578.000	87.224.391	94,22		
2	Pengadaan Perlengkapan PAUD	150.000.000	50.000.000	33,33	100	
3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	200.000.000	200.000.000	100	100	
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.600.000.000	2.500.000.000	68,06	100	
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	700.000.000	700.000.000	100	100	
6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000	0	0	50,00	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		4.156.617.000	3.675.537.000			
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1.266.617.000	1.253.747.000	99		
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	300.000.000	100	100	
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.490.000.000	2.021.790.000	81	100	
4	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100.000.000	100.000.000	100	100	

Kegiatan/Sub Kegiatan		Jumlah Anggaran	Realisasi		Fisik	Ket
			Rp.	%		
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		100.000.000	100.000.000			
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100.000.000	100.000.000			
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	100		
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	100	100	
JUMLAH I		15.428.645.589	11.342.494.128	73,52	100	
APBN						
Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	60.913.404.000	57.466.685.000	94	100	
2	Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	94.880.044.400	42.296.861.399	45	45	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21.661.749.000	21.661.749.000	94	100	
2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	44.893.815.000	19.227.161.056	43	100	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini						
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.950.198.000	3.911.650.000	99,02	100	
2	Pengelola Dana BOP PAUD	22.296.310.000	0	0	100	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1	DAK Kesetaraan	1.266.617.000	1.257.617.000	99,29	100	

Kegiatan/Sub Kegiatan		Jumlah Anggaran	Realisasi		Fisik	Ket
			Rp.	%		
2	Pengelola Dana BOP Kesetaraan	14.923.160.000	14.493.056.000	97,12	100	
JUMLAH II		264.785.298.000	160.314.779.455	60,55	100	
BANKEU						
Program Pengelolaan Pendidikan						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1	Bantuan Guru Bantu SD/MI Daerah Terpencil	184.800.000	184.800.000	100	100	
2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	20.000.000.000	20.000.000.000	100		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.000.000.000	2.000.000.000	100	100	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini						
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	13.999.500.000	13.993.170.000	99,95	100	
JUMLAH III		22.184.800.000	22.184.800.000		100	
JUMLAH I+II+III		302.345.943.589	193.789.273.583	64,10		

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 Kab. Kuningan

B. Bidang Urusan Kesehatan

Tabel 4.19 Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Dinas Kesehatan	245,192,045,136	208,002,606,274	84.8
A	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	245,192,045,136	208,002,606,274	84.8
A.1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	86,528,348,695	85,306,888,863	98.6
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000	36,505,000	48.7
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000	18,530,000	74.1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	17,975,000	36
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81,291,734,095	80,351,308,123	98.8
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81,291,734,095	80,351,308,123	98.8
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000	33,620,000	96.1

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35,000,000	33,620,000	96.1
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435,000,000	379,717,552	87.3
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000	99,900,000	99.9
	PHBN dan Pameran	25.000.000	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000	7,640,000	76.4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,000,000	74,853,592	99.8
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75,000,000	57,640,100	76.9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000	17,265,000	34.5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,000,000	122,418,860	97.9
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,000,000	48,250,000	48.3
	Pengadaan Mebel	25,000,000	5,150,000	20.6
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,000	43,100,000	57.5
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,126,373,600	3,998,979,588	96.9
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225,000,000	140,284,388	62.3
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	23,250,000	46.5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,851,373,600	3,835,445,200	99.6
	BPJS Ketenaga Kerjaan (653 x 5400 x 12 bln)	-	-	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465,241,000	458,508,600	98.6

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,000,000	68,267,600	91,0
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,581,450	9,581,450	100
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Hutang APBD 2022)	9,581,450	9,581,450	100
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	380,659,550	380,659,550	100
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000	100,000,000	100
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Hutang APBD 2022)	98,612,000	98,612,000	100
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Hutang APBD 2022)	182,047,550	182,047,550	100
A.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155,913,045,986		78.3
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	13,717,970,956	13,283,633,148	96.8
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	72,578,881	72,578,881	100
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan- Rehab Labkesda (Hutang APBD 2022)	72,578,881	72,578,881	100

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106,802,000	38,403,000	36
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kab/Kota	106,802,000	38,403,000	36
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	-
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7,059,891,766	6,724,952,111	95.3
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler	76,325,832	-	-
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Antropometri	848,000,000	848,000,000	100
	- Dental Unit	-	-	-
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Posbindu Lansia KIT	322,161,368	253,066,345	78.6
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Hematology Analyzer	2,678,000,000	2,520,000,000	94.1
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-IVA KIT Test	175,366,800	144,120,000	82.2
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Vaksin Refrigerator	239,672,000	239,400,000	99.9
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Hutang APBD 2022)	2,720,365,766	2,720,365,766	100
	Pengadaan Obat, Vaksin	2,363,161,629	2,363,161,629	100
	- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Hutang APBD 2022)	2,363,161,629	2,363,161,629	100
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3,940,536,680	3,932,718,483	99.8
	DAK Non Fisik BOK Kabupaten	3,737,402,000	3,729,583,803	99.8
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Hutang APBD 2022)	203,134,680	203,134,680	100

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	175,000,000	151,819,044	86.8
	DAK Non Fisik BOK Puskesmas	175,000,000	151,819,044	86.8
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141,859,377,030	108,451,198,727	76.4
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,896,255,000	2,648,620,000	91.4
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	2,896,255,000	2,648,620,000	91.4
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	141,800,000	141,800,000	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-
	Jaminan Persalinan (Hutang APBD 2022)	141,800,000	141,800,000	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16,900,000	16,873,000	99.8
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16,900,000	16,873,000	99.8
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,099,935,000	944,535,000	85.9
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	1,099,935,000	944,535,000	85.9
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	539,177,415	481,015,000	89.2
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	539,177,415	481,015,000	89.2
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	531,700,186	445,875,800	83.9

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10,375,000	10,375,000	100
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	521,325,186	435,500,800	83.5
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	963,065,000	900,575,000	93.5
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	963,065,000	900,575,000	93.5
	Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Kesehatan Lansia Tk.Kecamatan dan Desa	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Hypertensi	-	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	1,083,666,000	1,078,757,500	99.5
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	1,083,666,000	1,078,757,500	99.5
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	358,580,000	328,855,000	91.7
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	358,580,000	328,855,000	91.7
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,994,590,000	368,000,000	12.3
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7,800,000	5,050,000	64.7
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	2,569,440,000	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	417,350,000	362,950,000	87
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	885,128,191	838,241,375	94.7
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	17,580,000	17,529,500	99.7
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	340,000,000	332,223,000	97.7
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	527,548,191	488,488,875	92.6
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,580,000	1,500,000	94.9
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	1,580,000	1,500,000	94.9
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7,665,095,437	2,794,800,700	36.5
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	722,520,100	34,045,000	4.7

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	3,028,003,093	2,760,755,700	91.2
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	4,319,310	-	-
	Silpa Tahun 2021	3,910,252,934	-	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	598,132,573	490,640,000	82
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13,550,000	13,550,000	100
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	60,780,000	39,725,000	65.4
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	523,802,573	437,365,000	83.5
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	704,765,000	579,475,000	82.2
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	49,680,000	15,440,000	31.1
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	655,085,000	564,035,000	86.1
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	892,408,260	740,965,000	83
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	131,745,000	57,220,000	43.4
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	760,663,260	683,745,000	89.9
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40,289,600	37,984,371	94.3
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	482,035,000	353,623,750	73.4
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50,000,000	37,590,000	75.2
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	28,560,000	18,130,000	63.5
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	403,475,000	297,903,750	73.8
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	127,733,979	115,170,000	90.2
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	127,733,979	115,170,000	90.2
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	40,140,000	40,140,000	100
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7,410,791,858	5,544,546,890	74.8
	Foging/ Pengasapan	50,000,000	-	-
	Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	300,000,000	300,000,000	100
	Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	900,125,000	439,661,800	48.8
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	6,160,666,858	4,804,885,090	78
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	49,297,674,348	32,107,003,338	65.1
	Bansos JKN(pajak Rokok)	26,174,121,548	16,054,031,400	61.3
	Jamkesda	8,000,000,000	7,999,427,138	100
	Pembayaran Iuran BPJS Tahun 2023	4,500,000,000	-	-

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan (Iuran Jaminan Kesehatan) (DBHCHT)	1,515,477,600	1,515,477,600	100
	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Kuningan (Bankeu Prov)	5,155,920,000	2,585,912,000	50.2
	Pembayaran Tagihan Atas Kekurangan IWP 4% Pemerintah Daerah Kab. Kuningan Tahun 2020 dan 2021	3,500,000,000	3,500,000,000	100
	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (Hutang APBD 2022)	452,155,200	452,155,200	100
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	60,180,000	25,363,850	42.1
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	18,400,000	10,583,850	57.5
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	41,780,000	14,780,000	35.4
	Operasional Pelayanan Puskesmas	60,786,338,888	55,302,262,438	91
	FKTP JKN Puskesmas	46,554,305,623	43,504,516,539	93.4
	BLUD Puskesmas Non Kapitasi	5,188,998,778	3,870,150,819	74.6
	BLUD Puskesmas	2,764,467,000	2,548,831,840	92.2
	Prolanis	647,667,220	420,824,800	65
	FKTP JKN Puskesmas (Silpa 2022)	692,619,267	654,192,599	94.5
	DAK Non Fisik BOK Puskesmas	4,938,281,000	4,303,745,841	87.2
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,676,818,715	1,646,725,715	98.2
	Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas, LabKesda dan Gudang Farmasi	320,129,500	290,036,500	90.6

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas, LabKesda dan Gudang Farmasi (Hutang APBD 2022)	505,101,400	505,101,400	100
	Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan Dana Non Kapitasi (Hutang APBD 2022)	851,587,815	851,587,815	100
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	50,000,000	40,330,000	80.7
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	50,000,000	40,330,000	80.7
	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (KIPI) dan POPM	103,401,580	74,800,000	72.3
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	103,401,580	74,800,000	72.3
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	411,195,000	362,720,000	88.2
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	411,195,000	362,720,000	88.2
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	54,525,000	54,525,000	100
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	54,525,000	54,525,000	
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	281,173,000	215,165,536	76.5
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	281,173,000	215,165,536	76.5
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50,000,000	16,795,000	33.6
	DAK Non Fisik BOK Kabupaten	231,173,000	198,370,536	85.8
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
A3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,606,770,600	55,475,000	3.5
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	116,906,000	31,725,000	27.1
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	116,906,000	31,725,000	27.1
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	116,906,000	31,725,000	27.1
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,489,864,600	23,750,000	1.6
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,489,864,600	23,750,000	1.6
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	1,489,864,600	23,750,000	1.6
A.4	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	25,000,000	-	-
1	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25,000,000	-	-

No	Program Dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga. Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25,000,000	-	-
A.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,118,879,855	635,720,000	56.8
1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,118,879,855	635,720,000	56.8
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1,118,879,855	635,720,000	56.8
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Kabupaten	301,479,300	-	-
	- DAK Non Fisik BOK Puskesmas	817,400,555	635,720,000	77.8

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 Kab. Kuningan

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Tabel 4.20 Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	20,456,459,191
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8,420,000,000
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8,420,000,000

No.	Kegiatan		Jumlah (Rp)
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8,420,000,000
	1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8,420,000,000
	1	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Bungurberes Kecamatan Cilebak	420,000,000
	2	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Cilebak Kecamatan Cilebak	385,000,000
	3	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Cimulya Kecamatan Cimahi	420,000,000
	4	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Jambugelis Kecamatan Cigandamekar	350,000,000
	5	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu	476,000,000
	6	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Kaliaren Kecamatan Cilimus	385,000,000
	7	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Lagungtonggoh Kecamatan Luragung	420,000,000
	8	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Margamukti Kecamatan Cimahi	385,000,000
	9	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Selajambe Kecamatan Selajambe	420,000,000
	10	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Sindangkempeng Kecamatan Pancalang	420,000,000
	11	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Situgede Kecamatan Subang	350,000,000
	12	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang	385,000,000
	13	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Wanasaraya Kecamatan Kalimanggis	420,000,000

No.	Kegiatan			Jumlah (Rp)
		14	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Desa Wilanagara Kecamatan Luragung	364,000,000
		15	Peningkatan SPAM JP-Uprating IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindung/Broncaptering Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan	420,000,000
			PAMIARSA REREONGAN SAPEUTING (Pangwangunan Air Minum Sareng Sanitasi Rereongan Sangkan Pegat Tina Stunting) - Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Lokus Stunting di Kecamatan Ciwaru (Bantuan Keuangan Kompetitif 2024) (BKK Jabar)	
			2). Rencana Lokasi Pembangunan SPAM Kawasan Perdesaan berada di 7 Desa di Kecamatan Ciwaru Kab. Kuningan	2,400,000,000
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			12,036,459,191
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			12,036,459,191
	1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		12,036,459,191
		1	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi	420,000,000
		2	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Cikahuripan Kecamatan Maleber	420,000,000
		3	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Cimara Kecamatan Pasawahan	560,000,000
		4	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Indapatra Kecamatan Cigandamekar	420,000,000
		5	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung	420,000,000
		6	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang	420,000,000
		7	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Karangsari Kecamatan Darma	420,000,000
		8	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Koreak Kecamatan	420,000,000

No.	Kegiatan			Jumlah (Rp)
			Cigandamekar	
	9		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung	420,000,000
	10		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi	420,000,000
	11		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung	560,000,000
	12		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Puncak Kecamatan Cigugur	420,000,000
	13		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar	420,000,000
	14		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar	420,000,000
	15		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang	560,000,000
	16		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Tarikolot Kecamatan Pancalang	420,000,000
	17		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Tembong Kecamatan Garawangi	490,000,000
	18		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar	490,000,000
	19		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan	490,000,000
	20		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan	490,000,000
	21		Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan	490,000,000

No.	Kegiatan			Jumlah (Rp)
		1	PAMIARSA REREONGAN SAPEUTING (Pangwangunan Air Minum Sareng Sanitasi Rereongan Sangkan Pegat Tina Stunting) - Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Lokus Stunting di Kecamatan Ciwaru (Bantuan Keuangan Kompetitif 2024) (BKK Jabar)	
			1) Rencana Lokasi Pembangunan SPAL-D dilakukan diseluruh Desa di Kecamatan Ciwaru Kab. Kuningan	2,446,459,191

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 Kab. Kuningan

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman

Tabel 4.21 Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Ket
	Program Pengembangan Perumahan	150,000,000	0	0	Tunda Bayar
1	PendataanPenyediaanRehabilitasiRumah Korban BencanaatauRelokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	-	-	
3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	-	-	-	
4	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	-	-	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Ket
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Kota	-	-	-	
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	-	-	
2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggajian Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	
3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	-	-	-	
4	Pembentukan dan Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	-	-	-	
5	Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	
6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Layanan	-	-	-	
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	150,000,000	0	0	
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	150,000,000	0	0	

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Ket
2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	
4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	
5	Pembangunan rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
1	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
2	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	
3	Kegiatan Lainnya	-	-	-	

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 Kab. Kuningan

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.22 Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Persentasi		Sisa
					Keuangan	Fisik	
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
	Kegiatan :						
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,234,600,000	3,069,600,000	94,90	94,90	165,000,000
		Sub Kegiatan					
	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	700,700,000	607,690,000	86.73	86.73	93,010,000
	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	138,000,000	100,000,000	72.46	72.46	38,000,000
	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	25,000,000	25,000,000	100	100	0
	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,186,000,000	2,152,010,000	98.45	98.45	33,990,000

No	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Persentasi		Sisa
						Keuangan	Fisik	
		5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	146,800,000	146,800,000	100	100	0
		6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	38,100,000	38,100,000	100	100	0
		7	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	0	0	0	0	0
		Kegiatan						0
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						0
		Sub Kegiatan						0
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	195,000,000	195,000,000	100	100	0
		2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	250,000,000	250,000,000	100	100	0
		3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100,000,000	100,000,000	100	100	0
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							0
	Kegiatan :							0

No	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Persentasi		Sisa
					Keuangan	Fisik	
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					0
		Sub Kegiatan :					
	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210,000,000	210,000,000	100	100	0
	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	210,000,000	210,000,000	100	100	0
	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	210,000,000	210,000,000	100	100	0
	JUMLAH URUSAN DAN NON URUSAN		4,409,600,000	4,244,600,000	96.26	96.26	165,000,000
B	APBD PROVINSI						0
	1		1,200,000,000	764,373,500	63,70	63,70	435,626,500
	2						0
	JUMLAH II						
C	APBN						
	1						
	2						
	JUMLAH III						
D	SUMBER DANA LAINNYA						
	1						
	2						
	JUMLAH IV						
	JUMLAH I + II + III + IV		5,609,600,000	5,008,973,500	89,29	89,29	600,626,500

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 Kab. Kuningan

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Tabel 4.23 Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung SPM	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4
A	Program Rehabilitasi Sosial		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	317,400,000	
	1 Penyediaan Permakanan	67,375,000	APBD Kab.
	2 Penyediaan Alat Bantu	68,650,000	APBD Kab.
	3 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	57,000,000	APBD Kab.
	4 Pemberian Layanan Kedaruratan	37,000,000	APBD Kab.
	5 Pemberian Layanan Rujukan	34,375,000	APBD Kab.
	6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	53,000,000	APBD Kab.
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	83,250,000	
	1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	83,250,000	APBD Kab.
B	Program Penanganan Bencana	142,675,000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten / Kota	142,675,000	
	1 Penyediaan Makanan	92,075,000	APBD Kab.
	2 Penyediaan Sandang	50,600,000	APBD Kab.

Sumber: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 Kab. Kuningan

4.3.7. Inovasi Daerah

1. PIMDA NYAWAH (Pimpinan Daerah Menyapa Siswa di Sekolah)

Pimda nyawah merupakan Program Pimpinan Daerah menyapa siswa di sekolah (Pimda Nyawah). Program ini mengedukasi peserta didik dan tenaga pendidik oleh Pimpinan Daerah terkait dengan informasi kebijakan daerah yang disinergikan dengan Program-Program Bidang Pendidikan. Pelayanan Dinas bertujuan bagi para siswa diharapkan dapat mengenal pimpinan daerahnya sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan diri. Disamping itu, warga sekolah juga dapat secara langsung menyampaikan persoalan ataupun kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. GERBANG BERKAH (Gerakan Membangun Kebersamaan yang Agamis di Sekolah)

Pelayanan Dinas, dalam rangka gerakan membangun kebersamaan, kekompakan antar siswa, guru, tenaga kependidikan di sekolah, termasuk dengan masyarakat setempat guna menyatukan perbedaan menjadi landasan untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan rasa toleransi yang disinergikan dengan kegiatan keagamaan.

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima, dan peningkatan daya saing daerah, arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan isu strategis, Kabupaten Kuningan mengembangkan program kegiatan inovatif untuk mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyediaan berbagai fasilitas publik ditengah terbatasnya kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Pendekatan holistik dalam pelaksanaan perencanaan ini dilaksanakan melalui perencanaan yang terkoordinasi secara multi-sektor, multi-stakeholder dan multi-SKPD berdasarkan tematik fokus pembangunan daerah.

4. KABISA DESA (Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa)

Kabupaten Kuningan termasuk dalam katagori miskin di Provinsi Jawa Barat, Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi permasalahan utama. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Kuningan. Untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat menengah kebawah pemerintah daerah menggagas inovasi disektor pertanian dengan tema “**KABISA DESA**” dengan konsep *integrated farming system* yang dicirikan dengan adanya interaksi dan keterkaitan yang sinergis antar berbagai aktivitas pertanian dalam mewujudkan peningkatan efisiensi, peningkatan produktivitas, kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

KABISA DESA singkatan dari **Kolaborasi Aneka Agribisnis Bina Bersama Desa** adalah suatu model pengembangan sistem pertanian terpadu atau *integrated farming system* (IFS) yang dikemas dalam filosofi sunda. “**KABISA**” yang menggambarkan kemampuan masyarakat desa dalam mengoptimalkan seluruh potensi desa untuk meningkatkan taraf kehidupannya. **KABISA DESA** ini disasar melalui upaya penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan ekonomi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan lahan, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis usaha di sektor pertanian dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Arti Kalimat KABISA adalah kemampuan desa mengelola sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KABISA DESA merupakan core dari 3 kegiatan, yaitu **SIPADU** (Sistem Pertanian Terpadu); **Gerbang Kaya** (Gerakan Mengembangkan Kambing dan Ayam); dan **Si Koboi Naek Kuda Poni** (Sistem Kolam Bioflock Optimalisasi Ideal Naikkan Ekonomi Keluarga Pelaku Budidaya Pondasi Nikmati Illahi). Implementasi **KABISA DESA** akan dilaksanakan melalui sub tema bidang pertanian yaitu dengan pengembangan komoditas Tanaman Sorgum, Padi, dan Sayuran (SIPADU) yang terintegrasi dengan peternakan (Gerbang Kaya) dan perikanan (Si Koboi Naek Kuda Poni). Limbah-limbah dari proses

budidaya pertanian tersebut (batang dan daun sorgum) bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak melalui proses fermentasi menjadi pakan ternak yang berkualitas yaitu silase.

Tahapan proses penyusunan Model **KABISA DESA** diawali dari: 1) identifikasi masalah dan kebutuhan, 2) penggalian gagasan, penyusunan model **KABISA DESA** sesuai potensi desa dan agroklimat, 3) verifikasi usulan, 4) penetapan program/kegiatan, 5) pelaksanaan program secara partisipatif, integrasi dan fokus, 6) monitoring dan evaluasi **KABISA DESA**. Adapun Mekanisme kegiatan implementasi **KABISA DESA** adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan

Penguatan perencanaan dalam mengimplementasikan model **KABISA DESA** diantaranya adalah studi literatur, rapat koordinasi lintas sektor/lintas SKPD, identifikasi sasaran lokasi (mapping wilayah), identifikasi sasaran kelompok, identifikasi komoditas pertanian dan populasi ternak, penyusunan rencana aksi (identifikasi kebutuhan) dan pengajuan usulan lokasi kegiatan.

2. Penguatan Kerjasama

Penguatan kerjasama sangat penting dilakukan karena dalam implementasi **KABISA DESA** sangat sarat dengan kerjasama atau kolaborasi dengan *stakeholder* dengan pendekatan *Penta-Helix* yaitu kerjasama dengan *Academic, Business, Community, Government*, dan *Media* atau dikenal sebagai ABCGM.

3. Penguatan Sarana Prasarana

Penguatan sarana prasarana pada setiap aktivitas kegiatan usaha pertanian baik di *on farm*, *off farm* dan penguatan sarana prasarana pendukung usaha pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, pasar dan sebagainya.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan Kapasitas SDM diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi.

5. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan diarahkan pada kelompok tani sasaran penerima manfaat, kelompok masyarakat miskin, dan kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDes).

6. Penguatan Adopsi Teknologi

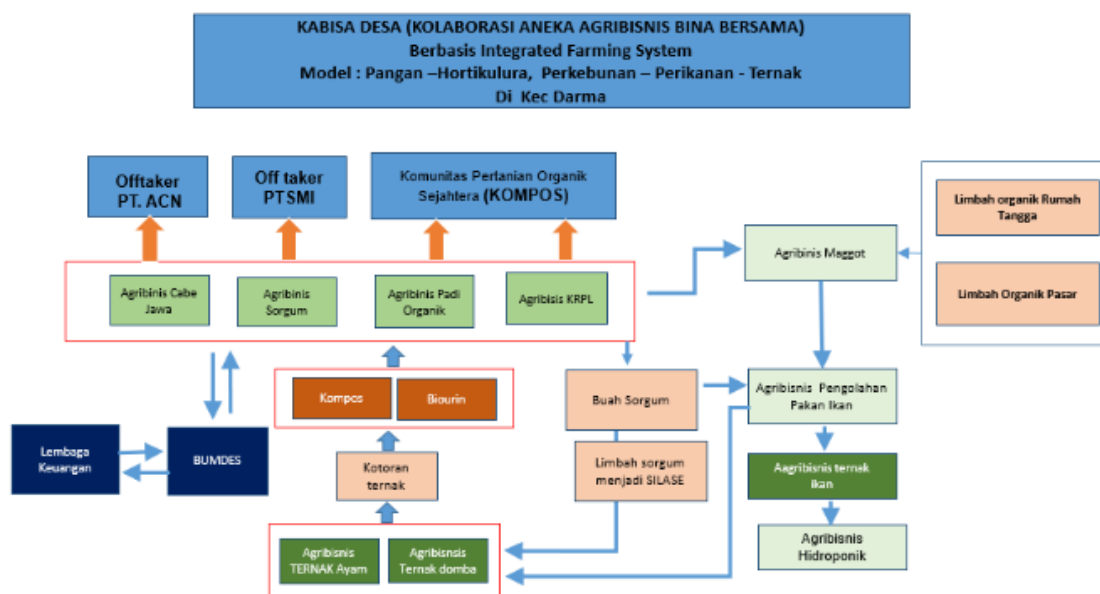
Penguatan adopsi teknologi ini merupakan salah satu paket yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas SDM tidak hanya cukup dengan pelatihan saja tetapi didukung dengan paket teknologi sesuai dengan yang dibutuhkan dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan yang dikoordinir oleh BAPPEDA Kabupaten Kuningan dengan SKPD Pelaksana yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan.

Selanjutnya mekanisme alur kegiatan antara sub tema pertanian, perikanan dan peternakan yang di kemas dengan inovasi **KABISA DESA** adalah sebagai berikut :

Gambar 4.7 Mekanisme Kegiatan KABISA DESA



Kegiatan **KABISA DESA** dilaksanakan di Kecamatan Darma, yang merupakan salah satu lokus penanganan kemiskinan ekstrim. Selain itu, masuk dalam wilayah kategori miskin ekstrim (sebaran kemiskinan ekstrem per desa di Kecamatan Darma disampaikan dalam lampiran) dan sebagai pendukung program

Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan Waduk Darma sebagai destinasi wisata bertaraf internasional. Adapun detail lokasi kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.24 Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan

No	Desa	Komoditas	Kuantitas		Sasaran (Orang)
1	SITUSARI	Sorgum	16	Ha	40
		Padi organik	1	Ha	10
		KRPL	20	Rumah Tangga Petani	100
		Ikan Nila	20	Unit	10
		Domba	44	ekor	20
		Ayam	3.141	ekor	500
2	PANINGGARAN	Sorgum	16	Ha	40
		Padi organik	1	Ha	10
		KRPL	20	Rumah Tangga Petani	100
		Ikan Nila	20	Unit	10
		Domba	44	ekor	20
		Ayam	3.141	ekor	500
3	CAGEUR	Hidroponik	1	Unit	5
		Sorgum	16	Ha	40
		Padi organik	1	Ha	10
		KRPL	20	Rumah Tangga Petani	100
		Ikan Nila	20	Unit	10
		Domba	44	ekor	20
4	TUGUMULYA	Ayam	3.141	ekor	500
		Sorgum	16	Ha	40
		Padi organik	1	Ha	10
		KRPL	20	Rumah Tangga Petani	100
		Ikan Nila	20	Unit	10
		Domba	44	ekor	20
5	KARANGSARI	Ayam	3.141	ekor	500
		Sorgum	16	Ha	40
		Padi organik	1	Ha	10
		KRPL	20	Rumah Tangga Petani	100
		Ikan Nila	20	Unit	10
		Domba	44	ekor	20
6	DARMA	Magot	1	Kelompok	10
		Pakan Ikan	1	Kelompok	10

Dengan Kegiatan **KABISA DESA** ini diharapkan bisa berkelanjutan adanya kerja sama dengan *off taker*, dipastikan kegiatan ini akan berlanjut meskipun fasilitas kegiatan telah selesai. Fasilitasi kegiatan merupakan modal awal bagi kelompok pelaksana. Untuk selanjutnya keuntungan dari hasil kegiatan sebagian digunakan untuk modal usaha berikutnya. Diharapkan dengan keberlanjutan kegiatan ini, dapat berkembang dan ada replikasi di lokasi lain sehingga semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam agribisnis **KABISA DESA**, sehingga penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan dapat tercapai dengan estimasi sebagai berikut:

- Kemiskinan berkurang 14.500 Orang
- Pengangguran berkurang 3.625 orang
- Penambahan Pendapatan per orang per hari Rp 2.207.050
- Pengembangan Agribisnis Sorgum (80 Ha)
- Pengembangan Hidroponik (1 Desa)
- Pengembangan Pupuk Organik (5 Desa)
- Pengembangan Usaha Perikanan (5 Desa)
- Pengembangan Usaha Peternakan Domba (220 ekor)
- Pengembangan Usaha Ternak Ayam (15.705 ekor)

4.3.8. Kebijakan Pembangunan Wilayah

a. Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan

Berdasarkan draft Revisi RTRW Kabupaten Kuningan, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Berbasis Pertanian dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan”. Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah, disusun Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan yaitu:

- 1) Pengembangan sistem pusat pelayanan untuk mendukung kegiatan pertanian dan pariwisata;
- 2) Peningkatan keterpaduan infrastruktur dan sistem kota dalam menunjang pertanian, dan pariwisata;

- 3) Pelestarian kawasan berfungsi lindung dalam mendukung kelestarian SDA;
 - 4) Pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam meningkatkan pertanian dan pariwisata; dan
 - 5) Pengendalian pertumbuhan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung.
- b. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan

Guna memudahkan implementasi atas tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kuningan, maka dirumuskan beberapa strategi yang akan ditempuh, meliputi:

- 1) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan untuk mendukung kegiatan pertanian dan pariwisata:
 - Menciptakan perkembangan wilayah Kabupaten sebagai bagian dari Ciayumajakuning dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - Menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - Menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - Menetapkan kawasan perkotaan yang merupakan pusat permukiman dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - Mengendalikan pertumbuhan kawasan perkotaan pada kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - Menetapkan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelayanan sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayahnya.; dan
 - Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama

pengembangan wilayah kota melalui pengaturan lokasi pusat pelayanan kawasan (PPK).

2) Strategi peningkatan keterpaduan infrastruktur dan sistem kota dalam menunjang pertanian dan pariwisata:

- Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dalam mendukung Kabupaten Kuningan sebagai pusat pertanian dan pariwisata;
- Membuka dan meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan, baik untuk di wilayah bagian utara, tengah dan bagian selatan;
- Mengembangkan infrastruktur dan sistem jaringan prasarana wilayah secara terintegrasi dengan pengembangan jalan, terminal, yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta antar pusat kegiatan dengan hinterlandnya berbasis mitigasi bencana;
- Mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan PKL ke PPK;
- Mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah dalam mendukung pertanian dan pariwisata; dan
- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana evakuasi bencana.

3) Strategi pelestarian kawasan berfungsi lindung dalam mendukung kelestarian sumberdaya alam:

- Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
- Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

- Mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan longsor;
- Mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung agar kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat terpelihara;
- Mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- Pemberian insentif dan disinsentif dalam penyediaan RTH;
- Menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan setempat; dan
- Mengendalikan fungsi kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Ciremai.

4) Strategi pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam meningkatkan pertanian dan pariwisata:

- Mengembangkan kawasan budidaya pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat melalui pengaturan intensitas pemanfaatan ruang;
- Meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi pertanian, dan pariwisata melalui pengembangan agrobisnis dan pariwisata baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi; dan
- Mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
- Mewujudkan kualitas destinasi pariwisata yang maju dan berdaya saing dalam meningkatkan pariwisata daerah;
- Meningkatkan peran industri pengolahan pertanian dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat;

- Menciptakan keserasian dan keselarasan antar kawasan dalam mendukung pertanian dan pariwisata;
 - Meningkatkan produksi dan produktivitas pada pertanian dan pariwisata guna mendukung pengembangan wilayah;
 - Mengembangkan ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif;
 - Mengembangkan mekanisme perizinan guna pengendalian penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang.
- 5) Strategi pengendalian pertumbuhan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung
- Mengurangi dampak negatif pengembangan kawasan terhadap lingkungan sekitar;
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung;
 - Meningkatkan fungsi kawasan hutan produksi sebagai kawasan penyangga bagi kawasan lindung;
 - Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan yang berfungsi lindung dan pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
 - Mengembangkan kawasan penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun melalui kegiatan budidaya tidak terbangun;
 - Mengembangkan peraturan yang ketat terhadap upaya konversi lahan budidaya yang bersifat sebagai penyangga kawasan lindung di atasnya berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - Mengembangkan mekanisme perizinan guna pengendalian penggunaan lahan ke tingkat yang lebih intensif;



➤ Mengurangi perijinan pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang; dan
Mengembangkan ruang terbuka hijau publik dan privat di seluruh wilayah kabupaten sebesar 30 %.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program prioritas daerah merupakan uraian yang menjelaskan program, kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun hasil (*outcome*) program, sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Kuningan merupakan gambaran Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan 2025-2029 serta mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan Tahun 2024 dan turut mengakomodir kepentingan masyarakat yang telah dibahas dan disepakati oleh para stakeholders dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kuningan untuk tahun perencanaan 2026.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dengan menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial dalam mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten.

RKPD Kabupaten Kuningan 2026 telah mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan kolaborasi berbagai sumber pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.1 Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2026

Program perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Skema pendanaan dan RKPD Tahun 2026 menyesuaikan dengan kemampuan fiskal Kabupaten Kuningan. Berikut ini merupakan rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2026 dengan memperhatikan seluruh kebutuhan perangkat daerah.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Estimasi Belanja Tahun 2026

URAIAN	Perubahan RKPD Tahun 2025	RKPD Tahun 2026
BELANJA DAERAH	2.966.250.552.926	2.273.443.733.083
Belanja Operasi	2.272.740.742.284	1.768.784.026.083
Belanja Pegawai	1.412.821.586.683	1.412.821.586.683
Belanja Barang dan Jasa	789.305.645.851	319.381.729.102
Belanja Bunga	1.700.000.000	14.580.710.298
Belanja Subsidi	0	0
Belanja Hibah	61.264.982.250	20.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	7.648.527.500	2.000.000.000
Belanja Modal	188.850.103.642	0
Belanja Modal Tanah	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.890.823.884	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.248.862.459	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.306.190.833	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.104.995.716	0
Belanja Aset Lainnya	299.230.750	0
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	12.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	12.000.000.000
Belanja Transfer	492.659.707.000	492.659.707.000
Belanja Bagi Hasil	14.658.000.000	14.658.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	478.001.707.000	478.001.707.000

Sumber: Data Olah Bappeda, Bappenda dan BPKAD Kabupaten Kuningan.

Pada Tabel 5.1 disampaikan estimasi belanja daerah Tahun 2026 sebesar **Rp. 2.273.443.733.083,-**. Jika angka belanja tersebut disandingkan dengan pendapatan daerah Tahun 2026 (Rp. 2.273.443.733.083,-) maka tidak defisit.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2026

URAIAN	Perubahan RKPD Tahun 2025	RKPD Tahun 2026
PENDAPATAN DAERAH	2.830.145.830.255	2.273.443.733.083
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>475.151.693.350</i>	<i>460.258.503.338</i>
Pajak Daerah	235.353.291.920	232.056.546.506
Retribusi Daerah	39.151.299.448	12.834.643.766
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.667.050.651	8.212.096.411
Lain-lain PAD Yang Sah	193.980.051.331	207.155.216.655
<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>2.305.952.726.922</i>	<i>1.764.143.819.762</i>
Transfer Pemerintah Pusat	2.176.282.517.000	1.639.933.414.000
Transfer Antar-Daerah	129.670.209.922	124.210.405.762
<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	<i>49.041.409.983</i>	<i>49.041.409.983</i>
Hibah	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.041.409.983	49.041.409.983

Sumber: Data Olah Bappenda Kabupaten Kuningan.

5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026

Pelaksanaan program pembangunan daerah diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2026**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
I	SPM Pendidikan				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTS)	100%	Dinas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Usia Dini
	SPM Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut yang	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
	Pada Usia Lanjut;	mendapatkan layanan kesehatan			Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
	SPM Pekerjaan Umum				
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	PUTR	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	PUTR	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
	SPM Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi	Jumlah Warga Negara korban	100%	DPKPP	Penyediaan dan rehabilitasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
	rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota;	bencana yang memperoleh rumah layak huni			rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota;
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	DPKPP	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
	SPM Trantibumlin mas				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	POLPP	Program Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangka Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan
4	Pelayanan Penyelamatan	Jumlah Warga Negara yang	100%	BPBD	Sosialisasi, Monitoring, dan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Prangkat Daerah	Kegiatan
	dan evakuasi korban kebakaran	memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kedaruratan Lainnya di Kabupaten Kuningan
	SPM Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.	Jumlah korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

5.3 Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2026

Sinergitas usulan rencana kegiatan bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan di daerah terdiri dari berbagai sumber pendanaan. Berikut ini merupakan dana Transfer ke Daerah (TKD),

yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal APBN. Kebijakan terkait TKD diperbaharui dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). TKD terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)
5. Dana Keistimewaan
6. Dana Desa

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atas kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah
- b. DAK non-fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah
- c. Hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berikut ini merupakan perkiraan usulan DAK Tahun 2026 yang akan di usulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Tabel 5.4 Skema Anggaran Pusat

No	Perangkat Daerah	Anggaran
DAK Non Fisik		
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	180.206.630.000
2.	DINAS KESEHATAN	42.102.166.000
3.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.176.640.000
DAU yang diarahkan		

No	Perangkat Daerah	Anggaran
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	32.890.106.000
2.	DINAS KESEHATAN	28.134.985.000
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	10.494.759.000
4.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	500.000.000
5.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.000.000.000
6.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	6.875.000.000
7.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.750.000.000
8.	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	2.100.000.000
9.	KECAMATAN KUNINGAN	2.000.000.000
10.	KECAMATAN CIGUGUR	1.000.000.000

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Tabel 5.4 menyajikan perkiraan rencana usulan DAK Non Fisik dan DAU Tahun 2026 dengan skema penugasan dan reguler dengan total anggaran DAK Non Fisik sebesar 228.485.436.000,00 dan DAU yang diarahkan sebesar 87.744.850.000,00.

5.4 Singkronisasi Rencana Kegiatan yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro Kabupaten/Kota yang juga menunjang pencapaian target indikator makro Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengulirkan Bantuan Keuangan

Tabel 5.5 Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Urusan	Jumlah Kegiatan	Anggaran
1	Kesehatan	5	36.359.212.437
2	Pertanian dan Ketahanan Pangan	11	54.643.500.000
3	Lingkungan Hidup	9	77.908.800.000

No	Urusan	Jumlah Kegiatan	Anggaran
4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	133	378.235.800.000
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	63.658.250.000
6	Pemuda dan Olah raga	2	173.447.772.000
7	Pendidikan	1	105.600.000
8	Perhubungan	10	93.068.000.000
9	Perikanan dan Peternakan	13	47.129.445.000
10	Perumahan dan Kawasan Permukiman	36	100.995.708.000
11	Tenaga Kerja	11	14.861.041.982
Total			1.040.413.129.419

Sumber : Usulan Bankeu Tahun 2026

Tabel di atas merupakan kegiatan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui skema pendanaan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dengan total usulan sebanyak 364 usulan , 18 urusan dengan total anggaran sebesar **Rp. 1.181.520.352.742,-** .

5.5 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Kuningan Tahun 2026

Program pembangunan daerah Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, terdapat prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2026. Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran perangkat daerah Tahun 2026 berbasis usulan anggaran perangkat daerah untuk

melaksanakan urusan yang diampu pada Tabel 5.11.

Tabel 5.6 Rekapitulasi Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	SKPD	Total Pagu
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.068.309.232.457
2	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	308.267.914.003
3	1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD 45	137.500.000.000
4	1.02.0.00.0.00.04.0000 RSUD LINGGAJATI	44.469.480.000
5	1.03.0.00.0.00.05.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	75.684.671.910
6	1.04.2.10.0.00.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	58.920.399.978
7	1.05.0.00.0.00.07.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	22.275.997.299
8	1.05.0.00.0.00.29.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.443.325.536
9	1.06.0.00.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL	11.866.931.118
10	2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.963.448.236
11	2.09.3.27.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	45.014.298.980
12	2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.170.160.460
13	2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.814.023.062
14	2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.218.933.612
15	2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.434.503.195
16	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	25.596.827.306
17	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.604.884.510
18	2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	18.341.574.953
19	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.743.000.067
20	2.19.3.26.0.00.19.0000 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	22.387.584.663
21	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	7.043.656.149
22	3.25.3.27.0.00.21.0000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	26.717.917.804
23	4.01.0.00.0.00.27.0000 SEKRETARIAT DAERAH	43.764.160.024
24	4.02.0.00.0.00.28.0000 SEKRETARIAT DPRD	58.824.695.914
25	5.01.5.05.0.00.23.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.972.727.173

NO	SKPD	Total Pagu
26	5.02.0.00.0.00.24.0000 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	19.051.771.557
27	5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	526.262.443.478
28	5.03.5.04.0.00.26.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.109.539.289
29	6.01.0.00.0.00.22.0000 INSPEKTORAT	27.806.830.974
30	7.01.0.00.0.00.35.0000 KECAMATAN CILIMUS	2.552.859.985
31	7.01.0.00.0.00.36.0000 KECAMATAN CIWARU	2.129.065.084
32	7.01.0.00.0.00.37.0000 KECAMATAN DARMA	1.991.533.700
33	7.01.0.00.0.00.38.0000 KECAMATAN GARAWANGI	2.323.917.040
34	7.01.0.00.0.00.39.0000 KECAMATAN JALAKSANA	2.328.582.359
35	7.01.0.00.0.00.40.0000 KECAMATAN KADUGEDE	2.272.976.266
36	7.01.0.00.0.00.41.0000 KECAMATAN KARANGKANCANA	2.064.961.227
37	7.01.0.00.0.00.42.0000 KECAMATAN KRAMATMULYA	2.385.587.727
38	7.01.0.00.0.00.43.0000 KECAMATAN KUNINGAN	14.345.000.088
39	7.01.0.00.0.00.44.0000 KECAMATAN LEBAKWANGI	2.341.752.462
40	7.01.0.00.0.00.45.0000 KECAMATAN LURAGUNG	2.498.386.431
41	7.01.0.00.0.00.46.0000 KECAMATAN MALEBER	2.279.652.290
42	7.01.0.00.0.00.47.0000 KECAMATAN MANDIRANCAN	2.057.050.175
43	7.01.0.00.0.00.48.0000 KECAMATAN PANCALANG	2.072.182.328
44	7.01.0.00.0.00.49.0000 KECAMATAN SINDANGAGUNG	1.987.354.368
45	7.01.0.00.0.00.50.0000 KECAMATAN CIBEUREUM	1.913.984.373
46	7.01.0.00.0.00.51.0000 KECAMATAN CIGUGUR	7.841.551.513
47	7.01.0.00.0.00.52.0000 KECAMATAN CILEBAK	1.971.899.078
48	7.01.0.00.0.00.53.0000 KECAMATAN CIMAHI	1.890.498.228
49	7.01.0.00.0.00.54.0000 KECAMATAN CINIRU	1.907.313.010
50	7.01.0.00.0.00.55.0000 KECAMATAN CIPICUNG	2.386.807.994
51	7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN HANTARA	2.224.018.762
52	7.01.0.00.0.00.57.0000 KECAMATAN JAPARA	2.013.456.000
53	7.01.0.00.0.00.58.0000 KECAMATAN KALIMANGGIS	2.265.618.216
54	7.01.0.00.0.00.59.0000 KECAMATAN NUSAHERANG	2.041.863.939
55	7.01.0.00.0.00.60.0000 KECAMATAN PASAWAHAN	1.864.096.231
56	7.01.0.00.0.00.61.0000 KECAMATAN SELAJAMBE	1.958.745.473
57	7.01.0.00.0.00.62.0000 KECAMATAN SUBANG	1.847.952.942
58	7.01.0.00.0.00.63.0000 KECAMATAN CIAWIGEBANG	2.615.586.298
59	7.01.0.00.0.00.64.0000 KECAMATAN CIBINGBIN	2.468.696.380
60	7.01.0.00.0.00.65.0000 KECAMATAN CIDAHU	1.983.784.364

NO	SKPD	Total Pagu
61	7.01.0.00.0.00.66.0000 KECAMATAN CIGANDAMEKAR	2.339.504.937
62	8.01.0.00.0.00.30.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.813.554.366
		2.765.560.727.341,77

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kuningan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun dimasa yang akan datang.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Sehingga untuk pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat dengan ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama yang tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja

program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran).

Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) di mana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

6.1. Indikator Makro Daerah

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Di dalam IKM Daerah terdapat 7 Indikator Makro, berikut secara

rinci penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 - 2026 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Target Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal/Capaian (2023*/2024)	Target Tahun 2026	Penyedia Data
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	71,56	71,75	BPS
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	9,88-10,95	BPS
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	7,78	7,58-8,69	BPS
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Juta Rupiah	5,61	5,20-5,76	BPS
5	Indeks Gini	Persen	0,379	0,339-0,346	BPS
6	Pendapatan per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	29,27	33,71	BPS
7	Kontribusi PDRB Kabupaten Kuningan	Persen	1,25	1,27	BPS
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO ₂ eq/Miliar)	n/a	7,58	BPS
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	72,05	68,41	BPS
10	Prevalensi Stunting	Persen	22,7	19,71	BPS

Sumber: BPS Kab. Kuningan Tahun 2024 dan RPJMD 2025-2029

6.2. Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD). Target IKU dan IKD pada tahun 2025 menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2026. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuningan Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan Tahun 2026

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD Penanggung Jawab	Keterangan
			2024	2025	2026		
1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75,02	80	82	Sekretariat Daerh	Indikator Sasaran RPJMD
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	2,27	2,272	2,273	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
3	Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)	Persen	13,43	13,46	13,49	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Sasaran RPJMD
4	Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM	Persen	N/a	10	10	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian	Indikator Sasaran RPJMD
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen	1,95	2,03	2,06	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
6	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)	Persen	23,23	24,49	24,57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
						Dinas Perikanan dan Peternakan	
7	Kelas Kelompok Petani	Kelompok Tani	2.573	2.623	2.673	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Sasaran RPJMD
						Dinas Perikanan dan Peternakan	
8	Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	Persen	17,66	14,43-18,13	14,37-18,53	Dinas Perhubungan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
9	Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi	Poin	-	64,98	65,93	Bappeda	Indikator Utama Pembangunan RPJPD

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD Penanggung Jawab	Keterangan
			2024	2025	2026		
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	7,78	7,71-8,81	7,58-8,69	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	22,6	24,4	24,43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
12	Indeks Inovasi Daerah	Poin	29.82	30	32	Bappeda	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin)	Poin	62,68	62,84	63	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88	88,12	88,24	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
15	Indeks Perlindungan Anak	Persen	N/a	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
16	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,05	1,04	1,03	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
17	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	N/a	52.73	52.73	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
	(I Bangsa)						

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD Penanggung Jawab	Keterangan
			2024	2025	2026		
18	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kategori	n/a	63	65	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Indikator Sasaran RPJMD
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,05	68,16	68,41	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Visi RPJPD
20	Emisi GRK Kumulatif (Ton Co2eq)	Ton CO2eq	N/a	#####	512.676,81	Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
21	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,7	76,78	Kesatuan Polisi Pamong Praja	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)	Poin	76,49	76,9	77,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
23	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	7,9	8,2	8,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
24	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,27	12,37	12,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
25	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,22	75,27	75,47	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
26	Prevalensi Stunting	Persen	22,7	20,51	19,71	Dinas Kesehatan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
27	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,50	9,88-10,95	Dinas Sosial	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
28	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	-	4,23	4,02	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indikator Utama Pembangunan RPJPD

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD Penanggung Jawab	Keterangan
			2024	2025	2026		
29	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	-	2,4	2,6	Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
30	Indeks Desa Membangun (ID)	Poin	0,79	0,78	0,8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
31	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Poin	1,52	1,52	1,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Sasaran RPJMD
32	Persentase Kualitas infrastruktur	Poin	81,9	83,61	85,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indikator Sasaran RPJMD
33	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	N/a	78,6	79,73	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD
34	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	130	129	127,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indikator Utama Pembangunan RPJPD

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kuningan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
	Aspek Geografi dan Demografi					
1	Penanganan Kerawanan Pangan	Desa	8	10	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	Persen	-	4,23	4,02	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	-	2,4	2,6	Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,05	68,16	68,41	Dinas Lingkungan Hidup
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman*	Persen	0	5,4	9,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	0	5,66	9,56	Dinas Lingkungan Hidup
7	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	Persen	0	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)	Ton CO2eq/2010 IDR Milyar	N/a	7,14	7,58	Dinas Lingkungan Hidup
9	Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2eq)	Ton CO2eq	N/a	393.756,10	512.676,81	Dinas Lingkungan Hidup
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	130	129	127,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,68	0,69	0,7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,05	1,04	1,03	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
		Persen	1,05	1,04	1,03	
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,61	5,18-5,71	5,20-5,76	-
2	Kontribusi PDRB Kabupaten/kota	Persen	1,25	1,26	1,27	-
3	Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,1	3,3 – 3,9	3,18-3,86	-
4	Indeks Ekonomi Hijau Pada Pilar Ekonomi	poin	-	64,98	65,93	Bappeda
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	7,78	7,71-8,81	7,58-8,69	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	22,6	24,4	24,43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,56	71,65	71,75	-
8	Pengeluaran Per Kapita	ribu	10.418,00	10.599,49	10.781,49	-
9	PDRB per Kapita	juta/kap/Tahun	29,27	29,09-29,45	32,16-35,41*	-
10	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,88	10,42-11,50	9,88-10,95	Dinas Sosial
11	Indeks Gini	Poin	0,379	0,34-0,347	0,339-0,346	-
12	Indeks Daya Saing Daerah	Persen	3,82	3,51	3,85	-
13	Indeks Inovasi Daerah	Poin	29.82	30	32	Bappeda
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	62,68	62,84	63	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	88	88,12	88,24	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
16	Indeks Perlindungan Anak	Poin	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	55	55,9	56,3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
18	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	7,9	8,2	8,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,27	12,37	12,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,22	75,27	75,47	Dinas Kesehatan
21	Prevalensi Stunting	Persen	22,7	20,51	19,71	Dinas Kesehatan
22	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,54	0,56	0,58	Bagian Kesra Setda
	Aspek Daya Saing Daerah					
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	2,27	2,272	2,273	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	Rasio PDRB sektor Perdagangan (%)	Persen	13,43	13,46	13,49	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	Laju penguatan kelembagaan Koperasi dan Daya saing UMKM	Persen	0	10	10	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen	1,95	2,03	2,06	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan (%)	Persen	23,23	24,49	24,5674	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
						Dinas Perikanan dan Peternakan
6	Rasio PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	Persen	17,66	14,43-18,13	14,37-18,53	Dinas Perhubungan
7	Kelas Kelompok Petani	Kelompok Tani	2.573	2.623	2.673	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	poin	0	0,783	0,80495	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Poin	1,52	1,52	1,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Persentase Kualitas infrastruktur	poin	81,9	84,66	86,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	0	78,6	79,73	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan
	Aspek Pelayanan Umum					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,4	75,41	75,42	
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,7	76,78	Kesatuan Polisi Pamong Praja
3	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen	12,06	16,33	16,79	Badan Perencanaan Pendapatan Daerah
4	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Poin	76,5	76,7	76,78	Kesatuan Polisi Pamong Praja
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) / Indeks Toleransi Beragama (Poin)	Poin	0	70	70,2632	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Indikator Kinerja Kunci					

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	75,4	75,41	75,42	Sekretariat Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Poin	77,47	78,5	79,5	Sekretariat DPRD
3	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP	Predikat	B	B	B	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP	Predikat	B	B	B	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Nilai Kepuasan Masyarakat	Poin	0	80	83	Badan Perencanaan Pendapatan Daerah
6	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7	Indeks Sistem Merit	Poin	289	300	325	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8	Indeks Profesionalitas ASN	poin	78,23	81	83	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
9	Indeks Keamanan informasi	poin	-	350	355	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	-	2,8	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	Predikat	CC	B	B	Disarsipus
12	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	90	91	92	Inspektorat
14	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Katagori	BB	A	A	Inspektorat
	dimensi evaluasi					
15	Level/ Tingkat maturitas	Level	3	3	3	Inspektorat

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
	implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
16	Nilai survei penilaian integritas	Nilai	-	72	74	Inspektorat
17	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan	Persen	90,87	91,71	92,07	Disdukcapil
18	Cakupan Kepemilikan KTP-EL	Persen	99,06	99,06	99,1	Disdukcapil
19	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	55,2	60	61	Disdukcapil
20	Cakupan Kepemilikan Akta	Persen	96,36	96,37	96,38	Disdukcapil
	Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun					
21	Persentase Penanganan	Persen	100	100	100	Disdukcapil
	Pelayanan Pembuatan Akta					
	Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Kematian					
22	Persentase Fasilitas Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	Disdukcapil
23	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persen	100	100	100	Disdukcapil
24	Persentase OPD yang telah	Persen	76,36	78,18	80	Disdukcapil

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
	memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja sama					
25	Persentase Pemenuhan Target Kerja sama Pemanfaatan Dokumen dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	Disdukcapil
26	Persentase Penyelesaian Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah Kepada Camat	Persen	86,5	100	100	Kecamatan Cigugur
27	Nilai PDRB Industri Pengolahan	Milyar	850,8	908,17	965,54	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
28	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Milyar	4.773,35	5054,77	5358,16	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
29	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	-	15	15	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
30	Persentase UMKM Naik kelas	Persen	-	15	20	Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian
31	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	-	3	4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
32	Nilai PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	Persen	-	24,49	24,5674	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan dan Peternakan
33	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Poktan	2573	2623	2673	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
34	Nilai PDRB sektor Transportasi	Persen	19,94	20,34	20,74	Dinas Perhubungan
35	Produksi Perikanan Budidaya Ikan Kecil	Ton	27.000	30500	32500	Dinas Perikanan dan Peternakan
36	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	420	450	475	Dinas Perikanan dan Peternakan
37	Produksi Perikanan Hasil Perikanan	Ton	250	275	300	Dinas Perikanan dan Peternakan
38	Populasi Ternak	Ekor	4678	4702	4725	Dinas Perikanan dan Peternakan
39	Pelayanan Kesehatan Hewan	Persen	7	8	10	Dinas Perikanan dan Peternakan
40	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	IDR Juta/Orang	33,96	49,55	55,56	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
41	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa	IDR Juta/Orang	76,5	78,78	91,68	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	Persentase tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang terserap/ bekerja di perusahaan dan berwirausaha	Persen	-	50	52,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	Persen	-	70	75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
44	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	-	44,42	44,44	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45	Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	-	44,42	44,4358	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46	Nilai Realisasi Investasi	Triliun	1,85	2	2,5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
47	Jumlah produk pelayanan perizinan yang dikeluarkan	Produk izin	-	3.500	4.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
48	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dirujuk oleh Dokumen Perencanaan Daerah	Persen	-	100	100	Bappeda
49	Persentase Kematangan Inovasi Daerah	Persen	-	100	100	Bappeda
50	Persentase pengarusutamaan Gender	Persen	87,02	87,04	87,06	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
51	Persentase Keberhasilan Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED) terhadap perempuan	Persen	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
52	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi Terhadap anak	Persen	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
53	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	0,5	0.5	0.5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
54	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	58	10	14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
55	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,05	1,04	1,03	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
56	Indeks Kualitas Air	Poin	50,1	70,39	70,59	Dinas Lingkungan Hidup
57	Indeks Kualitas Udara	Poin	84,5	65,51	65,91	Dinas Lingkungan Hidup
58	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	59	69,23	69,3	Dinas Lingkungan Hidup
59	Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	-	5,66	9,56	Dinas Lingkungan Hidup
60	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	Persen	-	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
61	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	Ton CO2eq/2010 IDR Milyar	-	7,14	7,77	Dinas Lingkungan Hidup
62	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	Persen	-	96	96,2105	Satuan Polisi Pamong Praja
63	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Persen	-	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
64	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	Persen	75,53	76,05	77,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	Persen	99,83	99,9	99,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	Persen	98	98,5	98,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan	Persen	30,39	30,95	31,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
68	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (poin)	Poin	-	6,9	6,96	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
69	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	75,22	75,27	75,4668	Dinas Kesehatan
70	Persentase Penurunan PPKS	Persen	N/A	1	2	Dinas Sosial
71	Skor PPH Ketersediaan	Persen	-	4,23	4,02	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
72	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Ton	8	200	200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
73	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	-	42,66	48,2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
74	Persentase Pemanfaatan Ruang Wilayah Kewenangan Kabupaten Yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	70	82,5	84,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun		PD Penanggung Jawab
			2024	2025	2026	
75	Kemantapan jalan	Persen	72,22	78,22	84,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
76	Tingkat aksesibilitas transportasi	Persen	8,06	9	9,2	Dinas Perhubungan
77	Persentase Peningkatan Pengguna Angkutan Umum	Persen	-2	5	5,2	Dinas Perhubungan
78	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman*	Persen	4,31	5,4	9,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
79	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	-	34,75	38,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
80	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik	Persen	66,97	67	67,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
81	Rasio bangunan ber-PBG	Persen	0,021	0,023	0,026	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
82	Persentase rumah layak huni	Persen	98,64	98,69	98,74	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan
83	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	Persen	98,57	98,63	98,64	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan
84	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,68	0,64	0,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB VII PENUTUP

RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025–2029, yang memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Proses penyusunan RKPD ini dilakukan dengan penelaahan terhadap isu-isu strategis yang berkembang dengan mempertimbangkan segenap masukan dan aspirasi dari masyarakat, proses penyusunan RKPD Tahun 2026 telah menerapkan asas perencanaan partisipatif. Selain itu perencanaan Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan tahun sebelumnya serta memerhatikan dokumen perencanaan tingkat Provinsi Jawa Barat dan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2026 dan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yaitu terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, kustomisasi, inklusif, kolaboratif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, mempertimbangkan sosial budaya dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Proses perencanaan pembangunan daerah telah melibatkan seluruh pihak dan disusun berdasarkan azas keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik. Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi wujud pelaksanaan pembangunan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat menuju terbangunnya masyarakat yang mandiri, tangguh, harmonis dan berdaya saing tinggi.

Berbagai pendekatan keilmuan diterapkan untuk menetapkan program dan kegiatan strategis yang mempunyai daya ungkit maksimum bagi percepatan pembangunan yang pada akhirnya akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebagai kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 oleh perangkat daerah, antara lain:

- (1) RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 menjadi acuan perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- (2) RKPD merupakan wujud keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029;
- (3) RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Kuningan 2026; dan
- (4) Bappeda melakukan evaluasi hasil RKPD Tahun 2026 dan melaporkannya kepada Bupati setiap triwulan, berdasarkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.